

Pemikiran Agraria Bulaksumur

Telaah Awal atas Pemikiran Sartono Kartodirdjo,
Masri Singarimbun, dan Mubyarto

Ahmad Nashih Luthfi
Amien Tohari
Tarli Nugroho

Editor:
Prof. Dr. Endriatmo Soetarto, MA



Pemikiran Agraria Bulaksumur:

Telaah Awal atas Pemikiran Sartono Kartodirdjo, Masri Singarimbun,
dan Mubyarto

©Ahmad Nashih Luthfi, Amien Tohari, Tarli Nugroho

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia
Oktober 2010 oleh:

STPN Press

Jl. Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Gamping, Sleman
Yogyakarta, 55293
Tlp. (0274) 587239
Faxes: (0274) 587138

Bekerjasama dengan

Sajogyo Institute

Jl. Malabar 22 Bogor, Jawa Barat
Tlp/Faxes: (0251) 8374048
E-mail: sains.press@gmail.com

Penulis : Ahmad Nashih Luthfi
Amien Tohari
Tarli Nugroho
Editor : Prof. Dr. Endriatmo Soetarto, MA
Layout/Cover : Aqil NF

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Pemikiran Agraria Bulaksumur:

Telaah Awal atas Pemikiran Sartono Kartodirdjo, Masri Singarimbun,
dan Mubyarto

STPN-Sajogyo Institute, 2010

xii + 325 hlm.: 14 x 21 cm

ISBN: 978-6208-1295-59-5

KATA PENGANTAR

KETUA SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

Cendekiawan, pendidikan, pembangunan, dan kepentingan umum.

Empat kata ini adalah kata-kata kunci yang senantiasa diemban oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), terutama dalam tahun-tahun terakhir ini, untuk memastikan visi-misi, dan tujuan-tujuan program strategis pertanahan (baca: agraria) yang sudah ditetapkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI terkelola dengan baik. Mengapa demikian?, karena jika menghadapi pertanyaan apakah dan sejauhmanakah pendidikan bisa membantu mendinamisasi terjadinya perubahan sosial yang sejalan dengan makna yang dimuat dalam tujuan-tujuan normatif tersebut, maka jawabannya bisa ambivalen.

Di satu pihak pendidikan dalam kenyataannya justeru sering menjadi pihak yang mendorong, sadar ataupun tidak, pelestarian 'status quo'. Ini terjadi karena ia lambat atau enggan menanggapi kemapanan lama yang telah terbentuk atau menghinggapinya tataran kebijakan (normatif) maupun dari praktik yang 'terbiasa' di tataran realitas. Keduanya terhubung secara dialektis sehingga menghasilkan *establishment forces* yang hegemonik (bandingkan Freire, 1973: *Pedagogy of the Oppressed*)

Namun di pihak lain, pendidikan juga dijumpai mampu

menjadi alat pembebasan manusia dari struktur menindas tersebut (lihat juga Freire, 1973: *Education as the Practice of Freedom*). Tentu saja disadari celah ini menuntut perubahan fundamental yang spektrumnya meliputi kehendak politik (*political will*) dalam mengubah susunan masyarakat serta mereform dalam institusi pendidikan itu sendiri. Pada titik ini memang bisa muncul tanda tanya, sehubungan dengan dengan dampak perubahannya yang tentulah akan membawa konsekuensi adanya pembatasan-pembatasan kepentingan golongan elite yang tidak akan rela dan mudah melepaskan kekayaan dan kekuasaannya yang justru menjadi target proses pembebasan itu sendiri.

Sehubungan dengan wujud institusional pendidikan, STPN selain tetap melanjutkan sistem pendidikannya yang sudah 'baku' berupa pengajaran dan penggemblengan di dalam kelas (teori/konseptual) dan di luar kelas (praktik kerja/penelitian lapangan), ia juga mengintroduksi metoda pendidikan 'jaringan belajar' (*learning webs*). Jaringan belajar ini dikenal dengan nama 'Lingkar Belajar Bersama Reforma Agraria' (LIBBRA). Jaringan belajar ini menggelar diskusi-diskusi kritis atas bahan-bahan substansi yang telah dipilih dan disediakan oleh sejumlah partisipannya dengan merujuk pada tulisan-tulisan mutakhir dari pakar dalam negeri maupun asing di bidang agraria. Dalam hal ini jaringan belajar ini pun melengkapi dirinya dengan situs *web site* di dunia maya agar bahan dan hasil-hasil diskusinya dapat diakses khalayak peminat secara lebih luas.

'Jaringan belajar' ini juga bekerja dalam pola yang mendiseminasi hasil-hasil penelitian di berbagai aras (desa, kecamatan, kabupaten/kota, dan propinsi) dengan melibatkan para pihak, unsur pemerintah, pegiat pergerakan, pengusaha, cendekiawan, dan unsur khalayak lain. Dengan cara ini hasil-hasil penelitian

dikritisi tak hanya dari temuan-temuan empirisnya melainkan juga dari bingkai konseptual beserta kerangka metodologis yang dibangunnya. Semua proses tersebut diarahkan pada memupuk pengembangan jejaring, pengalaman, dan menajamkan daya analisis atas persoalan-persoalan aktual keagrariaan yang keseluruhannya penting dalam penyiapan dan pengembangan kader-kader birokrasi agraria yang terdidik dan handal di lingkungan kampus.

Perkembangan mutakhir yang kini sedang dijalani oleh STPN adalah berupaya untuk memprakarsai penerbitan karya-karya ilmiah yang membedah perjalanan intelektual para penulis/pemikir (agraria)-nya di Indonesia, utamanya di Bogor dan Yogyakarta, untuk kemudian memastikan adakah mereka membangun mazhab intelektual (*school of thought*). Semua itu bergerak atas dorongan turut mencari celah upaya pribumisasi atas ilmu-ilmu sosial, khususnya menyangkut pokok persoalan agraria, sehingga diharapkan dapat memberikan kontekstualisasi dan arah penelitian yang lebih aktual, fundamental, dan tajam.

Tentu ada prasyarat yang perlu didalami dalam proses tersebut, guna memastikan:

1. Adanya kerangka kelembagaan;
2. Adanya sosok intelektual yang kharismatik
3. Adanya Manifesto (akademis)
4. Adanya Paradigma Baru
5. Adanya jurnal atau media apapun sebagai *outlet* pemikiran
6. Adanya *epistemic community*, yang menunjukkan pentingnya aktor-aktor dalam membentuk wacana dan kebijakan program pemerintah. Dalam kaitan itu ia menunjukkan pentingnya *systematic condition* dan *domestic pressure* yang mempengaruhi *state action*.

Sudah barang tentu masih ada parameter lain dalam proses pembedahan kritis yang penting untuk memaknai arti sebuah mazhab intelektual. Semua itu akan dijumpai pembaca dalam halaman-halaman berikut.

Sebagai penutup, kepada para penulis saya menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan tinggi atas kerja keras dan dedikasinya sehingga lahir buku ini yang bertepatan dengan peringatan tahun emas UUPA. Demikian juga atas upayanya yang tak henti dalam turut mengembangkan kajian agraria dalam 4 (empat) tahun terakhir di lingkungan kampus STPN. Semoga buku ini menjadi pendorong lahirnya seri buku berikut yang akan menghadirkan perjalanan intelektual para *scholar* lainnya.

Yogyakarta, September 2010

Prof. Dr. Endriatmo Soetarto, MA

PENGANTAR PENULIS

Di Indonesia, studi mengenai sebuah persoalan yang dilakukan dengan pendekatan kajian-pemikiran bisa dikatakan cukup langka, apalagi jika yang digunakan sebagai bahan kajian adalah pemikiran para sarjana Indonesia sendiri. Tentu saja ini dengan mengecualikan studi-studi yang dilakukan di jurusan-jurusan atau fakultas-fakultas filsafat, dimana kajian pemikiran hampir menjadi modus berbagai penelitian yang dilakukan di sana. Tetapi, bahkan dengan tanpa mengecualikan studi-studi di jurusan atau fakultas filsafat sekalipun, dalam kasus mengenai kajian pemikiran, studi mengenai pemikiran sarjana Indonesia tetap saja masih sangat miskin.

Di antara sarjana Indonesia, sejauh ini, yang paling lazim dijadikan obyek studi pemikiran barangkali adalah Soedjatmoko. Ini bisa dilihat dari jumlah publikasi yang menuliskan pemikiran Soedjatmoko, baik yang pada mulanya dilakukan untuk keperluan akademis (penulisan skripsi, tesis dan disertasi), maupun keperluan lainnya. Selain Soedjatmoko, beberapa sarjana Indonesia lainnya yang juga sudah lazim dijadikan obyek studi pemikiran adalah Tan Malaka, Mohammad Hatta, Nurcholish Madjid, dan Kuntowijoyo. Daftarnya, meski masih ada beberapa yang lain, memang sangat sedikit.

Mengenai masih sedikitnya kajian atas pemikiran sarjana Indonesia (oleh sarjana Indonesia sendiri), bisa dikemukakan beberapa sebab kenapa hal itu bisa terjadi. *Pertama*, hanya sedikit sarjana Indonesia yang mencoba membangun pemikirannya sendiri. Sudah menjadi kelaziman, bahwa kebanyakan sarjana, termasuk mereka yang menyandang gelar guru besar, lebih suka memposisikan diri sebagai penjaja pengetahuan-konvensional. Jika mereka menjadi guru, mereka memang hanya mengajar dengan cara *delivery of stocks*. Ini menyebabkan sumber pemikiran baru yang bisa digali menjadi langka. Mengenai hal ini, Arief Budiman, seorang intelektual kesohor di Indonesia, dalam sebuah kesempatan, misalnya, pernah mengejek dirinya sendiri sebagai “intelektual pengecer”, sebuah pengakuan terhadap minimnya kontribusi pengembangan keilmuan yang pernah ditunainya.

Kedua, tidak adanya apa yang disebut *peer-group* dalam dunia kesarjanaan di Indonesia. Hal ini telah menyebabkan absennya kebiasaan untuk saling mengkaji dan mengomentari pemikiran para kolega di kalangan sarjana Indonesia. Sehingga, gagasan penting apapun (termasuk juga yang “tidak-penting”) yang pernah dihasilkan pada akhirnya akan selalu menguap seiring waktu, atau hanya akan bertahan selama pengagasnya masih hidup. Tapi yang lebih fatal dari tidak adanya *peer-group* pada sebuah lingkungan akademik adalah pada akhirnya tak ada gagasan yang pernah benar-benar teruji di lingkungan bersangkutan. Gagasan yang pernah dicetuskan hanya akan beredar di kalangan para pendukungnya dan tak akan mendapatkan tanggapan yang berarti dari mereka yang tak menyepakatinya. Dalam dunia semacam itu tak ada baku dalih dan pertukaran gagasan yang bisa mengenali kekuatan dan kelemahan sebuah gagasan.

Ketiga, buruknya perpustakaan dan lembaga arsip di Indonesia. Studi pemikiran tidak mungkin bisa dilakukan tanpa ditopang oleh lembaga perpustakaan dan kearsipan yang bekerja dengan baik, terutama di lingkungan perguruan tinggi atau di pusat-pusat penelitian. Kesulitan teknis yang utama dalam melakukan studi pemikiran adalah langka dan sulitnya menelusuri arsip-arsip tulisan dari para sarjana yang pemikirannya hendak dijadikan bahan studi. Hal ini kian diperburuk oleh lemahnya tradisi mengarsip dan mendokumentasikan di kalangan sarjana kita sendiri. Yang terakhir ini bukan hanya terkait dengan arsip dan dokumentasi karangan mereka, melainkan juga arsip dan dokumen yang terkait dengan bidang dan topik yang mereka tekuni. Ini, misalnya, bisa dilihat dari hanya sedikit saja sarjana di Indonesia yang memiliki perpustakaan pribadi yang layak.

Dan *keempat*, tradisi riset di Indonesia masih didominasi oleh riset berjenis terapan (*applied research*), dan itu berlaku bagi hampir seluruh bidang keilmuan. Dalam riset terapan, para peneliti lebih banyak disibukan oleh pertanyaan mengenai *relevansi sosial*, terutama dalam kaitannya dengan kegunaan sebuah kerangka teori/keilmuan di wilayah yang bersifat praksis. Pertanyaan mengenai apakah sebuah kerangka teori mengidap persoalan konseptual atau tidak, misalnya, tidak menjadi pertanyaan utama, bahkan mungkin tak pernah dipersoalkan sama sekali dalam riset-riset terapan. Begitu juga dengan pertanyaan bagaimana sebuah konsep teoritis/keilmuan bisa terbentuk dan memaparkan dirinya, bagaimana strukturnya, bagaimana formasi diskursifnya, dan bagaimana keterhubungannya dengan sistem pengetahuan lain, bukan merupakan persoalan yang digeluti dalam riset-riset yang bersifat terapan. Kajian pemikiran, karena terutama bersifat teo-

ritis dan konseptual, *bukan* terapan, dengan sendirinya tidak menjadi bidang penelitian ataupun metode yang populer.

+ + +

Buku yang sedang Anda pegang ini adalah hasil studi pemikiran mengenai pemikiran-agraria. Obyek kajian buku ini adalah pemikiran tiga orang sarjana terkemuka, yang kesemuanya – entah kebetulan atau tidak – adalah mahaguru di Universitas Gadjah Mada, yaitu Sartono Kartodirdjo (1921-2007), Masri Singarimbun (1930-1997), dan Mubyarto (1938-2005). Latar belakang ketiganya yang berasal dari Kampus Bulaksumur itu pula yang salah satunya kemudian membuat studi ini bisa disebut sebagai “Studi Pemikiran Agraria Bulaksumur”.

Tentu akan muncul pertanyaan, bagaimana bisa pemikiran ketiganya dijadikan bahan kajian bagi studi pemikiran agraria, mengingat bidang kajian utama ketiganya bukanlah soal agraria, terutama jika yang dimaksud dengan “kajian utama” di sini adalah sebagaimana, misalnya, Sajogyo, Sediono M.P. Tjondronegoro, dan Gunawan Wiradi (ketiganya dari Institut Pertanian Bogor) menekuni soal yang sama.

Atas pertanyaan ini, selain penjelasan definitif bahwa apa yang dimaksud dengan studi agraria adalah juga mencakup sub-sub persoalan, seperti misalnya *sejarah agraria, kemiskinan pedesaan, reforma agraria, serta pembangunan pedesaan* (White, 2005), dimana pemikiran ketiganya memiliki jejak panjang pada sebagian di antara sub-sub tersebut, perlu juga dikemukakan bahwa kajian utama ketiganya, dengan caranya masing-masing, secara keilmuan telah memberikan sumbangan penting bagi pemikiran agraria di Indonesia. Sumbangan keilmuan di sini, karena bersifat epistemik, memang tidak mudah terlihat. Persis di sinilah studi agraria di Indonesia, yang dibentuk oleh tradisi kiri dengan pen-

dekatan empiris dan orientasi praksis yang kuat, perlu jeda sejenak untuk menteoritiskan pengalamannya. Tanpa teoritisasi pengalaman, studi agraria akan berdiri di atas formasi diskursif yang rapuh. Sebagai bidang kajian yang bersifat transdisipliner, teoritisasi juga diperlukan untuk memelihara jejaring epistemik dengan bidang-bidang keilmuan yang terkait dengan studi agraria, seperti sejarah, sosiologi, antropologi, ekonomi, hukum, dan lain-lain.

Soal jejaring keilmuan yang terlibat pada sebuah bidang kajian inilah yang sebenarnya menjadi latar belakang dari diadakannya penelitian ini. Pada mulanya kami, para penulis, berpandangan bahwa Sartono dan kawan-kawannya, baik disengaja maupun tidak, telah membangun sebetulnya “mazhab” di Kampus Bulaksumur. Mereka—Sartono, Masri, dan Mubyarto, meski berangkat dari latar belakang keilmuan yang berbeda, pada akhirnya telah bertemu pada sebuah persoalan yang—meski dalam porsi yang berbeda—mereka tekuni bersama, yaitu studi kemiskinan dan pedesaan, yang membuat pemikiran mereka menjadi saling kait-mengait satu sama lain. Sayangnya, pelacakan yang akhirnya sanggup ditunaikan oleh buku ini tak sampai pada bayangan awal itu, karena hanya berhenti di kajian pemikiran atas masing-masing tokoh tanpa pembahasan lebih lanjut atas irisan pemikiran dari ketiganya.

Sebagai sebuah elaborasi awal, studi ini diakui pasti banyak mengandung kekurangan dan kelemahan. Kami sendiri sebenarnya berharap buku ini baru akan terbit setelah segala kekurangan awal yang berhasil kami catat dapat diperbaiki, atau paling tidak diminimasi. Namun, pada akhirnya kami harus menyadari bahwa tak ada karya yang lahir sempurna dan memuaskan (meski pengakuan ini bersifat apologetik). Kini, kami mengundang pembaca

untuk menyampaikan kritik dan saran. Semoga kami berkesempatan untuk menghadirkan versi yang lebih komprehensif, sesuai rencana awal studi ini, di kesempatan yang lain.

Salam,
Yogyakarta, September 2010

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Ketua STPN ~ v

Pengantar Penulis ~ ix

BAB I PENDAHULUAN ~ 1

BAB II MEMBACA ULANG PEMIKIRAN SARTONO
KARTODIRDJO: TELAAH AWAL ~ 16

Ahmad Nashih Luthfi

A. Pendahuluan ~ 16

B. Anatomi Pemikiran ~ 19

1. Historiografi Indonesia-sentris dan Jebakan Nasionalisme Sempit ~ 21
2. Konsep Integrasi dalam Sejarah Nasional Indonesia ~ 28
3. Sejarah *Multidimensional Approach* sebagai Politik Pengetahuan ~ 33
4. Kajian Subaltern dan *Pemberontakan Petani*-nya Sartono ~ 39
5. Mendiskusikan Isu-isu Agraria ~ 51

C. Penulisan Sejarah Indonesia:

Menuju "The New History" ~ 60

1. Sejarah lama senantiasa berada dalam bingkai politik ~ 62

2. Sejarawan tradisional menganggap bahwa sejarah adalah narasi peristiwa-peristiwa ~ 64
3. Sejarah tradisional menawarkan suatu sudut pandang dari atas (*history from above*) ~ 66
4. Paradigma tradisional meyakini bahwa sejarah didasarkan pada “the documents” ~ 67
5. “Mengapa Brutus Menikam Caesar?” ~ 71
6. Objektivitas dan Representasi ~ 72
7. Sejarawan Profesional versus Sejarawan Amatir ~ 74

BAB III PEMIKIRAN MASRI SINGARIMBUN DALAM KONTEKS STUDI AGRARIA DI INDONESIA ~ 85

Amien Tohari

- A. Tentang Masri dan Karyanya ~ 91
 1. Sriharjo: Penduduk dan Kemiskinan ~ 100
 2. “Malam Sagu”: Mencari Alternatif Pemenuhan Pangan ~ 108
 3. *Emic-Etic*: Meramu Pendekatan Riset ~ 111
 4. Membangun Kelembagaan Diskursus Kependudukan ~ 114
- B. Masri dan Masalah Kependudukan Indonesia ~ 116
 1. Dalil-dalil Pengendalian Populasi ~ 117
 2. Keluarga Berencana: Kebijakan & Pengetahuan ~ 124
 3. Kependudukan: Masalah dan Pemecahan ~ 143
 4. Kependudukan: Kritik dan Debat ~ 160
- C. Pemikiran Masri dan Studi Agraria Indonesia ~ 170

BAB IV MUBYARTO DAN ILMU EKONOMI YANG MEMBUMI ~ 199

Tarli Nugroho

- A. Soal Harga Beras dan Jejak Awal Keberpihakan Mubyarto ~ 199
- B. Sekilas Manusia Mubyarto ~ 209

- C. Ilmu Ekonomi dan Keadilan Sosial: Fondasi Etis
Pemikiran Mubyarto ~ 228
- D. Pemiskinan Ilmu Ekonomi: Tentang Pengajaran
Ekonomi di Indonesia ~ 247
- E. Perdebatan Ekonomi Pancasila ~ 273
- F. Dalam Bayang-bayang Fisiokrasi: Implikasi Pemikiran
Mubyarto terhadap Studi Agraria ~285

Lampiran: Bibliografi Wacana Ekonomi Pancasila 1965-2004 ~ 315

Tentang Penulis ~ 322

BAB I

PENDAHULUAN

Agenda reforma agraria di abad ini makin disadari sebagai jalan perubahan untuk diantaranya mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan memajukan sebuah bangsa. Tidak saja oleh negara-negara berkembang tetapi badan-badan internasional mulai meletakkan agenda ini sebagai skema pembangunannya.¹ Meskipun metode dan paradigma yang melingkupi reforma agraria sebagai skema pembangunan oleh lembaga-lembaga internasional itu berbeda-beda namun poin pentingnya adalah bahwa reforma agraria menjadi isu sentral dan jalan baru pembangunan. Beberapa kondisi kontemporer yang bisa disebut sebagai pendorong kebangkitan studi agraria yang mengiringi keyakinan reforma agraria sebagai skema pembangunan adalah pertama kegagalan teori dan praktik neoliberalisme sepanjang 25 tahun semenjak pemberlakuan apa yang disebut *Structural Adjustment Program* (SAP (Fauzi,2008). Program penyesuaian

¹ Pada tahun 2008, Bank Dunia merilis sebuah publikasi berjudul *World Development Report, 2008: Agricultural for Development*. Dalam laporan itu ada tiga jalan yang ditawarkan untuk mendorong transformasi agraria yaitu; mengembangkan usahatani rumah tangga yang komersil, memberagamkan usaha non-pertanian di pedesaan, dan migrasi keluar pedesaan.

struktural ini awalnya dipercaya sebagai jalan keluar untuk membawa negara-negara miskin di dunia ketiga mampu mempercepat pembangunan dan menyusul kemakmuran negara-negara maju. Prinsip utama SAP adalah mengurangi peran negara dan menyerahkan semua proses sosial, politik, terutama proses ekonomi kepada mekanisme pasar. Pengurangan anggaran publik atau subsidi rakyat, penghapusan bea impor dan ekspor, mencabut aturan-aturan proteksi, dan melakukan privatisasi besar-besaran terhadap sektor publik. Liberalisasi ekonomi dan perdagangan bebas adalah tujuan utama dari program ini.

Kondisi kedua adalah bersamaan dengan kegagalan praktik neolibalisme yang melahirkan angka kemiskinan yang makin membesar dan membesarkan angka kemakmuran bagi segelintir pemilik modal besar itu memicu lahirnya suatu gerakan-gerakan sosial berbasis pedesaan. Meskipun gerakan-gerakan ini berbeda dalam cara mereka memperjuangkan diri, namun terikat dalam satu kesadaran bersama tentang adanya proses besar dan sistematis penghilangan dunia pedesaan, agraria, dan petani. *Deruralization, depeasantization, and deagrarianization* terjadi dalam waktu yang relatif cepat dan dalam jumlah relatif besar orang-orang yang semula hidup di pedesaan menyerbu dan terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Kondisi ketiga ditunjukkan oleh terbukanya kesempatan politik yang memungkinkan diangkatnya agenda akses terhadap tanah di dalam arena-arena pembuatan kebijakan publik di aras lokal, nasional, dan global. Meskipun kesempatan politik yang dihadapi setiap gerakan berbeda-beda namun tersedia suatu kondisi perubahan politik yang lebih luas bagi tampilnya gerakan pedesaan.

Amatan terhadap perkembangan studi agrarian di kancah internasional terlihat adanya perubahan penekanan dan

pergeseran pembahasan topik-topik agraria di abad 20 dan 21. Tania Li (2008) menyebutkan bahwa debat masalah agraria di abad 20 ditandai oleh pembicaraan tentang isu-isu yang terkait dengan akses tanah, tenaga kerja, konsolidasi atau mobilitas kapital. Isu-isu agraria ini dilihat dalam kerangka analitik yang linear; mencoba menjelaskan pergeseran yang terjadi dari sistem produksi subsistensi ke ekonomi pasar, perubahan dari pertanian ke industrialisasi, perubahan dari pedesaan ke perkotaan — dimana semua proses ini didorong, diekskalasi, dan dipandu oleh kekuatan-kekuatan kapital. Dalam berbagai risetnya Li banyak menggunakan konsep-konsep *governmentality*, *sovereignty*, dan *politik*. Ia ingin menunjukkan bahwa penyebutan-penyebutan atas sebuah lokasi dan komunitas yang mendiaminya oleh otoritas kekuasaan tertentu sangat terkait dengan teknologi kekuasaan yang syarat dengan kepentingan modal dalam penguasaan sumber daya alam.

Berbeda dengan studi agraria di abad 20, di abad 21 aspek-aspek seperti globalisasi dan kecenderungan lintas negara merupakan *variable* yang tidak dapat diabaikan dalam studi agraria kontemporer. Integrasi ekonomi keluarga ke pasar global, moda-modu baru ekspansi kapital, revolusi teknologi yang memungkinkan mobilitas modal lintas negara dengan kecepatan yang luar biasa, pertumbuhan populasi dunia, serta hadirnya aktor-aktor korporasi transnasional dan gerakan-gerakan sosial transnasional menjadikan studi agraria abad 21 memiliki spektrum kajian yang semakin meluas. Variabel-variabel yang sebelumnya tidak muncul, kini harus dipertimbangkan secara cermat dan seksama.

Pada tingkat internasional perdebatan kontemporer tentang reforma agraria masih terus berlangsung. Studi agraria, bagaimanapun, menyumbangkan amunisi yang diperlukan dalam

menatap masa depan pelaksanaan reforma agraria di berbagai tempat dengan kondisi empiris yang berlainan. Melalui perdebatan yang terjadi dalam studi agraria mungkin kita melihat perubahan, pergeseran, dan perkembangan studi agraria.

Bernstein (2004) menyebutkan ide-ide baru yang muncul dalam ruang perdebatan agraria mutakhir yaitu; produktifitas dan pertumbuhan produktifitas dalam usaha tani, kemiskinan pedesaan, kesempatan kerja dan penciptaanya di pedesaan, serta kaitan antara persoalan-persoalan tersebut secara (inter-sektoral) dengan akumulasi dan pertumbuhan dalam sektro-sektor ekonomi yang lain. Secara lebih jauh dan lebih tegas Bernstein menyodorkan situasi dan kondisi (tesis) yang sedang kita hadapi yang mau tidak mau harus dipertimbangkan secara seksama dalam studi agraria. Tesis-tesis tersebut memungkinkan kita melakukan investigasi tentang tipe-tipe produksi pertanian tertentu, bentuk-bentuk kapital dan tenaga kerja agraria dalam perbedaan ruang dan waktu untuk memetakan berbagai variasi yang ada. Kecuali itu juga memberi kita informasi untuk mengidentifikasi perubahan macam apa yang tengah terjadi di depan mata kita.²

Sementara itu, Borras, Cristobal, dan Lodhi (2006) memetakan tema-tema yang berkompetisi dalam perdebatan *land reform* kontemporer. Tema *pertama* adalah sejauh mana peranan pasar 'bebas' dalam realokasi sumber daya tanah diantara kelas dan

² Lebih lanjut lihat Henry Bernstein, *From Transition to Globalization: Agrarian Questions of Capital and Labour*, International Conference on Land, Poverty, Social Justice & Development (Natherland: Institute of Social Studies, 2006) p. 9-10. Juga Bernstein 'Changing Before Our Very Eyes': *Agrarian Questions and the Politics of Land in Capitalism Today*, *Journal of Agrarian Change*, Vol. 4 No. 1 and 2, January and April 2004, pp. 190- 225 via "Kebangkitan Studi Reforma Agraria di Abad 21" (Yogyakarta: STPN, 2008) hlm. 265-333

kelompok sosial yang berbeda dalam masyarakat sekaligus sektor dalam perekonomian nasional. Pertanyaan mendasarnya dalam tema ini adalah apa, bagaimana, dan sampai sejauh mana pasar 'bebas' telah meredistribusikan akses dan sumber daya tanah yang berpihak kepada kaum miskin pedesaan? Tema *kedua* adalah peran negara dalam realokasi sumber daya tanah yang *pro-poor*. Bagaimana dan sejauh mana negara berperan dalam meredistribusi sumber daya tanah diantara kelas dan kelompok sosial yang berbeda. Tema *ketiga*, berusaha menganalisa gerakan petani dan mobilisasi tanah oleh masyarakat. *Keempat* adalah tema yang ingin melihat peran dan kaitan antara masyarakat dan negara dalam meredistribusi tanah. Melalui tema-tema ini sebenarnya menarik untuk melihat kasus-kasus di Indonesia, sejauh mana dinamikanya tengah berlangsung hingga saat ini. Revolusi Hijau, Transmigrasi, Proyek Sejuta Hektar Lahan Gambut, HPH, dan sebagainya mungkin hanya dilihat oleh beberapa pihak sebagai hanya semata-mata kebijakan pertanian, tetapi bila dilihat dari makna agraria, kebijakan itu mungkin juga termasuk bagian dari reforma agraria. Tentu saja dengan pemaknaan dan sudut pandang yang berbeda dari reforma agraria yang sesungguhnya. Memang kebijakan-kebijakan itu melenyapkan masalah *reforma tanah* (land reform) dari pertimbangan kebijakan. Khusus untuk Transmigrasi, Sajogyo (2000) melihatnya sebagai suatu bentuk reforma agraria meskipun ada pihak yang menolak. Tetapi setidaknya, menurutnya, kasus transmigrasi ini dapat diacu dalam kaitannya dengan dua pola kebijakan lain yaitu pola "pembangunan masyarakat desa" dan pola "pembangunan pertanian".

Studi agraria kontemporer diwarnai perdebatan antara tiga kecenderungan yaitu antara mereka yang menganjurkan *state-led land reform*, *grassroot-initiated land reform*, dan *market-assisted*

land reform. Ketiga pendekatan ini saling tarik-menarik dalam kontestasi pemikiran agraria internasional.³ Sedangkan paradigma yang berkontestasi adalah antara pandangan populis, neo-populis, dan neo-klasik. Penekanan terhadap distribusi tanah, sumber-sumber daya produktif lainnya dan kekuatan politik yang tak setara, serta fokus pada solusi-solusi egalitarian merupakan ciri khas dari gagasan populis; sementara penekanan kepada ketidaksempurnaan-ketidaksempurnaan faktor pasar dan efisiensi jelas merupakan ciri sangat khas dari gagasan neo-klasik (Bernstein:2004). Neo-populis lebih percaya bahwa unit usaha paling kecil adalah yang paling efisien. Dalam konteks studi agraria Indonesia, dalam pandangan Wiradi, jalur transformasi agraria kita lebih dekat ke neo-populis dengan mengacu pada Pasal 33 UUD/1945 dan UUPA 1960, serta peraturan pelaksanaan lainnya. Persoalannya adalah sejauhmana kehendak politik untuk mengoperasionalisasikan model neo-populis itu?⁴

Studi agraria di Indonesia dapat dikatakan pernah ‘tertidur’. Sejak tragedi politik 65 banyak pihak mengkait-kaitkan persoalan agraria dengan komunisme, kajian terhadap isu ini akhirnya

³ Lihat Pengantar Noer Fauzi, *Kebangkitan Studi dan Agenda Reforma Agraria di Awal Abad Dua Puluh Satu* dalam Henry Bernstein, dkk “Kebangkitan Studi Agraria di Abad 21” (Yogyakarta: STPN, 2008)

⁴ Tentang Neo-Populisme Neo-Klasik ini lebih jauh lihat Terence J. Byres, *Neo-Classical Neo-Populism 25 Years On: Déjà Vu and Déjà Passé. Towards a Critique*. *Journal of Agrarian Change*, Vol. 4 Nos. 1 and 2, January and April 2004, pp. 17-44. Artikel ini berisi kritik terhadap pendekatan neo-populis dengan basis contoh-contoh empiris, kemudian ditanggapi oleh Griffin, K., A.R. Khan, dan A. Ickowitz dalam artikel “In Defence of Neo Classical Neo Populism” dalam *Journal of Agrarian Change* 2004 No (4).

meredup selama beberapa tahun (kurang lebih 10 tahun, 1965-1976). Namun secara terpisah-pisah beberapa orang tetap menekuni kajian ini dalam tema yang tidak eksplisit. Apa yang mereka lakukan itu pada dasarnya adalah upaya untuk terus mengusung studi agraria mengingat urgensi persoalan ini bagi masa depan Indonesia. Sebagai upaya untuk terus membangkitkan kembali studi agraria, dalam konteks ini menjadi penting untuk menapaki jejak pemikiran, keberpihakan, dan *concern* orang-orang yang selama dalam karir intelektualnya terus memperbincangkan isu-isu agraria ke permukaan publik sebagai upaya akumulasi pengetahuan tentang agraria khususnya di Indonesia.

White (2006) juga mencermati tentang studi agraria di Indonesia. Dalam makalahnya "*Diantara Apoligia Kritis: Transisi Agraria dan Pelibatan Dunia Ilmiah di Indonesia*", ia menulis "kajian agraria yang saya maksudkan adalah riset dan pengajaran tentang *struktur agraria, sejarah agraria, reforma agraria, kemiskinan pedesaan, dan pembangunan pedesaan*". Dalam makalah itu White menguraikan tentang ketegangan, yang kadang bersifat destruktif dan kadang kreatif, antara kebijakan negara dan kegiatan ilmiah yang berhubungan dengan masalah agraria. Dalam pandangannya, kecenderungan negara yang otoriter dan sangat dominan tidak selalu menampakkan suatu aktivitas ilmiah yang mengekor pada kehendak politik yang dianut negara, tetapi pada sisi lain juga muncul kegiatan ilmiah kritis meskipun terpisah-pisah.⁵

Untuk Indonesia, pertanyaan penting berkaitan dengan subyek ini adalah dalam konteks seperti apa studi agraria di Indonesia mulai kembali bergeliat? Sejak tahun 1966-1976, persis selama

⁵ Ben White dalam Vedi R. Hadiz dan Daniel Dhakidae, (ed.), *Ilmu Sosial dan Kekuasaan di Indonesia* (Jakarta: PT. Equinox Publishing Indonesia, 2006)

10 tahun, bisa dibilang isu agraria tidak mungkin dibicarakan. Pada tahun 1976 Sajogyo mengangkat kembali isu reforma agraria untuk pertama kalinya selama Orde Baru berkuasa. Alasan yang dikemukakanya pada waktu itu adalah “itu merupakan (alat uji) untuk menguji angin politik (pada saat itu)”. Di Bogor tahun 1974-1977, Sajogyo mulai membicarakan masalah kemiskinan di pedesaan. Tahun 1976 Masri Singarimbun & David H. Penny melakukan kajian yang sama di Yogyakarta (Sriharjo, Bantul). Mubyarto dan Loekman Soetrisno pada dekade 1980-an mulai banyak menulis topik tentang kemiskinan di pedesaan. Tampaknya upaya ini membuahkan hasil. Tema “*Kemiskinan Struktural*” muncul untuk pertama kalinya – di masa Orde Baru – pada konferensi PPII (Perhimpunan Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial) di Malang tahun 1978. Dua atau tiga tahun setelah itu, 1980 (White)/1981 (Sajogyo), sebuah Workshop Internasional tentang “*Agrarian Reform In Comparative Perspective*” diselenggarakan di Selabintana, Sukabumi melalui prakarsa SAE (Survey Agro Ekonomi). Lokakarya ini diadakan setelah pada 1979 di Roma digelar konferensi internasional tentang “Reforma Agraria dan Pembangunan Pedesaan” yang diprakarsai FAO (Sajogyo: 2000).

Konteks politik akademis studi agraria di Indonesia setidaknya dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu; perang dingin, politik kawasan membendung efek domino komunisme, revolusi hijau, modernisme, – juga ideologi pembangunan yang di dasarkan pada asumsi pertumbuhan Rostowian. Revolusi hijau yang dinilai terlalu teknokratis menjadi pemicu hadirnya analisis yang mendasarkan diri pada temuan-temuan empiris akibat program itu di pedesaan. White (2002;138) mencatat sejak 1978-1995 (17 tahun) terdapat sebelas edisi khusus yang temanya sangat berhubungan dengan studi agraria, seperti; pemilikan tanah, pembangunan

pedesaan, politik pangan, dan perkebunan. Semua tema ini dipublikasikan oleh *Prisma*, sebuah majalah multidisiplin yang sangat berpengaruh, terbit sejak 1971 dan berhenti pada 1996.

Di masa kolonial setidaknya ada dua aliran besar pemikiran sosial ekonomi pedesaan khususnya kajian tentang isu-isu agraria. *Pertama*, aliran empiris yang menekankan perlunya analisis ekonomi pedesaan dan pertanian yang rinci dan berorientasi lapangan. *Kedua*, adalah aliran yang lebih tertarik memperdebatkan secara teoritis sifat dasar masyarakat dan ekonomi agraria Indonesia (White, 2006).

Intelektual progresif Indonesia termasuk kaum nasionalis muda cenderung elitis karena tidak terlalu tertarik dengan kemiskinan pedesaan dan kondisi agrariannya. Tetapi apa yang dilakukan Iwa Kusumasumantri dan Soekarno berbeda dari kecenderungan itu. Iwa menulis buku kecil di Mokswa tahun 1927 berjudul *The Peasants' Movement in Indonesia*. Iwa menyoroti kondisi ekonomi dan sosial kaum tani dan buruh perkebunan Indonesia, beban berat kaum tani, perjuangan dan konflik tanah antara raksasa agrobisnis Eropa dan kaum tani, pajak dan upeti yang diwajibkan pemerintah, dan kegiatan jahat kaum lintah darat. Sedangkan Soekarno melalui konsep Marhaenya melihat kemiskinan kaum tani berlahan sempit sebagai referensinya tentang sebuah jenis kemiskinan desa dan kondisi agraria yang timpang.⁶ Dengan prinsip “berpijak pada realitas ke-Indonesiaan”, pada tahun 1960-an sebuah kelompok peneliti yang berasosiasi ke dalam sebuah partai besar di Indonesia melakukan kajian yang

⁶ Ben White “Diantara Apologia Diskursus Kritis: Transisi Agraria dan Pelibatan Dunia Ilmiah di Indonesia” dalam Vedi R. Hadiz dan Daniel Dhakidae, (ed.) *Ibid.*, hlm. 122-123

mendalam terhadap persoalan-persoalan pedesaan. Melalui semboyan “Perhebat Integrasi dengan Penelitian!”, kelompok peneliti yang dipimpin oleh D. N. Aidit, seorang dosen Akademi Ilmu Sosial “Aliarcham”, melakukan penelitian di beberapa pedesaan Jawa Barat.⁷ Penelitian ini mampu menghasilkan penelitian yang *based on rural structural-realities*, menginspirasi lahirnya sebuah pendekatan yang dirasa penting dan baru saat itu, yakni *Participatory Action Research* (PAR), sekaligus memberi rekomendasi-rekomendasi penting hasil identifikasi mereka terhadap realitas pedesaan. Penelitian ini berangkat dari keprihatinan atas kelemahan pendekatan positivistik, yang hanya mengandalkan angket dalam pengumpulan data. Kajian empirik berorientasi lapangan ini menghasilkan sejumlah temuan tentang diferensiasi kelas sosial di pedesaan; kelompok tunakisma, kelompok yang terlilit hutang dsb.

Pelebagaan kajian pedesaan (agraria) di Yogyakarta dimulai pada sekitar tahun 1951. Awalnya dibentuk sebuah *Panitia Sosial Research*, terutama dalam rangka menjalankan kerjasama dengan MIT dan “*Indonesia Field Team*”-nya yang terdiri dari enam calon Ph.D. dari Harvard, termasuk Hildred dan Clifford Geertz, Alice Dewey dan Robert Jay. Meskipun kerjasama dengan tim MIT ambruk, panitia ini terus menjalankan riset dibawah pimpinan ahli antropologi M.A. Jaspian. Panitia ini kemudian ditransformasikan menjadi *Lembaga Sosiografi dan Hukum Adat* yang menerbitkan jurnal *Sosiografi Indonesia*. Sebagai sebuah

⁷ Simak kesimpulannya dalam Aidit, D. N., *Kaum Tani Mengganjang Setan-setan Desa: Laporan Singkat tentang Hasil Riset Mengenai Keadaan Kaum Tani dan Gerakan Tani Djawa Barat*, Jakarta: Yayasan Pembaruan, 1964

lembaga, panitia ini juga berhasil menerbitkan sekitar 30 hasil riset, diantaranya beberapa studi desa di Jawa yang semua menunjukkan adanya stratifikasi sosial dan ketimpangan yang berhubungan dengan akses terhadap tanah – bukanya *shared poverty* atau pemerataan kemiskinan – sebagai basis strukturnya (White, 2006).

Pada awal tahun 1970-an beragam lembaga atau pusat studi didirikan di berbagai kampus termasuk lembaga studi pedesaan. Di Bogor (IPB) didirikan Lembaga Penelitian Sosiologi Pedesaan pada tahun 1972 dikepalai oleh Sajogyo. Sementara di Yogyakarta (UGM) didirikan pula Lembaga Studi Pedesaan dan Kawasan (LSPK)⁸ pada 1973 yang dipimpin oleh sejarawan Sartono Kartodirdjo. Sartono dengan gigih memelopori kajian sejarah petani *under ground*, berlawanan dengan arus utama sejarah yang mengagungkan raja, pengeran, hulubalang, permaisuri, selir, dan harem. Berbeda pula dari *mainstream* historiografi Indonesia saat itu yang cukup kuat *political touch*-nya, ia membawa pendekatan sosial ekonomi (selanjutnya pendekatan multidimensional) *a la* mazhab *Annales*-Perancis dalam khasanah historiografi baru di Indonesia.

Mubyarto bersama koleganya, Loekman Sutrisno, juga sering menulis tentang masalah kemiskinan pedesaan. Semua kerja ini membuka jalan, secara hati-hati, terhadap legitimasi diskusi akademik dan kebijakan tentang topik tersebut. Hasilnya terlihat pada pemilihan tema peka “Kemiskinan Struktural” untuk konferensi nasional Perhimpunan Pengembangan Ilmu-ilmu

⁸ Kini bernama Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK). Sejak awal pendiriannya, PSPK telah beberapa kali mengalami perubahan nama. Lihat tulisan Tarli Nugroho mengenai pemikiran Mubyarto dalam buku ini.

Sosial pada tahun 1978 di Malang.⁹ Mubyarto sendiri banyak menggunakan karya sosiologi dan sejenisnya dalam rangka memberi gambaran tentang ilmu ekonomi yang sesuai dengan realita Indonesia. Dalam berbagai tulisannya tentang Ekonomi Pancasila dan kebijakan pembangunan pertanian, ia dengan konsisten mengajukan sebuah argumen bagi pendekatan ekonomi alternatif yang memberi tempat lebih kuat bagi unsur keadilan sosial.

Kritiknya terhadap *developmentalisme* Orde Baru yang didasari semangat liberalisme merupakan tentangan keras pendukung aliran populisme. Hal ini disebabkan modus pembangunanisme Orde Baru jelas lebih menguntungkan kelas borjuis dan birokrat, bersifat bias urban dan bias kepentingan investor asing. Kritik populis yang paling serius, berkelanjutan, dan mendapat simpati cukup luas di kalangan ilmu sosial adalah pemikiran yang dikenal sebagai Ekonomi Pancasila. Secara historis, gagasan Ekonomi Pancasila banyak diilhami oleh gagasan kerakyatan yang telah dielaborasi oleh Mohammad Hatta. Sedangkan secara epistemologis, gagasan Ekonomi Pancasila mencoba menawarkan prinsip keadilan sosial melalui demokrasi ekonomi, sebagai alternatif atas ilmu ekonomi neoklasik yang bias kapitalisme, bias kepentingan negara-negara maju, dan bias pertumbuhan tanpa pemerataan. Sehingga, secara umum, gagasan Ekonomi Pancasila memiliki nilai penting paling tidak pada dua aspek, yaitu politik dan keilmuan. Dari aspek politik, Ekonomi Pancasila merupakan kritik tajam terhadap praktik *developmentalisme* Orde Baru. Sedangkan di aspek keilmuan, ia merupakan sebetuk kritik ideologi dan kritik teori atas ilmu ekonomi *main-*

⁹ Ben White, *Op. Cit.*, hlm. 137

stream. Di sinilah Mubyarto, seorang ekonom dari Universitas Gadjah Mada, menjadi eksponen utama kelompok ini. Meskipun pernah dikritik sebagai termasuk aliran kulturalisme oleh Arief Budiman, salah seorang pentolan intelektual Neo-Marxis di Indonesia, namun kritik Arief nampaknya salah alamat.¹⁰ Dalam posisi sebagai kritik terhadap *developmentalisme* sekaligus kritik terhadap ilmu ekonomi neoklasik, perampatan gagasan Ekonomi Pancasila ke dalam aliran kulturalisme yang menjadi bagian dari teori modernisasi adalah sepenuhnya salah alamat.¹¹

Di sekitar tahun 1970-an Masri Singarimbun di Yogyakarta (UGM) mengangkat langsung masalah kemiskinan pedesaan melalui penelitian empiris selama satu tahun. Hasil penelitian Masri dan D.H. Penny, seorang ahli ekonomi Australia, yang paling berpengaruh mengenai kemiskinan pedesaan ini diterbitkan dalam bukunya *Penduduk dan Kemiskinan; Kasus Desa Sriharjo* pada 1976, edisi Inggrisnya terbit pada 1973 *Population and Poverty in Java*. Isu kemiskinan saat itu cukup sensitif di saat pemerintah sedang menggiatkan berbagai program pembangunan. Isu kemiskinan yang didalamnya itu tidak lepas dari perhatiannya pada bidang demografi. Masri kemudian diangkat menjadi Direktur Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan UGM (1973-1990-an). Di lembaga inilah ia kemudian dikenal karena berbagai penelitiannya dalam masalah Keluarga Berencana (KB),

¹⁰ Arief Budiman, *Sistem Perekonomian Pancasila dan Ideologi Ilmu Sosial di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1989).

¹¹ Tarli Nugroho, "Dari Karsa ke Filsafat, Dari Filsafat ke Ilmu: Hidayat Nataatmadja dan Dekolonisasi Pemikiran", kata pengantar untuk buku Hidayat Nataatmadja, *Melampaui Mitos & Logos: Pemikiran ke Arah Ekonomi-Baru* (Yogyakarta: LANSKAP, 2007).

satu hal yang menjadi kebijakan pemerintah Orde Baru.

Buku yang ada di hadapan pembaca ini memperbincangkan pemikiran ketiga tokoh tersebut, sejauhmana pemikiran mereka beresonansi dengan studi agraria, sejauhmana pula perhatiannya terhadap isu-isu agraria di masa itu, dan adakah ketiga struktur pemikiran mereka membangun satu paradigma tertentu atau semacam *school of thought*-nya sendiri. Melalui pergulatan ketiga tokoh ini kita dapat “menonton” bagaimana sebuah diskursus tentang dunia pedesaan (agraria) dibangun, direproduksi, disebarkan luaskan, dan mempengaruhi kebijakan. Apakah ketiga pemikiran ini dapat disebut sebagai sebuah mazhab tampaknya masih problematis. Dalam arti, agak kejauhan bila pemikiran mereka disebut mazhab layaknya Mazhab Frankfurt di Jerman tetapi bahwa beberapa hal yang harus ada dalam sebuah *school of thought* terlihat mengemuka dalam pergulatan pemikiran mereka (Wiggershaus;1986,2. Hass;1992). Hal-hal itu misalnya kerangka kelembagaan dalam hal ini adalah pusat studi, sosok intelektual yang cukup kharismatik baik berperan sebagai *managerial scholar* maupun *ideological broker*, adanya kerangka keilmuan yang dijadikan sebagai kerangka pengetahuan untuk mengkaji kondisi-kondisi pedesaan (agraria) Indonesia, dan tersedianya media untuk menyebarkan pemikiran dan temuan-temuan mereka. Tetapi sebagai sebuah diskursus, pemikiran mereka beroperasi sekaligus dalam dua tingkatan yaitu tingkat pembangunan dan pengembangan gagasan di wilayah kelembagaan masing-masing, dan meskipun tidak semua tetapi beberapa pemikiran mereka masuk dan ikut mewarnai diskursus kebijakan di Indonesia baik melegitimasi kebijakan yang dinilai sesuai dengan kerangka aliran keilmuan mereka atau melakukan kritik terhadap berbagai kebijakan tersebut.

Lebih dari itu tiga tokoh ini telah meletakkan jejak kajian yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan kajian pedesaan dan kondisi agrarian di Indonesia. Mereka juga telah membuka jalan bagi pengembangan paradigma ilmu sosial yang lebih empiris dan sesuai dengan realita masyarakat Indonesia sehingga dapat memberikan pemecahan persoalan yang berangkat dari kenyataan konkrit yang dihadapi kaum miskin di pedesaan dan perkotaan. Pengetahuan mereka yang berasal dari berbagai disiplin ilmu dan medan pertarungan yang berbeda-beda, serta keragaman level pelembagaannya, telah demikian otoritatif dan bernilai rintisan. Pelacakan kembali rintisan mereka itu menambah khazanah kajian agraria akan semakin meluas. Sebab itu bangunan kajian yang telah mereka buka jalannya, merupakan harta yang sangat berharga untuk terus dihidupkan. Dengan mengkaji mereka kembali akan mengingatkan kita untuk terus menghimpun (kembali) warisan-warisan pemikiran terdahulu, agar tuduhan bahwa sejarah kesarjanaan kita berjalan terputus-putus (tidak terakumulasi, tidak juga menjadi himpunan pengetahuan yang otoritatif) tidak lagi terbukti. Sebab jika tidak, diskursus yang sudah memiliki kekuatan otoritatif ini menyurut bahkan hilang bersamaan dengan meninggalnya figur-figur yang diidentikkan denganya. Jika hal ini terjadi pertanda merosotnya sebuah diskursus kembali menjadi sebuah gagasan semata, atau lebih parahnyanya sebagai ujaran-ujaran yang tersisa di dalam ruang-ruang “gosip” akan segera tampak. Dalam kerangka inilah buku yang ada dihadapan pembaca ini lahir dan hadir. Selamat membaca.[]

BAB II

MEMBACA ULANG PEMIKIRAN

SARTONO KARTODIRDJO: TELAAH AWAL¹

Ahmad Nashih Luthfi

A. Pendahuluan

Salah satu definisi studi agraria adalah penelitian dan pengajaran ilmu sosial tentang sejarah agraria, kemiskinan pedesaan dan agraria, reforma agraria dan pembangunan pedesaan.² Pengalaman panjang studi agraria Indonesia tumbuh dari berbagai lembaga: kampus, lembaga pemerintah, dan organisasi massa, serta individu-individu yang memberi perhatian pada empat isu tersebut.

¹ Beberapa gagasan tentang historiografi dalam tulisan ini dirangsang oleh perkuliahan Prof. Dr. Bambang Purwanto, sejarawan UGM. Kepada beliau, penulis mengucapkan banyak terima kasih. Selibhnya, tanggung jawab tulisan ini ada di tangan penulis.

² Ben White, "Between Apologia and Critical Discourse: Agrarian Transition and Scholarly Engagement in Indonesia", dalam Vedi R. Hadiz dan D. Dhakidae (ed.), *Social Science and Power in Indonesia*, (Jakarta: Equinox bekerjasama dengan ISEAS, 2005), hlm. 107

Bentuk pentradisian atas kajian agraria yang telah lama tumbuh subur di lembaga perguruan tinggi salah satunya adalah di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Universitas ini memiliki keterlibatan panjang sejak turut berkontribusi dalam penyusunan hukum agraria nasional (UUPA) pada tahun 1947 sampai dengan riset-riset agraria yang lahir dari Fakultas Pertanian, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Ekonomi, serta Fakultas Sastra dan Kebudayaan. Melalui sejarah sosial yang dikembangkan di Jurusan Sejarah Fakultas Sastra dan Kebudayaan (kini Fakultas Ilmu Budaya), lembaga ini tidak henti-hentinya menyeriusi perjalanan sejarah pedesaan dari mulai periode kolonial hingga Orde Baru bahkan sampai dengan periode kontemporer. Dikaji juga tentang masalah kemiskinan pedesaan dan agraria, pelaksanaan *landreform* lokal, dan sejarah pedesaan.

Pentradisian dalam studi sejarah ini tidak dapat dilepaskan dari nama Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo. Beliau merupakan sejarawan perintis di Indonesia sehingga menerima julukan sebagai Begawan Sejarah Indonesia atau Guru Utama Sejarah Indonesia. Karya-karyanya sangat berpengaruh, mulai dari bangunan historiografi Indonesia dan bagaimana perspektif Indonesia-sentris digunakan, konsep-konsep dalam melihat periodisasi sejarah Indonesia (gagasan integrasi), metodologi sejarah dan topik sejarah pedesaan dan gerakan sosial. Hasil kajiannya dalam sejarah agraria maupun metodologi sejarah sangat berpengaruh hingga kini. Bisa dikatakan bahwa hampir tidak ada satupun sejarawan yang berkarir maupun lulus studi dari UGM yang tidak mendasarkan diri pada bangunan metodologi yang telah disusunnya. Untuk menyebut beberapa nama muridnya yang sedikit banyak mendapat pengaruh dari beliau adalah: Prof. Dr. Djoko Suryo, Prof. Dr. Suhartono, Prof.

Dr. Kuntowijoyo (alm), dan Prof. Dr. Soegijanto Padmo (alm).

Semua murid-muridnya itu menekuni sejarah sosial (pedesaan). Prof. Dr. Djoko Suryo melihat bagaimana pengaruh ekonomi modern dan segenap modus kapital masuk dan mengubah sebuah wilayah. Berbagai kebijakan sosial ekonomi Kolonial memberi pengaruh pada struktur dan kondisi masyarakat pedesaan Semarang. Prof. Dr. Kuntowijoyo (alm.) menunjukkan pentingnya *geographic-historical process* (perpaduan politik dan ekologi) di atas ranah spesifik agraria tegalan di Madura. Prof. Dr. Suhartono berkonsentrasi pada hubungan antara struktur penguasaan tanah dalam model tradisional dan apa perubahannya ketika sistem penguasaan tanah model modern diterapkan. Dan terakhir, Prof. Dr. Soegijanto Padmo (alm.) telah menyajikan narasi sejarah tentang dinamika gerakan sosial (kaum tani) di pedesaan dalam merespon kebijakan agraria di level lokal. Sementara murid pertamanya, Prof. Dr. Ibrahim Alfian, menyoroti peran ideologi dalam Perang Aceh. Beberapa murid mudanya, yang kini mengajar di Jurusan Sejarah Universitas Gadjah Mada, seperti Prof. Dr. Bambang Purwanto, Dr. Nur Aini Setiyawati, Dr. Sri Margana dan Drs. Machmoed Effendhie, berangkat dari pijakan yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh beliau. Nama-nama yang disebutkan itu sekadar untuk menunjukkan pelebagaan gagasan beliau di ranah kampus. Pengaruh pemikiran Sartono di bidang sejarah maupun ilmu sosial lain tentulah jauh lebih luas dari yang telah disebut.

Melihat secara lebih luas dinamika kampus saat ini, sebenarnya masih perlu diuji apakah gagasan senantiasanya menjadi “drive” bagi pengembangan kampus. Sebab di masa lampau dunia universiteir telah menjadi perpanjangan tangan kekuasaan (menteri), dan kini kehidupannya berada di bawah bayang-bayang kekuatan

modal-kapital. Di tengah kondisi semacam itu, dan secara luas kondisi masyarakat yang terus menerus dikepung oleh hingar-bingar kapitalisme baik di perkotaan maupun di pedesaan, membicarakan masalah agraria laksana mengajak duduk Don Quixote di meja makan *McDonald* atau menyeretnya ke pusat perbelanjaan *Carrefour*. Bukan hanya membuatnya semakin samar membedakan antara realitas dan bayangan, namun mengundang orang lain untuk melihatnya dengan penuh keanehan dan lantas tidak mengacuhkannya. Dunia akademis Indonesia telah begitu lama mengabaikan kajian agraria, seperti halnya negeri ini sejak lama mengingkari ekistensi keagrariannya. Mahasiswa-mahasiswa saat ini tidak tertarik lagi mengkajinya, seperti generasi-generasi muda meninggalkan ruang agrariannya di pedesaan. Ada politik pengetahuan di masa lalu yang menyebabkan kondisi semacam itu. Kenyataan seperti ini menantang kita untuk membaca kembali pemikiran-pemikiran agraria yang pernah ada, dan lantas memunculkan kajian-kajian baru yang kreatif agar mampu menjawab problem-problem real keagrarian kontemporer. Tantangan lainnya adalah agar gagasan dan pemikiran-pemikiran itu dapat berakumulasi menjadi gugus pengetahuan agraria yang otoritatif, didialogkan dari generasi ke generasi dalam berbagai tema dan teoretisasi baru.

B. Anatomi Pemikiran

Sartono Kartodirdjo lahir di Wonogiri, Jawa Tengah, 15 Februari 1921. Setamat HIS, dia melanjutkan sekolah MULO di Surakarta. Lalu ia meneruskan tingkat atasnya di *Kweekschool*. Sekolah guru ini berada di Salatiga. Ia lulus pada tahun 1941. Sartono kemudian bertugas sebagai guru HIS di Muntilan. Di kota ini Sartono bertemu dengan calon istrinya, Sri Kadaryati. Keduanya

sama-sama menjadi guru. Mereka menikah di Yogya tahun 1948, di sela-sela suasana perang kemerdekaan. Sebab itulah mereka dijuluki dengan “Pengantin Revolusi”. Keduanya dikaruniai dua anak, laki-laki dan perempuan bernama Nimpoeno dan Roeswati.

Sartono melanjutkan kuliah ke Fakultas Sastra UI pada tahun 1950. Sembari kuliah Sartono mengajar di SMA, sementara istrinya mengajar di sebuah SMP. Gelar sarjana diperoleh enam tahun kemudian, 1956. Sebelum terkenal sebagai guru besar Universitas Gadjah Mada, Sartono semula adalah peneliti di Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia (sekarang LIPI). Ia bekerja di lembaga ini sampai tahun 1962. Kemudian ia meneruskan studi ke Yale University, New Haven, Amerika, di bawah bimbingan Harry J Benda. Atas rekomendasi pembimbingnya itu, Sartono kemudian melanjutkan studi ke Amsterdam Universiteit guna mengambil program doktor di bawah bimbingan Prof. W.F. Wertheim. Ia menulis disertasi tentang pemberontakan petani Banten dengan memperoleh predikat *summa cumlaude*. Gelar Doktor diperolehnya pada 1 November 1966. Selama masih berada di Belanda itulah, pada tahun 1963 ia diangkat sebagai guru besar Universitas Gadjah Mada, dengan menyajikan pidato yang dikirim secara tertulis berjudul, “Catatan tentang Segi-segi Mesianistis dalam Sejarah Indonesia”.³

Dalam tulisan ringkas tentang Sartono ini, akan disajikan pemikiran-pemikirannya terutama tentang kajian sejarah dan agraria, dan beberapa pembacaan ulang terhadapnya. Tulisan ini sengaja tidak menyajikan gambaran biografi beliau secara lebih

³ Naskah pidato ini disajikan kembali dalam *Lembaran Sedjarah*, no 7 Juni 1971, sie. Penelitian Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra dan Kebudayaan, Universitas Gadjah Mada

mendalam, sebab telah ada beberapa buku yang mengkajinya.⁴ Dari pembacaan ulang atas pemikiran itu, akan terlihat peta pengetahuan agraria yang telah dikembangkannya serta batasan-batasannya, sehingga dari situ dapat diperluas apa yang belum dikerjakan oleh beliau.

Pemikiran Sartono Kartodirdjo khususnya dalam studi sejarah melintas mulai dari perspektif, konsep-konsep, metodologi, hingga suatu tema tertentu. Gagasan-gagasan utama itu adalah tentang perspektif Indonesia-sentris, konsep integrasi dalam melihat sejarah nasional Indonesia, pendekatan ilmu-ilmu sosial dalam metodologi sejarah, dan sejarah agraria terutama tentang gerakan sosial, ideologi, dan kepemimpinan. Penyajian anatomi pemikiran di bawah disertakan langsung dengan berbagai problematikanya.

1. Historiografi Indonesia-sentris dan Jebakan Nasionalisme Sempit

Guna melacak apa yang dimaksud dengan Indonesiasentris, alangkah baiknya merujuk langsung beberapa tulisan Sartono Kartodirdjo dalam beberapa terbitan. Di antaranya adalah,

“Setelah dirasakan bahwa historiografi kolonial tidak relevan lagi dengan ceritera tentang masa lampau bangsa Indonesia, maka pemikiran baik sebelum maupun sesudah Seminar Sejarah Nasional Pertama di

⁴ Beberapa di antaranya adalah, Nina H. Lubis, (ed), *80 tahun Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo, Pelopor Sejarah Indonesia*, (Bandung, Satya Historika, 2001); M. Nursam, *Membuka Pintu bagi Masa Depan, Biografi Sartono Kartodirdjo*, (Jakarta: Kompas, 2008); M. Nursam, dkk. (eds), *Sejarah yang Memihak, Mengenang Sartono Kartodirdjo*, (Yogyakarta: Ombak dan Rumah Budaya Tembi, 2008)

Yogyakarta pada akhir tahun 1957 telah berhasil menerobos kerangka kolonial dari Sejarah Indonesia serta mengganti pandangan Eropasentris dengan yang Indonesiasentris. Pemikiran yang pada umumnya bersifat lebih filosofis atau teoritis itu memang berhasil memberikan saran-saran, pengertian-pengertian serta pandangan-pandangan sekitar *approach* baru dari sejarah Indonesia, kadang-kadang malahan bersifat sangat provokatif, akan tetapi kemudian terbukti bahwa pemikiran itu ‘more successful in conception than in execution’, konsepsi-konsepsinya lebih bersifat filosofis tanpa landasan pada studi yang mendetail dari sumber-sumber sejarah.”⁵

Sartono menyadari benar bahwa sudut pandang itu *more successful in conception than in execution*. Sudut pandang moral semacam itu dapat menjebak penulis sejarah pada simplifikasi, misalkan hanya mengganti orang Belanda menjadi orang Indonesia sebagai titik-sentralnya, mengganti pengkhianat dengan pahlawan, serta melekatkan berbagai identitas heroistik ke dalam aktifitas yang dilakukan oleh orang pribumi tatkala berhadapan dengan kekuatan lain di masa lalu, padahal ia berada dalam konteks yang berlainan. Kecenderungan yang paling berbahaya adalah mengabaikan norma obyektifitas dalam penulisan sejarah. Maka di sinilah dibutuhkan penguatan dari segi metodologi: skope temporal maupun spasial dan analisa atau eksplanasi. Terhadap dua hal ini, Sartono menawarkan penulisan sejarah dalam lingkup yang lebih mikro, yakni sejarah lokal dan pendekatan ilmu sosial dalam menjelaskan suatu fenomena sejarah. Ia menyatakan,

⁵ Sartono Kartodirdjo, “Lembaran Sejarah”, no. 6 Desember 1970, sie. Penelitian Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra dan Kebudayaan, Universitas Gadjah Mada., hlm. 24-25, dimuat kembali dalam buku Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia, suatu Alternatif*, (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm. 30

“Apabila historiografi kolonial mencantumkan sejarah Indonesia hanya sebagai ‘perpanjangan’ dari sejarah bangsa Belanda di seberang dan tokoh-tokoh Belanda yang memegang peranan, maka dalam merekonstruksi sejarah Indonesia sebagai sejarah nasional sudut pandang yang Eropasentris ataupun Neerlandosentris itu diganti dengan pandangan yang menempatkan Indonesia sebagai tempat kejadian serta di mana bangsa Indonesia sendiri yang memegang peranan. Pandangan ini telah lazim kita sebut Indonesiasentrisme. Implikasi metodologis dari Indonesiasentrisme ini ialah bahwa untuk periode penjajah kita perlu memusatkan perhatian pada sejarah regional/lokal dengan maksud untuk menonjolkan peranan bangsa Indonesia sendiri, oleh karena pada masa itu peristiwa-peristiwa pada tingkat ‘nasional’ sudah barang tentu terutama berkisar seputar tokoh-tokoh kolonial.”⁶

Sejarah lokal selama ini didefinisikan sebagai suatu *locality* atau “tempat, ruang”. “Jadi, ‘sejarah lokal’ hanyalah berarti sejarah dari suatu ‘tempat’, suatu ‘locality’, yang batasannya ditentukan oleh ‘perjanjian’ yang diajukan penulis sejarah.”⁷ Sejarah lokal hanya dilihat sebagai ruang spasial, padahal semestinya ia juga dilihat sebagai dimensi dan perjumpaan. Lokalitas itu biasanya dihadapkan pada konteks nasionalitas, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah kritik, “...Sementara itu sejarah nasional tidak lain hanya merupakan representasi politis dari sejarah lokal dalam bingkai dimensi keruangan baru.....(padahal) Sejarah ekonomi lokal bukan sejarah ekonomi nasional di tingkat lokal”.⁸ Jika kalimat pertama diikuti, ini mengingatkan pada pandangan Ki

⁶ *Ibid.*, hlm 39

⁷ Taufik Abdullah, *Sejarah Lokal di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996), hlm. 15.

⁸ Bambang Purwanto, “Dimensi Ekonomi Lokal dalam Sejarah Indonesia”, dalam Sri Margana dan Widya Fitrianiingsih (ed.), *Sejarah Indonesia: Perspektif Lokal dan Global (Persembahan 70 tahun Prof. Djoko Suryo)*, (Yogyakarta: Jurusan Sejarah UGM dan Penerbit Ombak, 2009), hlm. 496 dan 497

Hadjar Dewantara tentang kebudayaan nasional yang diartikan sebagai “puncak-puncak dari kebudayaan daerah”. Kedaerahan adalah unsur pembangun kebudayaan nasional sekaligus dalam konteks tertentu, berposisi biner terhadapnya. Padahal realitas sejarah di masa lalu (lebih-lebih kini) menunjukkan bahwa kaitan antara lokal bisa jadi bukan dengan nasional namun dengan kekuatan global melalui berbagai saluran ekonomi, politik, dan kebudayaan. Selain itu, lokalitas dapat membangun kesejarahannya sendiri tanpa menunjukkan signifikansinya baik dalam konteks nasional maupun global. Hal ini bukan berarti menafikan analisa terhadap konteks yang lebih luas seperti kolonialisme dan neoliberalisme (jika memang dimungkinkan). Pertanyaan utamanya adalah, dalam konteks interaksi dan perjumpaan itu apa dampak yang dirasakan oleh masyarakat lokal?

Cara melihat lokal senantiasa secara subordinatif terhadap nasional bisa jadi juga keliru. Interaksi lokalitas dengan lokalitas yang lain atau bahkan dimensi yang lebih luas, seringkali berproses secara osmosis (saling melakukan penyerapan), responsif, akomodatif, dan bukan domintif-eksploitatif sebagaimana selama ini dibayangkan. Cara melihat secara demikian terjadi juga dalam proses difusi kebudayaan yang selama ini dipahami menyebar dari pusat ke pinggiran, dari elit ke massa, dan dari kolonial ke masyarakat pribumi. Pandangan ini mengabaikan adanya perjumpaan-perjumpaan (*encounter*) yang memungkinkan saling pengaruh itu terjadi. Tawaran untuk melihat proses melokal – menasional – mengglobal itu terjadi sebagai sebuah *encounter* dan bukan hirarki, justru adalah untuk mengemansipasi dan mengakui rasionalitas yang ada di level yang selama ini dianggap pinggiran. Sekaligus untuk menunjukkan bahwa berbagai problem yang sering disebut, seperti dominasi, eksploitasi, dan “penja-

jahan", itu justru dikembangkan secara internal kepada sesama-nya maupun terhadap kelompok di luarnya. Kolonialisme misalnya, bukanlah produk yang telah jadi di "negeri induk" yang kemudian disebar ke negeri koloni, namun ia bisa dibentuk saat perjumpaan di negeri koloni itu. Bahkan dalam kasus sebaliknya, apa yang disebut "Jawa", misalnya, sebagaimana dijelaskan oleh John Pamberton, bukanlah sesuatu yang terjadi secara alamiah, namun ia adalah bentukan sejarah hasil persinggungan berbagai kekuatan, melalui penaklukan, penyesuaian, dll.⁹ Demikian pula dengan "adat" (hukum adat, kearifan lokal, dan berbagai istilah turunan lainnya).

Cara melihat semacam ini mengajak kita bersetia pada kritik ilmiah ketimbang bersetia pada ideologi nasionalitas. Dengan cara membaca demikian, kekhawatiran yang jauh hari telah disinyalir oleh Sartono Kartodirdjo semoga dapat dihindari,

"Persoalannya sekarang ialah, apakah pendekatan 'dari dalam' dan pandangan Indonesiasentris akan cukup menjamin terungkapnya kompleks faktor-faktor yang mempengaruhi situasi-situasi historis dalam sejarah Indonesia? Pandangan Indonesiasentris yang masih terpaut pada pendekatan dari sejarah konvensional belum mampu menguraikan segala kompleksitas historis dari kehidupan bangsa Indonesia."¹⁰

Sinyalemen ini juga merupakan inti dari kritik yang dilakukan oleh sejarawan lain, Bambang Purwanto. Ia menyatakan

⁹ Periksa, John Pamberton, *On the Subject of Java*, (Ithaca: Cornell University Press, 1994)

¹⁰ Sartono Kartodirdjo, "Beberapa Masalah Teori dan Metodologi Sejarah Indonesia", dalam *Lembaran Sejarah*, no. 6 Desember 1970, sie. Penelitian Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra dan Kebudayaan, Universitas Gadjah Mada, dimuat kembali dalam buku Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia, suatu Alternatif*, (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm. 70

bahwa dua hal yang menjadi kunci mengapa sejarah Indonesia-sentris gagal adalah ketidakmampuannya dalam menghadirkan sejarah secara lebih *manusiawi* dan *beragam*, baik dari sisi keberagaman tema maupun epistemologinya. Tidak manusiawi sebab narasi sejarah di masa lalu senantiasa dikaitkan pada struktur yang lebih luas yakni negara-bangsa, tidak beragam karena hanya berkisar pada sejarah politik dan ideologi nasionalisme mengendalai pembacaan terhadap keragaman realitas. Kemudian ia merekomendasikan bagaimana seharusnya sejarah memberi ruang pada *keseharian, kemanusiaan, dan sesuatu yang terpinggirkan*.¹¹

Dalam kalimat lain barangkali dapat dikatakan bahwa sejarah, yang semestinya merupakan kajian atas humaniora terinkorporasi ke dalam studi sosiologi yang lebih menekankan pada struktur dan sistem yang lebih luas. Dan ini merupakan ciri yang tampak menonjol dalam kajian Sartono. Historiografi Indonesiasentris itu meski bisa difahami untuk konteks pasca-kolonial kala itu dan demi tujuan paedagogi atau ideologi di tahun 1950-an, dalam perkembangannya ia tidaklah tepat untuk kepentingan sejarah akademis dan kritis. Historiografi Indonesia-sentris telah menunaikan tugas untuk dekade awal pasca-kolonial, dan dengan itulah ia telah menjawab tantangan zamannya.

Kekhawatiran ideologisasi historiografi Indonesiasentris sebenarnya telah ditangkap oleh Soedjatmoko jauh-jauh hari dalam Seminar Sejarah Nasional I di Yogyakarta, tahun 1957. Sebagai seseorang dengan pandangan internasionalis dan humanis, ia mengatakan bahwa,

“Sejarah Indonesia sekarang tentu akan ditilik dan ditulis dari sudut

¹¹ Lihat, Bambang Purwanto, *Gagalnya Historiografi Indonesiasentris*, Yogyakarta: Ombak, 2006

‘berpangkal pada masyarakat Indonesia’. Dari sudut itu ia dapat dianggap sebagai sejarah nasional Indonesia. Penghadapan semacam itu memungkinkan berbagai konsepsi penulisan sejarah Indonesia. Tidak dapat dikatakan bahwa hanya sesuatu konsepsi bercorak nasional, dan yang lainnya tidak. Bila ia diterima dan diresmikan sebagai satu-satunya cara penghadapan sejarah Indonesia yang nasional, maka akan terbuka pintu untuk *uniformiteit* dan *conformiteit* dalam penyelidikan sejarah yang dipaksakan dari atas, oleh pemegang kekuasaan politik.¹²

Historiografi Indonesiasentris sebenarnya telah disadari kelemahannya sejak ia “dirumuskan” pada tahun 1957. Arah yang diinginkan saat itu adalah lahirnya karya-karya sejarah yang menempatkan masyarakat Indonesia sebagai pelaku sejarah dan bukan hanya kelompok responsif atas kekuasaan kolonial belaka. Semangat ini merupakan suatu “jiwa zaman” yang menghinggapi banyak orang dan di segala bidang, termasuk Yamin, Sartono dan lain-lain, terkecuali Soedjatmoko yang telah berpikir ke arah terwujudnya historiografi dengan standar-standar penyelidikan obyektif dan ilmiah. Dalam sajiannya ia mengatakan bahwa jika spirit nasionalisme (yang ditunjukkan dalam perspektif Indonesiasentris) itu ditempatkan sebagai falsafah sejarah nasional, maka hal itu tidak tepat. Menyebut filsafat sejarah nasional itu sendiri sebagai sebuah kesalahan,

“Tidak ada suatu falsafah tertentu tentang sejarah nasional, maupun tiada suatu filsafah nasional tentang sejarah. Mengenai sejarah nasional ada dua pengertian: filsafat sejarah ada, tetapi filsafat sejarah nasional ‘merupakan suatu *contradictio in terminis*’. Pengertian itu bukan pada tempatnya di lapangan filsafat, dan bukan tempatnya di lapangan sejarah”.¹³

¹² Laporan Seminar Sedjarah, *Atjara I dan II, Konsepsi Filsafat Sedjarah Nasional dan Periodisasi Sedjarah Indonesia*, Universitas Gadjah Mada, 1958, hlm 90.

¹³ Laporan Seminar Sedjarah, *Ringkasan*, Universitas Gadjah Mada, 1958, hlm 42

Hal kedua adalah masalah eksplanasi. Guna menghindari monokausalitas, determinasi, dan kesepihakan, maka pendekatan ilmu-ilmu sosial diperlukan dalam turut menjelaskan realitas sejarah yang kompleks. Penjelasan mengenai ini khusus disajikan dalam sub-bab di bawah nanti.

2. Konsep Integrasi dalam Sejarah Nasional Indonesia

Sartono terkenal pula dengan gagasan integrasinya dalam membaca gerak sejarah Indonesia. Ia menyatakan bahwa “dalam rangka penulisan sejarah nasional yang nasiosentris, pada hakekatnya proses integrasi menjadi ‘benang merah’ yang teranyam sebagai jalur utama dalam jaringan komunikasi serta interaksi seperti yang terselenggara sepanjang sejarah Indonesia”.¹⁴ Pada buku jilid I Pengantar Sejarah Indonesia yang mengambil periode 1500-1900, ia mengemukakan bahwa proses integrasi itu berkembang ke arah perwujudan geopolitik. Sedangkan dalam periode pergerakan nasional (abad 20), proses integrasi itu terjadi pada dimensi sosial-politik. Nasionalisme periode ini masih bersifat elitis, sebab merekalah yang memegang peranan penting dalam inovator politik dan dunia gerakan.

Ada dua hal yang perlu dikritisi terhadap konsep integrasi itu. Pertama, apakah pendapat di atas tidak bersifat anakronis mengingat nasionalisme merupakan gagasan yang muncul pada awal abad 20? Gerak sejarah yang terentang secara panjang dari mulai abad 16 hingga abad 20 menghadirkan dinamika dan arah yang berbeda-beda dan tidak menuju pada integrasi ke arah satu

¹⁴ Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional, dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*, (Jakarta: Gramedia, 1990), hlm. xi-xii.

unit tertentu. Dalam episode itu berbagai kekuatan berinteraksi dalam berbagai konteks ekonomi-politik, kedaerahan (satu daerah dengan daerah yang lain, satu kekuatan lokal – kerajaan dengan kekuatan global) yang belum terkerangkai oleh satu ikatan yang disebut negara bangsa. Bangunan negara-bangsa baru samar-samar terwujud pada awal abad 20 tatkala Hindia Belanda menjadi bagian dari Pax Neerlandia. Kerajaan-kerajaan di seluruh nusantara ditundukkan melalui pakta kedudukan dalam bentuk *korte verklaring* atau *lange contract*, meski beberapa daerah mendapat hak istimewa.¹⁵ Alih-alih arah integrasi menuju hadirnya *nation state* bernama Indonesia, dalam proses seperti itu justru yang tampak adalah arah integrasi yang mendorong (meligitimasi) hadirnya suatu unit koloni bernama Hindia Belanda yang menjadi bagian dari administrasi-politik Pax Neerlandia. Gubernur Jenderal van Heutz berperan penting dalam proses ini.

Kedua, jika yang dimaksud dengan arah integrasi itu adalah menuju hadirnya dunia baru yang diimajinasikan, yakni Indonesia, maka pertanyaannya adalah, siapa (saja) yang mengimajinasikannya itu? Dengan posisi politik sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah, disertai peneguhan hak adat, dan *privilege* sosial-ekonominya, elit-elit tradisional dan sebagian besar elite modern di berbagai daerah justru memiliki imajinasi yang mengikuti kecenderungan “pola ulum”. Mereka merasa menjadi bagian dari kekuasaan Hindia Belanda. Sedangkan lapisan kecil dari elit terdidik modern baik dari kalangan pribumi, keturunan Tionghoa, dan kaum Indisch, serta lapisan massa yang diorganisir, memiliki aspirasi politik ke arah sebaliknya yang menyimpang

¹⁵ Lihat, Usep Ranawidjaja, *Swapradja, Sekarang dan dihari Kemudian*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1955)

dari “pola umum” tersebut. Dilihat dari sini maka pendapat Sartono memerlukan klarifikasi.

Dari perspektif yang berbeda, periode pergerakan pada awal abad 20 itu dapat dikatakan sebagai awal dari “Revolusi Indonesia”. Dengan mendefinisikan revolusi sebagai perombakan struktur secara radikal dan menghasilkan sesuatu yang baru sama sekali, maka sebenarnya perombakan itu terjadi pada awal abad 20. Mengubah struktur tanpa menghadirkan sesuatu yang sama sekali baru bukanlah revolusi. Sesuatu yang sama sekali baru hadir di muka bumi (sebab sebelumnya tidak pernah ada) pada awal abad 20 itu adalah, “Indonesia”. Indonesia sebagai masa depan yang baru telah diimajinasikan. Ia menggantikan *nation* baru, komunitas baru sebagai ruang hidup bersama yang baru pula. Proses revolusi dan merevolusi ini, Indonesia dan meng-Indonesia ini, terjadi pada awal abad 20 hingga tahun 1960 dan mengalami titik balik pasca-1965.

Di dalam proses itu yang berperanan penting dalam membangun imajinasi adalah “bahasa”, yakni bahasa Melayu. Melalui bahasalah cita-cita, ide, dan bayangan akan hadirnya dunia baru itu dipertukarkan. Bahasa ini mampu menjelaskan seluk beluk impian, masa depan, dan kompleksitas persoalan penduduk. Cita-cita dan imajinasi itu agak bersifat mistik sifatnya, sama seperti yang dilakukan oleh kaum *milleniaris* pada abad-abad sebelumnya, meski yang baru ini hadir dalam ujar idiom dan kosa kata modern. Muncul pertanyaan, mengapa bahasa Melayu berhasil menjadi bahasa Indonesia? Teks resmi mengatakan 2 hal: ia menjadi *lingua franca* dan bahasa resmi administrasi. Tapi apakah dalam peran itu ia digunakan oleh banyak orang untuk membicarakan masa depan yang dicita-citakan? Maka jawabannya adalah “tidak”. Bahasa Melayu berhasil menjadi

bahasa Indonesia karena digunakan oleh sastra Tionghoa. Jenis sastra inilah yang dibaca oleh banyak kalangan, bisa menyatukan satu impian orang dengan impian orang lain, misi politik redaksi kepada khalayak pembacanya dan sirkuler dari khalayak kepada redaksi.¹⁶ Proses produksi dan reproduksi pengetahuan yang tercipta dalam dunia pers dan kesusastraan Melayu-Tionghoa inilah yang melahirkan kosa-kata revolusioner bernama Indonesia.

Menarik untuk membandingkan konsep integrasi Sartono dengan gagasan integrasi Soepomo, serta bagaimana dampak gagasan ini turut hadir mempengaruhi pengimajinasian nasion ke-Indonesiaan kita. Gagasan integrasi Soepomo terejawentahkan dalam penyusunan Undang-undang Dasar 1945. Sebagai arsitek dalam penyusunan itu, Soepomo memanfaatkan keahliannya sebagai pakar hukum adat dan ketatanegaraan. Ia adalah murid paling berpengaruh dari Van Vollenhoven. Ada perubahan yang menarik dari para ahli hukum adat, termasuk Soepomo, mengenai pandangannya terhadap adat dan bagaimana ia ditempatkan dalam bingkai negara modern. Sikap Soepomo terhadap hukum adat sangatlah mendua. Ia begitu getol membela hukum adat pada masa sebelum Perang, sebagaimana gurunya menuntut pengakuan dan sistem campuran (adat dan Barat) dalam hukum kolonial yang diterapkan di Hindia Belanda. Akan tetapi seperti halnya mayoritas praktisi hukum Indonesia, sikapnya berubah setelah tahun 1945.¹⁷

¹⁶ Catatan atas Ceramah Kebudayaan Max Lane di MRC-USD, Yogyakarta, 9 Juli 2010

¹⁷ C. Fasseur, "Dilema Zaman Kolonial: Van Vollenhoven dan Perseteruan antara Hukum Adat dan Hukum Barat di Indonesia, dalam, Jamie S. Davidson, David Henley, dan Sandra Moniaga, (eds.), *Adat dalam Politik Indonesia*, (Jakarta: KITLV dan Yayasan Obor Indonesia, 2010), hlm 75

Spirit dalam UUD 1945 adalah ingin mengakhiri dualisme hukum. Adat dan sistem hukumnya yang semula dianggap sebagai “solusi” di era Hindia Belanda, kemudian berubah menjadi “persoalan” di era kemerdekaan Indonesia. Pengakuan atas “250 *Zelfbesturende landschappen* dan *Volkgemeenschappen*” di berbagai daerah yang memiliki susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa (Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18a ayat 1), dapat ditafsirkan sebagai kesementaraan dan “rayuan” agar daerah-daerah terlebih dahulu menerima kehadiran Republik Indonesia. Tafsir ini seperti halnya kesan yang dapat kita tangkap dari bunyi teks Proklamasi Kemerdekaan yang diucapkan Soekarno. Semangat kemerdekaan dan penyambutan bayi yang baru lahir bernama Indonesia, mendahului penyelesaian masalah keadilan dan kondisi real sosial ekonomi, kejelasan hubungan daerah dengan pusat (Jawa), dan sebagainya. Pembacaan ini dinyatakan secara tepat, “bahwa kemerdekaan adalah jembatan emas menuju kehidupan berkeadilan dan sejahtera”.

Yang ingin dikatakan dengan uraian panjang di atas adalah bahwa konsep integrasi Sartono berada dalam konteks tertentu, yakni semangat merumuskan historiografi Indonesia-sentris dan dalam proyek membangun sejarah nasional Indonesia. Ia tidak lagi cocok untuk periode sesudahnya. Bahkan konsep ini bisa berpotensi menyajikan narasi sejarah (lokal) yang memaksakan diri untuk berproses ke arah unit sentralistik (pusat). Dengan demikian, mengkritisi historiografi Indonesiasentris berarti pula mempertanyakan ulang konsep integrasi ini. Dengan mengatakan bahwa pemikiran Indonesiasentris “more successful in conception than in execution” maka demikian pula kehati-hatian kita terhadap konsep integrasi dalam membaca proses sejarah nasional Indonesia.

Konsekuensi dari pembacaan ulang ini adalah bagaimana menempatkan berbagai aktor dan kekuatan yang pernah mengambil peran di atas bentang alam bernama nusantara ini sebagai bagian dari kesejarahan Indonesia. Tidak harus meminjam paradigma oksidentalisme untuk melakukannya. Dengan menempatkan kesejarahan Indonesia di dalam konteks kesejarahan dunia atau kawasan, atau sebaliknya menempatkan sejarah dunia atau kawasan dalam sejarah Indonesia, maka kita bisa menjawab keterbatasan historiografi Indonesiasentris dan problematika konsep integrasi dalam sejarah nasional. Kita sebut saja jenis pembacaan semacam ini dengan historiografi jaringan.

3. Sejarah *Multidimensional Approach* sebagai Politik Pengetahuan

Kecenderungan pendekatan unidimensional yang terjadi dalam berbagai disiplin ilmu sosial di Indonesia utamanya kajian sejarah, mendapat kritik Sartono Kartodirdjo. Pendekatan semacam ini tidak mampu membaca suatu realitas secara menyeluruh. Sebagai misal, pendekatan sosiologis hanya akan menyoroiti suatu gejala dari aspek sosial seperti hubungan sosial, interaksi, jaringan hubungan sosial, dan sebagainya. Pendekatan politikologi hanya mengungkap aspek politik seperti kekuasaan, kepemimpinan, otoritas, dan lain-lain. Multidimesionalitas gejala sejarah perlu ditunjukkan agar diperoleh gambaran secara bulat dan menyeluruh.¹⁸ Tidak ada kunci mendasar atau *single explanation* dalam sejarah, sehingga sejarah harus dilihat dari multi-perspektif dan multi-sebab.

¹⁸ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 87

Agar dapat demikian, seorang sejarawan pertama-tama dituntut menguasai alat analisis pada masing-masing disiplin ilmu, agar tidak menggunakannya sambil lalu dan serampangan apalagi hiasan belaka. Tugas seorang sejarawan yang semula hanya menjadi juru kisah dengan menarasikan runtutan peristiwa, dituntut lebih jauh agar dapat menganalisa peristiwa itu, menunjukkan multi(f)aktor, sebab akibat, dan berbagai dampaknya. Mengapa pilihan ini dilakukan? Umumnya penjelasannya adalah karena adanya perkembangan sejarah dan ilmu sosial secara global yang turut memengaruhi pijakan metodologi Sartono.

Kala itu aliran *Annales* dari Perancis yang dimotori oleh Marc Bloch dan Lucien Febvre menulis sejarah sosial tentang masyarakat feodal. Mereka menjelaskannya secara menyeluruh sehingga disebut juga dengan “sejarah total”. Pada gilirannya, pijakan metodologi itu diperkuat oleh Fernand Braudel. Tidak hanya sebab-sebab yang terjadi dalam interaksi manusia dengan manusia, Braudel melalui karyanya, *Laut Tengah dan Dunia Sekitarnya pada Zaman Phillipis II*, menjelaskan pula hasil interaksi manusia dengan alam. Sebagai gambaran, berikut suatu bagan yang menjelaskan bagaimana aspek geografis menjelaskan proses sejarah ala Mazhab Annales.¹⁹

Tempo Perubahan	Aspek	Fokus yang disoroti
Jangka panjang	Geografi	<i>Structure</i>
Jangka menengah	Ekonomi	<i>Conjuncture</i>
Jangka pendek	Politik	<i>Event</i>

¹⁹ F.R. Ankersmit, *Refleksi tentang Sejarah, Pendapat-pendapat Modern tentang Filsafat Sejarah*, (Jakarta: Gramedia, 1987), hlm. 281-282

Sartono sangat terpengaruh Mazhab Annales itu. Salah satu penerus mazhab tersebut yang mengkaji Indonesia adalah Denys Lombard. Sartono dianggap orang yang memahami pendekatannya sehingga sangat tepat untuk memberi kata pengantar terbitan bukunya. Denys Lombard membaca keberadaan Jawa sebagai produk persimpangan berbagai lapis (nebula) peradaban yang melintasi sejarah Jawa; India, Islam, dan Barat. Dalam perjumpaan ini, Jawa dipengaruhi dan turut memengaruhi ketiga peradaban besar tersebut.²⁰

Saya akan mengajukan pendapat lain bahwa pendekatan multidimensional melalui ilmu-ilmu sosial di dalam studi sejarah itu adalah strategi, tepatnya “politik pengetahuan”, dan tidak semata-mata pencapaian akademis (*academic enterprise*) ilmu sejarah pada wilayah eksplanasinya. Mulanya memang demikian. Lebih jauh, ia seakan menjadi *blessing in disguise* bagi pendirian Sartono yang bersikukuh menjaga jarak dengan kekuasaan. Kesuksesan pendekatan ini yang bisa kita lihat dan teladani dari Sartono, adalah terletak pada kekuatan politik pengetahuannya yang barangkali melebihi tindakan/pilihan ilmiahnya. Pendekatan ini merupakan strategi ampuh guna menghindarkan diri dari hegemoni kekuasaan yang demikian gencar mengideologisasi narasi sejarah Indonesia. Inilah satu pencapaian yang pernah ada dalam historiografi Indonesia.

Keberhasilannya tidak (hanya) terletak pada digunakannya bermacam perangkat ilmu sosial dalam menjelaskan keragaman aspek sejarah. Sartono Kartodirdjo sendiri tidak hendak

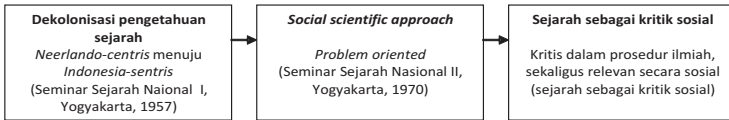
²⁰ Sartono Kartodirdjo, “Pengantar” dalam *Nusa Jawa, Silang Budaya, Batas-batas Pembaratan*, (Jakarta: Gramedia, 1998)

mengungkap berbagai (semua) aspek dan dimensi tentang pemberontakan, misalnya. Perangkat ilmu sosial yang dominan di dalam disertasinya adalah ilmu politik, antropologi, dan sosiologi, dan bukan semua bidang ilmu sosial. Dilihat dari sini, maka klaim *multidimensional approach* sejatinya tidak benar-benar menuliskan semua-mua aspek dan seluruh perangkat ilmu sosial, sebab hal demikian bukanlah cara kerja ilmu yang terkendali oleh “konvensi disiplin”.

Pendekatan multidimensional (pada gilirannya) bisa ditafsirkan sebagai “pretext” bagi Sartono Kartodirdjo untuk keluar dari jerat militerisasi dan politisasi sejarah Indonesia. Dalih ini menantang *mainstream* dan “historiografi resmi” saat itu. Pengalaman ia memimpin penulisan buku Sejarah Nasional Indonesia 6 jilid telah membuktikan. Dalih itu cukup ampuh, aman, elegan, dan yang jelas: bercita-rasa “akademis”. Inilah mengapa ia digandrungi dan banyak diikuti, sehingga konon melahirkan suatu “mazhab”. Mengenai hal ini, Sartono sendiri pernah menunjukkan sikap tatkala ia diminta mengoreksi buku putih yang datang dari sekretaris negara dan hanya diberi waktu 3 hari. Sartono memberi koreksi dan komentar yang sifatnya metodologis. Ketika hasil koreksi diminta kembali dan dianggap tidak memenuhi selera pemesan, Sartono mengatakan bahwa tugas sejarawan bukan memberi membenaran buku putih.

Dari sini bisa dilihat pula bahwa Sartono Kartodirdjo menggunakan dalih “pendekatan ilmu-ilmu sosial” dalam metodologinya guna meleluaskan gerakannya di tengah-tengah pendisiplinan rezim kekuasaan yang demikian menggila. Keleluasaan gerak itu sangat diperlukan dalam proses pemantapan bangunan pengetahuan (*state of the art*) ilmu sejarah. Pendekatan ini merupakan “fase kedua” di dalam perkembangan historiografi

Indonesia (tahun 1970-an, setelah Seminar Sejarah II). Pada fase ini “siasat politik-pengetahuannya” diarahkan pada kekuatan internal (rezim Orde Baru), sedangkan fase sebelumnya dengan gagasan “integrasi” dan “Indonesiasentris” (Seminar Sejarah I, 1957) siasatnya diarahkan pada kekuatan luar (Kolonial), sebagai upaya dekolonisasi pengetahuan sejarah.



Periodisasi dalam bagan di atas tidak bisa dibaca secara terpotong-potong, artinya satu periode meninggalkan periode yang lain. Penulisan sejarah untuk tujuan kritik sosial bisa saja ditulis dengan pendekatan ilmu sosial dan bercita-rasa Indonesiasentris.

Lazimnya orang menyebut ciri “mazhab” ala Sartono Kartodirdjo itu terletak pada kemampuannya merekonstruksi realitas kelompok marjinal (masyarakat tani-pedesaan) dalam sejarah Indonesia, “ruralisasi sejarah”, dan sejarah sosialnya. Saya cenderung melihat pencirian itu pada kesadaran politik (politik pengetahuan) yang dimainkan oleh Sartono Kartodirdjo. Kesadaran politik pengetahuan ini penting, sebab jika tidak, ilmu pengetahuan hanya tersisa menjadi “kerajinan tangan” belaka. Ia rentan terinstrumentasi oleh kekuatan di luarnya. Kesadaran politik inilah juga yang menurut saya mampu menyelamatkan nasib disiplin ilmu sejarah di Indonesia saat itu. Dengan pilihan ini Sartono Kartodirdjo sebenarnya sedang berpolitik, bukan politik dalam pengertian teknik untuk memperoleh kekuasaan dengan cara-cara yang “rasional”, namun politik sebagai terjemahan atau turunan atas “etika”. Menghadirkan dunia etika

ke dalam kerja keserjanaan yang dikemas dalam strategi ilmiah ini merupakan sesuatu yang luar biasa dari Sartono Kartodirdjo. Hal ini sangat sulit dan jarang dilakukan. Etika yang berakar dari ruang batin seringkali ditempatkan di luar kerangka ilmiah yang konon bersumber dari akal fikiran.

Dengan demikian, pendekatan multidimensional tidak semata-mata respon (mengekor) atas kecenderungan global di dalam ilmu pengetahuan sosial dan humaniora saat itu, dimana saling meminjam perangkat ilmu pengetahuan adalah strategi untuk mendobrak rezim “disiplin” keilmuan. Strategi ini, di dalam pengalaman Indonesia yang dapat kita baca melalui Sartono Kartodirdjo, sekaligus adalah upaya membentengi diri dari hegemoni kekuasaan. Pada titik inilah maka ditemukan kesesuaiannya dengan karakter atau prinsip *mesubudi* (asketisme) Sartono yang senantiasa ia tekankan berulang-ulang sebagai prinsip dalam menjalani dunia soliter ilmu pengetahuan.

Sejarah *multidimensional approach* sangat potensial menjadi sejarah kritis, asal tidak mengalami involusi tatkala dipahami sebagai instrumental (perangkat) belaka. Spirit politik pengetahuan itulah yang semestinya terus dihidupi dan dibaca ulang.

Kesan kedua yang bisa kita tangkap dari pendekatan ilmu-ilmu sosial dalam sejarah ala Sartono adalah, pendekatan itu digunakan terbatas pada wilayah eksplanasi sejarah yang bersifat kausatif. Di dalam disertasi kesan demikian cukup kuat. Ilmu politik, antropologi, dan sosiologi, digunakan untuk membaca sebab-sebab pemberontakan, seperti kebangunan agama, keresahan sosial produk dari tekanan struktur dan sistem sosial yang ada, dan konfigurasi kekuatan (elit) politik. Demikian pula dalam buku *Protest Movement in Rural Java*. Padahal dalam metodologi sejarah, penjelasan sejarah (*historical explanation*) tidak hanya

berupa penjelasan sebab-akibat (kausalitas), namun ada banyak penjelasan. Penjelasan sejarah adalah usaha membuat unit sejarah *intelligible* (bisa dipahami secara nalar). Jenisnya selain kausalitas adalah periodisasi, analisis struktural, paralelisme, generalisasi, *rapprochement* (antara sejarah dan teori sosial), kuantifikasi dan narasi.²¹ Karena terlalu kuat penjelasan kausalitas dan analisa strukturalnya, tulisan-tulisan Sartono Kartodirdjo terutama pasca disertai kurang menonjol narasi historis yang bersifat deskriptif.

4. Kajian Subaltern dan *Pemberontakan Petani-nya Sartono*

Siapakah yang disebut sebagai *subaltern* itu? Subaltern didefinisikan sebagai mereka (komunitas) yang berada dalam genggamannya otoritas kekuasaan yang disubordinasikan oleh subyek pembuat wacana.²² Istilah ini muncul dari uraian pemikir Marxis asal Italia, Antonio Gramsci mengenai kaum tani desa Italia. Istilah ini kemudian populer melalui “Subaltern Studies Groups” yang dimotori oleh Ranajit Guha dan Gayatri Chakravarty Spivak. Ia menjadi populer dalam term postkolonialitas khususnya merujuk pada penulisan sejarah India. Ranajit Guha pada tahun 1988 mempublikasikan sebuah serial yang diberi judul *Selected Subaltern Studies* yang menghimpun berbagai tulisan yang berisi tentang tandingan historiografi kolonial, dengan cara mendekonstruksi deskripsi atas sejarah yang ada dan menempatkan kelompok subaltern sebagai pihak yang turut membangun kesejarahannya.

²¹ Lihat Kuntowijoyo, *Penjelasan Sejarah (Historical Explanation)*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008)

²² Lihat, Sim Chee Cheang, *Banalities of Subalternism: Positing the Tionghua Peranakan in the Colonial Discourse*, *Jurnal Sari* edisi 20 (2003), hlm 31-38.

Apa yang mereka lakukan melawan cara pandang sejarah di negeri koloni yang menjelaskan secara linier-transisional dari feodalisme ke kapitalisme. Kelompok ini menunjukkan, pertama, bahwa momen perubahan itu tidak terjadi secara mulus, linear-transisional, namun berjalan secara plural oleh berbagai kekuatan, konfrontatif, dan dominatif antara satu dengan lainnya. Kedua, perubahan itu ditandai dengan perubahan fungsi di dalam sistem tanda, seperti sebutan “agamis” menjadi “militan”, “kriminalitas” menjadi “pemberontakan”, “dalit” (*untouchable*) menjadi “harijan” (*child of God*) dan sebagainya. Singkatnya, sebagaimana uraian Gayatri Chakrovarty Spivak, apa yang dilakukan itu adalah usaha untuk memroduksi analisis sejarah oleh kelompok yang dianggap marginal atau subaltern, untuk selanjutnya ditempatkan sebagai subyek sejarah.²³

Dua distingsi di atas dan kalimat terakhir itu mengingatkan kita pada dekolonisasi sejarah yang terjadi pada tahun 1950-an dan mencatatkan nama Sartono Kartodirdjo sebagai orang yang konsisten melakukan upaya itu. Dua karya beliau berjudul *The Peasants' Revolt of Banten in 1888: Its Conditions, Course, and Sequel*, (Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1966) dan *Protest Movements in Rural Java: a Study of Agrarian Unrest in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries*, (Oxford University Press, 1973) menjadi rujukan utama dalam penulisan sejarah petani, sejarah gerakan sosial, digunakannya pendekatan ilmu sosial dalam sejarah, dan bagaimana perspektif Indonesisentris dilakukan.

Buku judul pertama mendiskusikan gerakan sosial pembe-

²³ Gayatri Chakrovart Spivak, “Subaltern Studies: Deconstructing Historiography”, dalam Ranajit Guha dan Gayatri Chakrovart Spivak, (eds), (Oxford University Press, 1988), hlm 3

rontakan petani Banten dalam melawan kekuasaan kolonial Belanda. Melalui kepemimpinan ulama dan elit tradisional Banten para petani itu melakukan perlawanan. Sartono menunjukkan berbagai faktor (*multicausal*) yang melatar-belakangi pemberontakan itu. Pemberontakan yang terjadi merupakan rangkaian dari perlawanan-perlawanan sebelumnya yang terjadi secara terus menerus. Pemberontakan juga disebabkan oleh kemiskinan, tekanan pajak, dan akibat sosial-ekonomi yang ditimbulkan oleh meletusnya gunung Krakatau pada tahun 1883 sebelumnya.

Sementara buku kedua berusaha menunjukkan berbagai tipologi protes petani yang pernah terjadi di Indonesia. Beberapa tipe gerakan itu adalah, gerakan anti penghisapan (*anti-exortion*), harapan akan lahirnya zaman baru (*messianism*), melalui datangnya ratu adil (*messianism*); kebangkitan baru (*revivalism*); gerakan sektarian (*sectarian movement*) yang menolak kemapanan; dan gerakan Sarekat Islam.

Yang menjadi ciri khas dari karya Sartono adalah kuatnya pendekatan sejarah sosial. Masyarakat tani (terutama ketika dilihat aspek perubahannya) dibaca dalam bingkai struktur sosialnya, ideologi yang melingkupinya, lapisan elit-elit, organisasi dan kelembagaan sosialnya, serta saluran kekuasaannya. Aspek sinkronik dan diakronik tersaji di dalamnya. Proses yang merupakan aspek dinamis dari struktur, dan struktur yang merupakan aspek statis dari proses, sama-sama dihadirkan dalam sejarah sosial ala Sartono. Sejarah sosial semacam inilah yang kemudian diikuti oleh para muridnya, sehingga melahirkan sebutan tersendiri untuk menandainya, yakni “Mazhab Sartono” atau “Aliran Bulaksumur”.²⁴

²⁴ Istilah ini muncul dari usulan Harlem Siahaan, salah satu staf pengajar di Jurusan Sejarah UGM dan merupakan salah satu murid Sartono Kartodirdjo,

Pertanyaan utamanya adalah, apa persamaan dan perbedaan antara kajian subaltern para ilmuwan (diaspora) India pada tahun 1980-an dengan apa yang telah dilakukan oleh Sartono Kartodirdjo pada tahun 1960-an/1970-an itu?

Keduanya sama-sama melakukan dekonstruksi dan dekolonisasi sejarah untuk kemudian menghadirkan realitas orang biasa, petani dan kaum miskin pedesaan, ke dalam narasi historis. Subaltern Studies Groups (SSG) berakar pada tradisi Marxian (revisionis) yang diadopsi dari konsep hegemoni Gramsci. Mereka menunjukkan bagaimana lapisan bawah itu, alih-alih melakukan pemberontakan, sama sekali tidak berdaya bahkan “bersuarapun” tidak mampu sebab ada struktur kolonial dan lapisan kasta yang membentengi suara mereka. Tradisi Marxis yang non-ortodoks itu ditunjukkan pula oleh SSG dengan perhatian mereka pada “sistem tanda” dan pengkajian atas karya sastra yang kemudian melahirkan pula kajian postkolonial.

Kajian postkolonial adalah sebuah perspektif yang bertujuan melampaui kacamata kolonial dalam pemahaman kita sekarang. Ini berdasarkan asumsi bahwa kita, saat ini, membawa banyak *cultural baggage* dari sebuah masa yang dinamakan kolonialitas dan oleh karenanya hal itu harus dikritisi. Arah kajian postkolonial justru adalah menggugat “kekitaan-kita” (internal), saat ini, dan bukan seperti historiografi Indonesiasentris yang menghadapkannya pada “kemerekaan” (ektesternal).

Sementara Sartono dalam berbagai karyanya berangkat dari

pada Muker Sejarah VIII di IKIP Malang, 1984. Harlem Siahaan, “Pak Sartono dan Kita”, dalam M. Nursam, dkk. (eds), *Sejarah yang Memihak, Mengenang Sartono Kartodirdjo*, (Yogyakarta: Ombak dan Rumah Budaya Tembi, 2008), hlm. 155

tradisi Weberian yang menekankan pentingnya kepemimpinan (elit) dan ideologi dalam peristiwa pemberontakan itu, dan bukan perhatiannya pada kaum tani (lapisan terbawah mereka) itu sendiri. Nama-nama seperti K. H. Wasid, K.H. Marjuki, K.H. Tubagus Ismail, dll, tarekat Naqsyabandiyah, Qodiriyah, dan ideologi perang suci, menjadi titik perhatian Sartono Katodirdjo, dan bukan pada sentralitas peran petaninya (siapa saja mereka para petani-petani lapis bawah yang turut terlibat dalam pemberontakan itu, apa saja alasan mereka, harapan, dan kesulitan-kesulitannya).²⁵ Petani yang mampu melakukan pemberontakan melalui pengangenan elit dan ideologi tarekat itu tentu tidak tepat jika disebut subaltern. Sejarah sosial Sartono juga bukan berakar dari tradisi struktural Marxian, yang berupaya melihat *mode of capital* bekerja di ranah agraria, tetapi dari kekagumannya atas tradisi yang dikembangkan oleh Mazhab *Annales* di Perancis.

Persamaan yang bisa ditunjukkan adalah, Sartono mampu membongkar bias kolonial dan rezim penguasa dengan cara melakukan dekonstruksi semantik. Kemampuan ini diperoleh dengan cara “menginterogasi” arsip-arsip warisan pemerintahan kolonial Belanda yang ada di Arsip Nasional Jakarta maupun arsip-arsip yang ada di negeri Belanda sewaktu ia menulis disertasinya. Hal ini serupa dengan yang dilakukan oleh SSG dalam memperlakukan “manuskrip-manuskrip” berupa karya sastra India/Inggris.

Dengan posisi semacam di atas, proyek Indonesiasentris Sartono Kartodirdjo itu berhenti pada tataran rekonstruksi dan bukan pada tataran emansipasi. Pasca sejarah petani-nya Sartono

²⁵ Lihat Sartono Kartodirdjo, *Pemberontakan Petani Banteni 1888*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984)

tidak berlanjut pada proyek pemberdayaan kaum tani agar mereka dapat bersuara sendiri. Di sinilah maka tidak mengherankan bahwa perhatian Sartono Kartodirdjo pada awal-awal ia memimpin Lembaga Studi Pedesaan dan Kawasan adalah mengidentifikasi melalui riset survey (1974-1975) berbagai kesenian rakyat di daerah yang potensial dan *compatible* dengan proses pembangunan yang sedang terjadi. Cara mengidentifikasi kesenian itu adalah dengan dilihat dari rata-rata jumlah penonton, unsur yang tidak bisa diubah dalam tontonan, dan pesan yang disampaikan.²⁶ Arah survey itu untuk mengetahui jenis kesenian rakyat apa saja yang dapat digunakan sebagai media menyampaikan pesan-pesan, mengarahkannya pada tujuan-tujuan kolektif dan memolakan sikap berdasarkan nilai-nilai tertentu, yakni kemodernan dan pembangunan. Masalah kepemimpinan dan transisi modernitas ini kemudian menjadi perhatian Sartono lebih lanjut. Dengan itu ia ingin menghadirkan kontribusi perspektif sejarah dalam dinamika gagasan pembangunan Indonesia.²⁷

Dalam tulisan berjudul “Masyarakat Pedesaan dalam Pembangunan: Mengembangkan Teknologi Berwajah Manusiawi”, Sartono tidak berangkat dari kritik atas pembangunan itu sendiri namun melihat apa yang menghambat dari proses pembangunan itu. Ia menyebut bahwa kondisi pedesaan saat ini diliputi dengan *syndrom inertia* dan *syndrome* kemiskinan yang disebabkan oleh kekurangan pemanfaatan sumber daya alam, struktur sosial yang

²⁶ Lihat, Sartono Kartodirdjo dan Mubyarto, *Pembangunan Pedesaan di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty untuk P3PK UGM, 1988)

²⁷ Sartono Kartodirdjo, *Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial*, (Jakarta: LP3ES, 1984); Sartono Kartodirdjo, *Kebudayaan Pembangunan dalam Perspektif Sejarah*, (Yogyakarta: UGM Press, 1987)

masih feodal, dan sistem kepercayaan yang masih berakar pada magi.²⁸ Hal-hal inilah yang dinilai sebagai penghambat pembangunan. Dalam kondisi semacam itu maka diperlukan teknologi yang berwajah manusiawi disertai perubahan kelembagaan, serta yang paling penting adalah, perubahan perilaku dan sikap. Hal terakhir inilah yang dianggap sebagai faktor penentu.

Berhentinya pada tataran rekonstruksi dan bukan proses emansipasi itulah yang cukup menjelaskan mengapa dunia Sartono tidak cukup dekat dengan dunia gerakan pada tahun-tahun 1980-an dan seterusnya. Padahal kajian utamanya tentang gerakan dan protes sosial. Cukup aneh juga ia tidak ambil bagian dalam dinamika kontemporer mengenai gerakan sosial dan isu-isu ketidakadilan yang terjadi pada masyarakat tani Indonesia.²⁹ Hal ini barangkali juga karena karakter pribadi Sartono yang cenderung lebih bergaya akademis murni. Kenyataan semacam itu berbeda sekali dengan generasi-generasi sesudahnya seperti Mubyarto dan Loekman Soetrisno tatkala menggantikan Sartono memimpin lembaga Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan UGM. Sartono benar-benar hidup dalam dunia soliter ilmuwan yang penuh asketisme dan jauh dari hingar bingar gerakan. Ia mempraktikkan perspektif keagenan dan faktor kepemimpinan itu, sebagaimana uraian di atas. Baginya, untuk melawan kekuasaan adalah dengan cara menjaga jarak terhadapnya, bahkan tidak setuju terhadap rezimnya, melalui sikap pribadi asketisnya tersebut, dan bukan melalui gerakan sosial, misalnya.

Selain di atas, tipologi sartono tentang gerakan anti penghisapan (*enti-exortion*), harapan akan lahirnya zaman baru (*millenniarisme*), melalui datangnya ratu adil (*messianism*), kebangkitan

²⁸ Sartono Kartodirdjo, 1987, *ibid*, hlm. 75-76.

baru (*revivalism*) dan gerakan sektarian (*sectarian movement*) yang menolak kemapanan, dan gerakan Sarekat Islam, untuk konteks sekarang dapat dianggap sebagai pendekatan dan pola klasik. Dengan lima tipologi ini ia hanya melakukan analisa atas struktur sosial dan mentalitas dan kebudayaan masyarakat tani. Relasi pusat dan daerah yang menjadi titik tegang dalam sejarah politik, kebudayaan, dan ekonomi, selama masa Orde Baru abai menjadi konteks perhatian Sartono dalam membaca gerakan sosial di daerah. Contoh paling nyata adalah analisa dia terhadap gerakan usroh di Lampung, mengikuti tipologi klasiknya, adalah gerakan mileniarisme. Penelitian lanjutan yang dilakukan oleh Abd. Syukur menjelaskan bahwa gerakan pemberontakan itu terkait dengan relasi pusat-daerah dalam konstelasi politik penindasan Orde Baru. Kajian mutakhir ini sekaligus menunjukkan narasi kehidupan anak-anak muda yang menjadi pelaku gerakan. Mereka berasal dari golongan ekonomi dan pendidikan rendah. Analisa kelas menjadi ulasan yang menarik dalam riset ini.³⁰

Mengenai *anti-exortion*, ia menjelaskan pula bahwa penghisapan terjadi dalam sistem ekonomi perkebunan partikelir (*partikuliere landerijen*). Keresahan terjadi karena adanya berbagai bentuk eksploitasi dalam sewa-menyewa, penanaman, pembagian hasil, dan pengerahan tenaga kerja. Tenaga kerja mengalami alienasi dari ikatan sosialnya tatakala menempati satu areal sistem

²⁹ Cukup aneh pula ia tidak memberi perhatian mendalam terhadap gerakan sosial masyarakat tani tahun 1960-an dan pembantaian massal yang terjadi pasca-1965.

³⁰ Lihat, Abd. Syukur, "Jaringan Lokal Abdullah Sungkar dalam Peristiwa Lampung 1989" dalam Henk Shulte Nordholt, Bambang Purwanto, dan Ratna Saptari (ed.), *Perspektif Baru Penulisan Sejarah di Indonesia*, (Yayasan Obor Indonesia dan Pustaka Larasan, 2008)

perkebunan. Kenyataan semacam ini justru menjadikan mereka semakin merapatkan diri pada konservatisme, seperti xenofobia, eskapisme, supernaturalisme, dan nativisme.³¹

Sedangkan milleniarisme adalah suatu tipe ideal masyarakat akan masa keemasan menjelang yang segera menggantikan ketidakadilan dan kekacauan yang sedang terjadi. Keyakinan semacam ini dimunculkan semakin keras melalui peran pemimpin, baik tradisional (magis) maupun pemimpin agama. Masalah ideologi dan kepemimpinan ini menjadi fokus utama Sartono dalam melihat persoalan agraria pedesaan Jawa. Ia lebih banyak membahas tentang bagaimana para haji, jimat, tubagus, dan senjata-senjata yang digunakan dalam perlawanan ketimbang misalnya, menjelaskan bagaimana modus eksploitasi dan sistem ketenagakerjaan dan kapital bekerja di perkebunan partikelir. Ia memandang bahwa masyarakat pedesaan di masa lampau berada dalam sistem kesadaran historis yang dipegaruhi oleh keyakinan eskatologis, tentang kapan bermula dan kapan berakhir.³²

Membaca buku *Protest Movement in Rural Java* akan lebih menarik jika dilakukan dengan mendialogkannya dengan kajian-kajian mutakhir. Dari sini akan terlihat dimana batasan-batasan dan kelebihannya. Buku ini telah membantu para pengkaji agraria untuk mengenali sistem dan struktur kebudayaan seperti apa yang dimiliki oleh masyarakat tani pada suatu masa dan bagaimana dalam batas-batas itu mereka membuat strategi perlawanan.

³¹ Sartono Kartodirdjo, *Protest Movements in Rural Java: a Study of Agrarian Unrest in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries*, (Oxford University Press, 1973), hlm 5-6.

³² Sartono Kartodirdjo, "Catatan tentang Segi-segi Mesianistis dalam Sejarah Indonesia", dalam *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia, Suatu Alternatif*, (Jakarta: Gramedia, 1984), hlm 202

Pendekatan semacam ini tidak lagi memadai tatkala dihadapkan pada suatu periode yang berbeda atau ketika arah perhatian dihadapkan pada faktor-faktor luar yang mengakibatkan masyarakat tani tercerabut dari ruang hidupnya, agraria, baik dalam sistem tradisional maupun kolonialisme. Selain itu, pendekatan yang masih melekatkan “petani” sebagai identitas diri tidak lagi mencukupi menghadapi perubahan-perubahan di atas.

Noer Fauzi dalam bukunya berjudul “Memahami Gerakan-gerakan Rakyat di Dunia Ketiga”, berusaha “melanjutkan” kajian atas berbagai bentuk gerakan sosial petani. Ia tidak membahas sebatas yang ada di Indonesia, namun di beberapa negara Dunia Ketiga, dengan melihat trend-trend yang terjadi di sana. Penelitiannya memang bukan khusus kajian sejarah, namun cukup membantu untuk mengenali tiga hal, 1) tafsir atas situasi yang dimusuhi; 2) kesempatan politik yang memungkinkan aktor gerakan menetapkan pilihan strateginya; dan 3) pilihan jenis aksi kolektif yang diandalkan.³³ Konteks utama gerakan pedesaan saat ini yang dibaca oleh Noer Fauzi adalah konteks neo-liberalisme. Ini sedikit berbeda dengan konteks gerakan yang ditulis oleh Sartono.

Salah satu yang ingin ditunjukkan oleh Noer Fauzi dalam kasus *Föderation der Indegenen Organisationen des Napo (FOIN)* di Ekuador dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di Indonesia, adalah strategi gerakan yang semula identitas perjuangannya mengatasnamakan “petani”, diubah menjadi identitas “masyarakat adat”. Hal ini tidaklah sederhana. Ia bukan semata-mata karena para pelaku (korban) yang semula adalah

³³ Noer Fauzi, *Memahami Gerakan-Gerakan Rakyat Dunia Ketiga*, (Yogyakarta: Insist, 2005), hlm 7-8

petani yang bercocok-tanam dan menghasilkan bahan pangannya dari tanah adat, berubah menjadi pekerja/buruh yang terlempar dari tanah adatnya sebab “terrambah” oleh pembangunan modern. Akan tetapi karena dirasa ada “syarat perlu dan syarat penting” bagi pilihan strategi ini. Mereka mengubah strategi gerakan rakyat yang semula berbasis pada kelas menjadi berbasis identitas.

Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, “Masyarakat Adat” mengalami berbagai diskriminasi dan peminggiran. Sejak masa Kolonial, mereka di-“persona non grata”kan melalui prinsip *domein verklaring*. Eksistensinya diabaikan. UUPA no. 5/1960 yang merupakan undang-undang pokok juga menempatkan masyarakat adat pada posisi ambigu. Di satu sisi mereka diakui keberadaannya melalui penguasaan atas sumber-sumber daya agrariannya, di sisi lain pengakuan itu disertai catatan, “selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara”. Politik ketatanegaraan, hukum, dan politik kebahasaan (semantik) selama masa Orde Baru juga bersikap diskriminatif bahkan melecehkan. Mereka disebut dengan “masyarakat terasing”, “perambah hutan”, “peladang berpindah”, “masyarakat tradisional”, “populasi yang rentan”, “masyarakat primitif”, dan lain-lain.³⁴ Praktik hegemoni terhadap masyarakat adat bekerja melalui politik kebahasaan semacam itu, yang sudah sangat lazim digunakan di departemen-departemen pemerintahan.

Sebaliknya, argumen yang selalu digunakan dalam strategi perjuangan adalah bahwa masyarakat adat memiliki “kearifan

³⁴ Sandra Moniaga, “Keaslian Suku dari Suku-suku Asli di Indonesia: Dilihat dari Perspektif Siapa?”, dalam Noer Fauzi (ed.), *Tanah dan Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1997), hlm. 235-251.

lokal”, baik yang berkenaan dengan sistem hukum, sosial, budaya, ekologi, pengelolaan dan penguasaan atas sumber daya, penanganan konflik, dan sebagainya. Maka strategi mengatasnamakan “masyarakat adat” di atas identitas “masyarakat tani” itu tidaklah semata-mata tuntutan atas tanah, namun tuntutan atas keberlangsungan kehidupan budaya mereka.³⁵ Dalam bingkai ini, sekaligus adalah tuntutan hak atas kewarganegaraan mereka dalam bangun Keindonesiaan.

Argumen mengenai kearifan lokal juga harus dilihat secara jeli. Apa yang disebut “kearifan” itu seringkali semula merupakan “living tradition”, sesuatu yang dipraktikkan bersama, namun dapat berubah tatkala dikodifikasi, ditunjuk, dan dirujuk. Dalam kodifikasi itu terdapat proses-proses, konteks, kuasa, persaingan berbagai kepentingan yang melingkupinya. Berbagai varian juga ada di dalamnya. Maka artikulasi baru dalam gerakan sosial itu juga harus memahami problem internal tersebut, sembari terus mengembangkan alat pengenalan proses-proses pemusatan kekuasaan, baik dalam bidang politik, ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan, ideologi, dan bahasa, yang mengakibatkan terjadinya marjinalisasi masyarakat adat, baik antar diri sendiri maupun dari luar. Hal-hal semacam di atas berada di luar jangkauan kajian Sartono Kartodirdjo. Pasca otoritarianisme (rezim Orde Baru) cara melihat masyarakat adat versus sentralisme (hukum) nasional, dan kekuatan ekonomi-politik kapitalisme global ataupun lokal, menjadi mungkin dilakukan. Beberapa generasi muda mulai bermunculan dalam kajian tersebut.³⁶

³⁵ Noer Fauzi, 2005, *op.cit.*, hlm. 62

³⁶ Selain yang telah disebut di atas, beberapa kajian mereka dapat dilihat dalam publikasi berikut, Jamie S. Davidson, David Henley, dan Sandra Moniaga,

5. Mendiskusikan Isu-isu Agraria

“.....Sartono, dalam perjalanannya itu, terkadang ia melihat bagaimana petani di kampungnya menjual gableknya kepada tengkulak dengan harga yang sangat rendah. Melihat itu, Sartono ketika itu belum bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa sedih melihat para petani itu diperlakukan sewenang-wenang oleh tengkulak. Kesedihan hati Sartono bisa menunjukkan simpati dan kepekaan sosial atas lingkungan sekitarnya”. (M. Nursam, 2008: 37)

Demikianlah Sartono Kartodirdjo menyaksikan penderitaan rakyat kecil di hadapan bangsanya sendiri, orang-orang Indonesia, yang dalam struktur dan sistem tertentu melakukan tindakan yang merugikan bagi kaum lemah. Di bawah ini akan disajikan hasil identifikasi isu-isu agraria yang dibahas oleh Sartono Kartodirdjo.

a) Tentang Sistem Tanam Paksa

Sartono menggunakan istilah tanam paksa untuk menyebut *cultuurstelsel*. Ia berpendapat bahwa tanam paksa terjadi melalui persetujuan-persetujuan dengan rakyat. Pelaksanaan sistem ini melalui penyerahan seperlima dari tanah rakyat. Rakyat masih diperbolehkan mengerjakan tanahnya untuk tanaman pangan bahkan ada aturan penanaman paksa tidak boleh melebihi pekerjaan menanam. Areal yang terkena kebijakan ini mendapat pembebasan dari pajak tanah. Dalam penyerahan hasilnya, terdapat selisih positif

(eds.), *Adat dalam Politik Indonesia*, (Jakarta: KITLV dan Yayasan Obor Indonesia, 2010); Myrna A. Safitri dan Tristam Moeliono, (eds.), *Hukum Agraria dan Masyarakat di Indonesia*, (Jakarta: Huma, Van Vollenhoven Institute, dan KITLV-Jakarta, 2010). Kajian mereka terhadap masyarakat adat sedikit banyak berangkat dari pemikiran-pemikiran Van Vollenhoven.

antara nilai tanaman-tanaman ekspor dan pajak tanah kepada rakyat. Kerugian-kerugian yang diderita akibat kegagalan panen ditanggung pemerintah.³⁷

Berbeda dengan sejarawan yang lain, Sartono tidak demikian saja menampilkan gambaran negatif terhadap sistem tersebut, sebab pada hakekatnya apa yang disebut sistem ini memperoleh variasi lokal pada ruang agraria di daerah-daerah serta tergantung dengan pelaksananya.³⁸ Sartono yang menjadi perintis dari historiografi Indonesiasentris namun dia pulalah yang cukup kritis terhadapnya.

b) Nasib Petani pada Zaman Liberal dan *Malaise*

Penduduk Jawa lebih banyak lagi didorong ke dalam ekonomi uang karena hilangnya matapencaharian mereka yang tradisional. Hal ini memaksa mereka untuk mencari pekerjaan pada perkebunan-perkebunan besar yang dimiliki oleh Belanda dan lain-lain orang Eropa. Meskipun demikian, pada umumnya respons penduduk di Jawa terhadap meluasnya ekonomi-uang adalah pasif, artinya mereka untuk sebagian besar tetap tergantung dari mata pencaharian di bidang pertanian, dan hanya berusaha untuk melengkapi pendapatannya yang diperoleh dari hasil-hasil pertanian jika pendapatan ini tidak mencukupi. Para petani di Jawa juga

³⁷ Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid IV: Indonesia Dalam Abad 18 dan 19*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975).

³⁸ Lihat, Robert van Niel, "Warisan Sistem Tanam Paksa bagi Perkembangan Ekonomi Selanjutnya", Robert van Niel, *Sistem Tanam Paksa di Jawa*, (Jakarta: LP3ES, 2003), hlm. 254

mulai mencari pekerjaan di luar bidang pertanian, akan tetapi ini hanya mereka lakukan jika diperlukan, misalnya untuk membayar pajak tanah atau untuk membeli barang-barang konsumsi impor.³⁹

Beberapa penyebab menurunnya kemakmuran penduduk Jawa pada awal abad 20 adalah pertama-tama, jumlah penduduk Jawa telah meningkat dengan sangat pesat dalam abad kesembilanbelas. Penggunaan peralatan pertanian yang lebih efisien sementara para petani rata-rata sangat kekurangan modal sebagai akibat kemiskinan mereka. Mereka menjadi tersingkir akibat kehadiran alat pertanian modern itu. Selain itu adalah akibat politik pemerintah kolonial terhadap pulau Jawa pada masa Liberal. Penduduk Jawa pada akhir abad 19 menderita perpajakan yang sangat regresif, artinya sangat memberatkan golongan yang berpendapatan rendah, yang untuk bagian yang terbesar terdiri dari orang-orang Indonesia pribumi. Di lain pihak sistem ini sangat meringankan golongan yang berpendapatan tinggi, yang untuk sebagian besar terdiri atas orang-orang Eropa. Maka yang terjadi adalah bukan pemerintah kolonial yang berbuat sesuatu untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, akan tetapi justru sebaliknya rakyat Indonesia dipaksakan untuk membantu pemerintah kolonial.

³⁹ Sartono Kartodirdjo, dkk., *op.cit.*, hlm 91-92. Mengenai kajian jenis pekerjaan di luar pertanian pada awal abad 20 dilanjutkan oleh koleganya di Jurusan Sejarah UGM, Machmoed Effendhie dkk., “Aktifitas Non-farm di Pantai Utara Jawa pada Awal Abad xx”, dalam Tim SP4, *Jawa Abad XX, Perkebunan dan Dinamika Pedesaan*, (Yogyakarta: Unit Penerbitan Jurusan Sejarah UGM, 2005), hlm. 31-129

c) Perkebunan di Negara-negara Berkembang

Buku berjudul *Sejarah Perkebunan Di Indonesia: Kajian Sosial-Ekonomi* karya duet Sartono Kartodirdjo dengan Djoko Suryo merupakan karya yang paling sering dirujuk para aktivis gerakan agraria.⁴⁰ Buku ini memberi pemahaman sistem perkebunan yang terbentuk sejak abad 19 hingga nasib perkebunan pada tahun 1960-an. Menurut mereka berdua, pada mulanya kebun sering merupakan usaha tambahan atau pelengkap dari kegiatan kehidupan pertanian pokok, terutama pertanian pangan secara keseluruhan. Sistem kebun biasanya diwujudkan dalam bentuk usaha kecil, tidak padat modal, penggunaan lahan terbatas, sumber tenaga kerja berpusat pada anggota keluarga, kurang berorientasi pada pasar, dan lebih berorientasi pada kebutuhan subsisten.

Ciri pokok “sistem kebun” semacam itu sekaligus menjelaskan ciri umum dari usaha pertanian masyarakat agraris yang masih subsisten. Sebaliknya, “sistem perkebunan” diwujudkan dalam bentuk usaha pertanian skala besar dan kompleks, bersifat padat modal (*capital intensive*), penggunaan areal pertanian luas, organisasi tenaga kerja besar, pembagian kerja rinci, penggunaan tenaga kerja upahan (*wage labour*), struktur hubungan yang rapi, dan penggunaan teknologi modern, spesialisasi, sistem administrasi dan birokrasi, serta penanaman tanaman komersial (*commercial crops*) untuk komoditi ekspor di pasaran dunia. Sistem per-

⁴⁰ Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial-Ekonomi*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1991)

kebunan dengan demikian merupakan bagian dari kegiatan perekonomian modern, yang berasal dari dunia barat. Kehadirannya di negara-negara berkembang pada umumnya berhubungan erat dengan proses kapitalisme, kolonialisme, dan modernisme.⁴¹

Secara cermat dan tajam keduanya mengatakan bahwa sistem perkebunan memiliki peranan penting dalam proses eksploitasi dan ekstraksi kolonial. Pendirian perkebunan di negara-negara jajahan berkembang sering diikuti dengan kecenderungan pengambil-alihan tanah-tanah milik penduduk pribumi, dan perubahan basis ekologi pertanian subsisten yang ada sebelumnya. Penggambaran semacam ini masih cukup valid untuk melihat keberadaan perkebunan di masa kini. Sistem perkebunan yang menggunakan tanah melalui sewa (*erfpacht*) atau HGU pada tahun 1960-an melalui UUPA akan diakhiri secara perlahan-lahan atau dikuasai oleh pemerintah (nasionalisasi) dengan kepemilikan aset di tangan rakyat. UUPA sendiri berupaya membatasi keberadaan perkebunan melalui pemberian ijin HGU selama 25-30 tahun untuk selanjutnya dinasionalisasi.⁴²

d) Sistem Ekonomi Dualistis

Menurut Sartono, ekonomi dualistis bukanlah kondisi linearitas sejarah bahwa di satu sisi terdapat ekonomi tradisional, subsisten, yang belum menapaki ke arah modern, sehingga diorientasikan ke arah itu. Atau juga bukan ketika masih saling bertahannya kedua jenis ekonomi ter-

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 3

⁴² Lihat UUPA tahun 1960, pasal 29 dan 30

sebut sebagai bukti tidak saling mengganggu dan merusaknya masing-masing sistem sebagaimana dikemukakan Boeke, akan tetapi justru, menurut Sartono, ekonomi dualistis adalah bukti keterlemparan satu pihak terhadap pihak yang lain.⁴³ Analisa historis semacam ini berkeseuaian dengan pandangan mutakhir yang disampaikan oleh Borras melalui *Pandangan Relational-nya*, bahwa kemiskinan diterangkan justru sebagai akibat integrasi masyarakat tani lebih jauh ke dalam perekonomian dominan.⁴⁴ Apa yang disebut dengan ekonomi dominan dalam sejarah Indonesia adalah ekonomi dalam sistem perkebunan. Sistem ini memiliki peranan penting dalam proses eksploitasi dan ekstrasi kolonial. Dikotomi sektor modern-tradisional membenarkan hubungan eksploitatif antara penguasa kolonial dan tanah jajahan. Eksploitasi sumberdaya tanah dan tenaga kerja yang melimpah di sektor tradisional untuk penyelenggaraan produksi pasaran Eropa menjadi kebijaksanaan politik perekonomian kolonial. Komoditas tertentu yang dihasilkan dalam produksi perkebunan serta dilakukan dalam sistem tertentu (*non-enclave*, misalnya) justru mempertahankan ekonomi tradisional dan ekonomi persawahan sebagai katup penyelamat bagi tenaga kerja perkebunan. Bagi perkebunan, hal itu tentu menguntungkan karena dapat menekan biaya tenaga kerja mereka.

⁴³ *op.cit.*, hlm 8

⁴⁴ Saturnino Jr. Borras, *Agrarian Change and Peasant Studies: Changes Continuities and Challenges An introduction*. Journal of Peasant Studies, Juni 2009.

Sartono memberi ilustrasi bagaimana antara sistem modern perkebunan memanfaatkan sistem kekuasaan tradisional. "Di daerah Priyangan ini, kopi ditanam di kebun-kebun yang dibuat di tanah-tanah hutan yang belum dibuka, yang dikerjakan dengan menggunakan pekerja wajib. Organisasi pelaksanaannya diserahkan kepada para bupati, dan dilakukan menurut sistem feodal. Sekalipun demikian VOC juga mengangkat beberapa orang pengawas Belanda untuk mengawasi jalannya produksi dan penyerahannya kepada VOC termasuk mengawasi penguasa-penguasa pribumi. Melalui sistem paksa penduduk diwajibkan untuk mengerjakan pekerjaan rodi untuk pembukaan lahan, penggarapan lahan, penanaman biji kopi, pemeliharaan, dan pemanenan, serta pengangkutan produksi dari kebun ke tempat penimbunan yang telah ditetapkan. Dari kopi yang diserahkan penduduk setempat, bupati kemudian meneruskannya untuk diserahkan kepada pihak VOC, sebagai produksi penyerahan wajib. VOC memberikan perhitungan pembayaran biaya penanaman, pengangkutan, dan kelebihan jumlah dari yang ditetapkan, serta premi bagi bupati sendiri. Menurut ketentuan bupati meneruskan pembayaran kembali itu kepada penduduk yang bersangkutan melalui pegawai yang ada di bawahnya. Sistem penanaman wajib atau paksa yang dilakukan VOC di daerah Priyangan mendatangkan keberhasilan besar dalam mendatangkan produksi kopi yang berlaku di pasaran Eropa, sehingga mampu mengungguli kopi dari Yaman, yang semula menjadi daerah ekspor kopi untuk pasaran Eropa. Pelaksanaan penanaman kopi paksa yang dilakukan di Priyangan itu kemudian dikenal menjadi Sistem Pri-

yangan(*Prijanganstelsel*)".⁴⁵

e) Tentang Tanah Partikelir

Menarik mengikuti analisisnya tentang tanah partikelir. Sartono dan Djoko Suryo menunjukkan bahwa VOC sebagai "armada dagang" melakukan penyelenggaraan persewaan desa dan tanah partikulir (*Particuliere Landerijen*).⁴⁶ Praktek persewaan desa dilakukan dengan cara menyerahkan sejumlah desa kepada orang-orang Cina dengan pembayaran uang sewa. Desa-desa itu disewakan dalam jangka waktu tertentu, misalnya, 3, 5, 8, atau 10 tahun. Selama jangka waktu persewaan itu, pihak penyewa memiliki kekuasaan untuk menarik penghasilan dari desa itu, yang semula diserahkan kepada pemerintah. Hak atau kekuasaan itu diartikan secara luas, sehingga penyewa dapat menuntut penyerahan hasil bumi, misalnya beras dan hasil tanaman lain, dan jasa dari penduduk desa setempat. Bentuk persewaan semacam itu juga dikenal di daerah kerajaan, yang biasanya dilakukan oleh pemegang tanah *apanage* (lungguh/tanah jabatan).

Disebutkan pula bahwa pada akhir abad ke 18 terjadi praktek persewaan desa secara besar-besaran. Pada sekitar tahun 1800, VOC menyewakan sejumlah desa-desa di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah sekitar Batavia (Jakarta), kepada orang-orang partikelir (swasta). Dilaporkan pada

⁴⁵ *Ibid.* hlm 34

⁴⁶ Bandingkan keberadaan armada dagang VOC dengan berbagai perusahaan *Transnational Corporation* atau *Multinational Corporation* saat ini ,atau perusahaan parastatal seperti perhutani dan PTPN.

tahun 1776, di daerah pantai utara Jawa bagian timur terdapat 1134 desa yang disewakan VOC kepada orang asing (Cina). Di daerah yang sama, pada tahun 1803, disebutkan bahwa dari 16.083 desa terdapat 1146 (96%) yang disewakan kepada orang-orang partikelir, terutama kepada orang Cina. Selain beras, daerah pedesaan yang disewakan itu menghasilkan produksi gula, garam, nila, lada dan lainnya. Desa persewaan juga banyak yang digunakan untuk kepentingan usaha penanaman dan penggilingan tebu. Penanaman dan usaha penggilingan tebu itu banyak dijumpai di daerah desa persewaan, misalnya, di daerah Jepara, Juana, Cirebon, dan sekitar Batavia. Usaha ini banyak dilakukan oleh orang Cina.⁴⁷

Tanah partikelir nyaris menjadi negara dalam negara. Di dalam sistem itu ada penduduk, aturan-aturan, penguasa, bahkan kelembagaan desa di dalamnya. Ironis sekali, meskipun sistem tanah partikelir telah dihapuskan pada awal kemerdekaan, namun eksistensinya bermetamorfosa menjadi sistem baru bernama “Kawasan Hutan” yang rezim penguasaannya di bawah departemen kehutanan atau Perhutani. Sistem ini memandang hutan sebagai ruang yang mencakup di dalamnya masyarakat adat, bukan sebaliknya, masyarakat adatlah yang sejak zaman dahulu memandang hutan sebagai ruang hidup sekaligus sumber penghidupan dalam mereka mencari pangan. Akibatnya, pengusiran terhadap masyarakat terjadi. Tatkala kawasan itu dilakukan eksploitasi (*logging* atau penambangan) maka bisa dilakukan *tukar guling* dengan masyarakat adat atau sekaligus

⁴⁷ *Ibid.*, hlm 38-39

mengusirnya. Hal demikian menyerupai jual beli tenaga kerja di dalam tanah partikelir.

Dari beberapa contoh isu agraria yang disajikan di atas terlihat bahwa nasib kehidupan agraria Indonesia belum berubah dari gambarannya di era kolonial bahkan lebih buruk darinya. Modus perusakan yang dilakukan oleh sistem ekonomi kapital asing maupun domestik terjadi dengan cara-cara yang semakin canggih dalam bentuk sistem ekonomi, peralatan, dan sistem pengetahuannya. Negara sebagai pengurus negeri seakan-akan absen menghadang modus perusakan itu terjadi. Bahkan seringkali negara turut memfasilitasinya. Entah bagaimana dengan kalangan akademisnya.

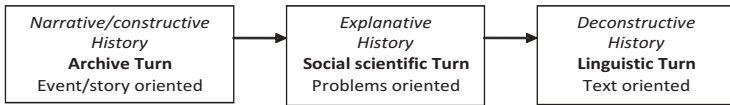
C. Penulisan Sejarah Indonesia: Mmenuju “The New History”

Dalam bagian terakhir ini akan disajikan tawaran penulisan sejarah Indonesia baru sebagai alternatif dari penulisan lama. Penulis tidak berpretensi bahwa bentuk penulisan ini belum ada, namun justru apa yang disebut baru ini berangkat dari penulisan yang telah ada disertai dengan tafsir dan cara pandang lain.

Menurut Kuntowijoyo perkembangan historiografi Indonesia bergerak dalam 3 gelombang.⁴⁸ Gelombang pertama terjadi tatkala dilakukan dekolonisasi pengetahuan sejarah dari Neerlandosentris menuju Indonesia-sentris pada acara Seminar Sejarah Nasional I, Yogyakarta, 1957. Gelombang kedua adalah ketika digunakannya *social scientific approach* dalam penulisan sejarah, hasil dari pertemuan Seminar Sejarah Nasional II,

⁴⁸ Kuntowijoyo, *Indonesian Historiography in Search of Identity*, Humaniora, No. 1, 2000.

Yogyakarta, 1970. Pendekatan ini menekankan pada *problem oriented*. Gelombang ketiga menempatkan sejarah sebagai kritik sosial. Ia kritis dalam prosedur keilmuwan, namun sekaligus fungsional dalam masyarakat sebagai kritik sosial. Dalam skema lain, perkembangan wacana sejarah setelah dikenal “the New History” dan “deconstructive history”, digambarkan sebagai berikut.



Awalnya rekonstruksi sejarah didasarkan pada penggunaan naskah-naskah kuno, kemudian ia dibaca secara kritis (sebagaimana kajian Husein Djajadiningrat tentang sejarah Banten). Pembacaan atas arsip kolonial pada gilirannya juga dikaji secara kritis akan bias-bias kolonialisme-nya. Kemudian dilakukan upaya penghadiran orang-orang Indonesia sebagai aktor sejarah. Periode kedua ini berada dalam semangat penulisan sejarah Indonesiasentris. Bentuk kongkrit yang dilakukan adalah dengan memperkaya studi-studi sejarah lokal atau pengadaan proyek sejarah lisan di berbagai universitas, lembaga arsip, dan lembaga terkait di daerah-daerah.

Sub-bab tulisan akhir ini ingin melihat semangat “the New History” dalam sejarah Indonesia, sudahkah dilakukan dan bagaimana kemungkinannya untuk dikembangkan. Akan diuraikan terlebih dahulu awal munculnya sejarah baru itu, kemudian dicoba untuk melihat kasus perkembangan penulisan sejarah di Indonesia.

“The new history” berkembang pada decade 1970-an-1980-an terutama dalam sejarah Jepang, Amerika Latin, dan India. Akan tetapi, penyebutan serupa juga dikenal pada periode lain,

satu identifikasi yang sering dikenakan pada aliran Lucien Febvre dan Marc Bloch melalui jurnal *Annales* (: laporan sejarah tahunan) pada tahun 1929.⁴⁹ Jika yang dimaksud adalah aliran Amerika, maka sering disebut dengan “The New History”. Aliran ini muncul tahun 1912 dengan tokoh utama James Harvey Robinson. Sementara dalam historiografi Perancis itu penyebutannya adalah “new kind of history”.⁵⁰ Ada beberapa pengertian tentang “The New History”. Kebaruannya dapat dilihat dari tiga sisi: kebaruan metodologinya yang menyangkut perdebatan epistemologi, kebaruan tematiknya, dan kebaruan “alamiah”, yakni dari sisi periode kajiannya. Kebaruan terakhir tidak termasuk dalam pembahasan ini sebab ia adalah *contemporary history* yang tanpa perlu dipersoalkan.

Menurut Peter Burke dalam *New Perspective on Historical Writing*, kontras antara “sejarah lama” dengan “sejarah baru” setidaknya dapat dilihat dari 7 hal sebagai berikut.⁵¹ Dari pencirian terhadap sejarah baru ini, akan dicoba melihat kasus Indonesia sejauh yang diketahui.

1. Sejarah lama senantiasa berada dalam bingkai politik

Seperti yang dikatakan oleh sejarawan Sir John Seeley, seorang profesor sejarah di Cambridge University, “History is past politics, politics is present history”. Politik dalam pengertian tradisional itu adalah berkisar seputar kelembagaan pemerintah (*official*), kepartaian, dan semacamnya, bukan politik dalam

⁴⁹ Peter Burke, *New Perspective on Historical Writing*, Oxford: Polity Press, 2001, hlm. 7

⁵⁰ Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm. 9

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 3-6

pengertian “kekuasaan yang menggejala” sebagaimana Michel Foucault. Meskipun mengambil tema politik, pastinya ia bisa dilihat pula secara sosial atau kultural. Kajian Herbert Feith dalam *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*⁵² menginspirasi kita untuk melihat gambaran praktik-praktik kampanye pemilu sampai dengan hari dilakukannya *voting*. Jaringan kekerabatan, etnisitas, dan profesi, yang dimanfaatkan dalam meraih dukungan suara pemilu daerah beberapa tahun yang lalu bisa menjadi kajian menarik. Dari pemilu 1955 kita dapatkan cerita-cerita yang masih diingat penduduk, mengenai bagaimana terjadi persaingan antara NU dan PKI dalam melakukan kampanye. Kelompok NU melakukan “kampanye qauliyah” berupa rapat-rapat dan pidato, sekaligus “kampanye fi’liyah” seperti membantu upacara-upacara siklus kehidupan sebagai proses pengintegrasian praktik berpolitik dalam aktifitas keseharian masyarakat. Hal demikian juga dilakukan oleh kelompok PKI.⁵³

Demikian juga bila kita ingin mengkaji kehadiran VOC di Indonesia. Ia dapat dilihat dari segi sosialnya, bagaimana misalnya ribuan anggotanya meninggal disebabkan penyakit tipus, malaria, disentri, dan beriberi yang mewabah di Batavia pada tahun 1700-an. Pada tahun 1733 disebutkan bahwa sekitar 85.000 anggota VOC menjadi korban keganasan penyakit malaria (*tertiana* dan *tropica*) yang tumbuh subur di *fishpond* (empang) sebagai *breedinghouse*-nya. Bagaiman melihat VOC dari sudut

⁵² Herbert Feith dalam *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1999).

⁵³ Kenangan tentang praktik-praktik semacam itu bisa dibaca di berbagai tulisan biografi, misalnya Moch. Eksan, *Kiai Lelono, Biografi K. H. Muchith Muzadi*, Yogyakarta: LKiS, 1999.

sejarah sosial ini cukup menarik. Armada dagang ini memiliki sekitar satu juta personel pria selama 2 abad di kawasan Asia (India, Bengal, Srilanka, dan Deshima-Jepang). Armada ini dilengkapi dengan fasilitas peradilan, kesehatan, sekolah, gereja, dan sebagainya.⁵⁴ Bagaimana mereka para pelayar, tentara, dan pengrajin yang tidak disertai para perempuan itu menyalurkan hasrat seksualnya dan lain-lain? Hal demikian menarik pula diperhatikan.

2. Sejarawan tradisional menganggap bahwa sejarah adalah narasi peristiwa

Pada pertengahan abad yang lalu, kita dapat melihat bahwa kajian sejarah tidak harus dibaca secara demikian. Ferdinand Braudel dalam *Laut Tengah dan Dunia Sekitarnya pada Zaman Phillipis II* mendasarkan analisisnya pada struktur yang mengatasi peristiwa di atasnya. Sebagaimana tersaji dalam tabel sub-bab terdahulu, tampak bahwa lapisan geografi dapat mempengaruhi ekonomi (keadaan cuaca, harga hasil bumi, intensitas transportasi, dan sebagainya), namun tidak sebaliknya (depresi ekonomi tidak mengakibatkan musim panas). Akibat dari pandangan ini arti kausal dari lapisan ketiga tidak terlalu dipentingkan dalam bukunya itu.

Dalam kasus Indonesia, seorang sejarawan-geografi Australia, Lesley Potter berusaha menggunakan pemetaan di atas dalam melihat realitas Orang Banjar di dan di Luar Hulu Sungai, Kalimantan Selatan. Ia melihat bahwa terdapat hubungan yang erat antara struktur konstant geografi (tanah *alluvial* dan rawa-rawa

⁵⁴ Lihat Peter H. Van der Brug, "Unhealthy Batavia and the Decline of The VOC in Eighteenth Century", dalam Kees Grijn dan Peter M. Nas, *Jakarta-Batavia, Socio-cultural Essays*, Leiden: KITLV Press, 2000, hlm. 43-74

dengan tingkat keasaman tinggi, pasang surut aliran sungai Barito-Kapuas, iklim, tanah terbuka dataran tinggi, dll), dengan aspek konjunktural berupa ekonomi, dan pola migrasi, serta aspek *eventless/occurrences* (peristiwa per-peristiwa) yakni politik (perang Banjar dan konflik internal elit lokal), dalam melakukan penjelasan atas dinamika sejarah orang Banjar baik di Hulu sungai maupun di luarnya. Ketiga hal itu saling mempengaruhi satu sama lain secara acak, dan bukan secara kausalitas linear. Dengan meletakkan pada pemetaan di atas, studi atas kemandirian budaya, peluang ekonomi dan mobilitas orang Banjar yang disajikan oleh Potter dapat dipahami secara baik.⁵⁵

Demikian juga kajian Denys Lombard dalam *Nusa Jawa Silang Budaya* dalam 3 jilid yang mengupas Jawa berdasarkan pembongkaran atas 3 lapis/ nebula peradaban yang mempengaruhinya; Hindu-Budha-India; China dan Islam; serta Barat. Suatu kajian yang komprehensif meskipun mengabaikan aspek politiknya dan lebih condong pada aspek kultural.

Bagaimana bila perspektif struktural di atas dihadapkan dengan aspek *humanity* dalam sejarah, dalam pengertian bagaimana seharusnya menghadirkan sisi kemanusiaan dalam sejarah? Asumsi dasar kajian sejarah adalah “bahwa segala sesuatu mengalami perubahan”, baik perubahan yang terjadi pada manusia dan pada alam: tumbuhan dan hewan. Di UGM dan beberapa universitas lain, kajian sejarah dimasukkan dalam bidang *Humaniora*. Manusianyalah yang menjadi fokus kajian. Aspek-aspek

⁵⁵ Lesley Potter, “Orang Banjar di dan di Luar Hulu Sungai, Kalimantan Selatan, Studi tentang Kemandirian Budaya, Peluang Ekonomi dan Mobilitas”, dalam Thomas Lindblad, *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia*, Jakarta: PSSAT-UGM dan Pustaka Pelajar, 2000, hlm. 370-418

perubahan yang terjadi di alam dikaji melalui disiplin biologi, zoologi, dan geografi/geologi. Dengan meminjam perspektif di atas, menurut saya hal-hal semacam di atas juga menjadi variabel penjelas terhadap dinamika sejarah manusia, dari sejarah antroposentris menuju sejarah eco-antroposentris.

3. Sejarah tradisional menawarkan suatu sudut pandang dari atas (*history from above*)

Dalam kajian sejarah tradisonal, jikapun narasi “masyarakat biasa” disajikan, tak lebih mereka adalah pantulan dari aktor (hero) dalam gerak sejarah. “History from below” yang ditawarkan oleh sejarah baru menghadirkan “ordinary people” dalam pengalaman sosial mereka sendiri. Yang menjadi persoalan adalah, apakah orang-orang biasa itu dapat berbicara sendiri, menuliskan sejarahnya, atautkah ia butuh “keagenan intelektual”? Dipesh Chakrabarty dalam tulisannya berjudul “Can Subaltern Speak” menunjukkan pentingnya keagenan. Pendapat ini kemudian dikritik oleh Benita Parry yang menunjukkan bahwa keagenan itu tidak selamanya benar, sebab mereka (perempuan-perempuan itu) “menuliskan” sejarah dirinya melalui keberadaannya sebagai penyembuh, asketik, penyanyi lagu-lagu sakral, perajin, dan seniman.⁵⁶

Hal lain adalah, keliru menyamakan *ordinary people* dan kelompok marjinal dengan minoritas. Bisa jadi yang disebut sebagai minoritas secara “budayawi”, tidak menjadi minor secara ekonomi dan politik. Sebagai contoh adalah orang Tionghoa di perkotaan saat ini kita sebut sebagai minoritas (dalam arti

⁵⁶ Ania Loomba, *Kolonialisme, Pascakolonialisme*, (Yogyakarta: Bentang, 2003), hlm. 302-303

demografis), namun tentu saja bukan dalam pengertian ekonomi-politik, yang justru pada masa Orde Baru mendapat akses langsung ke kekuasaan. Secara sosial mereka justru rentan.⁵⁷ Hal demikian senantiasa menyadari bahwa tidak sedikit pula kelompok Tionghoa miskin di pedesaan, sebagai buruh tambang di Singkawang atau di pedalaman Riau misalnya.

Demikian maka kajian terhadap kelompok orang kaya, atau *middle class* tidak mungkin diletakkan dalam konteks kajian minoritas atau marjinal. Penulisan terhadap mereka hanya bisa diwadahi dalam spirit sejarah yang bernuansa *humanity, humanity history* atau *history on humanity*. Semua kelompok masyarakat mempunyai masa lalu, dan masa lalu orang kaya berhak pula direkonstruksi. Tulisan berjudul *Orang Kaya di Jakarta Tahun 1994, Seorang Ibu dan Dua Puteri*, adalah contoh yang tepat.⁵⁸ Tulisan ini memberi inspirasi kita melihat bagaimanakah proses menjadi kaya, gambaran kehidupan sehari-hari orang kaya, bagaimana kekayaan itu dibelanjakan dan menjadikan identitas bagi mereka, dan sebagainya.

4. Paradigma tradisional meyakini bahwa sejarah didasarkan pada “the documents”

Ungkapan Ranke (1795-1886) yang sering dikutip adalah “no document no history”. Dokumen-dokumen resmi pemerintah yang disimpan di lembaga arsip-arsip menjadi sumber yang diandalkan waktu itu. Sementara “Sejarah Baru” bersikap terbuka

⁵⁷ Lihat Richard Robinson, *Indonesia The Rise of Capital*, (Singapore : Kin Hup Lee. Printing Co. 1986).

⁵⁸ Lizzy van Leeuwen, “Orang Kaya di Jakarta Tahun 1994, Seorang Ibu dan Dua Puteri”, dalam Henk Schulte Nordholt (ed.), *Outward Appearances, Trend, Identitas, Kepentingan*, (Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm. 495-532

untuk memperlakukan sumber-sumber beragam lainnya sebagai “materi sejarah”; data lisan, visual art, patung, diorama, foto, film, bunyi, bangunan, sikap (*manner and style*), dan juga data statistik, dan lain-lain.

Ranke bisa dianggap telah mengingkari metode “klasik” sejarah, yakni metode Herodotus atau Thucydides (Bapak Sejarah Dunia) ketika menulis perang Peloponnesia. Mereka melakukan wawancara terhadap para prajurit yang terlibat dalam perang tersebut. Sejak saat diyakininya dokumen sebagai sumber satu-satunya yang paling valid, maka penulisan sejarah mengalami kemunduran. Namun, setelah Allan Nevins dari Columbia University pada tahun 1948 menggunakan metode Sejarah Lisan dalam merekonstruksi masa lalu kulit putih Amerika, Sejarah Lisan mulai kembali mengalami kemajuan. Disusul dengan Paul Thompson dalam bukunya berjudul *Voice of The Past, Oral History*, metode Sejarah Lisan mengembalikan posisi pentingnya, dan membuka potensi rekonstruksi atas masa lalu lebih mudah dilakukan.⁵⁹ Penulisan sejarah semacam ini (khususnya banyak menggali aspek sosial) mulai berorientasi pada penulisan sejarah yang beragam, dari lapisan bawah atau “history from below, history from within”. Dengan upaya ini usaha pendemokratisan dalam sejarah dilakukan.

Dalam karya itu, Thompson mencontohkan bagaimana karya-karya George Ewart Evans misalnya, sejarawan ekonomi yang banyak membahas kegiatan ekonomi masyarakat Inggris di masa lalu, bisa dihadirkan dari sudut pandang rakyat. Ia melakukan penelitian mengenai pertanian masyarakat East Anglian:

⁵⁹ Paul Thompson, *The Voice of the Past, Oral History*, (Oxford University Press, 1978),

tentang metode-metodenya, dari pertanian dengan tenaga uap yang besar kepada pertanian bertanah kecil, ekonomi sapi dan jagung, pedagang, petani dan buruh tani. Penelitian itu tersaji dalam dua bukunya berjudul “The Horse in the Furrows, The Farm and the Village” dan “Where Beards Wag All”. Ada sesuatu yang menarik dari sisi perekaman. Ia menunjukkan bagaimana dialek buruh pertanian Inggris kuno dicemooh oleh tuan tanah perkotaan sebab tidak jelas pelafalannya. Buruh itu masih menggunakan struktur tata bahasa Chaucerian yang berbeda dengan Inggris konvensional.

Bukankah salah satu inspirasi Sartono Kartodirdjo adalah buku semacam itu? Melihat proses industrialisasi di Inggris tidak dijelaskan sebagaimana selama ini dengan hadirnya teknologi mesin uap, namun proses itu dihadirkan melalui perhatiannya terhadap peranan para petani dan desa ketika mengalami industrialisasi (meski dalam hal ini ia hanya berdasarkan pada sumber-sumber tertulis): bagaimana desa mengalami monetisasi, tanah dikonversi, dan para petani meresponnya baik secara positif maupun melihatnya sebagai peluang usaha dan seterusnya.

Di Indonesia, penelitian sejarah lisan (baik sebagai metode maupun sebagai sub-disiplin sejarah) telah dimulai oleh ANRI sejak tahun 1972 di bawah koordinator Jose rizal Chaniago (alm.). Serangkaian pelatihan dilakukan untuk menggali sejarah yang masih “kosong” yakni periode 1942-1950 (mengingat revolusi sosial menghancurkan banyak dokumen resmi dan masih banyaknya ingatan masyarakat yang belum digali tentang periode itu).⁶⁰

⁶⁰ Asvi Warman Adam, “Sejarah Lisan di Asia Tenggara, Sejarah Korban di Indonesia, dalam P. Lim Pui Huen, *Sejarah Lisan di Asia Tenggara*, (Jakarta: LP3ES, 2000), hlm xix

Di UGM pada tahun 1989-1990 Kuntowijoyo telah mengembangkan sejarah lisan sebagai sejarah alternatif dalam mengungkap kehidupan buruh dan mandor di pabrik gula Colomadu dekat Surakarta.⁶¹ Terdapat serangkaian wawancara yang dihasilkan dalam proyek yang melibatkan jurusan Sejarah UGM dan PAU-UGM itu, yang sampai saat ini menunggu diterbitkan. Sejak saat itu pula sejarah lisan menjadi matakuliah wajib di Jurusan Sejarah UGM dan di jurusan-jurusan lain.

Sejarah lisan telah mendemokratisasi pengetahuan sejarah, "It allows heroes not just from the leaders, but from the unknown majority of the people.It bring history into, and out of, the community".⁶²

Sayangnya, meski sejarah lisan telah diajarkan dan menjadi bagian dari metode penelitian sejarah, posisinya masih ditempatkan secara minor sebagai "pelengkap" dari sumber tertulis, dan ditempatkan semata-mata sebagai "metode", yakni cara mengumpulkan data berupa wawancara. Padahal sejarah lisan dapat menjadi penelitian mandiri sebagai sejarah lisan itu sendiri dan membawa implikasi metodologis sekaligus metodis tatkala ia diposisikan sebagai terobosan dalam menembus realitas di balik fakta: yakni ingatan. Berbagai ingatan yang bersifat traumatik atas masa lalu, dimana kekerasan dan ketidakadilan menimpa pelaku sejarah (*survivor*), maka sejarah lisan dapat menemukan

⁶¹ Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial di Pedesaan: Sejarah Lisan di Surakarta, 1930-1960*, (PAU-UGM dan Jurusan Sejarah UGM, 1990).

⁶² Paul Thompson, *op.cit.*, hlm 18

⁶³ Jonh Roosa dan Ayu Ratih, "Sejarah Lisan di Indonesia dan Kajian Subyektifitas", dalam Henk Shulte Nordholt, Bambang Purwanto, dan Ratna Saptari, *op.cit.*

kembali suara mereka yang selama ini dibungkam atau disembunyikan.⁶³ Sejarah lisan dapat menghadirkan kembali subyek-subyek yang selama ini absen dalam narasi sejarah atau yang kemunculannya dilihat sebagai pesakitan belaka. Hal demikian memang sulit dilakukan. Peneliti sering menghadapi dua kendala krusial; pertama, cenderung menjalankan tugas sebagai psikiater yang sedang melakukan *trauma healing*, dan kedua, larut dalam suasana traumatisme, kesedihan, dan subyektifitas pelaku tanpa bisa mengungkap realitas faktawi berupa tragedi yang menimpasi pelaku.

Jenis sejarah lisan yang terakhir ini, yang umumnya lebih menyoroti akibat dari suatu peristiwa sebagaimana metode sejarawan Piere Nora, tentu jauh dari jangkauan historiografi Sartonoian yang lebih menekankan pada sebab-sebab peristiwa sejarah. Ia juga berbeda dengan proyek sejarah lisan ANRI atau Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang menempatkan negara sebagai fokus perhatiannya dan apa yang disebut sebagai “pelaku sejarah” sebagai atribut kenegaraan itu. Historiografi semacam inilah yang diharapkan mampu menjawab tantangan penulisan sejarah di negara-negara pasca rezim otoriter.

5. “Mengapa Brutus Menikam Caesar?”

Cara pandang sejarah tradisional mengikuti cara pandang seperti yang dikenal melalui ucapan R. G. Collingwood; “ketika sejarawan bertanya ‘Mengapa Brutus menikam Caesar?’, artinya adalah ‘Apa yang dipikirkan Brutus saat itu, sehingga mengakibatkan ia menikam Caesar?’” Kata “apa yang dipikirkan” itu hendak membawa penjelasan ke arah “psikologi pribadi” semata, padahal bisa dibaca secara lebih luas sebagai kepentingan kelompok, persetujuan terselubung parlemen dsb.

Pandangan semacam itu dapat dilakukan dalam penelitian biografi dan sejenisnya. Ketokohan tidak hanya dilihat sebagai gejala tunggal namun dalam bingkai sosial dan kulturalnya. Biografi adalah kombinasi antara perwatakan tokoh, “sejarah substantif” sang tokoh yang berisi tentang rentetan aktifitasnya, apa, kapan, dan dimana, serta keadaan zaman tokoh (sosial-kultural).

Sudah banyak penulisan biografi dalam historiografi Indonesia. Di antaranya adalah karya M. Nursam, *Pergumulan Seorang Intelektual: Biografi Soedjatmoko*. Dalam tulisan itu dijelaskan latar belakang keluarga priyayi Jawa yang kuat agamanya, pendidikan Belanda, *setting* Hindia Belanda, Jepang, dan perkembangannya berinteraksi dengan dunia internasional melalui pengalamannya menjadi wartawan, politisi dan diplomat, memberi gambaran tentang “siapa sosok” dan mengapakah Soedjatmoko itu.⁶⁴

Sartono Kartodirdjo pernah menuliskan pengalamannya semasa periode revolusi di dua kota. Ia menempatkan pengalaman itu dalam konteks yang lebih luas saat itu. Ia ingin menunjukkan bahwa pengalaman subyektifitas seseorang menjadi bahan baku penulisan sejarah suatu masyarakat.

6. Objektivitas dan Representasi

Menurut pandangan lama, *history is objective and must be objective*. “The fact” dalam sejarah menurut Ranke adalah “how it

⁶⁴ M. Nursam, *Pergumulan Seorang Intelektual: Biografi Soedjatmoko*, Jakarta: Gramedia, 2002. Untuk biografi yang ditulis dalam disiplin ilmu sejarah lainnya, Budiawan, *Anak Bangsawan Bertukar Jalan* (Yogyakarta: LKiS, 2006); Ahmad Nashih Luthfi, *Manusia Ulang Alik, Biografi Umar Kayam*, (Eja Publisher dan Sajogyo Inside, 2007).

actually happened". Padahal "apa yang benar-benar terjadi" seperti dalam pandangan positivistik adalah tidak mungkin. Bias akan selalu ada, baik yang diasosiasikan dengan warna kulit, keyakinan, kelas, gender, dan sebagainya. "Suara-suara sejarah" adalah frase yang digunakan dalam Sejarah Baru. Sejarah haruslah "heteroglossia" yang artinya "suara-suara yang beragam dan berbeda-beda".

Dalam pandangan yang lebih terkini, sejarah dekonstruktif melihat bahwa sejarawan tidak dapat merepresentasikan masa lalu sebagai sebuah kebenaran adanya. Mereka hanya berperan melakukan kontrol atas masa lalu itu melalui teori pengetahuan atau perspektif yang dipilihnya. Dekonstruksi ditandai dengan hancurnya pembedaan antara object kajian, yakni sejarah, dan subject-nya, yakni sejarawan dengan segenap kediriannya, sekaligus leburnya batas antara *content (the past)*, *theory*, dengan *form (literary form)*. Ketika kita menulis sejarah, kita men-*transcend* dualitas subject-object secara bersamaan.⁶⁵

Menurut saya, di Indonesia sejarah dekonstruktif secara ketat sebagaimana diilhami oleh Derrida dalam *Grammatology* yang membawa implikasi bahwa "persoalan sejarah adalah persoalan kebahasaan", "bahasalah yang merupakan isi sejarah" sebagai cerminan dari perspektif kekinian, dan "tidak ada sesuatu di luar teks", belumlah dilakukan. Alih-alih, seorang sejarawan justru mengatakan bahwa sejarah dekonstruktif/postmodernis akan berakibat sejarawan "tutup buku", di-PHK, dan jurusan sejarah dibubarkan. Bahkan secara lebih jauh ia mengatakan "bagi pemeluk agama Islam meyakini postmodernisme berarti ia telah

⁶⁵ Alun Munslow, *The New History*, British: Pearson Longman, 2003; lihat juga Alun Munslow, *Deconstructing History*, (New York: Routledge, 1997)

menyimpang dari ajaran nabi Muhammad SAW".⁶⁶

Pendapat yang paling lunak menempatkan dekonstruksi hanya sebagai semangat menuliskan ulang sejarah (dari konstruksi yang telah ada). Pengertian yang demikian itu sebenarnya telah terintegrasi dalam "spirit alamiah" disiplin ilmu (sejarah). Sejarah dapat ditulis kembali ketika ditemukan bukti-bukti baru, perspektif dan paradigma baru sesuai *zeitgeist* dan *kulturgebundenheit*-nya (sebagaimana Thomas Kuhn tentang *the shifting of paradigm*). Sedangkan *différance* Derrida melihat bahwa "kata" (sebagai ikonoklasi dari narasi realitas historis) ditandai oleh ketidakstabilan makna dan interpretasi lain. Makna itu selalu dalam proses yang tidak baku dan permanen, demikian tafsir adalah kegiatan tanpa batas yang lebih menyerupai permainan ketimbang analisis seperti lazimnya dipahami.⁶⁷ Tafsir itu memiliki dimensi urgensitas dan tantangan kekiniannya. Pemahaman semacam ini tentu saja menggoyahkan prinsip-prinsip dasar sejarah empirisistik dan positivistik.

7. Sejarawan Profesional versus Sejarawan Amatir

Abad ke-19 adalah masa dimana sejarah mengalami profesionalisasi. Khususnya dalam pengalaman Jerman abad ke 19, dilakukan proteksi sosial terhadap profesor-profesor untuk melaksanakan pekerjaannya dengan sebuah pretensi kenetralan

⁶⁶ Ibrahim Alfian, "Profesor Sartono Kartodirdjo dan Konstruksionisme, serta Mengapa Kita Menolak Post-modernisme dalam Historiografi", dalam Nina Herlina Lubis, *80 tahun Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo, Pelopor Sejarah Indonesia*, Bandung: Satya Historika, 2001, hlm. 1-6

⁶⁷ Stuart Sim, *Derrida dan Akhir Sejarah*, Yogyakarta: Jendela, 2002, hlm. 26-27

agar ia bisa menutup diri bersama dengan kalangan penulis sejarah. Keserjanaan Jerman pada waktu itu berisi orang-orang dari golongan kecil patrisia yang berada dalam masyarakat yang sangat peduli akan status. Masih menurut Paul Thompson dalam buku yang disebut di atas. Menurutnya permusuhan terhadap sejarah non-profesional yang banyak menggunakan metode sejarah lisan terletak lebih pada perasaan daripada prinsip. Banyak dari generasi tua sejarawan yang memegang jabatan dan uang secara instink takut menghadapi temuan metode baru. Hal itu karena mereka takut bahwa mereka tidak lagi memiliki kemampuan dan otoritas terhadap semua teknik dari profesi mereka. Kalimat ini dengan telak dapat menohok para ilmuwan (sejarah) *established* yang ada di Indonesia yang seringkali perselisihannya bukan didasarkan pada pertarungan gagasan, alih-alih polemik, namun perebutan *resources*.

Sejalan dengan uraian dalam point sejarah lisan di atas, produksi sejarah seharusnya tidak lagi dimonopoli oleh sejarawan akademis dan anggapan mereka akan bahan sejarah apa yang relevan dan pantas, tetapi dimiliki oleh siapapun dan sejarah apapun yang mereka anggap sebagai hal yang berharga. Penyelidikan sejarah dapat dilakukan oleh kelompok manapun, akademisi (*by professional training*), guru dan murid sekolah, ibu-ibu rumah tangga, kalangan LSM, pegawai pemerintah, komunitas *hobby*, dan masyarakat luas. Sejarah dengan demikian kembali menjadi milik publik (*public domain*), setelah sebelumnya di-dakukan sebagai *privilege* kaum akademisi melalui penguasaannya atas sumber tertulis.

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam memproduksi sejarahnya sendiri, tanpa meminjam otoritas akademis dan hanya menempatkan mereka sebagai fasilitator. Dengan demikian meto-

de ini mampu menempatkan masyarakat pada posisi partisipan/ pelaku aktif. Bagaimana misalnya masyarakat berkisah tentang dirinya sendiri, memberi makna pada “peta sosialnya” berdasarkan benda-benda yang ada dan hadir dalam memori kolektif mereka: pada pohon-pohon besar, rumah tua, sungai jembatan, deretan warung, tempat “nongkrong” yang merekam realitas (masa lalu dan kini) akan jalinan sosial, ekonomi, perebutan kekuasaan antar penghuni dalam masyarakat yang didiaminya.

Dalam pengalaman Kunci Culture Studies dengan proyek “Kampung Juminahan”, Cemeti Art House dengan rangkaian program “Masa Lalu Masa Lupa”, Syarikat Indonesia dengan fokus kajiannya terhadap “sejarah kekerasan pasca 65” dan berbagai komunitas (di Yogyakarta dan di berbagai kota lainnya), memproduksi sejarah oleh masyarakat sendiri bukanlah hal yang tidak mungkin dilakukan. Sejarawan profesional barangkali akan tercengang sendiri melihat kemampuan masyarakat memroduksi pengetahuan sejarah dan cara bagaimana mereka menghasilkannya. (Menurut Kuntowijoyo, sejarawan adalah mereka yang menulis sejarah. *Titik*. Apapun profesinya!⁶⁸).

Jika kedua belah pihak berangkat dari motif yang sama, yakni dalam rangka pendemokratisan sejarah, sejarah sebagai kritik sosial, dan setiap orang berhak mengartikulasikan ingatannya, maka upaya kerjasama keduanya tidak sulit dilakukan.

Dari uraian di atas, “The New History” dan “Deconstructive history” bukanlah ancaman yang perlu ditakuti. Beberapa hal sebenarnya telah dilakukan oleh oleh para Sejarawan Indonesia (Indonesianis). Hanya bagaimana kemudian melanjutkan penu-

⁶⁸ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003, xiii

lisan-penulisan sejarah secara lebih beragam: tema, sudut pandang atau perspektif, pengkayaan terhadap metode dan metodologinya. Hal demikian akan membawa studi sejarah dalam dinamikanya yang bersumber pada gagasan-gagasan dan bukan perebutan sumber daya belaka.

Daftar Pustaka

- Abd. Syukur, "Jaringan Lokal Abdullah Sungkar dalam Peristiwa Lampung 1989" dalam Henk Shulte Nordholt, Bambang Purwanto, dan Ratna Saptari (ed.), *Perspektif Baru Penulisan Sejarah di Indonesia*, (Yayasan Obor Indonesia dan Pustaka Larasan, 2008)
- Ahmad Nashih Luthfi, *Manusia Ulang Alik, Biografi Umar Kayam*, Eja Publisher dan Sajogyo Inside, 2007
- Ankersmit, F.R., *Refleksi tentang Sejarah, Pendapat-pendapat Modern tentang Filsafat Sejarah*, Jakarta: Gramedia, 1987
- Aswi Warman Adam, "Sejarah Lisan di Asia Tenggara, Sejarah Korban di Indonesia", dalam P. Lim Pui Huen, *Sejarah Lisan di Asia Tenggara*, Jakarta: LP3ES, 2000
- Bambang Purwanto, *Gagalnya Historiografi Indonesiasentris*, Yogyakarta: Ombak, 2006
- Bambang Purwanto, "Dimensi Ekonomi Lokal dalam Sejarah Indonesia", dalam Sri Margana dan Widya Fitrianiingsih (ed.), *Sejarah Indonesia: Perspektif Lokal dan Global (Persembahan 70 tahun Prof. Djoko Suryo)*, Yogyakarta: Jurusan Sejarah UGM dan Penerbit Ombak, 2009
- Borras, Saturnino Jr., *Agrarian Change and Peasant Studies: Changes Continuities and Challenges an introduction*. *Journal of Peasant Studies*, Juni 2009.
- Brug, H. Van der, "Unhealthy Batavia and the Decline of The VOC in Eighteenth Century", dalam Kees Grijn dan Peter, *Batavia: Socio-cultural Essays*, Leiden: KITLV Press, 2000
- Budiawan, *Anak Bangsawan Bertukar Jalan*, Yogyakarta: LKiS, 2006
- Burke, Peter, *New Perspective on Historical Writing*, Oxford: Polity Press, 2001,
- Catatan atas Ceramah "Sastra dan Kebudayaan" Max Lane di

MRC-USD, Yogyakarta, 9 Juli 2010

- Davidson, Jamie S., David Henley, dan Sandra Moniaga, (eds.), *Adat dalam Politik Indonesia*, Jakarta: KITLV dan Yayasan Obor Indonesia, 2010
- Fasseur, C., "Dilema Zaman Kolonial: Van Vollenhoven dan Persetujuan antara Hukum Adat dan Hukum Barat di Indonesia, dalam, Jamie S. Davidson, David Henley, dan Sandra Moniaga, (eds.), *Adat dalam Politik Indonesia*, Jakarta: KITLV dan Yayasan Obor Indonesia, 2010
- Feith, Herbert, dalam *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1999
- Ibrahim Alfian, "Profesor Sartono Kartodirdjo dan Konstruksionisme, serta Mengapa Kita Menolak Post-modernisme dalam Historiografi", dalam Nina Herlina Lubis, *80 tahun Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo, Pelopor Sejarah Indonesia*, Bandung: Satya Historika, 2001
- Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial di Pedesaan: Sejarah Lisan di Surakarta, 1930-1960*, PAU- UGM, 1990
- Kuntowijoyo, *Indonesian Historiography in Search of Identity*, *Humaniora*, No. I, 2000.
- Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003
- Kuntowijoyo, *Penjelasan Sejarah (Historical Explanation)*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008
- Laporan Seminar Sedjarah, *Ringkasan*, Universitas Gadjah Mada, 1958
- Laporan Seminar Sedjarah, *Atjara I dan II, Konsepsi Filsafat Sedjarah Nasional dan Periodisasi Sedjarah Indonesia*, Universitas Gadjah Mada, 1958
- Leeuwen, Lizzy van, "Orang Kaya di Jakarta Tahun 1994, Seorang Ibu dan Dua Puteri", dalam Henk Schulte Nordholt (ed.), *Outward Appearances, Trend, Identitas, Kepentingan*, Yogyakarta: LKiS, 2005

- M. Nursam, *Pergumulan Seorang Intelektual: Biografi Soedjatmoko*, Jakarta: Gramedia, 2002
- M. Nursam, dkk. (eds), *Sejarah yang Memihak, Mengenang Sartono Kartodirdjo*, Yogyakarta: Ombak dan Rumah Budaya Tembi, 2008
- M. Nursam, *Membuka Pintu bagi Masa Depan, Biografi Sartono Kartodirdjo*, Jakarta: Kompas, 2008
- Machmoed Effendhie dkk., "Aktifitas Non-farm di Pantai Utara Jawa pada Awal Abad xx", dalam Tim SP4, *Jawa Abad XX, Perkebunan dan Dinamika Pedesaan*, Yogyakarta: Unit Penerbitan Jurusan Sejarah UGM, 2005 Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan DiIndonesia: Kajian Sosial-Ekonomi*, Yogyakarta: Aditya Media, 1991
- Moch. Eksan, *Kiai Lelono, Biografi K. H. Muchith Muzadi*, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Munslow, Alun, *Deconstructing History*, New York: Routledge, 1997
- Munslow, Alun. *The New History*, British: Pearson Longman, 2003
- Myrna A. Safitri dan Tristam Moeliono, (eds.), *Hukum Agraria dan Masyarakat di Indonesia*, Jakarta: Huma, Van Vollenhoven Institute, dan KITLV-Jakarta, 2010
- Robert van Niel, *Sistem Tanam Paksa di Jawa*, Jakarta: LP3ES, 2003
- Nina H. Lubis, (ed), *80 tahun Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo, Pelopor Sejarah Indonesia*, Bandung, Satya Historika, 2001
- Noer Fauzi, *Memahami Gerakan-Gerakan Rakyat Dunia Ketiga*, Yogyakarta: Insist, 2005
- Pemberton, John, *On the Subject of Java*, Ithaca: Cornell University Press, 1994
- Potter, Lesley, "Orang Banjar di dan di Luar Hulu Sungai, Kalimantan Selatan, Studi tentang Kemandirian Budaya, Peluang Ekonomi dan Mobilitas", dalam

- Thomas Lindblad, *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia*, Jakarta: PSSAT-UGM dan Pustaka Pelajar, 2000,
- Loomba, Ania, *Kolonialisme, Pascakolonialisme*, Yogyakarta: Bentang, 2003
- Robinson, Richard, *Indonesia The Rise of Capital*, Singapore : Kin Hup Lee. Printing Co. 1986.
- Sandra Moniaga, "Keaslian Suku dari Suku-suku Asli di Indonesia: Dilihat dari Perspektif Siapa?", dalam Noer Fauzi (ed.), *Tanah dan Pembangunan*, Jakarta: Sinar Harapan, 1997
- Sartono Kartodirdjo, "Beberapa Masalah Teori dan Metodologi Sejarah Indonesia", dalam *Lembaran Sejarah*, no. 6 Desember 1970, sie. Penelitian Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra dan Kebudayaan, Universitas Gadjah Mada
- Sartono Kartodirdjo, "Catatan tentang Segi-segi Mesianistis dalam Sejarah Indonesia", dalam *Lembaran Sejarah*, no. 7 Desember 1970, sie. Penelitian Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra dan Kebudayaan, Universitas Gadjah Mada
- Sartono Kartodirdjo, *Protest Movements in Rural Java: a Study of Agrarian Unrest in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries*, Oxford University Press, 1973
- Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia, suatu Alternatif*, Jakarta: Gramedia, 1982
- Sartono Kartodirdjo, *Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial*, Jakarta: LP3ES, 1984
- Sartono Kartodirdjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1984
- Sartono Kartodirdjo, *Kebudayaan Pembangunan dalam Perspektif Sejarah*, Yogyakarta: UGM Press, 1987
- Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional, dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*, Jakarta: Gramedia, 1990

- Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: Gramedia, 1992
- Sartono Kartodirdjo, "Pengantar" dalam Nusa Jawa, Silang Budaya, Batas-batas Pembaratan, Jakarta: Gramedia, 1998
- Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid IV: Indonesia Dalam Abad 18 dan 19*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975
- Sartono Kartodirdjo dan Mubyarto, *Pembangunan Pedesaan di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty untuk P3PK UGM, 1988
- Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan Di Indonesia: Kajian Sosial-Ekonomi*, Yogyakarta: Aditya Media, 1991
- Sim Chee Cheang, "Banalities of Subalternism: Positioning the Tionghua Peranakan in the Colonial Discourse", *Jurnal Sari* edisi 20 (2003)
- Spivak, Gayatri Chakrovart, "Subaltern Studies: Deconstructing Historiography", dalam Ranajit Guha dan Gayatri Chakrovart Spivak, (eds), Oxford University Press, 1988
- Taufik Abdullah, *Sejarah Lokal di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996
- Thompson, Paul, *The Voice of the Past, Oral History*, Oxford University Press, 1978
- Usep Ranawidjaja, *Swapradja, Sekarang dan dihari Kemudian*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 1955
- White, Ben, "Between Apologia and Critical Discourse: Agrarian Transition and Scholarly Engagement in Indonesia", dalam Vedi R. Hadiz dan D. Dhakidae (ed.), *Social Science and Power in Indonesia*, Jakarta: Equinox bekerjasama dengan ISEAS, 2005



Janganlah kita seperti pohon pisang, sekali berbuah terus ditebang. Setelah menulis skripsi atau disertasi terus berhenti. Demikian nasehat

Sartono Kartodirdjo dalam berbagai kesempatan sedang menyampaikan butir-butir pemikirannya pada Sidang II, Seminar Sejarah Nasional I, Yogyakarta 1957. Membahas tentang “Periodisasi Sejarah Indonesia”, ia menggaris bawahi bahwa dasar periodisasi itu adalah derajat “integrasi” yang telah tercapai di Indonesia di masa yang lampau. Sumber: 1) Dokumentasi Tempo; 2) Laporan Seminar Sedjarah, Atjara I dan II, 1958.



Dedikasi sepanjang hayat. Istri Sartono, Sri Kadaryati, menjelaskan bahwa sejak 1957 suaminya harus bekerja dengan satu mata tetapi ia gigih tidak mau menyerah. Pada tahun 1990-an, Sartono membaca buku dengan kacamata amat tebal, bahkan menggunakan alat semacam teropong untuk membaca. Saat kacamata sudah tidak mampu menolong,

Sartono memakai kaca pembesar. Saat ia nyaris buta, istrinya membacakan surat kabar, majalah atau buku, serta menuliskan buah pikiran-pikirannya.



Seribu hari wafat Sartono Kartodirdjo diperingati dengan meresmikan Pustaka beliau yang kini dikelola oleh Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Semula, koleksi buku-buku itu bertempat di kediaman F/9 Bulaksumur, dan telah dikelola dengan nama Perpustakaan Rakyat Gajah Mada. Sartono Kartodirdjo semasih hidup pernah memprakarsai pengelolaan pustaka Prof. W.F. Wertheim. Pada mulanya koleksi buku gurunya itu (yang nilai simbolisnya lebih besar ketimbang sebuah bolpoin) diberikan kepadanya. *Wertheim's Collections* saat ini dikelola oleh PSPK-UGM. Sumber: <http://www.facebook.com/?sk=messages&tid=1631358550656#!/photo.php?pid=1533053&id=1476825625&comments&alert>



Sartono Kartodirdjo saat bersantai dengan keluarga di kediaman, Bulaksumur Yogyakarta. Sumber: Dokumentasi Tempo

BAB III
PEMIKIRAN MASRI SINGARIMBUN
DALAM KONTEKS STUDI AGRARIA DI INDONESIA

Amien Tohari

Sejak lama dipahami bahwa kajian populasi yang didorong hadirnya problem populasi tidak terkait atau jarang dilihat berhubungan dengan kajian agraria yang di dasarkan pada realitas nyata kompleksitas problem agraria. Di Indonesia – dan juga sebagaimana kedua kajian ini berkembang di tempat-tempat lain – menemukan satu penilaian yang sama bahwa baik problem populasi maupun problem agraria sama-sama menjadi bagian – dapat diletakan sebagai sebab atau akibat – ketidakadilan di satu sisi, dan di sisi lain adalah alas bagi munculnya problem kemiskinan. Populasionis melihat problem-problem itu sebagai ekspresi dari kondisi over populasi, sedangkan agrarianis melihatnya, salah satunya, adalah ekspresi dari ketimpangan agraria atau deagrarianisasi. Jalan keluar yang ditempuh pada akhirnya juga berbeda antara kedua kajian ini; populasionis merekomendasikan pemecahan melalui pengurangan tekanan populasi; di pihak lain agrarianis melalui – salah satunya – reforma agraria. Spektrumnya memang tidak sesederhana ini tetapi secara umum, setidaknya, dapat dilihat secara demikian.

Membaca pemikiran Masri Singarimbun (1931-1997) menjadi penting karena memungkinkan kita melihat bagaimana dua arus kajian itu beresonansi dalam tingkat yang —kurang lebih— tidak selalu berbobot sama, dalam hidup, karya, dan pemikirannya. Masri adalah seorang demograf Indonesia yang tekun dan konsisten meskipun gelar akademiknya di bidang antropogi. Beragam riset yang dikerjakannya selama menjadi bagian penting Lembaga Kependudukan Universitas Gadjah Mada (LK-UGM), sekarang Pusat Studi Kebijakan dan Kependudukan (PSKK-UGM), perhatiannya lebih banyak pada persoalan-persoalan demografi dan program pengurangan fertilitas. Meskipun demikian, menjadi perhatiannya pula adalah masalah kemiskinan kronis di pedesaan, diversifikasi dan alternatif pangan, ketidakcukupan lahan garapan petani sebagai implikasi kondisi over populasi, transmigrasi, dan masalah-masalah lainnya. Pendeknya, Masri adalah seorang populasionis yang memiliki keprihatinan terhadap kondisi manusia secara utuh, tidak hanya pada aspek ledakan jumlah penduduk yang merupakan obyek studi demografi tetapi juga segala aspek yang dibutuhkan manusia untuk hidup secara layak dan bermartabat. Apa yang dilakukan Masri berada di saat ketika politik kebijakan pembangunan Orde Baru diarahkan pada tiga aspek yang saling melengkapi, yaitu menggalakkan program pengendalian populasi, mendongkrak produksi pangan, dan pemerataan penyebaran penduduk. Ketiga program ini ditempuh melalui tiga jalan, yang pertama melalui keluarga berencana (KB), yang kedua melalui teknologisasi pertanian atau revolusi hijau, dan yang ketiga melalui transmigrasi.¹ Sedangkan *concern* Masri

¹ Lihat Sediono M.P. Tjondronegoro, *Ranah Kajian Sosiologi Pedesaan* (Bogor: KPM-IPB, 2008) hlm. 236-245

yang paling utama adalah pada program pengendalian populasi.

Dalam konteks studi agraria menjadi relevan mengkaji pemikiran Masri, setidaknya di dasarnya pada beberapa alasan. *Pertama*, melalui riset yang dilakukannya dengan Penny pada akhir tahun 60-an hingga awal 70-an, problem kemiskinan diangkat ke permukaan menjadi persoalan yang harus dilihat dan diperhatikan oleh masyarakat luas, kaum akademisi, dan khususnya pengambil kebijakan. Program pengurangan tingkat fertilitas melalui KB yang gencar digulirkan Orde Baru tidak dapat dilepaskan dari perbaikan kondisi kesejahteraan rakyat khususnya di pedesaan. Pengurangan fertilitas hanya salah satu jalan yang keberhasilannya juga ditentukan oleh faktor-faktor lain seperti pembukaan lapangan kerja, perbaikan kesehatan, akses pendidikan yang terjangkau, ketersediaan lahan pertanian, ketahanan pangan, dan juga perbaikan infrastruktur dasar. Keberhasilan program penurunan fertilitas tidak bisa hanya diukur dengan terpenuhinya target-target angka statistik, tetapi juga perlu melihat ukuran-ukuran kualitatif pada tingkat kesejahteraan rakyat.

Kedua, meskipun Masri tidak melihat *land reform* sebagai jalan keluar yang meyakinkan atas kondisi kemiskinan di pedesaan Jawa, tetapi ia dengan meyakinkan menjelaskan bagaimana erat-nya kaitan antara kondisi over populasi dengan menyempitnya lahan pertanian sebagai kondisi-kondisi yang paling memungkinkan bagi munculnya problem kemiskinan itu. Artinya, secara tidak eksplisit dapat dipahami bahwa program *land reform* sekalipun, setidaknya dalam pemikiran Masri, tidak dapat tidak harus pula memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi over populasi yang bisa menjadi bom waktu dan kapan saja siap membuat luas tanah garapan menjadi semakin menyempit ketika jumlah penduduk melebihi kapasitas lahan untuk dapat menam-

pungnya dan menyuplai makanan bagi semua penduduk. Singkatnya, seberapa pun tanah gerapan dibagi rata jika laju pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan – diatur/ direncanakan – pada satu saat kondisi kekurangan tanah dapat terjadi lagi. Keterbatasannya sebagai seorang demograf membuat analisisnya tidak jauh-jauh dari masalah populasi, dan meletakkan masalah ini sebagai awal mula dimana rakyat yang tidak kebagian lahan kemudian membuka wilayah-wilayah baru yang mungkin dapat ditanami meskipun tidak subur, seperti rawa-rawa, tanah tandus, dan daerah perbukitan. Ia tidak melihat struktur penguasaan tanah yang juga sangat memungkinkan bagi lahirnya kondisi “lapar tanah” yang membuat banyak penduduk akhirnya mencari pekerjaan di luar sektor pertanian (non-farm), dan irosnisnya mereka ini hanya berbekal keterampilan pertanian yang sejak lama diturunkan oleh orang-orang tua mereka. Pada titik ini eksodus penduduk miskin tanpa tanah dan pekerjaan tersebut makin lama membanjiri wilayah perkotaan yang terindustrialisasi akibat proses kapitalisasi. Akibatnya kondisi ini tidak lagi terhindarkan.

Ketiga, Masri dan Penny adalah dua ilmuwan yang memiliki latar belakang keilmuan yang berbeda; Masri seorang antropolog, sedangkan Penny seorang ekonom. Penelitian mereka di Sriharjo menunjukkan bagaimana kerja sama dua ilmu tersebut mampu tidak hanya menggambarkan tetapi lebih jauh lagi mampu menggali problem-problem yang berbeda yang tidak terungkap jika kedua ilmu tersebut bekerja sendirian. Untuk dapat menemukan dan mendefinisikan sebuah obyek tertentu secara utuh tidak dapat dicapai jika hanya menggunakan satu kaca mata. Di sini, sejak awal Masri menyadari pentingnya kerja sama disiplin ilmu dalam memahami persoalan. Apa yang kemudian disebut dengan multidisiplin atau interdisiplin sudah sejak lama disadari

sebagai sesuatu yang bisa dikatakan sebuah “keharusan” bagi penelitian sosial. Sriharjo sebagai lapangan kaji tidak dibiarkan begitu saja setelah proyek penelitian selesai, tetapi Masri kembali mengunjungi desa itu sekitar lima tahun kemudian untuk melihat perubahan yang terjadi dan sampai dimana intervensi program-program pemerintah maupun inisiatif kemajuan yang diprakarsai penduduk desa sendiri mampu mendorong perubahan yang lebih baik. Pola kontinuitas ini disebut dengan demografi mikro, yang mencoba melihat kondisi-kondisi nyata di level lokal yang bisa dibaca sebagai mencerminkan keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan di tingkat makro. Dari studi Sriharjo ini, di tahun 1970-an awal, Masri berhasil menemukan masalah kemiskinan kronis di pedesaan Jawa dan mengangkatnya ke permukaan politik kebijakan Orde Baru pada saat itu, menggulirkannya sebagai diskursus kritis, sehingga membuka mata banyak pihak, bahwa jauh dari citra orang umum dan bahkan pemerintah sendiri dimana desa dan orang desa dipenuhi gambaran-gambaran indah, rukun, makmur, tanpa konflik, dan sebagainya, desa justru menyimpan masalah kemiskinan kronis. Tidak untuk meletakkan temuan Masri ini sebagai sesuatu yang paling otentik, paling dulu, atau paling baru dari yang lain, karena masalah kemiskinan di pedesaan yang mulai dilirik pemerintah ini adalah hasil dari serangkaian penelitian lain di berbagai daerah yang dilakukan oleh banyak sarjana baik dari Indonesia maupun dari luar negeri. Temuan Masri tentu saja menyumbang pada salah satu hasil penelitian yang mengangkat juga masalah kemiskinan, hingga masalah ini menjadi perhatian banyak pihak khususnya pemerintah.

Tulisan ini secara sederhana pembahasannya dibagi dalam beberapa tahapan. Pertama, membicarakan tentang Masri dan beberapa karyanya. Pada tahap ini digambarkan sosok seorang

Masri dari lahir hingga karir akademik yang ditempuhnya hingga menghantarkannya menjadi salah satu begawan kependudukan di Indonesia. Di samping itu juga dibicarakan beberapa hal yang menyangkut karya-karya akademik dan ilmiahnya yang paling diapresiasi luas oleh publik akademik dan khalayak umum. Tidak ditinggalkan menyebut beberapa terobosan yang dilakukannya dalam kerangka mencari jalan keluar dari persoalan yang bersifat kemanusiaan. Tahap kedua tulisan ini masuk ke perbincangan mengenai mengapa dan bagaimana kebijakan pengendalian populasi dijadikan sebagai salah satu jalan yang ditempuh Orde Baru dalam pembangunan. Dibahas juga masalah terkait dalil-dalil yang melegitimasi program pengendalian populasi sehingga menjadi solusi bagi masalah-masalah lain yang terkait dengannya, misalnya penyediaan lapangan kerja, kemiskinan, dan pemenuhan kebutuhan pangan, termasuk penyediaan lahan yang cukup untuk mengatasi kondisi “lapar tanah” akibat membengkaknya jumlah populasi di satu sisi dan keterbatasan ketersediaan lahan di sisi lain, dan bagaimana aktivitas penelitian dan pemikiran Masri dalam ikut serta mendorong dan mendukung program ini. Dimasukan pula beberapa perdebatan dan kritik terhadap problem populasi dan jalan keluarnya di Indonesia yang ditempuh melalui dua jalan yaitu pengendalian populasi dan penyebaran penduduk ke daerah belum padat penduduk. Tahap ketiga tulisan ini membahas tentang hubungan antara pemikiran Masri dengan studi agraria di Indonesia. Apa sumbangan Masri terhadap studi agraria, dan apa saja yang menjadi pemikirannya dalam kaitannya dengan studi agraria di Indonesia.

Studi kependudukan meletakkan problem populasi sebagai inti semua problem sosial, ekologi, dan pangan yang muncul termasuk masalah kemiskinan, tetapi tidak melihat sama sekali

bagaimana struktur penguasaan dan ekspansi kepatalisme yang ikut menyumbang pada perubahan struktur sosial, degradasi alam, dan ketidakadilan distribusi pangan, termasuk lahirnya masalah kemiskinan di Indonesia. Spektrum ini yang justru dilihat oleh studi agraria. Studi agraria melihat masalah kekurangan lahan garapan sebagai diakibatkan salah satunya oleh ketidakadilan kepemilikan yang merupakan akibat atau sebab dari ketimpangan struktur kekuasaan dan struktur sosial. Pemikiran Masri penting dibaca kembali dalam konteks ini karena meskipun sebagai seorang demografer, perhatiannya terhadap persoalan kemiskinan akibat dari kekurangan lahan garapan di pedesaan juga ikut menyumbang pada masalah-masalah lainnya. Tetapi jalan keluarnya, yang dibaca terkesan melompat, tetap pada program pengurangan fertilitas atau pengendalian populasi.

Dua kecenderungan ini tidak jarang berdiri dalam argumen dan keyakinannya masing-masing dengan jalan keluar yang ditawarkan berlainan. Yang pertama melalui pentanaan sumber-sumber dan akses agraria yang adil, sedangkan yang kedua menumpukannya pada pengendalian populasi. Hal yang penting untuk dipertemukan adalah bagaimana studi kependudukan menjadi bagian dari studi agraria, dan studi agraria tidak “men-cibir” jalan yang ditempuh studi kependudukan. Meskipun tidak terlihat jelas, upaya Masri dapat dipandang merintis jalan bagi kedua studi ini untuk dapat bekerja sama dan saling melengkapi walaupun jalan keluar yang ditwarkanya sangat khas demografer, yaitu pengendalian populasi sekuat mungkin.

A. Tentang Masri dan Karyanya

Laki-laki yang lahir 18 Juni 1931 di Karo, Sumatera Utara, itu bernama Masri Singarimbun (1930-1997). Panggilan masa

kecilnya adalah “Matahari”, seperti sebuah tanda bahwa kelak ia memberi inspirasi dan pencerahan bagi banyak orang. Kualitas ini ditapakinya dari kegemarannya mengamati dunia di sekitarnya, maka semenjak duduk di bangku SMA (1954) kegemaran ini terus dijalaninya hingga ia menjelajahi berbagai desa Karo, dan berhasil mengumpulkan banyak peribahasa. Riset kecil-kecilan yang dijalaninya itu ternyata membuahkan hasil, tahun 1962 buku “1.000 Perumpamaan Karo” terbit di Medan², karya pertama sang Matahari. Tapi anak sulung dari seorang petani itu pada awalnya bercita-cita menjadi pedagang.

Di tahun-tahun itu, dekade 30 hingga 40-an, adalah masa-masa yang sangat sulit. Indonesia baru saja keluar dari perang yang memporak-porandakan kondisi ekonomi, rakyat hidup di tengah kesulitan. Di masa itulah Masri kecil menjalani sekolahnya. Satu saat ia bercerita tentang masa kecilnya bersekolah, “pakaian seragam belum dikenal waktu itu, banyak anak ke sekolah pakai celana kolor hitam”, kisahnya. Akan halnya sepatu dan kaos kaki, “sampai menyelesaikan SMP di Medan, kami belum biasa memakai alat-alat itu. Umumnya, pelajar memakai sandal bahkan ada yang memakai bakiak”.³

Cita-cita menjadi seorang pedagang akhirnya berubah. Itu terjadi ketika seorang guru dengan suara keras membentak soal

² “Apa dan Siapa Sejumlah Orang Indonesia,” *Tempo*, 1981.

³ Herb Faith, “Sang Jiwa Bebas dan Luar Biasa Murah Hati,” dalam Robert Parangin-Angin & Irawati Singarimbun (ed.), *Matahari di Hati Kami* (Jakarta: Yayasan Merga Silima, 1998), hlm. 229-231. Apa yang ditulis Faith, pernah dituturkan Masri kepada Kompas, “Dr. Masri Singarimbun, Indikator Sosial Untuk Melihat Kemakmuran Masyarakat Sudah Patut Disempurnakan”, *Kompas*, Minggu, 26 April 1981 dan juga ditulis dalam rubrik “Pokok dan Tokoh”, *Majalah Sigma*, hlm. 9-11 dan 51-52.

bakiak, “Sahabat, ini bukan WC atau kamar mandi !”. Guru ini tampaknya memberi inspirasi seorang Masri muda kala itu, sebab itu ia kemudian mengubah cita-citanya yang semula ingin menjadi pedagang, ia kemudian ingin mengabdikan dirinya sebagai seorang pendidik. Cita-cita terakhir inilah yang ia jalani dengan setia dan mengantarkannya menjadi salah seorang begawan dalam bidang ilmu sosial di Indonesia khususnya dalam studi kependudukan.⁴

Namun dari sekian banyak orang yang memberinya inspirasi, sebagaimana ditulis sahabatnya Herb Faith, Masri sangat dipengaruhi oleh ibunya. “Optimisme, saya dapat dari Ibu. Dia seorang pekerja keras, hidup aktif, dan selalu peka pada kebutuhan orang lain”. Menurut pengakuannya, di masa Jepang dia banyak jalan, jual-beli ternak, sayuran dan tembakau. Pada masa revolusi dia menjadi kurir kaum gerilya dan sampai dua kali ditangkap oleh tentara Belanda. Pada 1950-an ketika ia masih di SMA, Masri pernah menyelenggarakan perpustakaan keliling, selain menjual buku untuk sesama pelajar dan mahasiswa. Masri muda gemar membaca novel karya Achdiat K. Mihadja, tulisan Takdir Alisjahbana yang bersifat filsafat dan terjemahan buku Gandhi, Tolstoy, dan Dostojevski. “Yang paling banyak mempengaruhi saya ialah tulisan Gandhi dan Tolstoy,” katanya. Masri pernah mendirikan Sekolah Menengah Pertama di desanya, itu terjadi setelah ia menamatkan pelajarannya dari SMA.⁵

Keterlibatannya dengan dunia akademik Universitas Gadjah Mada (UGM) dimulai pada 1955 di Fakultas Pedagogik sebagai mahasiswa. Ketika masih di UGM dia tertarik pada Lembaga

⁴ Herb Faith, *Op.cit.*

⁵ *Ibid.*

Hukum Adat UGM. Lembaga ini dipimpin oleh Prof. Djodjodieno dan giat melakukan penelitian lapangan di desa-desa di seluruh pulau Jawa dan beberapa daerah di luar Jawa. Ia juga tertarik dengan seorang profesor muda yang sangat antusias, Mervyn A. Jaspán⁶. Masri kemudian menjadi asisten peneliti Jaspán saat ia melakukan penelitian di tanah Karo, Jaspán kemudian merekomendasikanya untuk diterima sebagai calon mahasiswa S3 di bidang antropologi di Australian National University (ANU).

Ia kemudian memperoleh beasiswa untuk belajar di ANU, Canberra. Dari ANU Masri memperoleh gelar doktor antropologi dengan disertasi, *“Kinship, Descent, and Alliance Among the Karo Batak”* (1966).⁷ Khusus untuk buku ini James J. Fox menulis bahwa dalam waktu singkat buku ini telah menjadi topik pembahasan beberapa pakar antropologi terkemuka di dunia.⁸ Rodney Needham, di Oxford University menulis penilaian yang panjang mengenai kekerabatan Karo, dan diterbitkan dalam jurnal Belanda *Bijdragen tot de Taal-lend-en Volkenkunde* Vol. 134: 116-148, dipubli-

⁶ Jaspán adalah seorang antropolog berasal dari Inggris yang diperbantukan ke Universitas Gadjah Mada pada akhir tahun 1950-an dan awal 1960-an. Lihat White, “Diantara Apologia Kritis,...” hlm. 122

⁷ Menurut James Danandjaja disertasi Masri berjudul *“Kinship and Affinal Rotation Among the Karo Batak of North Sumatra”* (1965). Kolega Masri yang memperoleh Ph.D. dari Universitas yang sama adalah Raharjo Suwandi dengan disertasi berjudul *“A Quest for Justice: Millenary Aspirations of a Contemporary Javanese Bali”* (1985). Mungkin Masri adalah alumni pertama dalam bidang Antropologi dari ANU, Canberra. James Dananjaja, “Antropologi” dalam Manasse Malo, *Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial di Indonesia Sampai Dekade 80-an* (Jakarta: PT. Rajawali Press, 1989), hlm. 292.

⁸ James J. Fox “Masri Sahabatku, Sumber Informasi dan Inspirasi” dalam Robert Parangin-Angin & Irawati Singarimbun (ed.), *Ibid.*, hlm. 235.

kasikan di Leiden tahun 1978.⁹ Pada saat yang sama seorang antropolog Perancis terkemuka Claude Levi-Strauss menggunakan buku Masri untuk kuliahnya di Perancis, karena buku ini mengulas dengan sangat mengagumkan tentang rumah adat Karo. Baginya, uraian Masri tentang rumah tradisional Karo menunjukkan kenyataan nilai etnografi yang tinggi.¹⁰ Di dalam kuliahnya untuk pertama kalinya, dia berusaha menjelaskan suatu kelas masyarakat di mana rumah adat menjadi sesuatu yang penting bagi organisasi masyarakat secara keseluruhan. Kumpulan kuliah Levi-Strauss kemudian diterbitkan dalam bahasa Perancis dalam buku *Paroles Donees* pada tahun 1984. Edisi bahasa Inggris kumpulan kuliah Strauss ini terbit di Inggris tahun 1987 dengan judul *Anthropology and Myth: Lectures 1951-1982*, tepat ketika *Department of Anthropolgy Australian National University* sedang memulai *Comparative Austronesian Project*¹¹. Salah satu topik per-

⁹ *Ibid.*, hlm. 235.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Proyek pengkajian antropologi Indonesia tidak hanya diprakarsai ANU atau Australia tetapi sebelum itu telah dimulai oleh Belanda, menyusul Amerika dan Perancis. Belanda memulai lebih awal sejak paruh kedua abad 19, kemudian kembali bergeliat pada 1920 yang digerakkan oleh para antropolog yang dikenal dengan kelompok "Sekolah Leiden" (*Leidsch School van Etnologi*) di bawah pimpinan J.P.B. Josselin de Jong. Ia bertujuan menyusun kembali struktur sosial kebudayaan nusantara. Orang Indonesia yang terlibat di dalamnya adalah Koes Sardjono, Ph.L. Sedangkan pusat kajian *Indologi* di Indonesia adalah di Batavia pada *Fakulteit der Lettren en Wijsbegeerte* (menjadi Fakultas Sastra UI) dan asosiasi ilmu pengetahuan *Bataviaasch Genootschap van Kusnten en Wetenschappen*. Amerika juga memiliki proyek antropologi Indonesia di beberapa universitasnya; Cornell University, Massachussets Institute of Technology, dan Yale University sejak dekade 1950-an. Cornell mempunyai program *Modern Indonesian Project* dipimpin G. McT. Kahin, mereka yang dididik di sana antara lain

tama studi banding proyek tersebut adalah pentingnya rumah tradisional di lingkungan orang-orang yang berbahasa Austronesia dari Madagaskar, Indonesia, dan Pasifik. Lagi-lagi, karya Masri – yang mendapat perhatian teoritik lebih lanjut dari Levi-Strauss – menggambarkan dengan jelas dalam studi banding ini. Tahun 1975 disertasinya diterbitkan oleh University of California Press, Amerika Serikat.¹²

Selama sebelas tahun ia menetap di Australia¹³, sempat

Harsja W. Bachtiar, Umar Kayam, Selo Sumardjan. MIT melakukan penelitian tentang Indonesia yang dilakukan Clifford Geertz di Mojokuto yang melahirkan beberapa penelitian lainnya di wilayah itu. Di Yale proyek Indonesia pertama kali dilakukan Raymond Kennedy, ia menyusun *Bibliografi of Indonesian Peoples and Culture*. Antropolog Indonesia yang didik Yale adalah Koentjaraningrat. Universitas lain juga memiliki program yang sama seperti Berkely dan Harvard. Sementara di Australia program seperti ini dilakukan oleh ANU, Monash, dan Queensland University. Masri Singarimbun adalah antropolog Indonesia yang didik di ANU. Perancis, melalui mahasiswa didikkan G. Condominas, di *L'Ecole Pratique des Hautes Etudes*, mereka tertarik dengan kebudayaan-kebudayaan Indonesia bagian Timur. Selengkapnya lihat James Danandjaja dalam Manasse Malo, *Op.cit.*, hlm. 281-294

¹² James J. Fox “Masri Sahabatku, Sumber Informasi dan Inspirasi,” dalam Robert Parangin-Angin & Irawati Singarimbun (ed.), *Ibid.*, hlm. 234. “Apa dan Siapa Sejumlah Orang Indonesia,” *Tempo*, 1981. “Singarimbun, Masri” *Ensiklopedi Indonesia* Vol. 6 (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1984), hlm. 3192-3193.

¹³ Bukan tanpa sebab Masri menetap selama itu di Australia. Pada 1965 ketika disertasinya rampung, di tanah air Indonesia meletus peristiwa politik paling berdarah (Gestapu, G30S/PKI). Selama masa itu (1966-1973) Masri menulis dua buah buku tentang masalah kependudukan, yang pertama *Gerakan Pembatasan Kelahiran*, terbit tahun 1969. Buku ini mengulas perkembangan pengalaman praktek Keluarga Berencana di Eropa. Buku kedua membahas metode kontrasepsi berjudul *Kontrasepsi*, diterbitkan pada tahun 1970. Kedua buku ini kemudian diedit dalam bentuk seri populer dan disebarluaskan ke

menjadi pembantu khusus Atase Militer KBRI di Canberra dan *research fellow* di ANU. Tahun 1968 ketika masih bekerja pada *research fellow* di ANU, Masri mendapat tawaran untuk menjadi staf pengajar dari universitas di Boston. Awalnya ia menyanggupi tawaran itu, namun *United State Department* terlalu lama mengurus visanya, sekitar 1 tahun. Selama menunggu itu, minat Masri berkembang ke masalah kependudukan, ia pun sudah merencanakan sebuah penelitian tentang masalah ini. Dalam sebuah suratnya kepada sahabatnya George N. Appell (17 April 1968) minat itu tergambar dengan jelas; “Sembari menunggu visa saya, saya mengembangkan minat secara serius terhadap masalah-masalah kependudukan, program-program KB, dan hubungan antara kebudayaan dan fertilitas. Saya telah menulis sebuah naskah tentang metode kontrasepsi. Apabila tersedia bantuan dana, saya tertarik untuk mempelajari aspek-aspek sosial, budaya, dan ekonomi, yang melatarbelakangi masalah fertilitas di dalam masyarakat Jawa, Sunda, dan Batak”.¹⁴ Pada Minggu 26 April 1981, ketika meliput tentang Masri di bawah judul “*Dr. Masri Singarimbun, Indikator Sosial untuk Melihat Kemakmuran Masyarakat sudah Patut Disempurnakan*”, Kompas menulis, “tahun 1968 itu adalah titik balik paling penting pada kehidupan Singarimbun. Setelah berkonsultasi dengan istrinya, mereka memutuskan membatalkan keberangkatan ke Boston dan segera pindah ke

desa-desa di Indonesia dengan dukungan dana dari *Community Aid Abroad*. Lihat Anthony Reid, “*Sosok Pembaharu Alumni Australia*”, dalam Robert Parangin-Angin & Irawati Singarimbun (ed.), *Ibid.*, hlm. 158-159.

¹⁴ George N. Appell, “Mengenang Sahabat Tercinta Pak Masri: Sebuah Apresiasi dan Ungkapan Syukur Atas Kehidupan yang Amat Indah,” dalam Robert Parangin-Angin & Irawati Singarimbun (ed.), *Op.cit.*, hlm. 200-213.

disiplin demografi dengan menambah ilmu-ilmu lain yang dibutuhkan". Masri kembali ke UGM pada tahun 1973, salah satu keinginan yang juga mendorongnya kembali adalah "Kami ingin membesarkan dan mendidik anak-anak di Indonesia," ujarnya. Keinginan itu terlembagakan dalam dua institusi yaitu UGM sebagai Dosen di Fakultas Ekonomi (1973-1977) dan Pusat Studi Kependudukan (1973-1983) sebagai pendiri sekaligus direktur pertama.¹⁵

Kesibukan sebagai direktur sebuah lembaga penelitian terkemuka di masa itu¹⁶, tidak membuatnya abai terhadap

¹⁵ Hal ini juga didorong oleh sebuah peristiwa pada tahun 1973. Saat itu Prof. Dr. Sukadji Ranuwihardjo berada di Canberra dalam suatu pertemuan ilmiah. Ia menyatakan minatnya ingin mengembangkan bagian kependudukan di fakultasnya. Apa pak Masri tidak ingin kembali saja ke Bulaksumur? Pertimbangan lain adalah anak-anak, sebagaimana diungkapkan Irawati Singarimbun pada 1981, "Bagaimana nasib anak-anak, apakah mereka akan terus dibawa mengembara dan tak pernah sempat menjadi orang Indonesia yang hidup di negaranya sendiri? Wajar bila tawaran Prof. Kaji itu seketika langsung diterimanya, dan ia menolak tawaran Prof. Iskandar dari Universitas Indonesia untuk posisi yang sama yang datang kemudian. "Dr. Masri Singarimbun, Indikator Sosial Untuk Melihat Kemakmuran Masyarakat Sudah Patut Disempurnakan", *Kompas*, Minggu, 26 April 1981.

¹⁶ Sekitar Juli 1976, Masri menuliskan padatny agenda yang menyita waktunya. Dalam sebuah surat kepada Peter Hagul tanggal 15 Juli 1976, Masri menulis, "Semua baik-baik saja di Lembaga, cuma rasanya tambah hari tambah sibuk juga. Saya baru kembali dari Sulawesi dan singgah juga di Denpasar. Sekarang menumpuk urusan: minggu depan *coaching* asisten transmigrasi, sekarang sibuk-sibuknya merubah QRE, empat hari lagi memberikan ceramah pada Studium Generale, enam hari lagi ceramah di Jakarta pada Kongres Nasional PKBI, 7 hari lagi ceramah pada BKKBN pusat, kuliah sudah mulai 3 kali seminggu, permintaan karangan, perminataan ceramah ,dll. dan sebagai manusia perlu juga saya bernafas sedikit. Tapi tidak apa." "*Kumpulan Surat Peter Hagul*", disunting oleh tim PSKK UGM.

masalah-masalah lain. Selain sebagai seorang peneliti Masri juga aktif menulis di media massa, salah satunya mingguan *Tempo*. Pustaka Loka Kompas mencatat sepanjang 1959 hingga 1997 tulisan Masri berjumlah sekitar 101 buah. Tulisannya di berbagai media massa sepanjang 1977-1992 diterbitkan dengan judul *Reflection from Jogja, Potraits of Indonesian Social Life* adalah edisi Inggrisnya diterbitkan Galang Press, sedangkan edisi Indonesia dipublikasi Balai Pustaka dengan judul *Renungan Dari Yogya*¹⁷. Dalam banyak tulisannya Masri mampu mengurai benang kusut masalah-masalah sosial di media massa untuk pembaca awam. Tercermin dari beragam tema yang dituliskannya, perhatian Masri terhadap persoalan sosial sangat luas. Ia misalnya mengajak khalayak untuk memikirkan masalah-masalah seperti birokrasi yang tidak kunjung efisien, ledakan populasi penduduk, kemiskinan, HIV/AIDS, terorisme seksual, agresi tak terkendali, korupsi, buruknya kualitas perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia, rendahnya motivasi berprestasi, nasib intelektual yang tidak layak, dan runtuhnya pilar-pilar moralitas. Pendeknya hampir semua patologi sosial yang hingga saat ini masih membelenggu kehidupan masyarakat Indonesia. Perhatiannya yang demikian meluas tampak didorong oleh rasa empatinya yang sangat kuat terhadap kolega dan siapapun yang ditimpa musibah, tetapi lebih dari itu hakekatnya ia sedang menjalankan kewajiban dasar seorang sarjana, tugas utama seorang intelektual.¹⁸

Panggilan dasar ilmu pengetahuan benar-benar disambutnya

¹⁷ Masri Singarimbun, *Renungan Dari Yogya* (Yogyakarta: Balai Pustaka, 1992).

¹⁸ J. Sumardianta, "Gerilyawan Melawan Pendangkalan Makna Hidup", *Kompas*, Sabtu, 20 September 2003.

dengan terus melihat persoalan lebih dari mata orang biasa, dan mengabarkannya ke seantero dunia untuk mengajak orang lain dan terutama pengambil kebijakan untuk melihat dan mengatasi persoalan yang ada. Kendati demikian, tulisan dan gagasannya, seperti umumnya sebuah karya, bukan berarti tanpa celah. J. Sumardianta melihat bahwa sebagai seorang antropolog Indonesia dari generasi pertama, ia adalah ilmuwan yang humanis tatkala membicarakan tentang masalah kemiskinan, ketidakadilan, kekerasan, disparitas gender yang menimpa pemulung, pengamen jalanan, TKW, dan buruh bangunan perempuan. Tetapi sebagai pakar studi demografi ia tampil “berdarah dingin”, pro-prostitusi dan pengguguran kandungan. Sumardianta melanjutkan penilaiannya bahwa inilah dilema (ketegangan) tokoh etis yang bertekun di wilayah pragmatis.¹⁹ Di wilayah pragmatis seseorang mungkin sulit untuk tidak mengikuti logikanya hingga harus menabrak batas-batas etik. Tetapi yang etis itu tidak kemudian mati bagi seorang Masri, kolom dan media dipilihnya sebagai medium saluran untuk mengabarkan “yang etis” di tengah tekanan “kehendak pragmatis” yang bahkan *dibackup* oleh kekuasaan.

1. Sriharjo: Penduduk dan Kemiskinan

Karya Masri berikutnya yang sangat penting adalah hasil risetnya dengan David H. Penny di Sriharjo, sebuah desa di sebelah selatan Yogyakarta bagian dari kabupaten Bantul. Hasil riset itu diterbitkan tahun 1976, padahal dekade 70-an di Indonesia perbincangan mengenai kemiskinan masih dianggap sebagai isu yang sensitif, di kalangan ilmuwan sosial sekalipun. Politik

¹⁹ *Ibid.*

pembangunan ingin merangkum semua orang untuk berbaris rapi menatap kemakmuran ekonomi dan menyembunyikan persoalan kemiskinan karena kemiskinan dianggap “menggangu” optimisme pembangunan.²⁰ Kenyataan tentang adanya kemiskinan mungkin, pada saat itu, dianggap dapat mendelegitimasi program-program pemerintah di mata masyarakat yang mulai yakin dengan pembangunan dan di mata dunia internasional khususnya lembaga-lembaga yang memberikan pinjaman. Watak politik yang demikian itu membuat ilmu sosial tidak dapat bebas menyatakan temuannya secara obyektif tetapi didudukkan sebagai suatu instrumen yang harus mendukung tujuan-tujuan pembangunan itu sendiri.²¹ Akan halnya ilmuwan sosial mereka

²⁰ Pada 1979 Masri melontarkan kritik terhadap pembangunan yang menurutnya terlalu cenderung bersifat ekonomistik dan hanya melihat di aras permukaannya saja, tidak mencoba melihat lebih jauh ke dalam. Sebagai seorang ilmuwan Masri selalu mengajak orang untuk tidak hanya terjebak pada suatu permukaan tetapi lebih jauh mengarahkan pandangan pada wilayah di balik atau di bawah permukaan itu. Hal ini terlihat dalam jawabannya ketika Kompas menanyakan pendapatnya tentang pembangunan. “Kalau dilihat kasus per kasus, barangkali perlu dipertanyakan kembali pembangunan itu. Misalnya angka perluasan jalan menunjukkan kenaikan. Dari pendekatan pembangunan yang dianut hal itu menunjukkan sukses. Tetapi dengan perluasan jalan ke desa, andong digusur oleh colt (angkutan umum buatan Jepang), pembuat tali dan teklek (sandal dari bahan kayu) kehilangan mata pencaharian, dengan masuknya tali dan sandal-sandal plastik...minuman asing yang masuk desa menggantikan wedang. Begitu juga dengan barang-barang lainnya, seperti radio, sepeda motor, dan pakaian-pakaian luar yang mencampakkan sarung”. Tentu bukan karena Masri tidak setuju dengan benda-benda baru olahan industri itu tetapi pembangunan harus melihat efeknya terhadap produksi rakyat kecil. “Apa Pendapat Mereka Mengenai Pembangunan dan Kemiskinan”, *Kompas*, Selasa, 23 Januari 1979.

²¹ Kecenderungan yang demikian diungkapkan Kleden, “.. pada kenyataannya ada hubungan yang erat antara pembentukan rezim Orde Baru

butuh keberanian—jika bukan kenekatan—untuk mempublikasikan temuan obyektifnya sebagai hasil dari kerja keilmuan kepada khalayak luas khususnya pengambil kebijakan dan pemegang kekuasaan. Publikasi Masri dan Penny hadir dalam atmosfer politik pembangunan yang demikian itu. Menilai signifikansi buku ini, Mubyarto (1999) mengungkapkan, “mereka berdua telah membuat “revolusi paradigma” pembangunan pedesaan Indonesia”.²²

Publikasi *Population and Poverty in Java* hasil riset Masri dan Penny di Sriharjo terbit dalam edisi Indonesia *Penduduk dan*

dengan lembaga ilmu sosial di Indonesia, walaupun pengembangan ilmu sosial sudah sejak zaman kolonial dalam lembaga *indologi* untuk pegawai kolonial...pengembangan ilmu sosial secara sistematis hanyalah selama periode Orde Baru...bagaimana teori sosial membantu memberi pembenaran atas restrukturisasi dan reorientasi yang berlangsung selama pemerintahan Orde Baru. Ini dapat dilihat dengan menguji alasan-alasan bagi restrukturisasi dan reorientasi, sejauh dikemukakan atau dianjurkan oleh pejabat pemerintah, dan bagaimana secara teoritis alasan itu didukung teori atau konsep ilmu sosial, apapun penjelasan yang diberikan para ilmuwan sosial untuk membenarkan restrukturisasi sosial dan reorientasi budaya, semua itu didasarkan atas suatu strategi yang timbul dari pertemuan antara ilmu sosial dan pembangunan nasional...antara negara dan masyarakat. Dalam hal organisasi profesional, kita lihat bagaimana sangat mudahnya organisasi semacam itu menjadi alat negara untuk mengontrol masyarakat...ilmu sosial yang demikian lebih bersifat instrumental ketimbang kritis, karena tidak mampu mengkritik dirinya sendiri. Ini berarti ilmu sosial mempunyai kapasitas mengamati dan menganalisis segala sesuatu, kecuali dirinya sendiri.” Selengkapnya baca Ignas Kleden, “Ilmu Sosial di Indonesia, Tindakan dan Refleksi dalam Perspektif Asia Tenggara,” dalam Nico G. Schulte Nordolt & Leontine Visser (ed.), *Ilmu Sosial di Asia Tenggara: Dari Partikularisme ke Universalisme* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1997), hlm. 10-40.

²² Mubyarto, “”Juru Bicara” Mereka yang Miskin dan Tertinggal”,” dalam Robert Parangin-Angin & Irawati Singarimbun (ed.), *Op.cit.*, hlm. 64.

Kemiskinan: Kasus Desa Sriharjo tahun 1976 oleh penerbit Bhratara Karya Aksara, sebelumnya diterbitkan oleh Universitas Cornell, Ithaca, New York, pada Mei 1973. Lucas (1999) mencatat publikasi itu merupakan penelitian pertama yang menggunakan kata “kemiskinan” pada sampul depan buku yang diterbitkan di zaman Orde Baru. Judul ini merefleksikan hasil temuan Masri bersama seorang ahli ekonomi pertanian dari ANU, David H. Penny, dan menggunakan cara untuk mengukur tingkat kemiskinan. Ekuivalen beras pertama kali digunakan untuk mengukur tingkat kecukupan sebuah keluarga di desa Jawa (suami, istri, dan tiga orang anak) dari makanan, pakaian, dan rumah; dikatakan cukup bila pendapatan total sebuah keluarga ekuivalen dengan 240 kg beras. Penelitian ini menemukan sebuah ukuran *cukupan* yang secara operasional dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan. Keluarga yang tergolong *cukupan* diletakkan dalam kategori sangat miskin, mereka makan sederhana (hanya nasi dan sayur); mereka berpakaian sederhana (tidak lebih dari dua potong pakaian murah setiap tahun); rumah mereka juga sangat sederhana – lantai kotor atau tanah, dinding bambu, dan atap rumahnya dari rumbia. Mereka tidak mempunyai uang atau hanya punya sedikit uang untuk hiburan, perjalanan, dan biaya pengobatan (Penny 1986:35). Pada saat itu, temuan ini mendapat tempat dalam perbincangan dan perkembangan ilmu sosial di Indonesia dalam konteks pembangunan. Konsep *cukupan* ini kemudian dikembangkan oleh Sayogjo, seorang ahli sosiologi pedesaan, dalam penelitiannya.²³

²³ Anton Lucas, “Mengenang Pribadi dan Profesionalisme Pak Masri,” dalam Robert Parangin-Angin & Irawati Singarimbun (ed.), *Op.cit.*, hlm. 171-172.

Sebagai seorang antropolog, kerja sama penelitian dengan ahli ekonomi merupakan paduan yang sangat tepat. Dua hal dapat dicapai sekaligus, seorang antropolog biasanya cenderung melihat kehidupan sosial ekonomi manusia dari sisi kualitatifnya, sedangkan seorang ekonom yang terbiasa dengan pengukuran angka-angka cenderung melihatnya dari sisi kuantitatif. Dengan minat, kepedulian, dan disiplin keilmuannya, Masri lebih cenderung melihat persoalan dari kasus-kasus nyata, sedangkan ekonom lebih condong melihatnya dari perspektif sistem sosial ekonomi yang lebih luas. Tradisi penelitian yang dikembangkan Masri memang khas seorang antropolog sosial, dia lebih banyak melakukan studi-studi pada ruang lingkup mikro yang cermat dan mendetail di pedesaan, sehingga orang tidak terjebak pada data-data makro atau gambaran besar yang bisa jadi tidak mencerminkan kondisi masyarakat bawah yang sesungguhnya. Studi mikro menjadi sangat penting sebagai koreksi terhadap perspektif makro yang kadang mengabaikan detailnya. Di situlah studi kemiskinan Sriharjo mendapatkan momen yang tepat. Temuan Masri dan Penny mengabarkan tentang anomali rencana makro yang berjalan di bawah *developmentalisme*. Sulit dibayangkan seorang ilmuwan dapat mengungkap kondisi obyektif yang berlawanan dengan keyakinan pendapat pemegang kekuasaan tanpa didasari oleh dua hal, yaitu keberpihakan ilmiah dan kejujuran ilmiah.²⁴ Empati Masri yang sangat tinggi membuatnya tidak dapat diam

²⁴ Masri Singarimbun dan D.H. Penny, *Penduduk dan Kemiskinan: Kasus Sriharjo di Pedesaan Jawa* (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1976). Chris Manning, "Seorang Pemimpin, Rekan dan Aktivistis Sosial di Lingkungan Perguruan Tinggi," dalam Robert Parangin-Angin & Irawati Singarimbun (ed.), *Op.cit.*, hlm. 184.

melihat nasib orang-orang kecil yang tergilas pusaran roda pembangunan.²⁵

Dapat dikatakan studi kasus Sriharjo itu merupakan tilikkan awal tentang kemiskinan di pedesaan. Temuan itu menyangkal pernyataan-pernyataan sloganistik yang mencitrakan Indonesia sebagai negeri kaya yang tak memiliki persoalan penduduk dan penghidupannya. Tilikkan utama penelitian itu adalah hubungan antara jumlah tanah yang tersedia dengan kelebihan penduduk. Kelebihan penduduk dimanapun akan berarti tidak cukup bagi sebagian besar orang untuk dapat hidup secara layak. Di daerah pertanian “tidak cukup” akan berarti tidak cukup tanah, tidak cukup pekerjaan, tidak cukup pembayaran bagi pekerjaan yang dikerjakan, dan tidak cukup pelayanan pendidikan dan kesehatan. Sedangkan pemahaman arti *cukupan* bagi mereka sangat sederhana, yaitu jika seseorang dapat mengolah 0,7 ha sawah tadah hujan dan sebidang tanah darat, misalnya 0,3 ha, dimana ia dapat menanam kelapa, buah-buahan dan pohon-pohonan lainnya, dan sayuran sekadarnya, rempah-rempah dan keperluan rumah tangga lainnya. Dalam jangka waktu 70 tahun penduduk telah meningkat hampir tiga kali lipat; di Sriharjo luas tanah rata-rata per keluarga telah menyempit menjadi kurang

²⁵ Keberpihakan ini jelas terlihat dalam suatu pernyataan Masri tentang pembangunan saat itu. “Celaknya, melejitnya pola konsumsi ini tidak didukung kemajuan pola produksi. Akhirnya kemiskinan semakin membengkak. Swasembada menjadi ilusi. Dengan sederet kalimat—yang dibawa usaha pembangunan—iklan telah menjungkirbalikkan tatanan yang selama ini dipertahankan. Semua ini terjadi karena perencanaan pembangunan atau pembuat keputusan tidak pernah menghayati kehidupan penduduk miskin”. “Apa Pendapat Mereka Mengenai Pembangunan dan Kemiskinan di Pedesaan”, *Kompas*, Selasa, 23 Januari 1979.

dari $\frac{1}{4}$ ha dan sekitar $\frac{2}{3}$ penduduk tidak memperoleh pendapatan yang memungkinkan mereka makan nasi, sepanjang tahun. Mereka tahu bahwa mereka dapat hidup dengan layak, menurut ukuran mereka, jika mereka mempunyai cukup tanah yang bisa digarap, dan mereka meyakini bahwa kesempatan mereka untuk memperbaiki ekonomi telah menipis dengan meningkatnya jumlah penduduk.²⁶

Buku itu lebih banyak menggunakan data yang dikumpulkan Masri dan Irawati dibantu 7 asisten lapangan yang dilatih untuk itu. Untuk riset ini Masri membawa serta anak dan istrinya (Irawati) tinggal selama satu tahun (12 bulan) di desa itu sejak 1969 sampai 1970. Lebih dari angka-angka, Masri mencatat, dari penelitiannya, bahwa ada tiga cara pokok untuk mengetahui apakah di suatu daerah ada masalah kependudukan atau tidak, dan kalau ada sejauh mana mendalam dan seriusnya masalah itu. Orang dapat melihat, mendengar, atau bicara dengan penduduk setempat, membaca hasil laporan penelitian, atau dari data statistik yang akurat dan lengkap. Meskipun demikian, sebenarnya hanya dengan melihat situasi di suatu daerah tertentu orang sudah bisa meraba adanya persoalan kependudukan di dalamnya. Apakah bukit-bukit gundul? jika benar hampir pasti di situ ada masalah kependudukan. Sama juga jika lereng dan bukit sudah ditanami dengan tanaman berumur pendek. Daerah yang berpenduduk padat jarang dapat ditemui rumput yang panjang-panjang, mungkin disebabkan kurangnya sumber makanan untuk ternak yang dipelihara oleh penduduk setempat. Apakah rumah-rumah kokoh dan kuat, dan apakah lantainya dari kayu atau semen? Apakah kelapa ditanam untuk diambil buahnya atau disadap

²⁶ Masri Singarimbun dan D.H. Penny, *Op.cit.*, hlm. 25.

untuk dijadikan gula? Sudah berapa lama gula kelapa menjadi sumber penghidupan yang penting di desa? Tanda lainnya yang menunjukkan adanya persoalan kependudukan adalah apakah singkong atau gapek dijual secara umum di pasar makanan setempat?²⁷

Selain mengungkap data berupa angka-angka statistik untuk menunjukkan adanya masalah tanah yang menyempit dan jumlah penduduk yang membengkak, pada lampiran 4 buku itu kedua peneliti meyakini bahwa penelitian ekonomi Indonesia yang mengabaikan faktor-faktor kebudayaan yang khas dan mendasar (lokal) kurang menghasilkan temuan yang berharga bahkan dapat menyimpulkan hasil yang keliru. Kasus Sriharjo menunjukkan rasionalitas ekonomi murni yang semata-mata mengejar keuntungan bukan menjadi alasan tindakan ekonomi penduduk setempat. Tetapi bukan berarti mereka tidak membuat pertimbangan-pertimbangan ekonomistik dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya-sumber daya yang terbatas untuk mencukupi kebutuhan dasarnya. Satu contoh yang dikemukakan misalnya, seseorang yang memiliki modal tidak jadi membuat mesin penggilingan padi yang memungkinkan dia memperoleh keuntungan dari jasa penggilingan itu. Pertimbangannya adalah agar tidak mengurangi atau menghilangkan pekerjaan para penumbuk padi yang ada di tengah sulitnya memperoleh pekerjaan pada waktu itu.²⁸

Lima tahun kemudian yaitu pada tahun 1975 Masri kembali mengunjungi desa itu. Perubahan-perubahan fisik mulai terlihat yang baginya menunjukkan adanya hasil intervensi program

²⁷ *Ibid.*, hlm. 143-145.

²⁸ Masri Singarimbun dan D.H. Penny, *Op.cit.*, hlm. 166-170.

pemerintah seperti Bimas, pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan yang memungkinkan masyarakat menjangkau daerah-daerah lain, mobilitas yang semakin meluas memungkinkan penduduk mencari kesempatan-kesempatan baru di daerah lain. Tetapi kondisi perubahan itu hanya dapat dirasakan oleh mereka, terutama yang memiliki modal cukup, sedangkan bagi buruh tani kondisinya tidak begitu banyak berubah bahkan hampir tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan. Seorang guru sekolah yang sempat ditemuinya menuturkan “keadaan mereka sama saja, bekerja satu pecat (1/2 hari) mendapat ½ kg beras, dahulu begitu sekarang juga begitu. Upah naik tetapi harga-harga juga naik. Kesempatan kerja tidak bertambah”.²⁹

2. “Malam Sagu”: Mencari Alternatif Pemenuhan Pangan

Manusia hidup selalu membutuhkan pangan, tetapi persoalan pangan tidak dapat digeneralisir menjadi satu pokok jenis makanan. Makanan pokok terkait dengan kondisi sosio-ekologi, tradisi, dan sejarah pangan lokal. Di samping itu tekanan penduduk yang semakin padat membutuhkan ketersediaan pangan yang cukup. Oleh sebab itu, persoalan pangan ini tidak dapat ditumpukan pada satu jenis makanan saja melainkan juga diperlukan diversifikasi jenis makanan pokok. Generalisasi jenis pangan pokok berakibat pada hilangnya tradisi pangan pokok lokal yang telah lama dipraktikkan masyarakat lokal. Masri melakukan kritik atas kebijakan “sembilan bahan pokok” di antaranya adalah beras. “Pencantuman istilah “beras” dalam kaitan sembilan bahan makanan pokok, telah menyebabkan penduduk meninggalkan bahan makanan lain. Sembilan

²⁹ *Ibid.*, hlm. 182.

makanan tersebut telah disebarkan secara nasional, sebagai bahan makanan rakyat Indonesia. Tentu saja ini mendorong kekawatiran, tidak dianggap orang Indonesia jika tidak ikut makan beras!" Kalimat itu disampaikan Prof. Herman Johannes dalam acara "Malam Sagu" ketika membuka peresmian gedung baru Lembaga Kependudukan UGM (sekarang PSKK) pada Sabtu 23 Oktober 1978. Dalam acara itu, Masri menyebutkan bahwa hasil sagu total di Irian mencapai 77 juta ton per tahun, dapat memenuhi konsumsi pangan bagi 535 juta penduduk. Potensi sagu Irian sekitar 15,4 kali hasil sagu Maluku. Satu hektar hutan sagu dapat ditanami 625 pohon. Sehingga 1 km persegi tanah dapat ditanami 62.500 pohon, dan 22.500 km persegi tanah bisa memuat 1.406.250.000 pohon sagu. Karena umur sagu siap panen 12 tahun, tiap tahunnya dapat ditebang (1.406.250.000 dibagi 12) 117.187.500 pohon. Dengan hasil tiap satu pohon 350 kg sagu, maka hasil pertahun adalah 41.015.625 ton sagu. Jumlah ini memenuhi kebutuhan 41 juta penduduk. Jika dimanfaatkan dengan baik, menurut Masri, tidak mustahil ketergantungan akan impor beras dan gandum dapat dikurangi atau dihilangkan.³⁰

Tidak cukup sampai di situ, pada "Malam Sagu" itu Masri juga memberikan cara bagaimana orang yang belum terbiasa makan sagu bisa terbiasa makan sagu. Malam itu disuguhkan

³⁰ "Berpengaruh Negatif Istilah "Beras" dalam "9 Bahan Pokok", *Kompas*, 24 Oktober 1978. Lihat juga "Usaha Mengurangi Ketergantungan Beras", *Sinar Harapan*, Sabtu, 28 Oktober 1978. "Istilah Beras, ing 9 Bahan Pokok Nuwuhake Pengaruh Negatif", *Penyebar Semangat*, 4 November 1978. "Jadilah Manusia Pemakan Sagu", *Gelora Mahasiswa*, Edisi 5 November 1978. "Makanan Sagu dan Resep-resepnya", *Sinar Harapan*, Minggu, 12 November 1978. "Penggunaan Sagu Sebagai Bahan Pangan Perlu Ditingkatkan", *Masa Kini*, Senin, 23 Oktober 1978.

berbagai *nyamikan* (makanan ringan) dari bahan sagu, mulai dari kroket sagu, pastel sagu, cantik manis sagu, burindang sagu, dan sebagainya. Nasi sagu yang di Irian dikenal dengan *papeda dingin* dipadukan dengan resep kuliner daerah lain seperti sop bakso sagu, otak-otak, cap cai sagu, ikan bakar, empek-empek sagu, acar kenari, dan sebagainya. Untuk minuman dihidangkan cendol sagu, bubur tinotua, dan *madu mongso* yang semua dibuat dari bahan sagu. Koran “Sinar Harapan” edisi Minggu, 12 November 1978 menurunkan berita bertajuk “Makanan Sagu dan Resep-resepnya”. Dengan rinci ditulis jenis-jenis makanan dari sagu, seperti papeda dingin, kue spirit sagu, otak-otak, sagu kukus, kroket, dan sebagainya, lengkap dengan bahan dasar dan cara membuatnya.³¹

Acara itu memang sederhana yaitu peresmian gedung baru Lembaga Kependudukan dan makan-makan malam dengan kuliner “asing”, tentu saja bagi lidah dan perut Jawa (beras), atau orang yang baru saja mencobanya. Tetapi menjadi sangat serius karena selain dihadiri lima orang doktor yaitu Masri Singarimbun (ahli kependudukan), Mubyarto (ekonom dan pendiri pusat studi pedesaan), Sartono Kartodirdjo (sejarawan), Umar Kayam (budayawan), dan Herman Johanes, acara itu tidak hanya sekedar makan-makan biasa. Substansi acara itu sebenarnya adalah mengabarkan alternatif pangan, perlunya diversifikasi pangan, dan kritik terhadap kebijakan pemerintah mengenai 9 bahan makanan pokok yang berpotensi menghilangkan makanan lokal yang sudah menjadi makanan pokok suatu masyarakat tertentu. Tetapi sayang upaya itu tidak berhasil membangun keberlan-

³¹ “Makanan Sagu dan Resep-resepnya”, *Sinar Harapan*, Minggu, 12 November 1978.

jutanya sendiri, beras menjadi makanan pokok seluruh rakyat Indonesia hingga saat ini, dan bangsa ini mengalami problem pangan yang besar akibat ketergantungan terhadap impor beras setiap tahun³², tekanan penduduk yang sangat besar, menyempitnya lahan-lahan produktif, dan ekspansi pengembangan agroindustri besar dan real estate/alih fungsi lahan produktif.

Sepanjang karirnya sebagai seorang ilmuwan sosial, keterlibatan utama Masri adalah pada soal demografi. Isu ini juga terlihat dalam penelitiannya terhadap kasus Sriharjo itu, di mana kepadatan penduduk berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan. Pada waktu berikutnya (1975) ia kembali melihat Sriharjo dari sudut sejauh mana pelaksanaan program penurunan fertilitas di sana. Kepakarannya dalam bidang ini diakui oleh rekan, sahabat, dan kolega sesama ilmuwan baik di dalam maupun di luar negeri. Menurut pengakuannya, ia mulai tertarik dengan masalah kependudukan sejak tahun 1957, ketertarikannya itu diawali dari berbagai kegiatan riset tentang demografi di pelosok desa Jawa Tengah sekitar tahun 1962. Minat dalam soal demografi ini diperolehnya sejak ia mengikuti program doktoral bidang antropologi di Australia sejak 1955, dan pada 1962 datang ke Indonesia untuk melakukan penelitian tentang demografi di Indonesia.³³

3. *Emic-Etic*: Meramu Pendekatan Riset

Masalah meramu dua atau lebih pendekatan atau disiplin keilmuan menjadi satu pendekatan terpadu diakui adalah sebagai

³² Acara “Malam Sagu” itu kembali dimuat “Mari Makan Sagu”, *Femina* No. 148, edisi 19 Desember 1978. Ditampilkan pula gambar makanan-makanan yang terbuat dari sagu lengkap dengan resep dan cara membuatnya.

³³ “*Apa è Siapa Dr. Masri Singarimbun*”, *Kedaulatan Rakyat*, Minggu, 14 Oktober 1973.

keahlian Masri. Jauh dari menjadi rancu integrasi itu justru mampu menjangkau wilayah yang awalnya tidak terlihat jika masing-masing pendekatan atau disiplin ilmu berdiri sendiri dan bekerja sendiri. Satu contoh dapat disebutkan misalnya, para ahli demografi pada dasarnya tertarik pada perubahan struktur penduduk baik secara agregat maupun rata-rata. Perubahan struktur penduduk tersebut sangat dipengaruhi angka fertilitas. Salah satu ukuran yang biasa dipakai dalam fertilitas adalah angka fertilitas total yang menggambarkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh wanita selama masa reproduksinya atau selama usia subur. Angka fertilitas total merupakan angka hipotetis sehingga tidak menggambarkan jumlah anak yang sebenarnya dari kehidupan riil wanita sampai mereka mencapai saat monopouse. Sementara ahli antropologi tertarik pada budaya, struktur sosial komunitas manusia dan norma, serta nilai yang menuntun hidup manusia.³⁴

Ahli demografi bisa menjelaskan suatu fenomena demografi dengan fenomena demografi yang lain. Mereka dapat menjelaskan “bagaimana” perubahan demografi terjadi. Perubahan angka fertilitas total misalnya, dapat dijelaskan dengan perubahan angka fertilitas menurut umur, perubahan usia perkawinan, dan sebagainya. Bagi Masri penjelasan ini tidak memadai karena masih terdapat pertanyaan yang belum terjawab yaitu “mengapa”-nya. Mengapa pola fertilitas atau usia melahirkan berubah? Pertanyaan tersebut membutuhkan antropologi untuk menjawabnya.³⁵

Selain itu memang pada dasarnya ada perbedaan-perbedaan

³⁴ Anke Niehof, “Orang-orang di Balik Angka-angka”, dalam Robert Parangin-Angin & Irawati Singarimbun (ed.), *Op.cit.*, hlm. 145-149

³⁵ Anke Niehof, “Orang-orang di Balik Angka-angka”, dalam Robert Parangin-Angin & Irawati Singarimbun (ed.), *Op.cit.*, hlm. 145-149

antara demografi dan antropologi, yaitu pertentangan antara pendekatan “emic-etic”. Penjelasan “emic” adalah suatu penjelasan yang bersumber “dari dalam” yang dibingkai dengan konsep-konsep masyarakat yang kepada siapa penjelasan atau definisi itu berlaku. Sedangkan penjelasan “etic” merupakan penjelasan “dari luar”, yang berasal dari konsep-konsep yang dibawa oleh peneliti atau pengamat. Implikasinya, bagi seorang ahli demografi fertilitas merupakan hasil aplikasi dari suatu definisi demografis terhadap data jumlah anak lahir hidup yang dilahirkan oleh ibu umur tertentu. Ini disebut definisi “etic”. Tetapi bagi antropologi fertilitas merupakan apa saja yang dianggap penduduk bermakna fertilitas dalam pengertian mereka sendiri, yaitu dimensi-dimensi yang mereka bedakan dan bahasa-bahasa yang mereka gunakan dalam memaknai dan menjelaskan hal tersebut. Pertentangan “emic-etic” ini kerap muncul dalam penggabungan pendekatan demografi dan antropologi. Namun bagi Masri, yang menekankan pendekatan interdisipliner, tidak menyerah untuk mendapatkan suatu pemahaman yang menyeluruh. Persoalan fertilitas dan fenomena ekonomi yang terkait dengannya seharusnya tidak dipandang sebagai penjelasan yang berdiri sendiri, tetapi sebagai refleksi ide-ide, motivasi-motivasi, dan keputusan-keputusan dari masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, selalu diperlukan suatu analisis kebudayaan untuk memahami hakiki manusianya, yaitu orang-orang di balik angka-angka statistik. Tradisi “demografi humanistik” ini — jika bisa disebut demikian — yang telah dikembangkan Masri selama keterlibatannya dalam dunia penelitian kependudukan di Indonesia.³⁶

³⁶ *Ibid.*, hlm. 145-149

Bobot kepakaran Masri dalam bidang kependudukan diakui di dalam dan luar negeri.³⁷ Tahun 1996, ANU menganugerahkan *dokteret honoris causis* kepada Masri Singarimbun. Tahun itu juga adalah tahun kunjungan terakhirnya ke Australia. Manning (1999) menulis bahwa Masri adalah ilmuwan Indonesia pertama yang dianugerahi *honoris causa* oleh ANU. Penganugerahan itu tentu saja bukan karena tujuan politis-ekonomi tetapi didasarkan pada integritas kecendekiawanan Masri, dan karya-karyanya yang berpengaruh, hubungannya dengan ANU yang erat, dan dukungannya terhadap karir staf-stafnya di Lembaga Kependudukan UGM. Reid (1999) menyebutkan, “dia adalah salah satu dari sepuluh (bahkan orang Asia pertama) yang memperoleh penghargaan doktor kehormatan dari ANU, tepat pada ulang tahun ke-50 universitas tersebut di tahun 1996”.³⁸

4. Membangun Kelembagaan Diskursus Kependudukan

Dari seluruh karya yang dilahirkan Masri sepanjang karir keilmuannya, karya terpenting dan terbesarnya adalah sebuah pusat studi dan tradisi riset yang dirintis dan terus dikembangkannya di Pusat Studi Kebijakan dan Kependudukan (PSKK

³⁷ Dalam sebuah surat yang ditulisnya untuk Peter Hagul, Masri menulis “Bulan depan saya ke Mexico...Kebetulan saya akan diangkat menjadi anggota *Board of Trustees of The Population Council*, jadi akan ke New York 2 kali setahun...Lucu juga rasanya, seorang amatir kependudukan seperti saya ini, belajar di bawah pohon pisang, jadi anggota *Board of Trustees*. *Kumpulan Surat Peter Hagul*, 1 Juli 1977.

³⁸ Chris Manning, “Seorang Pemimpin, Rekan dan Aktivist Sosial di Lingkungan Perguruan Tinggi,” dalam Robert Parangin-Angin & Irawati Singarimbun (ed.), *Op.cit.*, hlm. 186.

UGM)³⁹. Masri berhasil membangun diskursus kependudukan di Indonesia menjadi diskursus dominan yang berpengaruh, dan tidak hanya beredar pada level bahasa atau gagasan. Terkait dengan hal ini, Irwan (2006) mengatakan bahwa dalam hal kelembagaan, sebuah diskursus akan beroperasi dalam dua tataran. Tataran pertama adalah operasi diskursus pada tingkat kelembagaan untuk menyebarkan sebuah gagasan. Kelembagaan tingkat pertama ini biasanya identik dengan organisasi, misalnya bagaimana sebuah kelompok berhasil mendominasi kecenderungan pemikiran pada suatu organisasi, fakultas, universitas, pusat studi, dan media massa untuk meneguhkan dan menyebarkan gagasannya. Kelembagaan tingkat kedua bukan berbentuk organisasi tetapi lebih pada regulasi atau kebijakan negara atau lintas negara yang mempunyai kekuatan hukum mengarahkan suatu tindakan tertentu. Sebuah diskursus dapat pula beroperasi pada tingkat proses dan lembaga sosial bahkan pada tingkat subyektifitas. Salah satu indikator diskursus bekerja pada tingkat subyektifitas adalah ketika terus bermunculan individu yang diidentikkan dengan diskursus tersebut.⁴⁰ Dalam soal Masri, studi kependudukan di Indonesia tentu saja tidak dapat dilepaskan dari nama

³⁹ Pengalaman keberhasilan mendirikan sebuah pusat studi kependudukan ini direkamnya dalam sebuah tulisan khusus berjudul “Pembinaan Lembaga Penelitian Dalam Lingkungan Universitas: Suatu Rekaman Pengalaman”, 25 Desember 1982, hlm. 2. Menurut Masri setidaknya ada lima aspek pokok yang sangat menentukan tercapainya tujuan sebuah lembaga penelitian, yaitu (1) pembinaan staf, (2) pembinaan lingkungan kerja, (3) pengelolaan dana, (4) aktivitas-aktivitas pokok, serta (5) hubungan dengan lembaga-lembaga lain.

⁴⁰ Alexander Irwan, “Dalil Kelembagaan dalam Pengelolaan Sumber Daya” dalam Vedi R. Hadiz dan Daniel Dakidae (ed.), *Ilmu Sosial dan Kekuasaan di Indonesia* (Jakarta: PT Equinox Publishing Indonesia, 2006), hlm. 31-32.

Masri Singarimbun. Masri sudah menjadi identik atau tokoh yang senantiasa dirujuk ketika orang berbicara tentang studi kependudukan di Indonesia. Anggapan bahwa sebuah diskursus akan berhenti dan turun menjadi bahasa atau gagasan tampaknya tidak berlaku bagi Masri dan lembaga penelitian yang didirikannya. Meskipun sang pendiri sudah meninggal, studi kependudukan di Indonesia pasti akan merujuk kepada lembaga yang dirintis dan dikembangkan Masri, yaitu pusat studi kependudukan. Gagasan-gagasan Masri hingga saat ini masih terus hidup dan dikembangkan oleh lembaga ini.

Guru besar emiretus Fakultas Sastra UGM ini meninggal di RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta, pada hari Kamis tanggal 25 September 1997 di usia 66 tahun. Selain meninggalkan ilmu dan segudang gagasan, ia meninggalkan seorang istri Irawati Singarimbun, dan ketiga orang putrinya, Nima Sulina Singarimbun, Riana Kerina Singarimbun, Marinta Serina Singarimbun. Jenazahnya dikebumikan di Pekuburan Keluarga UGM di Sawit-sari. Riwayat hidupnya dimuat dalam berbagai terbitan; *Ensiklopedi Indonesia*, Vol. 6 hal. 3193. Jakarta, Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1984., *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Vol. 15 hal. 67-68. Jakarta, Cipta Adi Pustaka, 1991., *Apa dan Siapa Sejumlah Orang Indonesia*, 1981-1982. Jakarta, Graffiti Press, hal. 629. Dalam Edisi 1985-1986, terbit tahun 1986, dimuat pada hal. 854., *Apa dan Siapa Sejumlah Orang Karo*, hal. 64-65. Di susun Robert Paranginangin. TB. Monoranta, 1993., *Apa dan Siapa Sejumlah Orang Yogyakarta*, Edisi 1995, hal. 146-147. Penerbit Citra Almamater.

B. Masri dan Masalah Kependudukan Indonesia

Bagian ini mengulas perkembangan studi kependudukan di Indonesia kaitannya dengan kebijakan penurunan fertilitas dan

keluarga berencana sebagai suatu jalan keluar yang ditempuh oleh pemerintah Orde Baru dalam mengerem laju pertumbuhan penduduk. Program ini dikaitkan dengan ketersediaan pangan, tanah, dan pemerataan pembangunan, pendeknya dengan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks itu dilihat pula sejauh mana pemikiran Masri mempengaruhi kebijakan kependudukan dan menjadikan studi kependudukan sebagai bagian dari pengajaran ilmu di berbagai universitas.

Dalam kaitan itu, menjadi penting untuk menelusuri sejarah hadirnya kebijakan kependudukan di Indonesia, bagaimana kebijakan ini dijadikan sebagai salah satu cara dalam paket pembangunan di Indonesia. Di balik sebuah kebijakan biasanya terdapat dalil-dalil ilmiah yang menjadi dasar argumentasi diambilnya sebuah cara di level kebijakan yang dipandang sebagai jalan keluar dari persoalan yang dihadapi sebuah negara. Artinya, sebuah kebijakan yang dijalankan secara nasional tidak dapat dilepaskan dari konteks internasional yang ikut serta mendukung dijalkannya kebijakan kependudukan di Indonesia, baik dukungan itu berbentuk pendanaan, atau suplai pengetahuan tentang subyek tersebut, ataupun dalam bentuk dukungan yang lain.

1. Dalil-dalil Pengendalian Populasi

Sesungguhnya teori-teori yang mendasari pentingnya upaya untuk mengontrol laju pertumbuhan penduduk tidak tunggal melainkan beragam. Umum dilihat bahwa teori Malthus dengan deret ukur dan deret hitung-nya itu mendasari kepentingan kebijakan kependudukan. Malthus mengungkapkan tesisnya bahwa laju pertumbuhan penduduk seturut dengan deret ukur, sedangkan kemampuan produksi pangan untuk memenuhi

kebutuhan penduduk cenderung mengikuti deret hitung. Teori Malthus menjadi begitu berpengaruh lebih disebabkan oleh kontroversi atas pernyataan-pernyataannya yang kasar terhadap orang miskin. Pendapat Malthus menyebutkan bahwa kondisi golongan yang miskin tidak dapat ditingkatkan dengan cara melakukan distribusi pendapatan. Pendapat ini adalah jawaban Malthus tentang sistem yang dinamakan “Undang-undang Burack” di Inggris pada abad 18.⁴¹

Malthus mengajukan proposisi bahwa penduduk akan cenderung berlipat ganda dua kali dengan sendirinya dalam jangka waktu 25 tahun, sedangkan produksi pertanian akan tetap sama setiap 25 tahun.

“Di seluruh dunia ini manusia akan bertambah menurut perhitungan 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, sedangkan produksi makanan hanya akan bertambah menurut perhitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Dalam jangka waktu dua abad perbandingan jumlah penduduk dengan jumlah makanan akan menjadi 256:9”.⁴²

Terkait dengan pemenuhan pangan bagi penduduk, Malthus berpendapat bahwa tanah akan dikuasai oleh hukum *deminishing return*, yaitu “bila semua tanah yang subur sudah ditempati manusia, pertambahan jumlah makanan selama satu tahun harus tergantung dari peningkatan tanah yang sudah diduduki itu”. Teori ini, pada tahap selanjutnya, diteruskan oleh aliran ekonomi klasik. Aspek ekonomi yang dikombinasikan dengan *deminishing*

⁴¹ Rozy Munir & Budiarto (terj.), *Teori-teori Kependudukan* (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm. 29-31.

⁴² Thomas R. Malthus, *An Essay on The Principle of Population*, edisi ke-7 (tahun 1982), buku 1, bab 1, dalam Rozy Munir & Budiarto (terj.), *Op.cit.*, hlm. 29.

return menyanggah asumsi ini. Bagi aliran klasik, hukum *deminshing return* hanya dianggap berlaku untuk masalah tanah saja, sedangkan untuk bidang industri yang selalu memberi kemungkinan untuk meningkatkan pembagian kerja dan peningkatan teknologi, dianggap dapat beroperasi secara konstan atau malah akan menghasilkan keuntungan yang semakin bertambah.⁴³

Penilaian bahwa kepadatan jumlah penduduk merupakan masalah besar yang menuntut negara melakukan kontrol muncul setelah pada abad-abad sebelumnya masalah jumlah penduduk dianggap sebagai bagian dari kekayaan negara. Plato dan Aristoteles melihat persoalan kependudukan dalam perspektif negara kota. Mereka melihat perlunya penduduk sampai tingkat optimum, tidak hanya dari sudut ekonomi tetapi juga dari segi pengembangan potensi penduduk. Bagi Plato penduduk negara kota yang ideal adalah 5.040, karena jika terlalu besar pemerintahan konstitusional tidak bisa berjalan dengan baik. Untuk membatasi jumlah penduduk, Plato menyarankan kolonisasi, sedangkan Aristoteles menghalalkan pembunuhan bayi dan aborsi. Berbeda dengan orang-orang Romawi yang melihat jumlah penduduk yang besar sebagai aset pertahanan, mereka justru merangsang pertumbuhan jumlah penduduk. Di abad pertengahan penulis-penulis Kristen melihat masalah kependudukan tidak dalam perspektif duniawi tetapi mereka lebih menekankan aspek moral dan etik⁴⁴. Mereka mengutuk aborsi, pembunuhan

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Penolakan kaum agama terhadap kontrol kelahiran atau Keluarga Berencana juga terjadi di Indonesia pada awal-awal ketika ide atau program ini hendak dijalankan.

bayi, penelantaran anak, perceraian dan poligami. Di zaman modern ketika Barat menemukan wilayah-wilayah jajahan baru dan meningkatnya perdagangan antar benua, mereka cenderung menginginkan penambahan penduduk. Sejalan dengan ini, kaum merkantilis pada abad 17 dan 18 melihat pertumbuhan penduduk dan jumlah penduduk yang besar merupakan keuntungan ekonomi, politik, dan militer. Di abad 19, kalangan Marxis melihat persoalan penduduk bukan dalam konteks pertumbuhan dan pertumbuhannya melainkan menganggap bahwa kemelaratan penduduk bukan disebabkan oleh jumlah penduduk yang besar tetapi akibat dari kepincangan distribusi pendapatan dan kepincangan-kepincangan lainnya di dalam tatanan masyarakat.⁴⁵

Disiplin demografi muncul di Amerika Serikat setelah Perang Dunia I, lebih cenderung menggunakan kerangka *eugenistik* yang melihat penduduk dalam ketegori gen-gen unggul atau gen-gen lemah.⁴⁶ Pada 1952, di Amerika *Population Council* didirikan oleh John. D Rockefeller, dimana fokus utamanya adalah persoalan

⁴⁵ Masri Singarimbun, "Masalah Penurunan Angka Kelahiran, Aspek-aspek Sosial Budaya dan Program", *Prisma* No. 6, Tahun XXIII, Mei 1994. hlm. 27-28. Tulisan ini adalah ringkasan dari tulisan berjudul "Penurunan Angka Kelahiran: Aspek-aspek Sosial Budaya dan Program" yang disampaikan dalam pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Sastra UGM di muka Rapat Senat Terbuka Universitas Gadjah Mada, 9 Februari 1994.

⁴⁶ Menurut Malthus, kemiskinan adalah kondisi "alamiah" yang dihasilkan oleh kelahiran orang-orang miskin dari pada sebuah akibat dari sistem sosial dan ekonomi. Pernyataan ini mengimplikasikan bahwa kemiskinan merupakan penurunan gen-gen tertentu yang lemah. Sebab itu kelompok *eugenistic* percaya bahwa program pembatasan kelahiran termasuk sterilisasi merupakan cara yang dapat mengurangi penyakit yang umumnya diderita oleh orang-orang miskin. Ross, *Malthus Factor, Poverty, Politics, and Population in Capitalist Development* (Tt: The Corner House, 2000), p. 5-6.

dampak potensial dari pertumbuhan populasi di negara-negara berkembang. Fokus ini menunjukkan simpati kalangan *eugenic* pada dekade pertamanya. Badan ini menyediakan dana untuk Masyarakat Eugenic Amerika (*American Eugenic Society*) dan menawarkan dukungan bagi terbitan *Eugenic Quarterly*. *Population Council* sejak saat itu memainkan peran kritis dalam riset-riset teoritik mengenai “masalah populasi” dan melakukan pengembangan teknik-teknik kontrasepsi. Salah satu teknik yang diperkenalkan adalah *norplant*. Teknik ini dibuat untuk digunakan oleh program pendukung kontrol kelahiran yang disiapkan terutama untuk perempuan di Dunia Ketiga agar membatasi fertilitas mereka di bawah kondisi-kondisi yang tidak sepenuhnya mereka lakukan secara suka rela. Beberapa individu yang diasosiasikan dengan *Population Council* menunjukkan bahwa teknologi kontrol kelahiran adalah cara untuk mempertahankan kepentingan-kepentingan Barat di masa-masa kolonisasi dan revolusi.⁴⁷

Meskipun teori Malthus di atas dinilai memiliki kelemahan, seperti bahwa ia tidak meramalkan kemampuan manusia menciptakan alat kontrasepsi untuk membatasi kelahiran, ia tidak meramalkan akan adanya migrasi yang merupakan *klep* (saluran) yang mampu mengurangi tekanan penduduk, dan ia tidak memperkirakan perkembangan teknologi yang memungkinkan peningkatan produksi tanah yang berlipat ganda; namun teori ini masih dianggap relevan. Masri mencatat dalam tulisannya bahwa semenjak berakhirnya perang dunia kedua, dirasakan bahwa teori Malthus mengandung banyak kebenaran. Negara-negara yang sedang berkembang di Amerika Latin, Afrika, dan Asia masih terus bergulat untuk meningkatkan taraf hidup rakyatnya. Kekha-

⁴⁷ Ross, *Op.cit.*, p. 7-8.

watiran Malthus lebih dari 1,5 abad yang lalu seolah menjadi kenyataan: pada periode tertentu penambahan penduduk melebihi pertumbuhan produksi pangan dan terjadi bahaya kelaparan pada musim paceklik, walaupun teknologi senantiasa bertambah maju dan pemakaian kontrasepsi bertambah luas.⁴⁸

Kebutuhan akan pangan mau tidak mau harus diupayakan semaksimal mungkin. Faktor utama produksi pangan adalah tanah, maka harus dilakukan intensifikasi produksi tanah berupa pangan dengan melakukan intervensi teknologi. Di akhir tahun 60-an, revolusi hijau dipandang membawa harapan baru. Brown dan Eckholm, sebagaimana dikutip Masri, mengungkapkan penilaiannya terhadap revolusi hijau; “revolusi hijau itu bukanlah pemecahan masalah pangan, lebih tepat kalau dikatakan suatu alat untuk mengulur waktu – barangkali untuk 15 tahun – dan memberi jalan kepada kita untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk”.⁴⁹

Masri melihat bahwa di Indonesia masalah pertumbuhan penduduk sudah mengkhawatirkan. Ia mengutip Dr. Sutami untuk menunjukkan hal ini, menurut Sutami; “pulau Jawa dengan keadaan geografi dan tingkat pertumbuhan ekonomi seperti sekarang ini, sebaiknya dihuni oleh penduduk sejumlah 60-70 juta orang, sehingga dapat dilakukan konsolidasi wilayah yang lebih baik”. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Sumitro, “dengan kepadatan penduduk rata-rata di atas 1000 jiwa/km pada tahun 2001, pulau Jawa akan menjadi seperti “pulau kota” waktu itu nanti.⁵⁰

⁴⁸ “Kata Pengantar Masri Singarimbun,” dalam Paul R. Ehrlich, *Ledakan Penduduk* (Jakarta: Gramedia, 1981), hlm. VII-VIII.

⁴⁹ “Kata Pengantar Masri Singarimbun,” dalam Paul R. Ehrlich, *Op.cit.*, hlm. IX.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. X.

Beberapa penilaian tentang pembangunan dan kaitannya dengan kesejahteraan rakyat, masalah kependudukan dinilai sangat terkait dengan upaya pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Wilayah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk seperti Jawa, bagaimanapun, sulit untuk ditata secara efektif, sebagaimana diungkapkan Sutami di atas. Hal ini sejalan dengan penilaian-penilaian baru dari kalangan Neo-Malthus yang beranggapan bahwa jalan keluar yang ditawarkan oleh kelompok Malthus-Klasik tidak relevan dengan situasi perkembangan dunia. Malthus-Klasik menganjurkan jalan *moral constraint* untuk memecahkan persoalan jumlah penduduk. Malthus (1872) mengungkapkan bahwa dalam kondisi seperti itu, pengekangan moral dan perilaku sederhana merupakan satu-satunya alternatif yang praktis dan dapat diterima secara moral terhadap pertumbuhan jumlah penduduk yang sulit dikendalikan.⁵¹ Merevisi pendapat Malthus-Klasik, kalangan Neo-Malthusian mengajukan pendekatan teknologis untuk masalah kependudukan, yaitu penggunaan alat kontrasepsi dan kontrol kelahiran. Rupanya cara ini sangat populer dan digunakan oleh banyak negara di dunia termasuk Indonesia. Ehrlich (1871) seorang Neo-Malthusian meneguhkan asumsi-asumsi dasarnya, dalam bukunya yang terkenal "*Population Boomb*" kemudian direvisi berjudul "*Population Explotion*" ia menyatakan; manusia sudah terlalu banyak di bumi, keadaan bahan makanan sangat terbatas, lingkungan rusak sebab populasi manusia meningkat.⁵² Persoalan yang dikemukakan

⁵¹ Rozy Munir & Budiarto (terj.), *Op.cit.*, hlm. 30.

⁵² Chabib Musthafa, "Sosiologi Kependudukan" dalam <http://pkno3ui.files.wordpress.com/2008/11/demografi-1.pdf> diakses pada hari Senin, 15 Oktober 2009 pukul 14.10 WIB.

Ehrlich ini dipecahkan dengan dua pendekatan, yaitu bagaimana mengontrol jumlah penduduk dan kedua bagaimana meningkatkan produksi pangan agar dapat memenuhi kebutuhan semua penduduk. Yang pertama tercermin dalam program Keluarga Berencana, sedangkan yang kedua diimplementasikan dalam program Revolusi Hijau. Meskipun revolusi hijau banyak menuai kritik,⁵³ di Indonesia program ini pernah menjadi program unggulan yang hampir menyamai program keluarga berencana.

2. Keluarga Berencana: Kebijakan & Pengetahuan

Kebijakan keluarga berencana ini mulai digalakkan dan menjadi program nasional semenjak Orde Baru atau Pelita I.⁵⁴ Keyakinan terhadap pembangunan mendorong Orde Baru

⁵³ Salah satu kritik atas proyek revolusi hijau adalah selama 25 tahun pelaksanaannya meskipun pemakaian teknologi pertanian (industri pertanian) menguntungkan semua lapisan petani, tetapi petani yang berlahan luas-lah yang mampu mengkonsolidasikannya dengan kekuatan-kekuatan efektif untuk mengakumulasikan keuntungan yang lebih besar. Jika untuk menghadapi peluang ekonomi baru di luar pertanian para petani berlahan luas mampu menempuh strategi akumulasi modal, maka para petani berlahan sempit dan buruh tani sebaliknya hanya mampu memanfaatkan peluang-peluang tersebut hanya untuk bertahan hidup. Sektor pertanian menjadi semakin tergantung dengan perkembangan ekonomi luar dan nasional. Mereka yang tersisih dari sektor pertanian akan beralih kepada sektor ekonomi di luar pertanian. Poliarisasi struktur sosial ekonomi pedesaan terjadi ketika terjadi keterbatasan kutub penyelamat dan peluang memperoleh sumber ekonomi dari luar pertanian. Francis Wahono, "Dinamika Ekonomi Sosial Desa Sesudah 25 Tahun Revolusi Hijau," *Prisma*, No. 3, Tahun XXIII (Maret 1994), 31.

⁵⁴ Sumber-sumber lain mencatat sebelum menjadi program nasional, keluarga berencana sudah menjadi bagian alami dari suatu bentuk perencanaan kelahiran yang dilakukan secara tradisional untuk mengatur kelahiran keluarga dengan berbagai cara tradisional, sejarahnya bahkan dirunut sejak masa

menempuh beragam cara yang dipercaya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Selama Orde Lama kebijakan ini tidak populer dan sama sekali tidak dianggap sebagai bagian dari upaya pembangunan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. Orde Lama lebih melihat bahwa kunci bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat terletak pada ketersediaan tanah yang dapat didayagunakan sebagai penghasil pangan. Persoalan utamanya bukan terletak pada kelebihan atau kepadatan penduduk tetapi belum dibukanya wilayah-wilayah baru untuk pertanian rakyat. Pada 1964 Soekarno pernah mengatakan, “bagi saya penyelesaiannya adalah membuka tanah lebih luas lagi, sebab bila engkau membuka seluruh tanah di Indonesia, engkau dapat memberi makan 250 juta jiwa, dan saya hanya punya 103 juta jiwa... Dalam negeriku, makin banyak (anak) makin baik”. Di masa itu, pembatasan kelahiran menggunakan alat-alat kontrasepsi dianggap bertentangan dengan moral bangsa kecuali jika dilakukan untuk membatasi kelahiran demi kesehatan ibu.⁵⁵

prasejarah. Tentu saja selain persoalan akurasi data, upaya konstruksi sejarah sampai ke zaman prasejarah itu, juga dapat dipahami sebagai cara melegitimasi sebuah kebijakan melalui pengetahuan sejarah. Lihat Clare O’Farrell, *Michele Foucault* (London: Sage Publication, 2005), p. 65-67. Namun di sisi lain, upaya merangkai-rangkai, meskipun jika terbukti benar, konteks ini menunjukkan KB saat itu benar-benar mendapat *support* yang besar dari kekuasaan. Diceritakan pula, berturut-turut ia menjadi gerakan-gerakan kecil yang tersebar sampai akhirnya diadopsi pemerintah menjadi kebijakan negara. Cerita keberhasilan program ini, banyak dilukiskan dengan suatu perjuangan penuh tantangan, pengorbanan, penolakan-penolakan, hingga akhirnya banyak orang kemudian menyadari arti pentingnya bagi keluarga dan negara. “KB Dari Masa ke Masa”, *Kompas*, 14 Desember 1988.

⁵⁵ Sonny Harry B. Harmadi, “Pengantar Demografi”, dipresentasikan di Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi UI pada tanggal 11 Desember 2008,

Analisis demografi, khususnya proyeksi populasi di Indonesia dimulai pada awal dekade 1950-an ketika Nathan Keyfitz melakukan survey di Jawa Timur. Berdasar pada survey itu, Nathan dan asistennya Wijoyo Nitisastro mempublikasi buku pertama tentang populasi Indonesia pada tahun 1955 berjudul *“Soal Penduduk dan Pembangunan Indonesia”*. Dalam buku itu, mereka berdua membuat proyeksi kasar populasi Indonesia dan memperkirakan bahwa Indonesia di masa depan yang dekat mengalami tingkat populasi yang besar jika asumsi tentang penurunan fertilitas dan mortalitas konstan digunakan. Upaya berikutnya membuat proyeksi penduduk Indonesia dilakukan setelah sensus pertama tahun 1961. Dalam bukunya *“Population Trend in Indonesia”* Wijoyo memperkirakan skenario populasi Indonesia sampai tahun 1991. Pada 1970, Nathanael Iskandar dari Lembaga Demografi UI merevisi perkiraan Wijoyo dan membuat perkiraan sampai tahun 2001. Di tahun yang sama, 1971, BPS membuat proyeksi populasi berdasar pada data sensus tahun 1971. Beberapa lembaga lain juga membuat proyeksi populasi Indonesia, di antaranya adalah Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada – (PPK UGM), Lembaga Ekonomi Kebudayaan Nasional – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

<http://pkno3ui.files.wordpress.com/2008/11/demografi-1.pdf> diakses pada hari Senin, 15 Oktober 2009 pukul 14.10 WIB. Pernyataan Soekarno itu dimuat dalam Newsweek tahun 1964, “My solution is exploit more land—because if you exploit all the land in Indonesia you can feed 250 million, and I have only 103 million...in my country, the more (children) the better”. Masri Singarimbun, “Keluarga Berencana Indonesia Sampai Abad XXI: Beberapa Aspek Program dan Sosial Budaya,” Makalah disampaikan pada Simposium Sehari Sepuluh Windu Usia Prof. H. M. Joedono di Jakarta, 10 November 1988, hlm. 2.

(LEKNAS-LIPI), dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Lihat Tabel. 1 berikut ini.⁵⁶

Tabel. 1 Beberapa studi proyeksi penduduk Indonesia: 1960-1990

Periode	No	Kode	Sumber	Tahun
1960	1	Nitisastro	Nitisastro, Widjojo. 1970. Population Trends in Indonesia. Ithaca. Cornell University Press.	1961
1970	2	LDUI 1	Iskandar, Nathanael. 1976. Beberapa Poyeksi Populasi Indonesia Untuk Pulau -pulau Utama. Lembaga Demografi UI.	1971
	3	BPS 1	Badan Pusat Statistik. 1973. Proyeksi Penduduk Indonesia: 1971 -1981. Seri BPS K. No. 1.	1971
	4	BPS 2	BPS. 1978. Proyeksi Penduduk Indonesia: 1976 - 2001. Seri BPS K. No. 2.	1976
	5	BPS 3	Cho, Lee Jay. et al. 198 0. Population Growth of Indonesia. Hawaii University Press.	1971
	6	LEKNAS - LIPI	Speare, Alden. 1976. Projections of Population anda Labour Force for Regions of Indonesia: 1970 -2005. LEKNAS-LIPI. Jakarta.	1970
1980	7	BPS 4	BPS. 1983b. Proyeksi Penduduk l ndonesia:1980 - 2000. Jakarta.	1980
	8	BPS 5	BPS. 1984. Proyeksi Penduduk Indonesia per Propinsi: 1980 -2000. Jakarta.	1980
	9	BPS 6	BPS. 1987. Proyeksi Penduduk Indonesia: 1985 - 2005. Berdasar Survey Populasi Intersensal 1985. Seri SUPAS No. 3	1985
	10	BKKBN	Pandjaitan, Sahala. 1986. Proyeksi dan Program Populasi Indonesia pada Keluarga Berencana Nasional di Indonesia: 1980 -2000. BKKBN, Jakarta.	1980
	11	LDUI 2	Ananta, Aris dan Adioetom, Sri Moertiningsih. 1990. Perkembangan Populasi Indonesia Sampai Ta hun 2005. LDUI, Jakarta.	1985
	12	LDUI 3	Ananta, Aris dan Anwar, Evi Nurvidya. 1992. Proyeksi Penduduk Propinsi Indonesia. 1990 -2020. LDUI, Jakarta.	1985
1990	13	LDUI 4	Ananta, Aris dan Anwar, Evi Nurvidya. 1994. Proyeksi Penduduk dan Tenaga Kerja Indon esia: 1995-2005. LDUI, Jakarta.	1990

⁵⁶ Salahudin Muhiddin, *The Population of Indonesia: Regional Demographic Scenarios Using a Multiregional Method and Multiple Data Resources* (Amsterdam: Rozenberg Publiher, 2002), p. 75-77.

	14	LDUI 5	Ananta, Ari (dan <i>Tim Proyeksi</i>). 1995. <i>Proyeksi Populasi 1995 -2005 (27 Propinsi)</i> . LDUI, Jakarta.	1990
	15	PPK-UGM	Sucipto, Tri dan Tukiran. 1992. <i>Proyeksi Penduduk Indonesia: 1990 -2050</i> . Seri Kertas Kerja No. 33, PPK-UGM	1990
	16	PPK-UGM	Tukiran. 1992. <i>Proyeksi Penduduk Indonesia: 1990 - 2010</i> . <i>Populasi 3 (2): 60 -77</i>	1990
	17	BPS 7	<i>Proyek Penduduk Indonesia: 1995 -2005</i> . 1998. BPS. Seri SUPAS S7.	1995
	18	BPS 8	<i>Proyek Penduduk Indonesia per Propinsi: 1995 - 2005</i> . 1998. BPS. Seri SUPAS S7.	1995

Diolah dari Salahudin Muhidin (2002)

Box.1. Tonggak Sejarah KB Indonesia

- 1945: Soekarno Hatta mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia dari Belanda, dengan demikian memulai perjuangan revolusioner yang berakhir pada 1949, ketika kemerdekaan Indonesia diakui PBB
- 1956: Agen Pembangunan Internasional Amerika mendanai dokto-doktor Indonesia untuk dilatih teknik-teknik KB di New York, Soekarno menolak dukungan politik pemerintah untuk program KB
- 1957: Berdiri Ikatan Keluarga Berencana sukarela sebagai organisasi swasta, non profit, dan Lembaga Swadaya Masyarakat menawarkan kotrasepsi untuk perempuan melalui jaringan besar klinik urban
- 1965: Terjadi percobaan kudeta menjatuhkan Soekarno dan munculnya pemerintahan Orde Baru Soeharto, yang resmi menjadi presiden pada Maret 1967
- 1970: Proyek Percontohan Jakarta merupakan aktivitas pemerintah pertama yang mendukung promosi pengendalian kelahiran kepada masyarakat
- Awal 1970: Lembaga Keluarga Berencana Nasional, yang pada

	1970 menjadi BKKBN didirikan
Awal 1980:	BKKBN menggulirkan strategi layanan kontrasepsi berbasis desa yang melibatkan pekerja lapangan, hirarki logistik, dan struktur manajemen.
1997:	Rupiah jatuh, krisis ekonomi Asia menghantam Indonesia
1998:	Orde Baru runtuh, era Reformasi dimulai
1999-2001:	Berbagai upaya dilakukan untuk mereformasi BKKBN dibawah Menteri Perberdayaan Perempuan
2001-07:	Badan Koordinasi itu diletakan dibawah arahan Menteri Kesehatan, meskipun Kepala Badan Koordinasi masih memiliki akses langsung yang sama mengkoordinasikan kementerian untuk kesejahteraan masyarakat (Terrence H. Hull, 2007)

Di masa Orde Baru kebijakan Keluarga Berencana dijadikan sebagai salah satu program prioritas. Kebijakan ini dimulai ketika pada 1967, Soeharto, Presiden Indonesia ke 2, menandatangani pakta perjanjian *United Nation Declaration on Population* bersama 29 pemimpin dunia lainnya. Pada 16 Agustus 1967, ia mencatat hasil perjanjian itu dalam sebuah pidatonya, "Indonesia harus benar-benar memperhatikan usaha pembatasan kelahiran". Dalam pidato itu jelas terbaca bagaimana asumsi-asumsi teori Malthusian mendasari kebijakan ini. Dinyatakan bahwa pertambahan penduduk di Indonesia adalah sedemikian rupa, sehingga dikhawatirkan akan tidak seimbang lagi dengan persediaan pangan, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang

diperoleh dari luar negeri.⁵⁷ Kebijakan ini dilanjutkan dengan pembentukan Lembaga Keluarga Berencana Nasional pada Oktober 1968, kemudian di tahun 1970 dibentuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Masalah kependudukan di masa ini dianggap menjadi satu bagian integral dari program pembangunan, dan pembangunan sulit dicapai jika “Indonesia tidak benar-benar memperhatikan usaha pembatasan kelahiran”.

“Dinamika kependudukan itu sendiri mempunyai hubungan yang kait mengkait dengan pertumbuhan ekonomi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pengembangan sumber daya alam dan energi, karena itu perlu ditangani dari pelbagai segi”.⁵⁸

Kebijakan ini rupanya disokong oleh kalangan akademis. Sampai dekade tahun 90-an tidak kurang dari 29 lembaga kependudukan terbentuk di Indonesia yang tersebar di berbagai perguruan tinggi. Mereka menyuplai pengetahuan yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam mengimplementasikan program ini melalui berbagai riset, pelatihan, dan konsultasi kebijakan. Kepala BKKBN waktu itu, Haryono Suyono, mengungkapkan tentang

⁵⁷ Suara Pembaruan, Desember 1988. Sebelum menjadi program yang diintegrasikan dengan Pelita I tahun 1969/70-1974/75, serangkaian diskusi, seminar, dan pertemuan digelar diantaranya; (1) Simposium Kontrasepsi di Bandung 1967 mendukung KB, (2) Kongres pertama PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) bulan Februari 1967 di Jakarta, (3) dimulainya proyek KB di DKI Jakarta bulan April 1967, (4) pada 16 Agustus Presiden Soeharto dalam pidatonya mendukung program KB, (5) November 1968 lahir Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN). Masri Singarimbun, “Keluarga Berencana Indonesia Sampai Abad XXI: Beberapa Aspek Program dan Sosial Budaya,” *Op.cit.*, hlm. 2-3.

⁵⁸ MT. Zein, *Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup* (Jakarta: Gramedia, 1979), hlm. 3 dalam “Kata Pengantar Masri Singarimbun,” dalam Paul R. Ehrlich, *Op.cit.*, hlm. XIV-XV.

hubungan timbal balik antara pemerintah dan lembaga studi kependudukan, “hubungan ini dilandasi empat hal pokok yaitu: (1) lembaga studi kependudukan sebagai evaluator non-partisan dari pelaksanaan program; (2) sumber data dan informasi program; (3) sumber kritik dan penyempurnaan program; (4) dan nara sumber ahli dalam berbagai masalah yang dihadapi pengelola program. Dari sini terlihat bagaimana lembaga-lembaga penelitian kependudukan diletakkan tidak jauh dari bagian pelaksana program yang berada di luar struktur resmi pelaksana kebijakan. Sehingga lembaga-lembaga penelitian kependudukan memiliki ruang lingkup yang tidak luas mencakup misalnya riset tentang asumsi-asumsi dasar kebijakan keluarga berencana dan cenderung menjadi terlalu “obyektif”⁵⁹.

Dalam konteks ini menarik menyimak hubungan antara kekuasaan dengan lembaga-lembaga riset di masa Orde Baru. Daniel (2003) ketika membaca hubungan antara lembaga-lembaga penelitian dengan kekuasaan menyebutkan bahwa terjadi persaingan keras antara otoritas ilmu pengetahuan, organisasi ilmu pengetahuan, modal yang mengatur organisasi ilmu pengetahuan dan rezim Orde Baru yang mengatur beberapa hal itu. Dengan begitu ada pertarungan yang tidak bebas dalam “medan kekuasaan” sehingga yang disebut sebagai “medan intelektual” berada di posisi bawahan, *dominated position*⁶⁰. Dalam konteks ilmu sosial, Soedjatmoko, seperti dikutip Daniel mencatat dua hal penting. *Pertama*, pusat pengetahuan sudah tidak lagi berpusat pada uni-

⁵⁹ “Lembaga Studi Kependudukan Tetap Perlu Selama Hasil Pembangunan untuk Manusia,” *Catatan Saran Kampus dan Lingkungan Hidup*.

⁶⁰ Daniel Dhakidae, *Cendekiawan dan Kekuasaan Dalam Negara Orde Baru* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 306.

versitas akan tetapi tersebar dalam organisasi-organisasi korporatis ilmu-ilmu sosial yang sudah tidak lagi dimonopoli oleh universitas. Lembaga-lembaga riset mulai bertumbuhan seperti cendawan di musim hujan. Apa yang dikhawatirkan Soedjatmoko adalah ilmu-ilmu sosial yang justru berkembang keluar, *extensif*, *intensif*, menjadi “obyektif”, dan tidak lagi “refleksi”. *Kedua*, di kalangan ilmuwan sosial terjadi pengelompokan kalau bukan perpecahan ke dalam kubu partisipasi dan kubu yang mempertahankan ilmu-ilmu sosial sebagai *critical science*. Ia melemparkan kritik pada apa yang disebutnya dengan *policy analysis* dan *policy research*, antara *disiplin research* dengan *policy research*.

Discipline research bermaksud untuk menambah perbendaharaan pengetahuan ilmiah tentang masyarakat di dalam bidang disiplin masing-masing, menambang pengembangan konsep-konsep analitis, dan untuk menyusun hipotesa-hipotesa yang dapat membuka pintu ke arah penambahan pengetahuan ilmiah selangkah lebih maju lagi. Apa yang disebut sebagai *discipline research* adalah apa yang kelak dikenal sebagai *basic research*, riset murni atau riset dasar. Sedangkan *policy research* cenderung langsung menghadapi keperluan para pembuat kebijakan, dan penyajian *policy alternatives* dengan implikasi-implikasi pada *trade off*-nya, yang dapat menyoroti pilihan dan keputusan yang harus diambil. Yang pertama tidak mempedulikan kebijakan negara dan yang kedua semata-mata berdasarkan kebijakan negara.⁶¹

Dengan melihat beberapa topik-topik penelitian yang dilakukan lembaga kependudukan yang dikepalai Masri terlihat kecenderungan dominasi *policy research* itu. Selama tahun-tahun 1974-

⁶¹ Soedjatmoko, “Etika Dalam Perumusan Strategi Penelitian Ilmu-ilmu Sosial,” dalam *Ibid.* hlm. 311-313.

1979, topik-topik penelitian yang dilakukan Masri dan beberapa kolega lainnya berada dalam kerangka bagaimana sebuah kebijakan bisa dilaksanakan secara efektif. Salah satunya adalah *Penelitian Fertilitas dan Keluarga Berencana Di Mojolama*. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan faktor-faktor yang tersebar pada tingkat fertilitas rendah, menemukan variabel-variabel yang mempengaruhi fertilitas, memperhatikan kebiasaan dan praktek yang berakibat langsung pada fertilitas, serta pengaruh pola perkawinan, perceraian. Tahun 1975 dilakukan penelitian *Vasektomi* untuk menemukan pola komunikasi akseptor tentang vasektomi, faktor-faktor yang menjadi motivasi untuk menerima vasektomi sebagai metode kontrasepsi. Di tahun yang sama juga dilakukan penelitian "*Evaluasi Dwikarti*" yang bertujuan untuk menilai seberapa jauh tujuan Dwikarti telah dicapai dan mengetahui faktor-faktor pendorong dan penghambat terhadap pelaksanaan proyek. Satu tahun berikutnya, 1976, dilakukan penelitian efektifitas *Proyek Kondom Melalui Pos* untuk mencari bentuk layanan baru KB tanpa tatap muka, dan mewujudkan keluarga kecil dalam masyarakat. Penelitian lainnya memiliki karakteristik yang sama dan semuanya menggunakan metode kuantitatif; *Transmigrasi di Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan, Nilai Anak: Hasil Penelitian di Jawa*.⁶²

Jauh dari membuat sebuah generalisasi, di masa ketika Negara Orde Baru memiliki kekuasaan besar menentukan arah sebuah pengetahuan itu, White (2006) melihat memang ada ketegangan antara kebijakan negara dengan kegiatan ilmiah, ketegangan yang kadang destruktif dan kadang juga kreatif. Kecenderungan negara yang otoriter dan terlihat sangat dominan

⁶² "Ringkasan Proyek Penelitian PPSK UGM 1974-1979", disunting oleh Tim PPSK UGM.

tidak selalu menampakkan suatu aktivitas ilmiah yang mengekor pada kehendak politik yang dianut negara, di sisi lain tetap masih muncul kegiatan ilmiah kritis meskipun tersebar.⁶³

Dari sisi metodologi, kecenderungan penelitian yang terlalu bersifat survei dan mengandalkan kuisisioner atau '*quantitative minded*' ternyata disadari oleh peserta lokakarya penelitian kependudukan di tahun 1976⁶⁴ itu. Ada wilayah-wilayah yang tidak dapat dijangkau oleh metode ini. Tetapi di masa itu, seperti diungkapkan Daniel sebagai berikut.

“Para akademisi kehilangan arah di tengah kekuatan negara dan modal. Indonesia dilanda oleh semangat berhalwa terhadap angka, *Zahlenfetishismus*. Di banyak tempat baik itu di universitas, departemen pemerintah, dan malah di luar dua tempat itu, ilmuwan pada dasarnya sudah menjadi teknisi. Penelitian yang mereka lakukan sudah menurun derajatnya sedemikian rupa sehingga penelitian tidak lebih dari dan merosot menjadi “kerajinan tangan”, pengumpul tabel. Para pemesan riset semakin memerosotkan dunia riset karena tidak masuk akal mereka kalau ada penelitian tidak mengandung tabel. Demikian pun para ilmuwan.”⁶⁵

Kegelisahan yang sama diungkapkan Masri bahwa ada kecenderungan dalam penelitian kependudukan di Indonesia untuk menekankan pada survei baru, tanpa memperhatikan secukupnya hasil survei yang sudah ada dan data primer apa

⁶³ Benjamin White, “Di Antara Apologia Diskursus Kritis: Transisi Agraria dan Pelibatan Dunia Ilmiah di Indonesia,” dalam Vedi R. Hadiz dan Daniel Dhakidae (ed.), *Ilmu Sosial dan Kekuasaan di Indonesia* (Jakarta: PT. Equinox Publishing Indonesia, 2006), hlm. 119.

⁶⁴ Masri Singarimbun, “Penelitian Kependudukan di Indonesia,” *Makalah* disiapkan untuk ceramah pada Penataran Asisten Peneliti Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta, 18 Mei 1979, hlm. 5.

⁶⁵ Daniel Dhakidae, *Cendekiawan dan Kekuasaan Dalam Negara Orde Baru*, *Op.cit.*, hlm. 336.

yang tersedia. Ini tentunya berhubungan pula dengan kenyataan bahwa *survey* baru melalui proyek penelitian menghasilkan uang, sedangkan penelitian yang memanfaatkan data yang sudah ada mungkin sulit mendapatkan dananya.⁶⁶ Masri menilai lokakarya itu tidak menyinggung pendekatan antropologi yang menggunakan teknik observasi, juga tidak membicarakan *grounded research* yang mulai banyak dibicarakan di Indonesia. Tetapi sayang dalam makalah itu, kritik yang dilontarkannya diperhalus dan mengindikasikan ia tidak terlalu “terganggu” oleh perkembangan penelitian kependudukan di Indonesia yang masih didominasi riset-riset teknis. Di akhir makalahnya ia menulis, “akhirnya yang penting adalah hasil yang bermutu, metoda apa pun yang dipakai”.⁶⁷

Meskipun banyak berkecimpung dalam penelitian *survey* sebagaimana hal ini menjadi kerja utama lembaga yang dipimpinnya Masri tetap menggunakan pendekatan lain dari tradisi kualitatif. Di Lembaga Kependudukan UGM dan di beberapa kesempatan seminar atau lokakarya ia pun memperkenalkan *grounded research*. Dalam sebuah paper tentang metodologi riset ia menilai bahwa “pemujaan” terhadap penelitian verifikasi mengandung bahaya dan kelemahan, yaitu proses sosial tidak dapat diketahui melalui pendekatan itu, dan teori tidak berkembang jika penelitian membatasi diri pada verifikasi. Padahal penelitian sosial bertujuan menambah pengertian dan penjelasan tentang proses sosial, fenomena sosial, dan hubungan antar variable sosial. Dalam *grounded research*, teori dikembangkan oleh

⁶⁶ Masri Singarimbun, “Penelitian Kependudukan di Indonesia,” *Op.cit.*, hlm. 2

⁶⁷ *Ibid.* hlm. 6

peneliti selama melakukan penelitian, dikembangkan dari data yang dihimpun, datalah yang bicara. Upaya ini berlanjut, pada 1987 dalam sebuah Lokakarya *Kelangsungan Hidup Anak*, ia memperkenalkan apa yang dikenal dengan *focus group research*. Metode ini berangkat dari model riset kualitatif tetapi tidak meninggalkan sama sekali pendekatan-pendekatan kuantitatif.⁶⁸ Di tahun yang sama bulan Februari Masri menulis sebuah makalah tentang “*Penelitian Kualitatif*” yang disampaikan dalam Lokakarya Tenaga Kerja Sektor Informal di Pusat Penelitian Kependudukan Universitas. Tulisan itu lebih banyak membahas metodologi dan asumsi-asumsi dasarnya, menunjukkan kelemahan dan kekuatan masing-masing metodologi, terdapat juga di dalamnya pembahasan tersendiri mengenai *grounded research*.⁶⁹

Rekaman perjalanan penelitian Masri selama bertahun-tahun semenjak ia baru menjadi seorang asisten peneliti M. A. Jспан hingga memimpin sebuah lembaga penelitian (PPSK) menunjukkan betapa tidak memadainya sebuah penelitian jika hanya menggantungkan pada teknik *survey* semata dan mengandalkan kehandalan statistik. Tergambar jelas bagaimana Masri mampu mengungkap hal-hal yang tidak terlihat oleh *survey-survey* berskala besar, sesuatu yang tidak terjaring oleh daftar pertanyaan di kuisioner, dan hal itu justru memunculkan sesuatu yang lain yang sangat penting yang awalnya tidak dipertimbangkan saat

⁶⁸ Masri Singarimbun, “Focus Group Research,” Catatan untuk ceramah pada Lokakarya Kelangsungan Hidup Anak di PPK-UGM Yogyakarta, 14-26 September 1987.

⁶⁹ Masri Singarimbun, “Penelitian Kualitatif”, Disusun untuk Lokakarya Tenaga Kerja Sektor Informal di Pusat Penelitian Kependudukan Universitas, Februari 1987.

menyusun rencana penelitian. Disadari bahwa terdapat hubungan yang sangat halus dan rumit antara variabel-variabel demografi dengan faktor-faktor sosial budaya dan faktor-faktor lainnya yang tidak terungkap hanya dengan wawancara formal. Pada bulan Juli 1987 Masri menyiapkan sebuah makalah yang disampaikan dalam sebuah lokakarya metodologi penelitian. Dalam makalah itu ia mengajukan apa yang disebutnya dengan “*Pendekatan Demografi Mikro*”. Pendekatan ini bukan hal baru karena secara substansial Masri pada dasarnya sudah mempraktekannya dalam penelitian tetapi lima tahun sebelum itu (1982) IUSSP Council membentuk sebuah kelompok kerja dan kemudian pada Juni 1983 menyelenggarakan pertemuan pertama di London untuk merumuskan ciri-ciri demografi mikro. Ciri-ciri demografi mikro di antaranya sebagai berikut.⁷⁰

(1) small scale and hence low cost enquiries: economical ways of approaching some major questions, (2) intense study of contemporary or historical demographic issues involving the study of a particular population in its proper cultural and economic context, (3) a diversity of research methods, including a flexibility of approach and probably a good deal of eclecticism, (4) continuity of involvement by the researcher both during data collection and analysis.

Penemuan-penemuan baru terkadang dipicu oleh sebuah peristiwa tertentu atau dari sebuah obrolan ringan yang tidak disengaja tetapi mampu mengungkap hal-hal yang tersembunyi.

⁷⁰ Masri Singarimbun, “Pendekatan Mikro Demografi, Pengalaman Memadukan Antropolgi dan Demografi,” *Makalah* untuk Lokakarya Penerapan Kombinasi Metode Kualitatif dan Kuantitatif dalam Penelitian Kelangsungan Hidup Anak di Indonesia di Jakarta 6-10 Juli 1987, hlm. 3. Dimuat kembali dengan beberapa tambahan di “Pendekatan Mikro Demografi, Pengalaman Memadukan Antropolgi dan Demografi,” *Majalah Demografi*, No. 31 (Juli 1989).

Pada tahun 1960-1962 misalnya ketika ia melakukan penelitian di Kuta Gamber untuk disertasinya, sebuah lokasi yang jauhnya empat jam perjalanan. Riset itu pada awalnya ingin melihat masalah kekerabatan dan perkawinan. Pada suatu pagi terjadi keributan di desa: seorang ibu berteriak kesakitan karena menggugurkan. Kami berkerumun dan situasi menjadi kaku karena persoalan yang dihadapi (sebaiknya) tidak dibicarakan secara terbuka. Sejak itu Masri dan istrinya mulai menghimpun informasi tentang teknik-teknik pengguguran tradisional. Di catat 15 kasus secara terperinci. Dipelajari ramuan yang dipakai, efek sampingan, siapa yang menolong, dan bagaimana cara pembayaran kepada dukun. Berbeda dengan di Jawa dimana teknik pengguguran terutama mekanistik di masyarakat Karo ini caranya terutama kimiawi, dengan memakai tumbuhan tertentu yang namanya *tengkua*.⁷¹

Tentang praktek abtinensi yang digunakan oleh masyarakat untuk mengatur jarak kelahiran ditemukannya dalam sebuah kunjungan tidak resmi di bulan April 1969 di rumah Prof. Djodjodigoeno, Masri mengungkapkan:

Kunjungan kami suami istri kepada Prof. Djodjodigoeno di Cemorojajar mempunyai nilai yang tak terhingga. Kepada beliau saya tanyakan mengenai program keluarga berencana yang mulai dicanangkan pemerintah. Jawab beliau: “Saya tidak percaya kepada KB, tidak percaya kepada alat-alat itu. Kalau tidak ingin punya anak, jangan kumpul”. Pada mulanya saya kira beliau bersenda gurau, tetapi ternyata beliau serius. Saya sadar untuk pertama kali bahwa salah satu cara untuk melaksanakan keluarga berencana adalah dengan cara tidak kumpul atau abtinensi. Atas dasar

⁷¹Masri Singarimbun, “Pendekatan Mikro Demografi, Pengalaman Memadukan Antropolgi dan Demografi,” *Op.cit.* Dimuat kembali dengan beberapa tambahan di “Pendekatan Mikro Demografi, Pengalaman Memadukan Antropolgi dan Demografi,” *Op.cit.*

itu kami mengadakan tes di Sriharjo, dan di luar dugaan kami, memang abtinensi dipraktikkan oleh responden. Akhirnya inilah penemuan yang penting dalam penelitian di Sriharjo,...cara itu tidak pernah saya temukan dalam literatur.⁷²

Namun dalam pengakuan Masri, hasil temuannya itu justru menjadi bahan tertawaan para dokter-dokter di Yogyakarta ketika ia menyampaikan hasil temuannya itu karena mereka tidak percaya penduduk Sriharjo mempraktikkan abtinensi. Demikian pula ketika ia mempresentasikan hasil penelitiannya di Canberra dalam sebuah seminar yang diselenggarakan oleh *Department of Demography*, hasil temuannya dicurigai dan dianggap mengada-ada.⁷³

Metode yang sama telah membuatnya memperhatikan persoalan kemiskinan ketika melakukan penelitian tentang fertilitas, aspek ini sungguh tidak dapat diabaikan. "Sungguh hal yang segera saya rasakan adalah hubungan positif antara status sosial ekonomi, fertilitas, dan jumlah anak yang hidup. Padahal di dalam literatur kependudukan sering dikemukakan hubungan sebaliknya, yakni hubungan yang negatif antara status sosial ekonomi dengan fertilitas. "*The rich gets richer and the poor gets children*".⁷⁴ Penelitian fertilitas di Sriharjo (1969-1970) itu membuka matanya terhadap persoalan kemiskinan yang ternyata sangat kronis di desa itu. Hal ini dipicu oleh sebuah peristiwa yang dialami tetangga sebelah rumah di mana Masri dan istrinya tinggal di desa itu. Masri mengungkapkan:

⁷² *Ibid.*, hlm. 5.

⁷³ Masri Singarimbun, "Pendekatan Mikro Demografi, Pengalaman Memadukan Antropolgi dan Demografi," *Op.cit.* Dimuat kembali dengan beberapa tambahan di "Pendekatan Mikro Demografi, Pengalaman Memadukan Antropolgi dan Demografi," *Op.cit.*

“Lalu musibah menimpa tetangga saya, Pak Merto, yang saya kenal dengan baik, seorang buruh tani yang men-*deres* kelapa. Dia kena flu dan penyakit yang relatif sederhana itu membawa malapetaka. Penyakit flu itu ternyata *luks* untuk orang miskin. Tak sembuh dengan pengobatan rumah dan pengobatan dukun, dia pergi berkonsultasi dengan dokter di Bantul. Ongkosnya Rp. 250, sedangkan pendapatannya per hari hanya Rp. 40. Sudah habis Rp. 1300 pengeluarannya tetapi penyakitnya tidak sembuh juga. Lalu dia meminjam Rp. 700 kepada tetangga sebelah selatan rumah kami dan dihitung hutangnya 20 kg gula. Harga gula di pasar (waktu itu) Rp. 52.50/kg...peristiwa lainnya; seorang mbah yang tidak makan siang dan makanan yang ada untuk cucunya; responden itu meneteskan air mata ketika ditanyakan berapa lama memakan nasi dalam setahun, ternyata dia kehabisan bahan makanan dan tidak tahu apa yang akan dimakan pada hari itu...”⁷⁵

Temuan ini juga mendapat respon yang kurang simpatik, malahan Masri dituduh membesar-besarkan masalah kemiskinan dan ditafsirkan dapat merongrong pemerintah, dan dituduh pesimis terhadap pembangunan di Indonesia. Bahkan banyak ahli ekonomi yang tidak percaya terhadap keadaan di Sriharjo itu. Tetapi lambat laun orang percaya setelah terjadi peristiwa di Jawa Barat di mana penduduk makan *enceng gondok* di saat musim paceklik.⁷⁶

Respon publik yang demikian itu tidak mengherankan dan menunjukkan tiga hal. *Pertama*, dunia penelitian di Indonesia pada saat itu masih sangat didominasi oleh pendekatan kuantitatif. *Kedua*, kebanyakan riset yang dilakukan adalah riset-riset yang menggunakan *survey* dalam skala besar. Dalam riset seperti itu pendekatan utamanya adalah *etik* di mana peneliti membawa

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 7.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 8.

⁷⁶ *Ibid.*

konsep-konsep teoritik yang diperolehnya dari literatur kemudian diturunkan menjadi metode dan kuisioner sehingga tidak begitu mempedulikan konsep-konsep yang sudah ada di alam pikiran masyarakat yang diteliti. *Ketiga*, sebagaimana diungkap Soedjatmoko di atas dunia penelitian ilmu sosial di Indonesia masih sangat kurang dengan model *discipline research* yang justru dapat menemukan kenyataan-kenyataan baru yang bisa jadi sangat bertentangan dengan asumsi-asumsi teoritik yang terdapat di dalam literatur. Hanya dengan cara inilah maka pada dasarnya teori baru dapat dibangun sesuai dengan realitas ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia yang sesungguhnya. Di samping itu, kolonisasi metodologi dapat dikurangi bahkan dihindari sama sekali. Sebab sebuah teori selalu berangkat dari suatu kenyataan historis tertentu dalam dinamika suatu masyarakat tertentu. Sebuah teori juga pada dasarnya membawa nilai-nilainya sendiri dari mana ia didapatkan. Di akhir tulisan itu Masri menyatakan: “Secara umum kami berpendapat bahwa penelitian yang intensif dan keterlibatan yang besar tersebut mempunyai tingkat kecermatan yang lebih tinggi dari pada survei-survei yang besar yang kami lakukan”.⁷⁷

Meskipun ungkapan di atas menunjukkan kesadaran tentang sumbangan penting pendekatan penelitian dengan intensitas keterlibatan yang tinggi dengan tineliti (subyek yang diteliti), tetapi tidak sulit menjelaskan mengapa Masri dan lembaga yang dipimpinya mengusung metodologi survey, seolah menjadi ciri

⁷⁷ Masri Singarimbun, “Pendekatan Mikro Demografi, Pengalaman Memadukan Antropolgi dan Demografi,” *Op.cit.* Dimuat kembali dengan beberapa tambahan di “Pendekatan Mikro Demografi, Pengalaman Memadukan Antropolgi dan Demografi,” *Op.cit.*, hlm. 10.

penting jenis penelitian yang dilakukan Lembaga Kependudukan saat itu. Hal ini lebih didorong oleh corak studi demografi yang lebih mungkin menggunakan metode survey karena berkaitan dengan populasi yang luas daripada *grounded research*. Meskipun demikian Masri dalam beberapa penelitian selain menggunakan pendekatan kuantitatif juga melengkapinya dengan studi kasus melalui observasi terlibat yang intens seperti diuraikan di atas. Disadari bahwa terdapat wilayah-wilayah tertentu yang tidak tergapai jika menggunakan teknik survey semata. Oleh karena itu diperlukan suatu pendekatan lain yang lebih memungkinkan peneliti mengungkapkan data tersembunyi lainnya. Latar belakang sebagai antropolog dengan jam terbang penelitian yang tinggi memungkinkan Masri untuk menjalankan metode ini.

Untuk lebih meningkatkan kualitas penelitian khususnya dalam segi metode survey ini Lembaga Kependudukan UGM pada masa itu menyelenggarakan pelatihan intensif dan berkesinambungan tentang metodologi penelitian terutama metode survey. Pelatihan tersebut kemudian mendorong Masri dan beberapa kolega sesama pegiat Lembaga Kependudukan UGM menyusun sebuah buku yang berisi segala macam teknik penelitian survey. Buku itu berjudul *Metode Penelitian Survey* dieditori oleh Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi. Terbit pertama kali tahun 1982 dan hingga Agustus 2008 sudah mencapai cetakan ke sembilan belas⁷⁸. Hal ini menunjukkan luasnya penggunaan buku tersebut di masyarakat. Banyak kalangan menilai buku tersebut merupakan panduan praktis penelitian survey yang ada dalam bahasa Indonesia.

⁷⁸ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi (edt), *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 2008)

3. Kependudukan: Masalah dan Pemecahan

Di tahun 1960-an dunia mengalami kesadaran yang hampir sama bahwa pengendalian pertumbuhan penduduk merupakan unsur penting dalam pembangunan ekonomi. Berdasar hal ini berbagai negara berkembang berupaya melaksanakan program keluarga berencana. Ada anggapan bahwa jika program ini dijalankan dengan baik akan memberikan keuntungan yang besar. Setiap dolar yang diinvestasikan akan kembali menjadi 22 dollar.⁷⁹

Saat-saat ketika Masri menekuni masalah kependudukan bertepatan dengan ketika pada dekade 60-an itu, Indonesia meletakkan pondasi awal penyelenggaraan program keluarga berencana. Masri tampak meyakini bahwa pengendalian jumlah penduduk adalah bagian integral dari upaya pembangunan bangsa ini, karena itu ia secara total melibatkan dirinya dalam penyelenggaraan program ini, hampir sepanjang karirnya sebagai ilmuwan kependudukan di Indonesia. Entah diakui terkait atau tidak dengan asumsi Malthusian, tetapi tampak dari keseluruhan program ini bahwa besarnya jumlah penduduk adalah masalah besar. Jika tidak ada tindakan yang terencana dan sistematis ledakan penduduk mengancam kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Program dan kebijakan apapun yang akan dilakukan negara, atau siapapun juga, masalah kependudukan tidak dapat diabaikan begitu saja. Masalah kependudukan, bagaimanapun, terkait dengan penyediaan kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, tanah, persediaan pangan, pemukiman, dan sebagainya, pendek-

⁷⁹ Masri Singarimbun, "Pencapaian Program Keluarga Berencana di Indonesia," *Prisma*, No. 3 (1988), 3.

nya segala sesuatu yang terkait dengan hidup dan kehidupan, serta masalah kemakmuran dan kesejahteraan manusia.

Di tahun 1815 sensus Rafles menyebutkan penduduk Jawa sekitar 4,5 juta. Di tahun 1900 jumlah itu mencapai 28,5 juta dengan pertumbuhan luar biasa rata-rata 2,2 % per tahun. Tahun 1961 jumlahnya mencapai 63,1 juta di Jawa dan Madura, peningkatannya 22,2 juta dari sensus tahun 1930. Tahun 1970 total populasinya sudah mencapai 73,8 juta. Persoalan pangan dan kemiskinan segera saja muncul sebagai akibatnya. Karena itu, politik etis diterapkan untuk mengatasi persoalan ini meliputi pendidikan, irigasi, dan kolonisasi (transmigrasi). Berbeda dengan perspektif lain yang melihat perbaikan pendidikan, irigasi, dan kolonisasi (transmigrasi) yang dilakukan pemerintah kolonial sebagai bagian dari politik penguasaan dan pelanggaran kekuasaan terhadap bangsa Indonesia, dan bagian dari melindungi kepentingan ekonomi kolonial atas pengerukan sumber daya alam Indonesia, Masri justru melihatnya sebagai solusi yang ditempuh pemerintah kolonial untuk mengatasi masalah kependudukan di Indonesia pada saat itu.⁸⁰ Kepadatan jumlah penduduk yang demikian besar – di daerah pedesaan tingkat kepadatannya mencapai 4000 jiwa/km persegi – menurut Masri memunculkan akibat pada persoalan tanah dan pangan, dan selanjutnya memunculkan deforestasi, banjir, erosi, dan kekurangan air untuk irigasi.⁸¹

⁸⁰ Masri Singarimbun, "Some Consequences of Population Growth in Java," This paper is presented at SEADANG Population Seminar on April 6-8th 1979 in Elkrige, Maryland, USA, p.1-2. Lihat juga Masri Singarimbun, "Masalah Kependudukan," Makalah disiapkan untuk Panel Diskusi Konsultasi Kependudukan Dewan Gereja-gereja Indonesia di Jakarta, 7 November 1981, hlm.1-2.

⁸¹ Masri Singarimbun, "Some Consequences of Population Growth in Java," *Ibid.*, p.5. Lihat juga Masri Singarimbun, "Masalah Kependudukan," *Ibid.*

Fragmentasi tanah mulai terjadi di Indonesia sejak abad 19, pada saat di mana populasi penduduk di pedesaan meningkat sangat cepat dari pada ketersediaan tanah yang dapat dibuka untuk pertanian. Semua tanah subur pada 1900 sudah dijadikan lahan pertanian, di samping itu kesulitan ekonomi mendorong penduduk tak bertanah menjadikan bukit curam dan wilayah-wilayah yang tidak subur sebagai lahan pertanian. Hal ini pada tahap selanjutnya mengakibatkan penggundulan hutan, erosi, dan banjir. Pertambahan penduduk mengakibatkan petani semakin tidak memiliki cukup luasan tanah yang bisa menghidupi mereka, untuk dapat hidup setidaknya seorang petani harus memiliki sekurang-kurangnya 1 *bau* (0,709 ha) sawah, dan 2 *bau* lahan kering. Kenyataannya di awal abad ini mayoritas petani justru memiliki kurang dari jumlah itu. Pembagian warisan tanah di tengah kepadatan jumlah penduduk karena semakin bertambahnya anggota keluarga juga faktor yang semakin mempersempit luasan tanah pertanian. Pertambahan jumlah penduduk dan lahan yang semakin sempit memunculkan banyak orang yang tak bertanah beralih menjadi buruh tani. Banyaknya jumlah buruh tani semakin memperkecil pendapatan mereka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Jika kondisi ini terus berlanjut maka membengkaknya jumlah pengangguran tidak dapat dihindari, dan dapat melahirkan tindakan-tindakan destruktif lainnya. Urbanisasi adalah akibat tak terelakkan dari padatnya penduduk di pedesaan dan desa mereka tidak lagi mampu menampung hidup mereka. Semua itu, menurut Masri, disebabkan oleh fertilitas yang tidak dikendalikan.⁸²

⁸² Lihat “Kurangnya Kesempatan Kerja Menarik Orang Bekerja Sebagai Buruh Tani”, *Sinar Harapan*, Selasa, 7 Juli 1981., Masri Singarimbun, “Beberapa Aspek Kependudukan dan Land Reform,” hlm. 3.

Pangan juga merupakan masalah yang genting ketika jumlah penduduk demikian padat. Di Jawa beras dan jagung adalah makanan pokok sampai menjelang akhir abad 19. Namun sejak pergantian abad itu (-19) ubi – yang kandungan proteinnya 1,5 % lebih sedikit dari beras yang 7,5 % dan jagung 9 % – sudah makin banyak dikonsumsi baik sebagai pelengkap atau pengganti beras. Masri menegaskan bahwa semakin banyak produksi dan konsumsi ubi di Jawa menunjukkan adanya problem pangan yang nyata. Hal ini dikuatkan dengan pendapat Napitupulu berikut.

When a district produces more than 50 kg of cassava per head per year, it is very likely that many of the inhabitants use it as their staple food, which means that many will suffer from malnutrition (Napitupulu, 1968)⁸³

Malnutrisi pertama kali terjadi di Jawa Tengah yang merupakan propinsi terpadat di Jawa dan kemudian menyebar ke Jawa Timur dan Jawa Barat. Sebuah studi yang dilakukan Timer (1961) menunjukkan bahwa kasus *malnutrisi* adalah penyebab utama kematian anak-anak dari usia 1 sampai 7 tahun di Yogyakarta.⁸⁴ Dari Sriharjo, Masri melihat dan pelan-pelan menyadari bahwa desa yang terlampau padat penduduknya bisa dipastikan terdapat masalah kemiskinan yang meluas, pengangguran, dan masalah kekurangan gizi. Dalam tulisan lainnya, Masri menyebutkan bahwa beberapa negara yang mengalami wabah kematian akibat kelaparan karena kekurangan makanan dan sekaligus mene-

⁸³ Masri Singarimbun, "Some Consequences of Population Growth in Java," *Op.cit.*, p. 5.

⁸⁴ M. Timer, *Child Mortality and Population Pressure in the D.I. Yogyakarta, Java, Indonesia* (Rotterdam: Bronder-offset, 1961), p. 307. dalam Masri Singarimbun, "Some Consequences of Population Growth in Java," *Ibid.*, p. 7-8.

guhkan suatu korelasi positif antara kepadatan penduduk di satu sisi dan persoalan pangan di sisi lain.⁸⁵

Pada tahun 2005, hampir 10 tahun setelah Masri meninggal persoalan malnutrisi masih juga terjadi di Indonesia, NTB. Tetapi apakah hal itu terkait dengan membengkaknya jumlah penduduk Indonesia atau disebabkan oleh kemiskinan yang kronis, dan/atau masalah manajemen pengelolaan pemerintahan dan penyediaan pangan nasional yang kurang merata masih perlu diselidiki. Hanya saja jika hal ini dikaitkan dengan keberhasilan program pengendalian jumlah penduduk yang dikatakan berhasil tampaknya kasus busung lapar tersebut justru mematahkan asumsi bahwa persoalan kekurangan gizi atau pangan dapat ditanggulangi salah satunya dengan program keluarga berencana. Banyak pihak yang menilai bahwa program pengendalian ledakan penduduk hampir 10 tahun terakhir ini terabaikan. Akibatnya, tingkat kesuburan (*total fertility rate*/TFR) yang turun begitu pesat dari 5,61 tahun 1971 menjadi 2,78 tahun 1997, berhenti pada angka 2,60 sejak tahun 2002 sampai 2007. Artinya, rata-rata perempuan usia subur di Indonesia memiliki 2,6 anak. Ditambah persentase peserta Keluarga Berencana yang juga nyaris tak berubah 60 persen (2002) dan 61 persen (2007).⁸⁶

Kondisi kelebihan penduduk tersebut juga memunculkan persoalan kemiskinan yang mengganggu proses-proses sosial. Jumlah orang dengan status sosial dan ekonomi rendah meningkat dan bersamaan dengan itu meningkat pula jumlah orang yang

⁸⁵ Masri Singarimbun, "Some Consequences of Population Growth in Java," *Op.cit.*, p. 5-8.

⁸⁶ Agnes Aristiarini, "Mereposisi Keluarga Berencana", *Kompas*, 16 April 2009.

punya tetapi tidak memiliki harapan yang lebih cerah di masa depan. Kelompok ini memiliki pandangan hidup yang berorientasi ke 'masa kini' semakin kuat. Hal ini tidak mengherankan, misalnya, seorang petani yang memiliki beberapa luas tanah tetapi hasil sawahnya tidak cukup untuk memenuhi yang dia butuhkan, menjual sebagian besar dari sedikit panen yang dihasilkannya, segera setelah ia memanennya. Ia melakukan itu karena ia tahu bahwa harga gabah saat panen sangat rendah dan kemudian kondisi memaksanya membeli makanan ketika harga relatif tinggi. Ia melakukannya karena, di masa panen, dia menilai bahwa uang tunai lebih tinggi nilainya daripada beras yang diproduksinya, dan dia tahu bahwa dia akan membutuhkan uang itu di kemudian hari. Dalam hal ini dia terpengaruh oleh kecenderungan konsumtif dan kebutuhan-kebutuhan sosial seperti membeli sesuatu yang menyenangkan anak-anaknya atau menyelenggarakan *selamatan*⁸⁷. Mungkin orang lainya melakukan hal demikian dengan alasan yang berbeda, misalnya, dia harus menjual hasil sawahnya karena dia memiliki tanggungan hutang yang harus segera

⁸⁷ Thomas Schweizer (2000) memahami selamatan sebagai ritual untuk melawan pengaruh-pengaruh jahat dan memberi dorongan kepada seseorang yang ingin secara mulus mencapai tahap perjalanan hidup berikutnya (kelahiran anak, sunatan, perkawinan, dan kematian), atau terjaga dalam usaha yang baru (pindah rumah, beralih pekerjaan, dan sebagainya). Ritual ini, dalam pandangan Schweizer, multifungsi; ia menunjukkan penghormatan yang tinggi terhadap para leluhur dan tradisi Jawa; ia memperhatikan kewajiban agama—dengan memberikan perlakuan yang sama terhadap Muslim sinkretis (*kejawan*) dan Muslim ortodoks (*santri*) di desa; ia adalah kesempatan untuk makan besar di desa; dan ia memperlihatkan nilai kerukunan sosial yang senantiasa dirindukan, tetapi tidak selalu bisa dicapai dalam kehidupan sehari-hari. Thomas Schweizer, "Slametan, Solidaritas dan Ritualisme Orang Jawa", *Jurnal Gerbang* Vol. 07, No. 03 (Mei-Juli 2000), 49-60.

dibayarnya dan yang lain lagi bahkan harus menjual hasil sawah sebelum tanamannya siap untuk dipanen. Pada akhirnya, ekonomi kelangkaan (*economy of scarcity*) ini menempatkan orang-orang miskin itu pada posisi khusus dalam relasinya dengan orang lain yang strata ekonominya lebih tinggi. Sebagai orang yang posisinya lebih secara sosial, para buruh itu di bawah kondisi kelangkaan menerima prinsip-prinsip kekuasaan; ia menerima posisi subordinasinya, dan tanggungjawab sesuai dengan posisi subordinasinya.⁸⁸ Dari sini relasi sosial yang disebut dengan patron-klien muncul sebagai bentuk ketimpangan pemilikan properti.

Di tahun 1981, Masri melihat bagaimana hubungan positif antara kepadatan penduduk dengan meningkatnya jumlah buruh tani yang juga bagian dari sebab kurangnya kesempatan kerja yang seharusnya disediakan pemerintah. Jumlah petani gurem di Indonesia yang meningkat 5 kali lipat dari jumlah tahun 1973, sebenarnya sudah bisa diramalkan karena beberapa faktor. *Pertama*, sistem pemilikan tanah keluarga yang dipecah-pecah untuk warisan, di samping bertambahnya jumlah penduduk absolut yang mencari pekerjaan yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja yang tersedia. Sistem pewarisan yang seperti ini menyebabkan pemilikan tanah menjadi semakin sempit, yang semula 1 ha dipecah menjadi 1,5 ha, kemudian dipecah lagi menjadi 1,4 ha, dan seterusnya sesuai dengan pertambahan penduduk maka proses itu tidak dapat dihindarkan. *Kedua*, ada gejala polarisasi di mana yang kaya membeli tanah milik orang miskin yang mengalami kesulitan ekonomi sehingga akhirnya petani kecil itu kehilangan sama sekali tanahnya dan menjadi

⁸⁸ Masri Singarimbun, "Some Consequences of Population Growth in Java," *Op.cit.*, p. 13-14.

buruh tani.⁸⁹ Di Jawa jumlah buruh tani yang tidak memiliki tanah sama sekali cukup besar 28,1 pCt, dan yang memiliki 500-2000 meter jumlahnya 47,2 pCt. Sehingga bila dijumlahkan maka orang mempunyai tanah sebesar kurang dari 1/5 ha sekitar 75,3 pCt. Sedangkan yang punya tanah 1 ha jumlahnya hanya 24 pCt. Tanah di Jawa jumlahnya sudah sangat terbatas, dan kalau pun dibagi-bagi rata tetap tidak mencukupi. Bagi Masri hal ini tidak berarti bahwa tidak perlu *land reform* tetapi tidak cukup jika jalan keluarnya hanya *land reform* tanpa dibarengai dengan penanganan bidang-bidang lainnya, seperti menciptakan kesempatan kerja yang luas, pemerataan pendapatan, perbaikan infrastruktur daerah tertinggal dan keluarga berencana dengan dua anak cukup.⁹⁰

Persoalan ini selanjutnya membawa dampak meningkatnya laju urbanisasi. Masri mencatat bahwa persoalan urbanisasi di Asia memiliki karakteristik yang hampir sama. Pertumbuhan urbanisasi umumnya tidak disebabkan oleh faktor penarik, seperti tersedianya lapangan kerja, tetapi lebih disebabkan faktor pendorong berupa pengangguran dan kemiskinan, dan seringkali oleh ketiadaan jaminan keamanan fisik. Pikiran ini juga tampak ketika ia membahas masalah gelandangan yang semakin banyak pada dekade 80-an. Masri melihat banyaknya gelandangan di kota-kota besar adalah akibat dari ledakan penduduk. Umumnya mereka berasal dari desa-desa sehubungan dengan makin meningkatnya pemilikan tanah, banyaknya buruh tani, dan sulitnya

⁸⁹ Masri Singarimbun, "Kurangnya Kesempatan Kerja Menarik Orang Bekerja Sebagai Buruh Tani", *Sinar Harapan*, Selasa, 7 Juli 1981.

⁹⁰ Masri Singarimbun, "Kurangnya Kesempatan Kerja Menarik Orang Bekerja Sebagai Buruh Tani", *Op.cit.*

mencari pekerjaan di desa sepanjang musim. Akibatnya tidak ada pilihan lain selain pergi ke kota untuk mencari pekerjaan yang dianggapnya bisa memberikan harapan. Jika apa yang mereka inginkan itu tidak mereka dapatkan di kota, pilihan lain adalah hidup menggelandang, ada yang mengemis, mencari puntung rokok, mengumpulkan karton-karton dan plastik. Mereka yang punya keberanian, ada yang jadi pencuri atau penodong.⁹¹ Semua persoalan di atas ditumpukan kepada ledakan penduduk yang begitu besar dan belum berhasil dikendalikan. Faktor lain luput dari penglihatan Masri yang juga merupakan bagian dari penyebab merebaknya urbanisasi dan berbagai persoalan kemiskinan di kota-kota besar. Kebijakan pemerintah berorientasi pertumbuhan dimulai pada 1967-an bersama dengan investasi swasta membangun pusat-pusat pertumbuhan di kota-kota besar. Hal ini juga ikut merangsang konsentrasi populasi yang hidup di wilayah-wilayah urban. Konsentrasi populasi di dalam dan di sekitar kota-kota besar dimana pergerakan barang-barang dan jasa-jasa demikian besar, menghasilkan urbanisasi di wilayah-wilayah yang dekat dengan pusat pertumbuhan. Segera tampak dari konsentrasi populasi itu adalah kualitas lingkungan yang buruk, kondisi pemukiman yang tidak sehat, sanitasi dan air bersih yang kian sulit didapat. Industri manufaktur yang dibangun dari investasi swasta itu memerlukan prasyarat keterampilan baru yang tidak dimiliki pendatang dari desa yang terdesak kondisi kemiskinan. Sehingga industri-industri itu tidak dapat menyerap makin banyaknya populasi urban. Keterampilan agraris yang lama tidak lagi *compatible* dengan modus produksi

⁹¹ “Penyebab Gelandangan: Ekonomi, Kesempatan Kerja, dan Ledakan Penduduk”, *Sinar Harapan*, Jum’at, 26 Februari 1982.

kapitalisme baru dalam daur industrialisasi di Indonesia.⁹²

Analisis demikian tidak begitu muncul dalam pemikiran Masri tentang kemiskinan perkotaan dan kondisi masyarakat urban. Hal ini menjadi jelas ketika melihat situasi traumatik yang menjadi dasar bangunan kekuasaan di Indonesia pada saat itu. Analisis ilmuwan sosial tampak sangat berhati-hati dan menghindari peletakkan sebab kemiskinan sebagai masalah struktural. Alih-alih, mereka menempatkan persoalan kemiskinan sebagai sesuatu yang lebih banyak bersifat voluntaristik daripada deterministik. Tetapi ketiadaan analisis yang demikian juga dapat disebabkan oleh kekurangan alat baca struktural daripada alat baca kebudayaan yang lebih menekankan faktor manusia sebagai penyebab dari kondisi yang sulit bagi individu untuk memilih.⁹³

Pertanyaan penting untuk diajukan dalam diskusi ini adalah bagaimana semua persoalan itu dipecahkan, tentu saja dalam konteks pemikiran Masri? Secara makro ia melihat ada dua kebijakan yang dijadikan sebagai jalan keluar dari persolan mandasar jumlah penduduk yang sangat besar dan padat, yaitu transmigrasi dan keluarga berencana. Berbeda dengan pengendalian kelahiran, transmigrasi yang dimaksudkan sebagai jalan keluar lebih dilihat sebagai program yang dijalankan pemerintah dan yang dilihat oleh pemerintah mampu mengatasi persoalan kelebihan populasi penduduk Jawa dan terkait dengan upaya meningkatkan kese-

⁹² Soetjipto Wirosardjono, "Population and Social Welfare," dalam Jan-Paul Dirkse, Frans Husken, and Mario Rotten (eds.), *Development and Social Welfare, Indonesia's Experiences Under The New Order* (Leiden: KITLV, 1993), hlm. 97.

⁹³ Arif Budiman, "Ilmu-ilmu Sosial Indonesia A-Historis", *Prisma*, No. 6 (Juni 1983) dalam <http://www.geocities.com/edicaHy/ekopol/a-historis.html> diakses pada 17 September 2009 pukul 21.17 WIB.

jahteraan. Di masa awal Orde Baru dua program ini merupakan program unggulan pemerintah yang cukup ambisius. Meskipun asumsinya berlainan tetapi kedua program ini berangkat dari satu titik tolak yang sama, yaitu masalah kependudukan. Levang (1997) memberikan ilustrasi yang padat dan jelas tentang tujuan dan alasan sosial transmigrasi, "Propaganda pemerintah jelas memperlihatkan ambisi ganda sebuah program, yakni kebijakan sosial di satu sisi dan kebijakan pembangunan di sisi lain. Tujuan sosial transmigrasi sudah jelas: menolong "*rakyat indonesia yang termiskinkan*", petani tanpa lahan, penganggur di kota, dan gelandangan. Transmigrasi bertujuan pula untuk membangun daerah luar Jawa," memanfaatkan lahan-lahan luas yang belum diolah, mengubah tanah yang belum digarap menjadi tanah subur dan produktif." Program ini terutama didasari oleh masalah, dalam kalimat Levang "yang ada atau diperkirakan ada", di antaranya menyangkut kesengsaraan, kemiskinan, kelaparan, penyakit, pengangguran, dan eksodus dari desa—yang sesak. Penyebab utama penderitaan itu dinyatakan dengan jelas, yakni kelebihan penduduk di pulau Jawa dan pulau-pulau di dekatnya.⁹⁴

Di sisi lain program ini, segera tampak kemudian apa yang pada kenyataannya hendak diantisipasi pemerintah selain masalah mengurangi kepadatan agraris Jawa. Transmigrasi dapat pula dimengerti sebagai kanalisasi gejala sosial yang berkaitan dengan aksi-aksi politik, gejala alam, dan dampak sosial program pemerintah sendiri. Aksi-aksi polisional yang terjadi ketika bangsa ini merangkak menapaki jalan-jalan awal kemerdekaan salah satu-

⁹⁴ Patrice Levang, *Ayo ke Tanah Seberang, Transmigrasi di Indonesia*, terj. Ambar Wahyuni (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), 2003), hlm. 7-8.

nya dipicu oleh ketiadaan imbalan yang sesuai dengan upaya perjuangan yang dilakukan oleh berbagai “cadangan” Tentara Nasional yang tersebar di pelbagai tempat. Transmigrasi menjadi satu skema yang memungkinkan mereka memperoleh imbalan yang sesuai, sedangkan di pihak pemerintah hal ini dapat mengurangi daya mobilisasi mereka yang berdampak pada stabilitas pemerintahan. Kelompok lain yang ditampung program ini adalah korban letusan gunung atau bencana alam lainnya. Tahun 1963 letusan Gunung Agung di Bali menyisakan penduduk yang trauma, kehilangan harapan, dan pijakan sosial-ekologis. Transmigrasi adalah jalan terang yang dijanjikan pemerintah kepada mereka. Penggusuran yang dilakukan pemerintah menghasilkan residu manusia yang tercabut dari akar kehidupan mereka, dan lagi-lagi transmigrasi menjadi skema penyelesaiannya. Di satu sisi, transmigrasi menjadi jalan pemecahan persoalan yang dihadapi pemerintah di Jawa, di sisi lain, problem Jawa menjadi pendorong dicapainya target-target pemindahan penduduk yang ditetapkan setiap Pelita. Kondisi keterdesakan penduduk bisa dilihat sebagai daya pendorong yang “murah” untuk transmigrasi daripada promosi dan sosialisasi program yang melelahkan.⁹⁵

Program ini dinilai mampu mengurangi — jika tidak menyelesaikan — tumpukan persoalan yang dihadapi penduduk Jawa dan sekitarnya, mulai persoalan kepadatan penduduk hingga masalah yang dilihat sebagai ikutan dari kepadatan penduduk, seperti pengangguran, kekurangan tanah, kemiskinan, dan sebagainya. Masri melihat kontribusi transmigrasi dalam mengatasi beragam persoalan memang sangat penting dan harus terus ditingkatkan, namun sebagai skema solusi atas kepadatan

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 19-24.

dan pertumbuhan jumlah penduduk tampaknya lebih meragukan daripada meyakinkan. Terutama apabila dilihat daya serap program ini terhadap pemindahan penduduk.⁹⁶

Dari tahun 1950-1968 dipindahkan 424.380 jiwa, rata-rata 22.336 jiwa per tahun. Periode 1969-1973 dipindahkan 181.696 jiwa, rata-rata 36.339 jiwa/tahun. Periode 1974-1977 dipindahkan 184.258 jiwa, rata-rata 46.605 orang/tahun. Maka sejak 1950-1977 jumlahnya 790.334, dalam 28 tahun rata-rata 28.226 jiwa/tahun. Rencana Pelita III ditransmigrasikan 500.000 kk atau 2.5 juta jiwa, rata-rata 100.000 kk. Sedangkan Jawa dihuni sekitar 86 juta jiwa (1979), kalau pertambahannya 2 % setahun maka 1.72 juta. Jadi jumlah yang ditransmigrasikan selama 1950-1977 masih kurang dari pertambahan penduduk Jawa selama 6 bulan.⁹⁷

Data itu menunjukkan bahwa tidak tepat bila transmigrasi diletakkan sebagai skema pengurangan kepadatan penduduk atau jalan untuk penyebaran penduduk. Jika diletakkan sebagai skema pengurangan penduduk, nyata terlihat daya serap program ini kecil dan tidak signifikan terhadap laju pertumbuhan penduduk Jawa, bagaimanapun Jawa akan tetap padat. Sedang-

⁹⁶ Masri Singarimbun, "Masalah Peledakan Penduduk dalam Pembangunan Nasional", *Makalah* disampaikan untuk Konferensi Gereja dan Masyarakat di Medan, 4 Juni 1979, hlm. 3-4. "Ajaran Malthus Ternyata Masih Berlaku: Hasil Penelitian dan Berbagai Teori Menanggulangi Kependudukan", *Sinar Harapan*, Rabu, 18 Februari 1981. "Percakapan Sinar Harapan dengan DR. Masri Singarimbun: Suksesnya Program Pangan Jangan Kurangi Urgensi Kependudukan", *Sinar Harapan*, Selasa, 3 Maret 1981. "Masri Singarimbun: Bagaimanapun Pulau Jawa Tetap Akan Padat", *Journal Ekuin*, Jum'at, 4 Desember 1981. Masri Singarimbun, "Masalah Kependudukan", *Op.cit.*, hlm. 1-2.

⁹⁷ Masri Singarimbun, "Masalah Peledakan Penduduk dalam Pembangunan Nasional", *Ibid.*, hlm. 3-4. Lihat juga Masri Singarimbun, "Masalah Kependudukan", *Op.cit.*, hlm. 1-2.

kan sebagai pola terpilih untuk penyebaran penduduk, program ini selain daya serapnya yang kecil, asumsinya sebagai penyebaran penduduk membuat para pelaku program dikejar hantu pencapaian angka-angka demografi. Dengan demikian yang dikejar bukan hidup dan kehidupan transmigran di tanah baru tetapi bagaimana departemen⁹⁸ bersangkutan memenuhi target angka-angka yang sudah ditetapkan, tidak peduli pada metode, alasan, dan masalah orang-orang yang pergi atau “dipergikan” ke tanah transmigrasi asalkan target terpenuhi. Hal kedua yang harus dicatat adalah hendaknya program ini tidak mengulang situasi Jawa, dimana hanya mengandalkan pendekatan agraris, yang pada akhirnya memunculkan persoalan tanah dan kepadatan penduduk tinggi, tetapi harus diarahkan pula ke industrialisasi pedesaan.⁹⁹ Lebih dari sekedar angka-angka, transmigrasi bukan migrasi sementara, urbanisasi, juga bukan mobilitas sesaat, tetapi orang yang bertransmigrasi adalah orang yang memutuskan

⁹⁸ Transmigrasi yang berada di bawah Departemen Tenaga Kerja dan Sosial, pada tahun 1947 dipindah ke Departemen Pembangunan dan Kemudahan, kemudian pada tahun 1948 dialihkan ke Departemen Dalam Negeri. Sebagai Dinas dari Departemen Pembangunan Daerah, transmigrasi kembali ke Departemen Sosial sebelum dijadikan Departemen pada tahun 1957. Sejak 1959, transmigrasi digabung dengan Departemen Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa, kemudian dipindahkan ke Departemen Dalam Negeri, selanjutnya ke Departemen Veteran, setelah itu kembali lagi ke Departemen Koperasi. Dipindah lagi ke Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi, akhirnya pada tahun 1983 sepenuhnya urusan Departemen Transmigrasi. Patrice Levang, *Op.cit.*, hlm. 11.

⁹⁹ Masri Singarimbun, “Keliru, Mitos Penyebaran Penduduk Yang Mendasari Transmigrasi”, *Kompas*, 18 Maret 1982. Lihat juga, “Peringatan Dr. Masri Singarimbun: Orang Kaya Bisa Menjadi Tuan Tanah di Daerah Transmigrasi”, *Sinar Harapan*, Kamis 8 Juli 1982.

meninggalkan desa, kampung, dan tempatnya dilahirkan, untuk selama-lamanya. Meskipun mereka memiliki kesempatan atau dimungkinkan untuk pulang tetapi bukan pulang selamanya melainkan menjenguk keluarga di desa asal. Masri memberi catatan penting atas program ini, “janganlah keputusan hidup yang penting itu nantinya menghadapi kesuraman hanya karena pemerintah terlalu memperhitungkannya secara administratif”.¹⁰⁰ Meskipun banyak orang termasuk Masri melihat program ini penting dijalankan, tetapi ia merasa tidak terlalu optimis – untuk tidak mengatakan selalu pesimis – terhadap program ini, nadanya sebatas berharap daripada suatu pernyataan yang terlihat lebih meyakinkan, “mudah-mudahan program tersebut (transmigrasi) berhasil dengan baik”.¹⁰¹

Program pemerintah kedua dimana Masri selalu tampak yakin dan optimis dan dianggapnya mampu mengatasi masalah kependudukan adalah keluarga berencana. Optimisme itu, tentu saja, tidak dapat dilepaskan dari proyek pribadi dan kelembagaannya yang memang diarahkan untuk menggeluti wilayah kependudukan khususnya program keluarga berencana. Hampir bisa dipahami bahwa Masri dan lembaga yang dipimpinnya seperti “*think tank*” departemen yang dibentuk untuk menangani masalah kependudukan melalui program keluarga berencana.¹⁰²

¹⁰⁰ *Ibid.* Lihat juga “Berita-berita Transmigran Yang Kembali ke Daerah Asal Harus Ditanggapi Serius”, *Sinar Harapan*, 24 September 1982. dan juga “Orang Kaya Bisa Menjadi Tuan Tanah di Daerah Transmigran”, *Sinar Harapan*, 8 Juli 1982.

¹⁰¹ Masri Singarimbun, “Masalah Kependudukan”, *Op.cit.*, hlm.2.

¹⁰² Berita Nasional menulis, “Akan seringnya orang-orang mengidentifikasi Lembaga Kependudukan yang dipimpin Masri Singarimbun tersebut dengan lembaga KB, Masri menyangkal pendapat yang demikian. Karena, katanya,

Dalam seluruh karya-karyanya sulit ditemukan suatu “refleksi kritis” yang mempertanyakan ulang, merevisit, atau membaca kembali asumsi-asumsi yang mendasari proyek dunia penurunan kelahiran dan pengendalian jumlah penduduk, dalam perspektif yang lebih kritis. Fokus utama pikiran-pikiran Masri dalam masalah ini tetap terbingkai dalam logika program; bagaimana pemerintah dapat menyukseskan target pengendalian jumlah penduduk, bagaimana menyosialisasikan dan mem-berhasilan program KB, dan bagaimana meningkatkan jumlah akseptor KB. Berbagai penelitian dilakukan dan banyak data disebarakan dalam kerangka menemukan pendekatan dan cara-cara yang lebih efektif mendorong masyarakat untuk mengadopsi anjuran-ajuran program penurunan jumlah penduduk atau penjarangan kelahiran, misalnya promosi dua anak cukup/catur warga.

Program pengendalian populasi di negara-negara berkembang lebih cenderung didasari alasan-alasan ekonomi. Ada asumsi bahwa keberhasilan program ini membawa dampak pada pertumbuhan ekonomi, kemampuan alam memproduksi makanan, dan juga mengatasi masalah kemiskinan. Sebab program ini salah satunya didasarkan pada analisis bahwa kondisi *over-populasi* menyumbang pada masalah kemiskinan. Tetapi, seperti diungkap Masri, “terdapat pengalaman yang berbeda-beda di berbagai negara di dalam masalah penurunan populasi. Di negara-negara industri pada umumnya tidak pernah mempunyai program resmi keluarga berencana yang dimaksudkan untuk

kegiatan atau orientasi daripada LK adalah meliputi berbagai bidang yang bersangkutan paut dengan masalah kependudukan. Masri sendiri tak mengerti mengapa namanya lebih dikenal dalam masalah KB.” Dalam “Kalau Hanya dengan Transmigrasi adalah Ilusi”, *Berita Nasional*, Selasa, 30 November 1976, hlm. 1-4.

penurunan angka kelahiran. Sedangkan dilaksanakannya program keluarga berencana di negara-negara berkembang didasarkan atas perhitungan ekonomi, dalam rangka memajukan sosial ekonomi masyarakat agraris yang relatif terbelakang. Untuk meningkatkan taraf hidup penduduk, pertumbuhan penduduk perlu dikekang. Tanpa pengendalian jumlah penduduk peningkatan mutu penduduk sulit atau mustahil dilakukan. Ahli-ahli ekonomi dan kependudukan membuat kalkulasi terperinci dan menunjukkan bahwa investasi dalam keluarga berencana adalah sangat menguntungkan dan merupakan syarat mutlak di dalam situasi kependudukan tertentu".¹⁰³ Panorama program pengendalian populasi di berbagai negara, menunjukkan perbedaan kebijakan, pendekatan, dan *political will* pemerintah; Indonesia, Cina, Bangladesh, India, Kenya komitmen politik pemerintah besar mendorong program ini; Thailand, Korea, Taiwan, Costa Rica, Columbia, tanpa dukungan resmi pemerintah; demikian juga Hong Kong tanpa dukungan politik pemerintah mengalami kesuksesan dalam program keluarga berencana. Kenyataan ini memperlihatkan adanya kaitan erat antara kemajuan sosial ekonomi dan program keluarga berencana. Masri tidak mau masuk ke dalam perdebatan mana yang lebih penting, kemajuan sosial ekonomi atau keluarga berencana dalam pengendalian populasi melalui penurunan jumlah kelahiran.¹⁰⁴

Asumsi yang mengatakan bahwa penurunan fertilitas akan tercapai dengan sendirinya dengan perbaikan dalam keadaan sosial ekonomi tidak dapat dijadikan dasar untuk menunda pro-

¹⁰³ Masri Singarimbun, "Masalah Penurunan Angka Kelahiran, Aspek-aspek Sosial Budaya dan Program", *Op.cit.*, hlm. 40.

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 42.

gram keluarga berencana, khususnya di Indonesia. Lebih lanjut Masri mencatat bahwa negara-negara Barat terutama Inggris, Perancis, dan Amerika – telah mencapai penurunan fertilitas dengan cara-cara kontrasepsi yang sederhana tanpa program KB pemerintah, tetapi proses tersebut sejalan dengan perombakan struktur sosial-ekonomi secara menyeluruh, industrialisasi dan urbanisasi. Tetapi ada juga masyarakat-masyarakat di mana perbaikan dalam tingkat sosial-ekonomi untuk golongan-golongan tertentu tidak banyak mempengaruhi fertilitas, bahkan dengan tingkat ekonomi yang lebih tinggi tingkat kematian anak menurun, dan mengakibatkan keluarga bertambah besar.¹⁰⁵ Penurunan tingkat fertilitas yang berarti dan mantap harus disertai dengan perubahan nilai-nilai mengenai anak, fungsi sosial anak, dan sebagainya. Di satu sisi, kemiskinan dapat mendorong ke arah pembatasan kelahiran tetapi, di sisi lain, lebih banyak anak secara ekonomi mungkin juga dirasakan sebagai sesuatu yang menguntungkan. Program keluarga berencana bagaimana pun perlu mempertimbangkan selain faktor-faktor ekonomi, juga faktor kultural, dan psikologis yang mempengaruhi motivasi dan pola pilihan-pilihan orang tua.¹⁰⁶ Dengan demikian, antara program keluarga berencana dan perbaikan kondisi sosial ekonomi harus dijalankan secara beriringan.

4. Kependudukan: Kritik & Debat

Program kontrol populasi di Indonesia, bagaimanapun, tidak dapat dilepaskan dari paket-paket kebijakan sebagai bagian dari

¹⁰⁵ Masri Singarimbun & Chriss Manning, “Keluarga Berencana, Motivasi dan Pola Sosial-Ekonomi: Kasus Mojolama”, *Prisma*, Vol. 3, No. 2 (April 1974), 31-43.

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 3.

arah makro kebijakan ekonomi-politik Indonesia di masa awal Orde Baru. Kebijakan kependudukan di Indonesia melalui KB ini, tampak lebih jelas ketika ia dikaitkan dengan skenario pembangunan ekonomi yang lebih cenderung beraliran neo-klasik. Menjadi cukup beralasan menyebut keterkaitan itu, sebab program nasional pengendalian populasi melalui keluarga berencana di dunia ketiga tidak didorong kondisi material yang memungkinkan dan memunculkan kesadaran umum di level masyarakat yang lebih rasional menyangkut nilai dan fungsi sosial jumlah anak. Pertimbangan rasional yang dimaksud, seperti banyak pengertian istilah ini dirujukan, adalah pertimbangan ekonomistik yang terkait dengan kesehatan, dan kesejahteraan keluarga. Tidak heran bila pengendalian populasi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah satu paket dengan perbaikan kondisi sosial ekonomi. Seperti apa yang dihindari Masri untuk diperdebatkan, mana yang lebih diprioritaskan, untuk kasus Indonesia, antara penggalakan program keluarga berencana dan perbaikan kondisi sosial ekonomi. Indonesia tampaknya, sebagaimana biasanya, memilih jalan tengah dan menghindar untuk menjadi ekstrim – kanan/kiri jika memilih salah satunya. Artinya, di Indonesia dua hal itu (pengendalian populasi dan pertumbuhan ekonomi) dijalankan secara berbarengan, sebab kedua hal tersebut dilihat saling melengkapi dan salah satunya tidak dapat berjalan tanpa kehadiran yang lain. Bongaarts dan Sinding (2009) menegaskan bahwa keluarga berencana merupakan *win-win* solusi; kesejahteraan individu terutama perempuan dan anak-anak dapat diperbaiki, dan menghasilkan keuntungan baik pada ekonomi nasional maupun lingkungan. Tampaknya jalan inilah yang diyakini kebanyakan pemimpin dunia ketiga untuk mengatasi persoalan penduduk di negeri masing-masing – termasuk Indonesia.

Kelebihan populasi akan terkait dengan kemampuan pemerintah menyediakan layanan kesehatan, membangun sekolah, menyediakan infrastruktur, dan menjamin kesejahteraan keluarga. Ketidakmampuan pemerintah menyediakan semua itu ditambah dengan pertumbuhan penduduk usia muda dianggap dapat memunculkan kekerasan politik dan konflik sipil, sebuah kondisi – dalam konteks Indonesia – yang dihindari sebab pemerintah membutuhkan stabilitas nasional untuk menjalankan agenda-agenda pembangunan.¹⁰⁷

Perdebatan tentang tekanan populasi dipicu oleh persoalan hubungan antara pertumbuhan populasi, kemiskinan, dan degradasi lingkungan. Sebagian melihat kemiskinan dan degradasi lingkungan adalah akibat dari pertumbuhan populasi yang tinggi. Pihak lain meletakkan kemiskinan lebih sebagai penyebab daripada akibat dari peningkatan jumlah penduduk.¹⁰⁸

Kelompok Malthusian dan Neo-Malthusian meletakkan kondisi overpopulasi sebagai pusat segala persoalan kemiskinan dan degradasi alam. Manusia dilihat sebagai memiliki kebutuhan konsumsi yang tidak terbatas dan selalu membutuhkan makanan yang diproduksi oleh alam. Sebelum konferensi Populasi Dunia tahun 2002 di Kairo, perdebatan isu ini menjadi fokus yang paling ramai diperbincangkan. Persoalan yang diajukan adalah apakah problem populasi menyebabkan penurunan kemampuan

¹⁰⁷ John Bongaarts & Steven W. Sinding, “A Respon To Critics of Family Planning Programs”, *Internasional Perspective on Sexual and Reproductive Health*, Vol. 35, No. 1 (Maret 2009), 39.

¹⁰⁸ Partha Dasgupta, “The Population Problem: Theory and Evidance”, *Journal of Economics Literature*, Vol. XXXIII (Desember 1995), 1879-1902.

layanan alam atau kerusakan alam? Kalangan Neo-Malthusian bersikukuh mengajukan jawaban positif, yaitu populasi berkontribusi kepada degradasi alam. Salah satu eksponen kelompok ini, Paul Harisson (1994), mengungkapkan jika pertumbuhan populasi tidak memperburuk masalah lingkungan, seperti klaim banyak kaum feminis, sosialis, dan ekonomis, kemudian kita tidak perlu khawatir terhadap jumlah itu. Jika itu terjadi, maka problem pada dekade terakhir mungkin hanya sebuah pendahuluan bagi masalah yang datang kemudian. Di level lokal, hubungan antara kepadatan pertumbuhan populasi dan degradasi tanah menjadi lebih jelas dalam beberapa kasus. Salah satu contoh adalah di Madagaskar. Di Madagaskar, hutan mengalami reduksi di sepanjang lereng tebing sebelah timur. Hutan asli meliputi 27.6 juta ha, pada tahun 1950 hanya tinggal 18.8 juta ha. Sekarang jumlahnya tinggal setengahnya yaitu 9.4 juta ha—artinya habitat unik kehidupan liar pulau itu hanya tinggal setengahnya dalam waktu empat puluh tahun. Setiap tahun 3 % hutan itu tergunduli. Hampir semuanya disebabkan penambahan populasi yang mencapai 3.2 % setiap tahun. Kasus serupa juga terjadi di sebuah desa, Ambodiaviav, dekat Ranomafana, menunjukkan bekerjanya proses degradasi itu. Lima puluh tahun yang lalu, semua daerah itu dipenuhi hutan. Delapan keluarga, semuanya berjumlah 32 orang, datang ke desa itu, setelah koloni Perancis membakar desa mereka. Awalnya mereka bertani di lembah paling bawah, dimana mereka mudah mendapat irigasi sungai kecil yang mengalir dari atas bukitnya. Setiap keluarga mengerjakan tanah seluas yang mereka mampu. Selama waktu 43 tahun kemudian, populasi desa itu membengkak 10 kali, mencapai 320, dan jumlah keluarga bertambah hingga mencapai 36 orang. Pertambahan alami itu ditambahi dengan datangnya imigran baru dari daerah dataran tinggi yang sudah penuh sesak, dimana semua tanah yang bisa

ditanami sudah diokupasi. Pada tahun 1950-an, lembah paling bawah desa itu sudah penuh sesak. Pasangan-pasangan baru mulai menebangi hutan di bagian lereng lembah. Secara bertahap mereka bergerak semakin mendaki, sekarang ada 32 pasangan yang mendiami lereng bukit itu.¹⁰⁹

Harisson melanjutkan, pertumbuhan populasi yang berkombinasi dengan konsumsi dan teknologi dapat merusak alam. Ia menawarkan, keluarga berencana dan pelayanan kesehatan reproduksi, perhatian terhadap kesehatan ibu dan anak, hak-hak dan pendidikan perempuan, sebagai empat poin program mempercepat pengurangan pertumbuhan populasi.¹¹⁰ Ekologis Amerika, Paul Ehrlich memainkan peranan Malthus. Ehrlich menyatakan bahwa “tidak ada peristiwa geologi yang dipandang sebagai ancaman terhadap kehidupan bumi selama jutaan tahun

¹⁰⁹ Paul Horisson, “Sex and the Single Planet: Need, Greed, and Earthly Limits,” (Winter, 1994) dalam “Is Limiting Population Growth a Key Factor in Protecting the Global Environment?”, *Issue*, 5 Juli 2001. Lihat juga Achille Loria, ahli ekonomi Italia yang berusaha menguji kembali prinsip-prinsip Malthus. Achille Loria, *Contemporary Social Problems: A Course of Lectures delivered at the University of Padua*, trans. John Leslie Garner (London: Swan Sonnenschein & Co.Ltd., 1911), p. 64–67. Gagasan yang mengembangkan prinsip Malthus dan dikombinasikan dengan evolusionisme Darwinian, melihat kelangkaan dapat memunculkan kompetisi tetapi juga dapat memajukan kebudayaan. William Graham Sumner and Albert Galloway Keller, *The Science of Society* (New Haven, Conn: Yale University Press, 1927), p. 45–48. Dunia terancam oleh kehancuran sistem ekologi oleh mekanisme teknologi dan pertumbuhan populasi yang tidak dapat dikendalikan. Dr. Paul R. Ehrlich, *The Population Bomb* (New York: Ballantine Books, 1971), p. 26–44. dalam Kathleen A. Tobin, *Politics and Population Control, A Documentary History* (London: Greenwood Press, 2004), p. 2-15.

¹¹⁰ Paul Horisson, “Sex and the Single Planet: Need, Greed, and Earthly Limits,” (Winter, 1994) dalam “Is Limiting Population Growth a Key Factor in Protecting the Global Environment?”, *Issue*, (5 Juli 2001), 1.

sebanding dengan ancaman yang datang dari kondisi overpopulasi manusia". Artikel Harisson melihat bahwa mereka yang tidak sependapat dengan determinisme asumsi-asumsi kelompok populasionis ini ternyata juga mengajukan determinisme lain. Henry George (1879) dari tradisi sosialis misalnya, mengajukan hipotesis bahwa kemiskinan bukan disebabkan kondisi overpopulasi, tetapi karena perang dan ketidakadilan hukum. Penulis radikal lain seperti Susan George dan Frances Moore Lape, dengan nada yang sama menegaskan, "kemiskinan dan ketidakadilan adalah akar penyebab degradasi alam, bukan populasi." Dua kecenderungan deterministik ini coba dinetralisir Harisson; perdebatan yang berpusat pada persoalan apakah kondisi overpopulasi ini mengakibatkan degradasi alam hanya akan memunculkan dua jawaban, yaitu "ya" atau "tidak". Bahwa degradasi alam bukan hanya disebabkan pertumbuhan populasi, tetapi banyak variabel yang ikut menyumbang; masalah konsumsi, teknologi produksi, dan pemborosan. Tiga faktor tersebut juga dipengaruhi oleh banyak faktor lainnya, mulai dari status perempuan sampai soal kepemilikan tanah, dari level demokrasi sampai efisiensi pasar.¹¹¹

Di sisi lain, Betsy Hartmann, dalam bukunya "*Population Fiction: Malthusian Are Back In Town*" (1994), berpendapat bahwa benar jika dikatakan bahwa pertumbuhan populasi dapat menambah tekanan terhadap sumber daya alam di wilayah-wilayah tertentu. Tetapi ancaman terhadap kehidupan, demokrasi dan lingkungan global yang dimunculkan oleh fertilitas perempuan miskin sebanding dengan persoalan yang diakibatkan oleh pola-pola konsumsi orang-orang kaya dan pola pembinasaaan oleh militer. Negara-negara industri yang meduduki 22% populasi

¹¹¹ *Ibid.*, 3-4.

dunia, mengkonsumsi 60% hasil produksi makanan dunia, 70 % energinya, 75% metalnya, dan 85% kayunya. Mereka menghasilkan hampir $\frac{3}{4}$ emisi karbon dioksida, yang menyumbang hampir separuh gas rumah kaca di atmosfer, dan bertanggungjawab terhadap menipisnya lapisan ozon. Militer adalah pelanggar besar lainnya. Sepertujuh dari degradasi alam diakibatkan oleh aktivitas militer, dan militer Amerika merupakan konsumen minyak domestik terbesar, membuang racun yang lebih besar dari gabungan 5 perusahaan kimia multinasional. Hartman, seolah ingin menegaskan bahwa persoalannya bukan jumlah manusianya, tetapi sistem kerja manusia dan sistem eksploitasi alam yang tidak demokratis. Sehingga solusinya adalah bagaimana kontrol terhadap sumber daya alam dapat lebih demokratis, bukan hanya terbatas pada agenda kontrol populasi.¹¹²

Untuk kasus Indonesia menarik jika mendiskusikan artikel Ben White tentang isu ini. Melihat kasus Indonesia White tertarik untuk mendiskusikan tiga hal. *Pertama*, apakah Indonesia mempunyai masalah populasi, dan jika iya, jenis problem populasi macam apa yang dihadapi?; *Kedua*, apa hubungan antara perubahan populasi, di satu sisi, dan pembangunan ekonomi (dan kemiskinan) di sisi lain?; *Ketiga*, dan dengan apa yang sudah diketahui sejauh ini, apakah kebijakan tentang populasi yang dijanjikan itu tepat?¹¹³

White mengajukan data-data yang menunjukkan bahwa

¹¹² Betsy Hartmann, "Population Fiction: Malthusian Are Back In Town", (September/October 1994) dalam "Is Limiting Population Growth a Key Factor in Protecting the Global Environment?", *Op.cit.*

¹¹³ Benjamin White, "Indonesia's Population Problems and Policies; A Non -Malthusian View," dalam Jan-Paul Dirkse, Frans Husken, and Mario Rotten (eds.), *Op.cit.*, p. 105.

populasi di Indonesia mengalami penurunan, bahkan Jawa sekalipun yang dianggap memiliki tingkat populasi dan kepadatan tinggi juga mengalami penurunan populasi. Sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel. 2 di bawah ini.¹¹⁴

Tabel. 2 Rata-rata pertumbuhan populasi tahunan Indonesia dan Jawa, 1961-1990 (%)

Tahun	Indonesia	Jawa
1961-71	2.1	1.9
1971-80	2.3	2.0
1980-85	2.1	1.7
1980-90	2.0	1.7

Di Jawa, ketidakseimbangan populasi terjadi dalam pergeseran gravitasi pusat populasi menuju ke barat yang ditunjukkan oleh pertumbuhan yang lebih cepat di wilayah Jakarta dan Jawa Barat daripada kawasan lainnya di Jawa. Demikian juga imigrasi meningkat di kawasan ini. Sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel. 3 berikut.¹¹⁵

Tabel.3 Persentase populasi Jawa di Jawa Barat dan Jakarta, 1961-1990

Tahun	Total Populasi (juta)	Jawa Barat/Jakarta (%)
1961	63	33
1971	76	34
1980	91	37
1985	100	39
1990	108	41

¹¹⁴ *Ibid.*, p. 107.

¹¹⁵ Benjamin White, "Indonesia's Population Problems and Policies; A Non -Malthusian View," dalam Jan-Paul Dirkse, Frans Husken, and Mario Rotten (eds.), *Op.cit.*, p. 107.

Kondisi yang sama juga terjadi di daerah pedesaan dimana kepadatan populasi juga mengalami perlambatan, di Bali dan Yogyakarta populasi desa mengalami penurunan, sementara di Jawa Tengah dan Jawa Timur pertumbuhannya tidak terlalu signifikan, yaitu 0.1 persen atau kurang dari itu. Selama 30 tahun tingkat fertilitas juga mengalami penurunan, dimana penurunan fertilitas sekarang melebihi penurunan mortalitas yang menghasilkan penurunan rata-rata populasi. Namun bagi White, penurunan yang mengesankan ini bukan semata-mata merupakan pencapaian program keluarga berencana tetapi sebagian besar juga disebabkan perubahan sosial, khususnya terkait dengan pendidikan dan perubahan praktik perkawinan. Rata-rata umur perkawinan pertama perempuan Indonesia meningkat dua sampai tiga daripada dua dekade yang lalu.¹¹⁶

Siapa yang paling besar menyumbang kepada pertumbuhan populasi di Indonesia? Berbeda dengan pandangan umum (dan pandangan yang diyakini kalangan kelas menengah urban Indonesia dan orang asing), hal ini bukan disebabkan oleh orang miskin yang dianggap memiliki tingkat fertilitas paling tinggi, tetapi fertilitas secara positif berkaitan dengan status sosial-ekonomi. Terkait dengan masalah hubungan antara populasi dan ketersediaan makanan, Indonesia tidak mengalami apa yang disebut dengan “mimpi buruk Malthusian”, dimana pertumbuhan populasi melebihi kapasitas produksi makanan. Produksi pertanian Indonesia meningkat sekitar 4% sejak 1960, pertumbuhan produksi makanan (beras, dan juga makanan pokok lainnya) telah tumbuh lebih besar daripada pertumbuhan populasi sejak 25 tahun yang lalu. Di Indonesia sendiri dua penyebab paling serius

¹¹⁶ *Ibid.*, p. 108.

degradasi lingkungan, deforestasi di luar Jawa, dan polusi Industri di sebagian Jawa, bukan disebabkan tekanan populasi melainkan oleh perusahaan tambang dan industri.¹¹⁷

White menegaskan bahwa eksplanasi di atas bukan bermaksud menyatakan bahwa di Indonesia tidak ada masalah populasi, tetapi masalah populasi di Indonesia tidak sangat sederhana, tidak juga terlalu serius, juga tidak begitu akut seperti yang selama ini diyakini – beberapa kalangan. Penting melihat hal ini, bahwa masalah populasi di Indonesia tidak begitu akut seperti yang diperkirakan dan kemudian dijadikan sebagai dasar meletakkan program kontrol kelahiran sebagai prioritas utama di atas tujuan pembangunan lainnya, termasuk individu, khususnya hak-hak perempuan untuk mengontrol kelahiran. Ketika menilai pendekatan yang digunakan dalam melancarkan program kontrol kelahiran, menurutnya sukses program itu karena menggunakan pendekatan *top-down*. Ada perbedaan yang sangat mendasar antara pendekatan “kontrol populasi” dan “kontrol kelahiran”. “Kontrol kelahiran” terkait dengan hak, atau kapasitas, individu-individu di dalam masyarakat untuk mengontrol jumlah anak yang mereka inginkan (waktu, jarak, jumlah, dsb – lahir), dan didasarkan pada pilihan-pilihan individu, ketersediaan informasi yang dibutuhkan, fasilitas dan bantuan untuk melakukan kontrol tersebut. Sedangkan “kontrol populasi” lebih pada adanya intervensi dari pihak luar (biasanya – tetapi tidak mesti – pemerintah) yang bertujuan untuk mengontrol perilaku reproduksi disebabkan adanya tekanan-tekanan demografis, umumnya – tetapi tidak

¹¹⁷ Benjamin White, “Indonesia’s Population Problems and Policies; A Non -Malthusian View,” dalam Jan-Paul Dirkse, Frans Husken, and Mario Rotten (eds.), *Op.cit.*, p. 109-110.

selalu — dengan tujuan menurunkan fertilitas dan tingkat pertumbuhan populasi.¹¹⁸ Pendekatan “kontrol populasi” akan mengatakan kepada masyarakat, “di negara ini banyak sekali orang, perempuannya punya banyak sekali anak, anda tidak bisa lepas dari kemiskinan kalau banyak sekali mulut yang harus diberi makan. Anda punya tanggungjawab untuk membuat diri anda, anak anda, dan negara anda lebih baik. Karena itu anda harus membatasi kelahiran. Cara terbaiknya adalah menggunakan pil/IUD/injeksi/sterilisasi. Anda akan jauh lebih sejahtera dan lebih produktif kalau hanya memiliki dua anak saja”. Sedangkan pendekatan “kontrol kelahiran” menekankan aspek lain, “anda bisa dengan mudah mengendalikan kelahiran anak, ada banyak cara untuk itu, baik dan buruknya cara itu begini dan begitu, silahkan anda pikirkan dan pilih mana yang terbaik bagi anda.”¹¹⁹

C. Pemikiran Masri dan Studi Agraria Indonesia

Menelusuri pergulatan Masri dengan problem populasi di Indonesia terlihat bagaimana ia tidak dapat mengabaikan realitas kemiskinan di pedesaan, sesuatu yang tidak bisa dielakkan untuk dipertimbangkan meskipun kajian utamanya adalah masalah pertumbuhan populasi dan bagaimana mengatasinya. Studi demografi ini juga membawanya mau tidak mau melihat hubungannya dengan ketersediaan pangan, tanah pertanian, dan pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan, bagaimanapun, sangat mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap program keluarga berencana dan kesuksesan program ini. Meskipun kesimpulan Masri sangat khas seorang demografer, yaitu hampir semua persoalan

¹¹⁸ *Ibid.*, p. 105-113.

¹¹⁹ *Ibid.*, p. III.

hubungan manusia dengan alam, kehidupannya, dan dunia sosialnya ditumpukan pada masalah pertumbuhan populasi. Kecenderungan ini juga menunjukkan dimana ia melepaskan variabel struktural dan penetrasi modal dalam ikut serta mengakibatkan degradasi alam, deforestasi, kemiskinan pedesaan dan perkotaan.

Temuan-temuan penelitiannya di pedesaan tentang praktek keluarga berencana tradisional, dan terutama hubungan antara kemiskinan dan pertumbuhan populasi mampu mematahkan asumsi-asumsi generalistik kaum populasionalis Barat yang cenderung melihat negara-negara dunia ketiga sebagai penyumbang terbesar pertumbuhan populasi dunia.¹²⁰ Sebuah asumsi yang khas pengalaman Barat dan menumpahkan kepada orang miskin hampir seluruh problem populasi, dan menyimpulkan kemiskinan sebagai penyumbang terbesar pertumbuhan populasi. Masri justru menemukan bahwa orang miskin cenderung sangat terdorong untuk mengendalikan jumlah kelahiran anak dengan cara-cara yang mereka pahami dan mampu mereka lakukan.¹²¹

¹²⁰ United Nation (UN) merilis sebuah laporan tentang populasi bertajuk “*World Population Prospect: The 2000 Revision*”. Laporan ini mengemukakan bahwa semua ledakan populasi itu terjadi di negara-negara berkembang—yang paling cepat pertumbuhannya adalah wilayah-wilayah yang secara geografis rawan dan tidak (lingkungan) ramah untuk pertumbuhan ekonomi (cuaca yang tidak baik, kekurangan sumber daya, atau lokasinya kurang baik)—yang sangat mungkin di masa depan menimbulkan malapetaka. Hingga tahun 2000, persentase negara berkembang dinilai paling tinggi menambah pertumbuhan populasi dunia yaitu 60 % pada 1950, 69 % di tahun 2000, sedangkan negara maju masing-masing 30 % (1950) dan 20 % (2000). David E. Blomm, *The Demographic Dividend: a New Perspective on Economic Consequences of Population Change* (Pittsburgh: RAND, 2002), p.12-13.

¹²¹ Masri Singarimbun & Chriss Manning, “Keluarga Berencana, Motivasi dan Pola Sosial-Ekonomi: Kasus Mojolama”, *Op.cit.*, 10.

Dalam konteks studi agraria, setidaknya ada tiga hal yang akan didiskusikan pada bagian ini; *pertama*, dimana titik temu studi agraria dan studi kependudukan? *Kedua*, apa sumbangan pemikiran Masri terhadap studi agraria? *Ketiga*, bagaimana Masri melihat persoalan agraria dan pemecahan masalah yang diajukan oleh kajian agraria?

Persoalan agraria tidak hanya menyangkut soal “tanah” atau “pertanian” saja. Istilah ini memiliki arti “wilayah” atau “tanah negara”, yang dengan demikian cakupannya menjadi sangat luas. Di dalamnya termasuk flora dan fauna, barang tambang, dan juga manusia. Pendeknya segala sesuatu yang berada di atas maupun terkandung dalam tanah, dan segala hal yang ada di bawah langit. Pengertian yang sama digunakan dalam UUPA 1960, pada pasal 1 ayat 1-5, “Bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung di dalamnya”.¹²² Sedangkan istilah-istilah seperti “tata ruang”, “lingkungan”, “sumber daya alam”, mungkin juga termasuk istilah semacam “pembangunan pedesaan”, “keadilan akses”, “kesempatan dan pemberdayaan perempuan”, dan sebagainya tidak lain adalah bagian dari studi agraria itu sendiri. White (2006) juga mencermati tentang studi agraria di Indonesia, ia menulis “kajian agraria yang saya maksudkan adalah riset dan pengajaran tentang *struktur agraria, sejarah agraria, reforma agraria, kemiskinan pedesaan, dan pembaharuan pedesaan*”.¹²³

¹²² Meskipun pengertian agraria tidak terbatas soal tanah, tetapi banyak orang beranggapan bahwa bicara soal agraria adalah bicara soal tanah. Wiradi pun mengakui hal ini, “Memang semua pengertian di atas memberi kesan bahwa tekanannya pada tanah. Tetapi hal ini justru karena tanah itu mewadahi semuanya”. Lihat Gunawan Wiradi, *Metodologi Studi Agraria, Karya Terpilih Gunawan Wiradi* (Yogyakarta: STPN, 2009), hlm. 100-111.

¹²³ Benjamin White, “Di Antara Apologia Diskursus Kritis: Transisi

Terlihat di sini studi agraria secara umum lebih menekankan perhatiannya pada aspek ruang daripada manusianya, meskipun manusia dilihat dalam hubungannya dengan distribusi ruang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang paling dasar. Ruang dimaksud adalah sumber daya dalam arti luasnya, dimana ketidakadilan distribusi ruang/sumber daya dan akses yang tidak adil terhadapnya melahirkan kondisi yang juga tidak adil, sehingga penataan struktur agraria menjadi alas penting untuk membangun struktur agraria yang lebih adil. Distribusi ruang yang adil terkait erat dengan struktur sosial yang setara dan dengan begitu terkait juga dengan kekuasaan. Sedangkan studi kependudukan meskipun tidak abai tetapi tidak melihat kekuasaan sebagai faktor yang juga menentukan keadilan distributif ruang, makanan, dan akses terhadap sumber daya. Mereka yang pergulatannya lebih banyak dalam studi agraria melihat bukan masalah jumlah penduduk yang menyebabkan semakin menipisnya pembagian sumber daya yang menopang kehidupan manusia tetapi bagaimana struktur penguasaan terhadap sumber daya itu sendiri bekerja. Sehingga struktur sosial menjadi satu variabel yang penting dilihat dalam sejarah penguasaan sumber daya agraria. Di sini modal menjadi salah satu kekuatan yang dilihat ikut menyumbang pada ketidakadilan penguasaan sumber daya. Kapitalisme juga menjadi faktor yang sangat besar dipertimbangkan dan dilihat sebagai proses-proses sosial, ekonomi dan politik yang memungkinkan modal melakukan akumulasinya, melalui serangkaian pola jaringan kekuasaan yang memberi alas beroperasinya modal dalam ranah penguasaan sumber daya. Penduduk atau manusia sebanyak apapun

Agraria dan Pelibatan Dunia Ilmiah di Indonesia,” dalam Vedi R. Hadiz dan Daniel Dhakidae, (ed.), *Op.cit.*, hlm. 19.

atau sesedikit apapun jumlahnya dapat tetap menjadi miskin ketika dalam relasi sosial-politik-ekonomi tertentu penguasaan sumber dayanya tidak adil, karena mereka tidak mendapat akses yang sama terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada.

Di era 1970-an, intelektual yang memiliki laboratorium kajian di daerah pedesaan berhasil mengungkapkan kritik terhadap pandangan umum tentang situasi pedesaan. Visi pertama tentang situasi pedesaan yang dominan di kalangan perumus kebijakan, akademisi dan elite urban, adalah menggambarkan masyarakat agraris pedesaan (terutama Jawa) yang terdiri dari komunitas *peasant* atau petani kecil yang egaliter atau homogen. Mereka bertani sekedar untuk menyambung hidup dan cukup terisolasi dari ekonomi pasar. Pandangan ini dikritisi intelektual yang banyak bergelut dengan kondisi pedesaan. Temuan mereka menunjukkan bahwa masyarakat desa Indonesia sejak awal abad 20 banyak tergantung pada ekonomi uang. Itu di satu sisi, di sisi lain berlangsung pula proses diferensiasi sosial yang menunjukkan munculnya kelas-kelas agraris berdasarkan perbedaan akses terhadap tanah, termasuk kelas petani tanpa lahan yang jumlahnya semakin banyak di berbagai wilayah.¹²⁴

Simpulan Masri dari penelitiannya di pedesaan Jawa tidak jauh berbeda dari pandangan di atas. Namun ia, sebagai demografer, meletakkan sebab musababnya pada pertumbuhan populasi pedesaan yang meningkat. Dalam sebuah tulisan bertajuk "*Beberapa Aspek Kependudukan dan Land Reform*", dia mengungkapkan perubahan kepadatan penduduk paralel dengan laju pertumbuhan

¹²⁴ Benjamin White, "Di Antara Apologia Diskursus Kritis: Transisi Agraria dan Pelibatan Dunia Ilmiah di Indonesia," dalam Vedi R. Hadiz dan Daniel Dhakidae, (ed.), *Op.cit.*, hlm.10.

penduduk. Di pedesaan Jawa pertambahan penduduk lebih dari 3000 jiwa/km. Dengan bertambahnya jumlah penduduk bertambah pula petani gurem dan buruh tani yang tidak memiliki tanah sama sekali. Proposisi ini diperkuat dengan data yang menunjukkan ketimpangan pemilikan tanah di Sriharjo, yang dalam pandangan Masri, walaupun tanah itu dibagi rata sekalipun dengan menggunakan pembagian yang tercantum dalam UUPA Tahun 1960, tetap tidak cukup. Penyebab semakin menyempitnya luas tanah di tengah populasi yang tinggi adalah sistem warisan, dimana setiap generasi pewaris membagi-bagi tanah sesuai hukum warisan atau hukum adat yang berlaku. Menciutnya pemilikan tanah dan bertambahnya buruh tani yang tidak memiliki tanah cenderung menimbulkan situasi di mana penggarap mendapatkan bagian yang semakin mengecil. Sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel. 4 berikut ini.¹²⁵

Tabel.4 Luas sawah yang dimiliki dan digarap di Sriharjo: 1969-1970

M2	Dimiliki			Digarap		
	F	%	Kum.	F	%	Kum.
0	217	28,1	28,1	195	25,3	25,3
<500	76	9,8	37,9	85	11,0	36,3
500-<1000	135	17,5	55,4	144	18,7	55,0
1000-<2000	154	19,9	75,3	154	19,9	74,9
2000-<4000	121	15,7	91,0	120	15,5	90,4
4000-<8000	47	6,1	97,1	54	7,0	97,4
8000-<10.000	4	0,5	77,6	4	0,5	97,9
10.000 Ke atas	18	2,4	100,0	16	2,1	100,0
Jumlah	772	100,0		772	100,0	

¹²⁵ Masri Singarimbun, "Beberapa Aspek Kependudukan dan Land Reform", *Catatan Ceramah*, hlm. 1-2.

Jumlah penduduk, kepadatan penduduk, struktur penduduk, mempengaruhi sifat hubungan dengan tanah. Tentu saja pengaruh itu tidak berdiri sendiri melainkan terkait dengan variabel-variabel lain – teknologi, struktur sosial, dan organisasi politik. Namun terkait dengan penguasaan tanah, kepadatan dapat merupakan variabel pengaruh atau variabel terpengaruh, dan dapat dikaitkan dengan variabel-variabel demografi – fertilitas, mobilitas, mortalitas. Kepadatan penduduk dalam satu daerah tertentu juga dipengaruhi oleh tingkat kesuburan tanah atau ketersediaan sumber daya alam yang memadai. Masri mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan kepadatan penduduk antara daerah tegalan dengan daerah persawahan, demikian pula daerah persawahan tadah hujan dengan persawahan irigasi. Orang biasanya cenderung pindah dari daerah yang kurang subur ke daerah yang lebih subur.¹²⁶

Pertumbuhan penduduk yang tinggi, sumber daya yang makin menciut, dan hadirnya kemiskinan di pedesaan Jawa membawa Masri untuk sepakat dengan simpulan Geertz (1976:106) tentang *shared poverty*.¹²⁷

“Akan tetapi, di bawah tekanan jumlah penduduk yang terus meningkat dan sumber daya yang terbatas itu, masyarakat Jawa toh tidak belah menjadi dua ... yaitu menjadi golongan tuan tanah besar dan golongan setengah budak yang diperas, melainkan tetap mempertahankan tingkat homogenitas sosial dan ekonomis yang cukup tinggi dengan cara membagi-bagikan

¹²⁶ Masri Singarimbun, “Masalah Tanah dan Kependudukan”, *Makalah* disampaikan untuk Lokakarya Latihan Penelitian Masalah Pertanahan dan Hubungan Agraris di Solo, 18 Oktober 1981-9 Januari 1982, hlm. 1-2.

¹²⁷ Clifford Geertz, *Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia* (Jakarta: Bhratara, 1976), hlm. 106 dalam Masri Singarimbun, “Masalah Tanah dan Kependudukan”, *Ibid.*, hlm. 5.

rezeki yang ada, hingga makin lama makin sedikit sekali yang diterima oleh masing-masing anggota masyarakat ... suatu proses yang ... saya namakan “shared poverty”... masyarakat desa itu tidak terbagi atas golongan golongan “have” dan “have note” melainkan ... golongan “cukupan” dan “kekurangan”.

Tetapi *shared poverty* yang digambarkan Geertz yang mengindikasikan adanya suatu situasi yang egaliter dan homogen di pedesaan itu tidak seperti kenyataannya. Masri sepenuhnya setuju dengan pendapat Sajogyo dan White bahwa yang terjadi adalah tekanan penduduk atas penduduk atau tekanan manusia atas manusia, dan bukan tekanan penduduk atas tanah. Kekuasaan atas tanah dapat memberi orang kekuasaan untuk berkata: “mulai tahun ini anda tidak mendapat separo lagi, tetapi sepertiga; mulai tahun ini anda jangan lagi mengerjakan tanah saya, sebab anda tidak memilih saya dalam pencalonan lurah; mulai panen ini anda tidak dapat lagi turut panen di sawah saya karena padi saya sudah ditebaskan; mulai sekarang yang panen tidak mendapat seperlima tetapi sepertujuh; mulai tahun depan yang bisa turut menuai cuma mereka yang turut menanam dan menyiangi karena kami mengikuti cara *ceblokan*; untuk mereka yang turut panen tidak lagi diberi upah padi tetapi jerami; mulai sekarang anda tidak menumbuk padi saya lagi karena sudah ada *huller*”.¹²⁸ Meskipun Masri sependapat dengan analisis ini tetapi dia tidak melihat penerapan reforma agraria sebagai jalan keluar yang tepat untuk mengatasi masalah itu. Bagaimanapun, baginya persoalan jumlah penduduk tetap menjadi masalah yang utama.¹²⁹

¹²⁸ Masri Singarimbun, “Masalah Tanah dan Kependudukan”, *Ibid.*, hlm. 7.

¹²⁹ “Kuranganya Kesempatan Kerja Menarik Orang Bekerja Sebagai Buruh Tani”, *Sinar Harapan*, Selasa, 7 Juli 1981.

Dalam studi kependudukan, peningkatan jumlah penduduk dilihat selalu terkait dengan perubahan pola-pola penggunaan tanah. Sebaliknya bila di suatu daerah terjadi suatu pola perubahan penggunaan tanah dan hadirnya teknologi baru dalam mengolahnya, bisa dipastikan di sana muncul persoalan peningkatan jumlah penduduk — jika tidak selalu kepadatan penduduk. Persoalan kependudukan, selain terkait dengan masalah penggunaan tanah, selalu juga berhubungan dengan masalah penyediaan pangan, lingkungan, dan lebih luas lagi dengan soal pembangunan pedesaan yang spektrumnya menjadi semakin luas.¹³⁰ Misalnya bagaimana mengatasi masalah kemiskinan, membangun infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, dan sebagainya. Oleh sebab itu, Masri sebagai seorang populasionis mau tidak mau juga menyediliki lebih dalam lagi bagaimana pola-pola penggunaan tanah di desa yang ditelitinya. Penggunaan tanah dimaksud adalah termasuk luas tanah, luas yang digarap, pola kepemilikan, pola pewarisan, kemampuan produksi, penggunaan tenaga kerja, kemampuan pemenuhan hasil produksi terhadap kebutuhan rumah tangga, dan sebagainya.

Apa yang dilakukanya di Sriharjo tampak menunjukkan bagaimana hal di atas dilakukan secara tekun dan kontinyu, hingga lewat studi kependudukan yang mengambil wilayah penelitian di pedesaan, ia mampu menemukan dan mengung-

¹³⁰ Lihat misalnya Ronald D. Lee, W. Brian Arthur, at.all., *Population, Food, and Rural Development* (New York: Oxford University Press, 1988), Carole L. Jolly and Barbara Boyle Torrey (ed.), *Population and Land Use in Developing Countries* (Washington, D.C.: National Academy Press, 1993), Sajogyo, *Penduduk dan Pola Penggunaan Tanah*, dalam Sediono M.P. Tjondronegoro, Said Rusli, Umar Tuanaya (ed.), *Ilmu Kependudukan Suatu Kumpulan Bacaan*, (Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan (LSP), 1981)

kapkan masalah agraria di pedesaan. Hull (1996) menilai bahwa pertama-tama yang dimiliki seorang Masri adalah kemampuan memadukan disiplin antropologi dan demografi. Melihat bagaimana studinya menjadi bahan pembicaraan banyak kalangan di masa itu, penjelasan berikutnya diajukan untuk menjawab pertanyaan; pendekatan yang digunakan, kondisi dimana karya dan publikasi itu muncul, dan temuan-temuan yang dinilai menghentak di masa itu. Tidak berlebihan jika jawaban pertanyaan itu sekaligus menunjukkan sumbangan Masri terhadap geliat awal dan perkembangan studi agraria di Indonesia.

Pertama-tama seperti disebut Hull dan Nihofe di atas, Masri mengembangkan satu pendekatan multidisiplin dalam memahami persoalan di pedesaan. Apa yang dilakukannya, disebut oleh Hull, menggunakan dua tingkat analisis yaitu individu dan masyarakat, memadukan kedua disiplin itu dengan sedemikian rupa sehingga perspektif manusia merupakan titik sentral dalam memahami permasalahan. Antropologi seringkali memiliki peran penting dalam menjembatani dan menautkan dua tingkat analisis tersebut dengan fokus pada sistem sosial dan budaya, tetapi metode lapangan lebih memperdalam dengan mendasarkan pada observasi personal dan wawancara mendalam dengan informan-informan kunci. Ketika pendekatan ini digunakan untuk penelitian kependudukan maka disebut mikro, walaupun masalah dan solusinya kelihatan makro.¹³¹ Studi ini dilakukan pada saat ketika ahli ekonomi Orde Baru memfokuskan analisis mereka pada rencana pembangunan nasional, dan menguraikan angka-angka

¹³¹ Terence H. Hull., "Pengantar Penduduk dan Pembangunan", dalam Agus Dwiyanto, Faturochman, Marcelinus Molo, Irwan Abdullah (ed), *Penduduk dan Pembangunan* (Yogyakarta: Aditya Media, 1996) hlm. xi-xvii

statistik dari Badan Pusat Statistik untuk melihat pertumbuhan ekspor, produksi, dan pendapatan. Berdasarkan wawancara, survei, dan observasi serta keterlibatan intens dengan warga desa, ia berhasil menggungkap keterangan yang rinci mengenai kemiskinan dan dampaknya terhadap penduduk di pedesaan menjadi sesuatu yang mengejutkan bagi intelektual kota, yang hanya melihat pembangunan ekonomi pada saat itu sebagai jawaban otomatis terhadap semua masalah.

Diskursus tentang kemiskinan sajak saat itu menjadi topik wacana yang ramai baik di kalangan akademisi maupun pengambil kebijakan. Delapan tahun kemudian setelah problem kemiskinan diungkap ke publik¹³², tema “*Kemiskinan Struktural*” muncul untuk pertama kalinya – di masa Orde Baru – dalam konferensi PPII (Perhimpunan Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial) di Malang tahun 1978. Meskipun tema yang demikian itu muncul didahului oleh beberapa penelitian dan tulisan tentang topik yang sama yang dilakukan beberapa ilmuwan senior di antaranya Sajogyo di Bogor tahun 1974-1977, Mubyarto dan Loekman Sutrisno kolega Masri di Yogyakarta pada dekade 1980-an juga mulai banyak menulis topik mengenai kemiskinan di pedesaan, publikasi Masri dan Penny menjadi salah satu temuan yang cukup mengagetkan banyak kalangan dan memaksa mereka mau tidak mau memperhatikan masalah kemiskinan. Munculnya topik tersebut mengindikasikan suatu kemajuan yang signifikan tentang tingkat analisis kemiskinan. Dengan istilah “kemiskinan struktural” tidak lagi

¹³² Terhitung dari penelitian Masri dan Penny di Sriharjo selesai (1969-1970), tetapi hasil laporan penelitian tersebut baru dipublikasikan pada 1976, jika dihitung dari tahun publikasinya maka topik kemiskinan struktural itu muncul tiga tahun setelah publikasi Sriharjo.

melihat problem kemiskinan sebagai problem kebudayaan atau takdir tetapi lebih luas lagi ditautkan dengan struktur kebijakan dan *political will* pemerintah. Sehingga kenyataan ini mau tidak mau secara langsung mengkoreksi kebijakan pembangunan pemerintah yang dinilai tidak berpihak dan terlalu berorientasi pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan struktural biasanya dipahami sebagai kondisi kemiskinan yang disebabkan situasi yang menekan. Situasi itu dapat berupa kebijakan, peraturan, atau institusi yang menghambat peningkatan produktifitas atau berkembangnya potensi manusia semaksimal mungkin. Lebih tegas lagi Suyanto (1995) meminjam Soetandyo menyebutkan kemiskinan struktural sebagai akibat dari struktur atau tatanan kehidupan yang tidak menguntungkan.

Publikasi kemiskinan Sriharjo (1976) itu setidaknya mengungkap tiga hal mendasar yang sangat jelas menunjukkan kronisnya kondisi kehidupan penduduk; yaitu bagaimana tekanan penduduk atas tanah, bagaimana hubungan tanah dan tenaga kerja, dan bagaimana penduduk memenuhi pendapatannya untuk mencukupi kebutuhan hidup.

Salah satu kampung di kelurahan itu, Miri, penduduknya di tahun 1970-an berjumlah 164 keluarga atau 964 orang. Total tanah subur (sawah dan pekarangan) di kampung itu berjumlah 29,5 ha, jika dibagi per kepala jumlahnya menjadi 0,0425 ha. Dari 164 keluarga itu, hanya 104 keluarga yang memiliki sawah, 24 keluarga memiliki tanah kering, dan 36 keluarga tidak memiliki sawah sama sekali. Sepertiga tanah di kampung itu kurang dari 0,20 ha dimiliki oleh 137 keluarga. Sedangkan 66 % bidang tanah lainya lebih dari 0,20 ha dan dimiliki 27 keluarga. Jika mengacu pada Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960, tidak ada orang yang bisa memiliki lebih dari 5 ha tanah di area yang padat

penduduk. Di Miri, pada tahun itu, hanya 1 keluarga yang memiliki tanah lebih dari 2 ha. Sedangkan sejak 1963 populasinya meningkat sebanyak 15 persen. Di Miri, 34 % keluarga yang ada menggarap tanah baik sawah atau pekarangan kurang dari 0.1 ha. Kondisi ini bertahan cukup lama, sejak 15 tahun studi Ismael¹³³ menunjukkan bahwa di Jawa orang dalam jumlah besar tergantung hidupnya dari pertanian tetapi hanya memiliki kurang dari 0.1 ha tanah. Dapat dikatakan dari 116 keluarga di sana hanya memiliki 0.22 ha. Rata-rata sekitar sepertiga di pekarangan, dan sisanya dua pertiga di sawah. Tetapi dibandingkan dengan Sriharjo secara keseluruhan, sawah di Miri lebih luas karena di sana tidak ada *tegalan*. Namun beberapa dari 116 keluarga itu tidak tergantung pada pertanian semua, mereka memiliki sumber pendapatan lainnya. Mereka ini umumnya menggarap di bawah rata-rata luas sawah yang dimiliki atau digarap. Tergambar jelas dari penduduk tersebut tiga golongan; mereka yang luas tanah taninya sangat kecil, mereka yang tidak memiliki hak guna atau milik atas tanah, dan adanya kenyataan dimana sawah yang terairi terkonsentrasi di tangan beberapa orang.

Untuk menguatkan tesis bahwa kepadatan penduduk mempersempit perolehan pemanfaatan sumber daya penelitian itu menunjukkan bagaimana di Miri sawah menampung terlalu banyak tenaga kerja dan memperkecil pendapatan mereka. Jumlah besar tenaga kerja itu segera terlihat jelas dengan perbandingan yang dibuat dalam laporan itu. Di Sumatera Timur petani menggarap tanah 0.84 ha, menggunakan tenaga kerja keluarga,

¹³³ J.E. Ismael, *Keadaan Penduduk di Duapuluhtiga Desa di Djawa* dalam M. Singarimbun & D.H. Penny, *A Case Study of Rural Poverty*, Buletin of Indonesian Economic Studies (BIES) 8:1, 79-88.

tidak menggunakan tenaga hewan atau teknologi modern apapun. Setiap keluarga menghasilkan 1.150 kg beras, atau sekitar 4.8 kg per orang sehari kerja. Sehingga masih ada surplus yang bisa dijual setelah kebutuhan keluarga tercukupi (sekitar 125 kg perorang). Di Sriharjo, luas tanah yang digarap kurang dari seperempat jumlah tanah garapan di Sumatera Timur, tetapi jumlah orang yang bekerja untuk memanen 223 orang, sedangkan di Sumatera Timur 154 orang. Jadi petani di Sriharjo menggunakan 45 % lebih banyak tenaga kerja per hektar dibanding di Sumatera. Tenaga kerja di Sriharjo memang lebih banyak tetapi lebih murah. Ketika studi itu dilakukan, upah buruh tani per hari Rp. 30,- sepadan dengan 0.75 kg gabah kering. Mereka yang bekerja hanya mendapatkan 11 kg beras dalam satu musim kerja (umumnya 180 hari). Di Sriharjo, kekurangan tanah memaksa orang untuk mencari pekerjaan lain, bahkan selama musim tanam sekalipun. Sekitar 88 % orang di Sriharjo bekerja di sawah, dan hanya 22 % dari seluruh waktu yang dihabiskan di sawah, sedangkan sisa waktu lainnya dihabiskan untuk pertanian lain dan kegiatan di luar sektor pertanian.¹³⁴

Kepedulian terhadap orang-orang yang terpinggirkan membawa Masri untuk tidak diam ketika UU Pokok Kehutanan Tahun 1967 berdampak terhadap kehidupan dan hak-hak masyarakat dayak. Dalam sebuah tulisan berjudul “Hak Ulayat Masyarakat Dayak”¹³⁵ terasa betul dimana Masri membela hak masyarakat adat. Tulisan itu mendiskusikan dua persoalan peting terkait dengan isu ini, yaitu bagaimana posisi hak ulayat masyarakat

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ Masri Singarimbun, “Hak Ulayat Masyarakat Adat” dalam *Kebudayaan Dayak, Aktualisasi dan Transformasi* (Jakarta: Grasindo, 1994) hlm 53-65.

adat di dalam struktur perundangan yang terkait dan apakah masyarakat dayak memang memiliki persekutuan hukum yang membuatnya memiliki hak atas tanah ulayat.

Sebagaimana banyak penilaian kritis atas UU Pokok Kehutanan 1967 menyebutkan bahwa undang-undang ini membuka peluang pemodal besar (pemegang HPH) melakukan eksploitasi terhadap sumber daya hutan. Seiring dengan terjadinya *timber boom* secara besar-besaran banyak petani peladang di Kalimantan, Sumatera, dan sebagainya kehilangan hak pengelolaan atas sumber daya alam yang sejak lama—jauh sebelum UU Pokok Kehutanan dan modal besar masuk—telah menopang dan menjadi sumber hidup mereka. Tetapi karena pengelolaan hutan dengan cara demikian menempel pada proyek besar pembangunan nasional, maka residu dari proyek industrialisasi hutan itu dimasukkan kembali ke dalam proses produksi industrial. Artinya, petani peladang yang kehilangan hak-hak pengelolaan hutan dimasukkan ke dalam industri hutan sebagai buruh bayaran, atau mereka menggarap lahan basah atau kering yang disediakan pemerintah sebagai pengganti atas hak mereka yang hilang.

Departemen-departemen dalam tubuh pemerintahan juga berada di belakang perusahaan yang mendapat izin penebangan hutan. Empat departemen terlibat aktif dalam proyek ini. Departemen Pertanian menyelenggarakan PIR BUN (Perusahaan Inti Rakyat dan Perkebunan). Departemen ini bertugas membimbing petani kebun dan merehabilitasi usaha perkebunan rakyat—yang terkena dampak HPH. Departemen transmigrasi merancang lokasi dan menempatkan petani transmigran—di daerah bekas hutan. Petani lokal disediakan jatah jika ingin ikut dalam proyek transmigrasi sebagai peserta. Sedangkan Departemen Sosial

ditugasi untuk menangani suku terasing yang berasal dari lingkungan hutan. Mereka dimukimkan dalam kampung baru yang dilengkapi berbagai fasilitas. Berbeda dengan tiga departemen di atas Depdagri melaksanakan proyek “resettlement” petani peladang berpindah. Mereka dipindah ke luar lingkungan asal mereka yaitu hutan yang sudah dijadikan sebagai lokasi beroperasinya industri perhutanan modern. Akibat industri perhutanan modern ini segera terlihat beberapa tahun kemudian. Dalam waktu delapan tahun sejak 1982 di Kalimantan laju kerusakan hutan diperkirakan seluas 610,9 ribu hektar per tahun, maka pada tahun 1990 kerusakan hutan Kalimantan mencapai sekitar 4887,2 ribu hektar¹³⁶.

Bahwa kelompok komunal tertentu dan tanah yang didiaminya mempunyai kaitan yang tidak dapat dipisahkan. Tanah adalah tempat tinggal mereka dan memberikan penghidupan kepada persekutuan. Jenazah nenek moyang mereka dikuburkan di tempat itu dan mereka percaya nenek moyang mereka akan menjadi pelindung bagi mereka. Dengan demikian, tindakan memindah begitu saja orang-orang dayak pedalaman sama dengan mencabut seluruh relasi hidup, kebudayaan, dan peradaban yang telah mereka bangun ratusan tahun jauh bahkan sebelum negara ini berdiri. Di sinilah letak dilema dan persoalan yang tarik menarik antara kepentingan pembangunan nasional dan hak hidup masyarakat dayak. Pemerintah dan khususnya Kanwil Pertanahan Propinsi Kalimantan Timur pada saat itu berpendapat bahwa persekutuan hukum masyarakat dayak tidak ada lagi. Kanwil tersebut menyebut bahwa upaya menarik-narik

¹³⁶ *Ibid.*, hlm. 58-60

eksistensi persekutuan hukum adat seperti “menegakkan benang basah” atau “menarik-narik kerbau mati”. Kesan yang terbaca pada penutup tulisan tersebut memperlihatkan posisi Masri; di satu sisi bahwa hutan memang harus dimanfaatkan untuk menyejahterakan rakyat tetapi harus disadari bahwa masyarakat Dayak sebagai persatuan hukum memiliki hak pengelolaan.

Daftar Pustaka

Buku

- Achille Loria, *Contemporary Social Problems: A Course of Lectures Delivered at the University of Padua*, trans. From Italian by John Leslie Garner. London. Swan Sonnenschein & Co.Ltd., 1911
- Alexander, P., Boomgaard, P. and White, B. (eds.). *In The Shadow of Agriculture In The Javanese Economy, Past and Present*. Amsterdam: Royal Tropical Institute, 1991
- Ardnt, H.W. *Pembangunan dan Pemerataan: Indonesia di Masa Orde Baru* (terj.) Kosta Damanik. Jakarta: LP3ES, 1983
- Belling, Willard A. and Totten, George O. (peny.). *Modernisasi Masalah Model Pembangunan* (terj.) Mien Joebhaar, Hasan Basari. Jakarta: CV Rajawali bekerja sama dengan YIIS, 1980
- Bernstein, Henry, et.al. *Kebangkitan Studi Reforma Agraria di Abad 21*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2008
- Cuffaro, Nadia. *Population, Economic Growth and Agricultural ini Less Developed Countries*. London. Routledge, 2001.
- Daniel Dhakidae, *Cendekiawan dan Kekuasaan Dalam Negara Orde Baru*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama, 2003
- David E. Blomm, *The Demographic Dividend: a New Perspective on Economic Consequences of Population Change*. Pittsburgh. RAND, 2002
- Dr. Paul R. Ehrlich, *The Population Bomb*. NewYork. Ballantine Books, 1971
- Fu'ad, Zulfikar. *Menulis Biografi, Jadikan Hidup Anda Lebih Bermakna*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 2008.
- Goldscheider, Calvin. *Populasi, Modernisasi, dan Struktur Sosial* (terj.) Nin Bakdi Sumanto, dkk. Jakarta: CV Rajawali, 1985
- Gunawan Wiradi, *Metodologi Studi Agraria, Karya Terpilih Gunawan*

- Wiradi . Yogyakarta: STPN, 2009
- Gunawan Wiradi. *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir*. Yogyakarta: Kerjasama Insist Press dan KPA serta Pustaka Pelajar, 2000
- Hardin, Garret. *Living Witihin Limit: Ecology, Economics, and Populations Taboos*. New York. Oxford University Press. 1993.
- Hauser, Philip M., et.al. *Penduduk dan Masa Depan Perkotaan* (terj.) Masri Maris. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985
- James Dananjaja dalam Malo, Manasse “*Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial di Indonesia Sampai Dekade 80-an*”. Jakarta. PT. Rajawali Press, 1989.
- Jan-Paul Dirkse, Frans Husken, and Mario Rotten (edt), *Development and Social Welfare, Indonesia’s Experiences Under The New Order*. Leiden. KITLV, 1993
- John Bongaarts & Steven W. Sinding, “*A Respon To Crtics of Family Planning Programs*”. Internasional Perspective on Sexual and Reproductive Health. Vol. 35, No. 1, Maret 2009
- Kandel, Willian A. dan Brown. David L. *Population Change and Rural Society*. Netherland. Springer, 2006.
- Kathleen A. Tobin, *Politics and Population Control, A Documentary History*. London. Greenwood Press, 2004
- Levang, Patrice. *Ayo ke Tanah Seberang, Transmigrasi di Indonesia.*, Ambar Wahyuni (terj). Jakarta. Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), 2003
- M. Dawam Rahardjo. *Transformasi Pertanian, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja*. Jakarta: UI Press, 1986
- M. Masyur Amin, dkk. *Kelompok Elit dan Hubungan Sosial di Pedesaan*. Jakarta: PT Pustaka Grafika Kita, 1988
- Masri Singarimbun & David H. Penny, “*Penduduk dan Kemiskinan: Kasus Sriharjo di Pedesaan Jawa*”. Jakarta. Bhratara Aksara Jaya, 1976
- Masri Singarimbun, *Pencapaian Program Keluarga Berencana di In-*

- donesia. Majalah Prisma No. 3 Tahun 1988. Jakarta. LP3ES
- N. Daldjoeni dan A. Suyitno. *Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan*. Bandung: Alumni, 1979
- Nordholt, Nico G. Schulte & Leontine Visser (ed). *Ilmu Sosial di Asia Tenggara: Dari Partikularisme ke Universalisme*. Jakarta. Pustaka LP3ES Indonesia, 1997
- O'Farrell, Clare. *Michele Foucault*. London. Sage Publication, 2005
- Partha Dasgupta, *The Population Problem: Theory and Evidance*. Journal of Economics Literature, Vol. XXXIII, Desember 1995
- Rizal Mallarangeng. *Mendobrak Sentralisme Ekonomi*. Jakarta: KPG, 2002
- Robert Parangin-Angin & Irawati Singarimbun (ed). *"Matahari di Hati Kami"*. Jakarta. Yayasan Merga Silima, 1998.
- Ross, *Malthus Factor, Poverty, Politics, and Population in Capitalist Development*. The Corner House, 2000.
- Rozy Munir & Budiarto, *"Teori Kependudukan"* terj. Jakarta. Bina Aksara, 1983
- Sarjana Sigit Wahyudi. *Dampak Agro Industri di Persawahan Jawa*. Semarang: Kerjasama Penerbit Mimbar dan Yayasan Adikarya IKAPI serta Ford Foundation, tt.
- Seltzer, Judith R. *The Origins and Evolution of Family Planning Programs in Developing Countries*. Pittsburgh. RAND, 2002.
- Taljapulkar, Sriphad, at al. *Population, Resources, and Development: A Riding The Age Waves-Volume 1*. Netherland. Springer, 2005.
- Timer, M., *Child Mortality and Population Pressure in the D.I. Yogyakarta, Java, Indonesia*. Rotterdam. Bronder-offset, 1961
- Vedi R. Hadiz dan Daniel Dhakidae, (ed.), *Ilmu Sosial dan Kekuasaan di Indonesia*. Jakarta: PT. Equinox Publishing Indonesia, 2006.
- William Graham Sumner and Albert Galloway Keller, *The Science of Society*. New Haven, Conn. Yale University Press, 1927.
- Wiradi, Gunawan, at al. *Ranah Studi Agraria, Penguasaan Tanah dan Hubungan Agraris*. Yogyakarta. STPN, 2008.

Jurnal

"Family Planning in Indonesia," *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, No. 10, June 1968, Canberra: Australian National University Press, 48-56.

Jurnal Gerbang Vol. 07, No. 03, Mei-Julii 2000. Surabaya, eISAD dan The Asia Foundation, 2000

Masri Singarimbun, "Masalah Penurunan Angka Kelahiran: Aspek-aspek Budaya dan Program". *Prisma*, No. 6 Tahun XXIII, Juni 1994, 27-42.

Masri Singarimbun, "Kelahiran, Kematian dan Pertambahan Penduduk,"

Masri Singarimbun, "Pencapaian Program Keluarga Berencana di Indonesia," *Prisma*, 3 (1988), 3-15.

Masri Singarimbun, *Menuju Sistem Kesehatan Yang Baru*. Majalah Kedokteran Indonesia Volume 34, Nomor: 7, 31 Juli 1984

Masri Singarimbun, *Menyehatkan Orang Desa: Beberapa Aspek Sosial Budaya*. Makalah Seminar Strategi Penelitian dan Strategi Program untuk Intensifikasi Penurunan Mortalitas Bayi dan Anak di Indonesia. Proyek Penelitian Morbiditas dan Mortalitas, Universitas Indonesia. Jakarta, 25-29 Mei 1994.

Masri Singarimbun, *Pola Konsumsi: Ke Arah Pemerataan ?* *Prisma*, 10 November 1978

Masri Singarimbun, *Rumah Tangga*. Makalah ceramah Penataran Analisa Data Sensus Penduduk di Universitas Brawijaya, 22 Februari- 13 Maret 1982.

Masri Singarimbun, *Soal Komunikasi Inovasi*. *Medika*, 10 (7): 488-489, Juli 1984

Masri Singarimbun, "Economic Aspect of Family Planning," *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 6, No. 3, November 1970, Canberra: Australian National University Press, 102-5.

Populasi, Volume 7 No. 1 Tahun 1996. Yogyakarta. PSKK, 1996.

- Populasi, Volume 8 No. 2 Tahun 1997. Yogyakarta. PSKK, 1997.
Prisma No 3 Tahun XXIII. Jakarta. LP3ES, Maret 1994
Prisma, vol. 3, No. 2. Jakarta. LP3ES, April 1974
Tamtomo, "Masri Singarimbun: Bagaimanapun Pulau Jawa Tetap Akan Padat," *Journal Ekuin*, Jum'at, 4 Desember 1981.

Koran

- Akibat Kenaikan BBM: Jurang Kemiskinan Akan Tambah Lebar.* Sinar Harapan, Kamis 20 Mei 1980
Arus Penduduk Ke Luar Jawa Tetap Lebih Banyak. Kompas, Kamis 24 Februari 1975
Dari Sriharjo ke Susukan. Kompas, Senin 4 Agustus 19986
Dr. Masri Singarimbun: Indikator Sosial Untuk Melihat Kemakmuran Masyarakat Sudah Patut Disempurnakan. Kompas, Minggu 26 April 1981
Dr. Masri Singarimbun: Masalahnya Adalah Iktikad. INOVASI No. 7 TH. IV September-Desember 1990
KB Dari Masa ke Masa. Kompas, 14 Desember 1988
Keadaan Sekarang Sudah Cukup Membaik, Meski Jumlah Orang Miskin Sangat Besar. EKSPONEN, 26 Februari-23 Maret 1984
Kondom Bukan Kambing Hitam. Yogya Post, 1 Desember 1990
Kurangnya Kesempatan Kerja Menarik Orang Bekerja Sebagai Buruh Tani. Sinar Harapan, Selasa 7 Juli 1981
Mahasiswa Tak Peka Atas Kemiskinan Orang Tuanya. Gelora No. 5, Desember 1978
Masri Singarimbun, "Frekwensi Banyaknya Hubungan Seks Tdk Berpengaruh Thd Angka Kelahiran," *Sinar Harapan*, Jum'at, 30 Januari 1981.
Masri Singarimbun, "Jangan Membuat Bidang Kebudayaan Sebagai "Daerah Kering" Untuk Penelitian". *Suara Karya*, Jum'at 28 Oktober 1991.
Masri Singarimbun, "Perguruan Tinggi Dalam Bidang Kepen-

- dudukan”, *Pikiran Rakyat*, 15 April 1980
- Masri Singarimbun, “Tantangan Menarik, Mempercepat Penurunan Tingkat Kelahiran,” *Kompas*, 14 April 1980.
- Masri Singarimbun: *Gaya Pola Konsumtif*. Jurnal Ekuin. Sabtu, 15 Agustus 1981
- Menggosur Asonian*. Kedaulatan Rakyat, Senin 21 Mei 1990
- Pendapat Para Ahli PPSK UGM: Sensus Penduduk 1980, Ujian untuk Mengukur Keberhasilan Program KB,” *Kompas*, Kamis 16 Oktober 1980.
- Pendekatan-pendekatan Elitis Tidak Membantu Gelandangan*. Sinar Harapan, Sabtu 23 Januari 1982
- Penertiban Asonian, Becak, dan UUD 45 Pasal 34*. Suara Karya, Selasa 22 Mei 1990
- Pengakuan Politis Tentang Adanya Kemiskinan Muncul Dalam Orde Baru*. Sinar Harapan, Jum’at 18 November 1977
- Penyebab Gelandangan: Ekonomi, Kesempatan Kerja, dan Ledakan Penduduk*. Sinar Harapan, Jum’at 26 Februari 1982
- Percakapan “SH” dengan Masri Singarimbun, “Suksesnya Program Pangan Jangan Kurangi Urgensi Kependudukan,” *Sinar Harapan*, Selasa, 3 Maret 1981.
- Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan Universitas Gadjah Mada (PPSK-UGM): *Menjelang Usia 10 Tahun*. OPTIMIS, Desember 1982
- Ramuan Untuk Penelitian Sosial*. Resensi Buku “Metode Penelitian Survey”. Jakarta. LP3ES, 1982. *Kompas*, Minggu 13 Juni 1982
- Subangun E. Nilai Sosial Budaya Mendukung Program Kependudukan. *Kompas*, Sabtu 17 Desember 1977
- Supermarket Perlu Dibatasi Agar Tak Lemahkan Wiraswasta*. Kedaulatan Rakyat, 14 Februari 1990
- Team “SH”, “Ajaran Malthus Ternyata Masih Berlaku: Hasil Penelitian dan Berbagai Teori Menanggulangi Kependudukan,” *Sinar Harapan*, Rabu, 18 Februari 1981.

- Team "SH", "Ajaran Malthus Ternyata Masih Berlaku: Hasil Penelitian dan Berbagai Teori Menanggulangi Kependudukan," *Sinar Harapan*, Rabu, 18 Februari 1981
- Usaha Memerangi Kesenjangan Sosial: Era Pasifik, Pertumbuhan Ekonom, dan Usaha Pemerataan*. Kedaulatan Rakyat, 18 April 1990

Dokumen

- Kumpulan Surat Peter Hagul*, disunting tim PSKK UGM
- Masri Singarimbun dan Chris Manning, "Keluarga Berencana, Motivasi dan Pola Sosial-Ekonomi: Kasus Mojolama," *Prisma*, Vol. 3. No. 2 (April 1974) 31-43.
- Masri Singarimbun, "Beberapa Aspek ZPG," *Makalah Upgrading/ Penataran Pengurus dan Anggota Inti dari Student Movement of Zero Population Growth (ZPG) di Kaliurang*, 10-15 Agustus 1973.
- Masri Singarimbun, "Indonesia," in Henry P. David and Sung Jin Lee, *Social and Psychological Aspects of Fertility in Asia*, Proceeding of the Technical Seminar, Choonchun, Korea, 7-9 November 1973, Korean Institute for Research in the Behavioral Sciences (Seoul) and Transnational Family Research Institute (Washington).
- Masri Singarimbun, "Interrelation of Population Dynamics and Social Change,"
- Masri Singarimbun, "Metode-metode Kontasepsi Yang Non-Klinis di Dalam Keluarga Berencana", *Ilmu Kedokteran Gadjah Mada*, 1 (2), Desember 1969, 111-7
- Masri Singarimbun, "Pembinaan Lembaga Penelitian Dalam Lingkungan Universitas: Suatu Rekaman Pengalaman", 25 Desember 1982
- Masri Singarimbun, dalam Ehrlich, Paul .R, "Ledakan Penduduk". Jakarta. Gramedia, 1981
- Masri Singarimbun, *Focus Group Research*. Catatan untuk ceramah pada Lokakarya Kelangsungan Hidup Anak, Yogya-

- karta, PPK-UGM, 14-26 September, 1987
- Masri Singarimbun, *Kehidupan Orang-orang Usia Lanjut: Aspek-aspek Sosial dan Kependudukan*. Makalah untuk dimuat Bulletin Dewan Riset Nasional, 1992
- Masri Singarimbun, *Keluarga Berencana di Pedesaan*. Makalah untuk Lokakarya KB Swadaya di Pedesaan. Jakarta. 30 Januari-1 Februari, 1989.
- Masri Singarimbun, *Keluarga Berencana Indonesia Sampai Abad XXI: Beberapa Aspek Program dan Sosial Budaya*. Paper disampaikan pada Simposium Sehari Sepuluh Windu Usia Prof. H. M. Joedono. Jakarta, 10 November 1988
- Masri Singarimbun, *Kemiskinan*. Yogyakarta. Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 1995
- Masri Singarimbun, *Kepemimpinan Dalam Penelitian: Kursus Singkat Research Management Training*. Diselenggarakan dalam kerja sama antara Proyek Pengembangan Pusat Studi Lingkungan (PP-PSL) dan Pusat Penelitian Lingkungan Hidup UGM. Yogyakarta, 10-17 Januari 1993
- Masri Singarimbun, *Masalah Kependudukan*. Makalah disiapkan untuk Panel Diskusi Konsultasi Kependudukan, Dewan Gereja-gereja di Indonesia, Jakarta, 7 November 1981
- Masri Singarimbun, *Masalah Peledakan Penduduk dalam Pembangunan Nasional*. Makalah disampaikan untuk Konferensi Gereja dan Masyarakat. Medan, 4 Juni 1979
- Masri Singarimbun, *Masalah Tanah Dan Kependudukan*. Makalah disampaikan untuk "Lokakarya Latihan Penelitian Masalah Pertanahan dan Hubungan Agraris". Solo, 18 Oktober 1981-9 Januari 1982
- Masri Singarimbun, *Metodologi Antropologi*. Penataran dan Pencangkokan Tenaga-tenaga Peneliti, 2-30 Januari 1980.
- Masri Singarimbun, *Pendekatan Mikro Demografi, Pengalaman Memadukan Antropologi dan Demografi*. Makalah untuk

Lokakarya Penerapan Kombinasi Metode Kualitatif dan Kuantitatif dalam Penelitian Kelangsungan Hidup Anak di Indonesia. Jakarta 6-10 Juli 1987

Masri Singarimbun, *Penelitian Kependudukan di Indonesia.* Makalah disiapkan untuk ceramah pada Penataran Asisten Peneliti, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jakarta, 18 Mei 1979

Masri Singarimbun, *Penelitian Kualitatif.* Disusun untuk Lokakarya Sektor Informal di Pusat Penelitian Kependudukan Universitas, Februari 1987.

Masri Singarimbun, *Some Consequences of Population Growth in Java.* The paper is presented at SEADANG Population Seminar, April 6-8, 1979. Elkridge, Maryland, USA

Masri Singarimbun, "Kondom Melalui Pos: Catatan Mengenai Suatu Case Study", Ceramah di Lembaga Kependudukan Universitas Gadjah Mada, Kamis 7 Februari 1974, pkl. 10.00-11.30

Measure of Family Planning Acceptance in West Java and Central Java. Lembaga Kependudukan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. April, 1977

Ringkasan Proyek Penelitian PPSK UGM 1974-1979. Tim PPSK UGM.

Internet

Chabib Musthafa, *Sosiologi Kependudukan*, dalam <http://chabib.sunan-ampel.ac.id/wp-content/uploads/2008/12/hand-out-sos-kependudukan-pdf.pdf> diakses pada hari Senin 15 Oktober 2009 pukul 14.10 WIB.

Sonny Harry B. Harmadi, "Pengantar Demografi", dipresentasikan di Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi UI pada 11 Desember 2008, dalam <http://pkn03ui.files.wordpress.com/2008/11/demografi-1.pdf> diakses pada hari Senin 15 Oktober 2009 pukul 14.10 WIB.



Seminar "Dari Pertumbuhan Ke Pembangunan, Yogyakarta 23-25 Agustus 1993, diselenggarakan oleh P3PK dan PPK UGM, hadir dalam acara itu juga Mubyarto, Sartono, Bambang Ismawan.

Sumber: Dokumentasi PSKK



(Atas dan bawah) Seminar "Dari Pertumbuhan Ke Pembangunan, Yogyakarta 23-25 Agustus 1993, diselenggarakan oleh P3PK dan PPK UGM, hadir dalam acara itu juga Mubyarto, Sartono, Bambang Ismawan. Sumber: Dokumentasi PSKK





Para ahli agraria berfoto bersama. Tampak Masri Singarimbun bersama Sajogyo, Mubyarto, Bambang Ismawan, dan kedua mahasiswa pascasarjana yang mendapat David Penny Award. Sumber: Dokumentasi Sajogyo Institute



Masri Singarimbun bersama keluarganya di kediaman, Yogyakarta. Sumber: Dokumentasi Tempo

BAB IV MUBYARTO DAN ILMU EKONOMI YANG MEMBUMI

Tarli Nugroho

A. Soal Harga Beras dan Jejak Awal Keberpihakan Mubyarto

Pada kuartal kedua 1969, halaman media massa di Indonesia diramaikan oleh perbincangan mengenai peningkatan jumlah produksi beras. Sebuah berita yang dirilis *Antara*, misalnya, menyebut bahwa produksi beras 1969, yang mencapai 11,14 juta ton, telah melebihi target awal yang ditetapkan pemerintah, yaitu sebesar 10,5 juta ton.¹ Ramainya pemberitaan media itu telah mengundang para ahli, terutama para ekonom, untuk mengemukakan pendapat mengenai sebab-sebab kenapa hal itu bisa terjadi. Sebagian analisis mengemukakan bahwa kenaikan itu disebabkan oleh *faktor alam*, khususnya iklim yang mendukung dan hujan yang turun sepanjang tahun, sehingga para petani bisa menanam dua hingga tiga kali pada periode itu.

¹ Rilis berita *Antara*, “Dept. Pertanian Meramal: Produksi Beras 1969 Melebihi Target”, sebagaimana dipetik dalam buku kumpulan berita dan pendapat yang disusun Arifin Hutabarat, *Usaha Mengatasi Krisis Beras* (Jakarta: Lembaga Pendidikan dan Konsultasi Pers, 1974), hal. 44-45.

Namun, sejumlah ekonom menolak penjelasan faktor alam itu. Mereka menyebut bahwa kenaikan itu merupakan hasil dari program intensifikasi pertanian yang kebetulan menjadi titik berat pembangunan lima tahun tahap pertama pemerintahan Orde Baru (Pelita I, 1969-1974). Penggunaan pupuk yang kian massif beserta pemakaian bibit unggul menjadi alasan yang paling banyak dikemukakan. Apalagi, Revolusi Hijau memang baru saja disemai di Indonesia. Pendek kata, kenaikan produksi beras adalah buah dari manajemen pembangunan.

Sementara, sebagian ekonom lainnya mencoba mengambil jalan tengah dengan mengatakan bahwa kombinasi iklim yang baik, ditambah dengan perencanaan serta konsepsi ekonomi yang tepat, adalah faktor-faktor yang telah menyebabkan tercapainya rekor produksi beras. Silang pendapat mengenai sebab-sebab meningkatnya jumlah produksi beras itu terdokumentasi dengan baik dalam tajuk rencana yang ditulis Harian *Pedoman* pada Sabtu, 10 Mei 1969.²

Jika disimak sekilas, semua penjelasan tadi sepenuhnya logis, serta secara teknis memang berhubungan atau bisa dikaitkan dengan angka kenaikan produksi padi. Hanya saja, nampaknya tak semua orang sepandangan dengan berbagai model penjelasan yang — meminjam istilah Galbraith — bersifat “*conventional wisdom*” tadi.³ Dan satu-satunya orang yang dengan tegas menolak semua penjelasan tadi adalah ekonom muda bernama Mubyarto (1938-2005). Mubyarto, yang waktu itu menjabat sebagai penasihat menteri perdagangan (dijabat oleh Prof. Dr. Sumitro Djojohadi-

² Tajuk itu dicuplik secara utuh dalam Hutabarat, *ibid.*, hal. 95-96.

³ John Kenneth Galbraith, *The Affluent Society* (New York: Mentor Book, 1958), lihat Chapter II, “*The Concept of Conventional Wisdom*”, hal. 17-26.

kusumo), memiliki pandangan sendiri mengenai apa yang sedang terjadi. Menurutnya, kenaikan produksi padi pada saat itu adalah dikarenakan *membaiiknya harga komoditas pertanian* sepanjang periode sebelumnya. Membaiiknya nilai tukar ini, menurut Mubyarto, membuat para petani terpacu untuk meningkatkan produktivitasnya. Perbaikan harga menjadi daya rangsang yang luar biasa yang mendorong petani menanam padi. Atau, menurut cuplikan Tajuk Rencana *Pedoman*,

“... Dr. Mubyarto mengemukakan bahwa orang kebanyakan lupa, bahwa harga beras yang sangat melonjak pada akhir tahun 1967 dan awal 1968 adalah terlalu menarik bagi petani produsen beras. Sehingga mereka berusaha sekuat-kuatnya untuk meningkatkan produksi beras tahun 1968 dengan harapan harga akan minimal sama dengan harga-harga awal tahun 1968 itu.

...

Harga yang tinggi pada sesuatu tahun tertentu, selalu diikuti oleh produksi yang tinggi tahun berikutnya, sedang harga merosot selalu diikuti produksi yang rendah, demikian Dr. Mubyarto.”⁴

Pandangan Mubyarto, yang membuat determinasi soal keterkaitan antara nilai tukar dengan produktivitas petani, secara jelas menunjukkan keberpihakannya terhadap rakyat tani, terutama dalam posisi mereka sebagai produsen. Keberpihakan ini tidak hanya di level praksis-kebijakan, sebagaimana misalnya bisa kita baca dari kumpulan memorandum yang dia buat untuk menteri perdagangan,⁵ melainkan – sebagaimana akan dibahas nanti oleh bab ini – keberpihakan itu dia bawa hingga ke level *episteme* keilmuan, sesuatu yang di kemudian hari membuat namanya identik

⁴ Hutabarat, *ibid.*, hal. 95.

⁵ Mubyarto, *Kebidjaksanaan Beras di Indonesia; Kumpulan Memorandum untuk Menteri Perdagangan Republik Indonesia, September 1968-September 1969* (Yogyakarta: Biro Penelitian Ekonomi Fakultas Ekonomi UGM, 1969).

dengan gagasan Ekonomi Pancasila. Terlepas dari kontroversi mengenai isu itu, dengan melontarkan gagasan Ekonomi Pancasila, dan menjadi salah satu pembelanya yang paling gigih, Mubyarto telah mengukuhkan dirinya sebagai salah satu dari hanya sedikit saja sarjana Indonesia yang mau terlibat dalam kegiatan kritik teori dan strukturasi keilmuan (baru). Sekali lagi, lebih jauh mengenai hal ini akan diuraikan dalam bagian lain dari bab ini.

Kembali ke soal harga beras, pendirian Mubyarto tahun 1969 itu tentunya tidak berpijak pada pemihakan buta yang tak berdasar. Kesimpulan itu merupakan konklusi dari berbagai riset lapangan yang pernah dilakukannya. Dan memang demikianlah adanya. Tesis yang ditulisnya di Vanderbilt University, *Rice Marketing in Indonesia* (1961); disertasi yang disusunnya di Iowa State University, *The Elasticity of the Marketable Surplus of Rice in Indonesia: A Study in Java* (1965); serta monografi yang disusun bersama dengan pembimbingnya, Profesor Lehman B. Fletcher, *The Marketable Surplus of Rice in Indonesia: A Study in Java-Madura* (1966), misalnya, yang berangkat dari titik pandang bahwa pemecahan masalah beras di Indonesia tidak pernah mendudukkan faktor harga sebagai determinan penting (sebagai *insentif* buat petani produsen),⁶ bukan hanya berisi data-data empiris yang lengkap mengenai soal beras, melainkan secara analitikal mengajukan sebuah terobosan analisis yang bersifat baru dalam kajian perberasan. Thee Kian Wie, dalam sebuah telaah panjang atas perkembangan ilmu ekonomi di Indonesia, menyebut bahwa riset Mubyarto mengenai beras adalah istimewa karena mencoba

⁶ Mubyarto dan Lehman B. Fletcher, *The Marketable Surplus of Rice in Indonesia: A Study in Java-Madura* (Ames: Department of Economics, Iowa State University, 1966), lihat hal. 5-6, 14-15, dan 25.

mengintegrasikan perilaku penawaran dan permintaan (*supply and demand behaviour*) dalam produksi beras. Tanpa analisis simultan sebagaimana yang diperkenalkan Mubyarto, Thee menyebut bahwa perilaku surplus beras yang dipasarkan tidak akan pernah bisa dijelaskan atau dipahami dengan baik.⁷

Hingga waktu itu (sebenarnya hingga saat ini masalah tersebut tidak pernah benar-benar diselesaikan), kebijakan harga beras di Indonesia memang selalu berorientasi kepada konsumen, dimana tujuan akhirnya adalah untuk menjamin tersedianya beras dalam jumlah yang cukup pada tingkat harga yang murah. Ini bisa dilihat dari model-model kebijakan perberasan yang dipilih oleh pemerintah, baik itu pemerintahan kolonial Belanda dulu maupun pemerintahan Republik. Secara garis besar, menurut Mubyarto, hingga 1969 kebijakan harga beras di Indonesia bisa dibedakan menjadi tiga periode, yaitu (1) masa kebijakan pangan murah (*the cheap food policy*), yaitu terhitung sejak masa kolonialisme Belanda hingga kira-kira 1959; (2) kebijakan "*upah natura*" (*the food wage policy*), yaitu selama periode inflasi dari 1959-1966; dan (3) kebijakan tekan-inflasi (*the "kill-inflation" policy*) dari 1966 hingga 1969.⁸ Ketiga bentuk kebijakan itu pada dasarnya sama-sama menitikberatkan pemihakan pada konsumen dan itu adalah sesuatu yang bermasalah. Bagi Mubyarto, masalah pokok perberasan Indonesia tidak terletak pada bagaimana caranya "*menurunkan harga beras*", melainkan pada bagaimana "*menyediakan*

⁷ Thee Kian Wie, "Economics", dalam Koentjaraningrat (ed.), *The Social Sciences in Indonesia*, Vol. II (Jakarta: Indonesian Institute of Sciences/LIPI, 1979), hal. 269-70.

⁸ Mubyarto, "Harga Beras dan Policy Produksi di Indonesia", dalam *Jurnal Agroekonomika*, No. 1/Th. I, Januari 1970, hal. 113.

beras” di pasaran yang “*dapat dibeli*” oleh rakyat banyak.⁹ Artinya, berapapun tingkat harga beras, jika rakyat banyak memiliki daya beli (*purchasing power*) hal itu tentunya tidak akan menjadi persoalan, sesuatu yang membuat isu beras murah dengan sendirinya menjadi tidak relevan. Pengkaitan dengan soal daya beli inilah yang absen dalam analisis perberasan sejauh itu dan hingga saat ini. Dan dalam kaitannya dengan daya beli rakyat tani, daya beli mereka sangat terkait dengan tingkat harga dari *output* yang mereka hasilkan, yaitu beras.

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Produksi dan Tingkat Harga Beras di Indonesia*

Tahun	Harga Rata-rata (Rp)	Jumlah Produksi (Juta Ton)
1955	3,41	-
1956	3,61	-
1957	3,69	-
1958	7,91	-
1959	7,63	-
1960	8,36	10,17
1961	13,04	9,58
1962	45,51	10,28
1963	82,08	9,16
1964	183,015	9,61
1965	672,74	10,24
1966	5,86	10,75
1967	15,46	10,40
1968	46,12	11,67
1969	43,38	12,25

Sumber: Data harga rata-rata dari Bulog (1971); Data Jumlah Produksi dari Mears dan Moeljono (1990).

⁹ Mubyarto, *Masalah Beras di Indonesia* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian Ekonomi Fakultas Ekonomi UGM, 1975), hal. 83.

Jika disimak, model argumentasi yang dibangun oleh Mubyarto ini senafas dengan pikiran Mohammad Hatta mengenai kaitan antara harga beras dengan politik kemakmuran.¹⁰ Dalam pandangan Hatta, cara pandang demikian inilah yang disebut sebagai “politik harga beras yang memakmurkan rakyat”. Menurutnya, kenaikan harga *output* hasil produksi desa, teristimewa padi dan beras, merupakan tiang dari politik-kemakmuran orang desa, dimana dengan surplus kemakmuran itu perekonomian desa akan dengan sendirinya membantu perkembangan perekonomian kota. Menurut cara pandang ini, perekonomian desa yang bertumpu pada sektor pertanian (atau agro-kompleks secara umum) dianggap memainkan fungsi unik yang berbeda dengan fungsi yang dimainkan perekonomian kota. Surplus ekonomi yang terjadi di desa selalu akan merupakan faktor pendorong bagi perkembangan perekonomian kota, tapi hubungan itu tidak berlaku sebaliknya.

Kerangka penjabar yang lebih gamblang mengenai pemikiran Mubyarto dan Hatta ini mungkin bisa diuraikan dengan meminjam hasil studi yang dilakukan oleh Cohen dan Zysman mengenai struktur perekonomian Amerika Serikat.¹¹ Dalam studi keduanya,

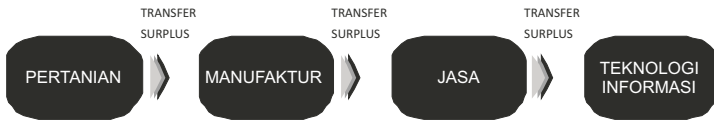
* Pada 1959 terjadi sanering uang yang kedua (0,1), dan 1965 terjadi sanering uang untuk ketiga kalinya (0,001).

¹⁰ Mohammad Hatta, *Beberapa Fasal Ekonomi: Djalan Keekonomi dan Pembangunan*, Djilid Pertama (Jakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka, 1960, cetakan keenam), hal. 177-95.

¹¹ Stephen S. Cohen dan John Zysman, *Manufacturing Matters: The Myth of the Post-Industrial Economy* (New York : Basic Books, 1987). Ulasan yang baik mengenai buku ini dibuat oleh Sritua Arief dalam tulisannya di Majalah *Prospek*, No. 29/II, 2 Mei 1992. Tulisan itu dimuat lagi dalam Sritua Arief, *Pemikiran Pembangunan dan Kebijaksanaan Ekonomi* (Jakarta: Lembaga Riset Pembangunan,

esensi dari perkembangan perekonomian tidak terletak pada pergeseran titik tumpu dari sektor pertanian ke sektor manufaktur, atau dari sektor manufaktur ke sektor jasa, sebagaimana yang lazim kita jumpai dalam teori-teori modernisasi; melainkan terletak pada hubungan dialektik antara apa yang mereka sebut sebagai sektor inti (*core sector*) dengan sektor pendukung (*supporting sector*). Dalam sebuah perekonomian yang sehat, sektor-sektor pendukung perekonomian harus selalu memiliki kaitan langsung dengan sektor inti. Apa yang dimaksud dengan sektor inti dalam perekonomian Amerika oleh Cohen dan Zysman tidak lain adalah sektor pertanian. Surplus yang terjadi di sektor inti, dalam hal ini pertanian, merupakan faktor utama yang telah mendorong munculnya industri hulu di sektor manufaktur, seperti industri pupuk dan petrokimia; juga menjadi faktor utama yang mendorong munculnya industri-industri hilir, seperti industri pengolahan bahan makanan dan sejenisnya; serta telah mendorong perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa. Dapat dilihat bahwa faktor pendinamis perekonomian pada mulanya adalah sektor pertanian dan lalu kemudian sektor-sektor lain yang masih memproduksi barang nyata (*material production*). Jika sektor inti mengalami kemunduran, maka sektor-sektor pendukung juga akan mengalami kemunduran. Berbeda dengan sektor inti yang bisa “menolong” perekonomian jika sektor pendukung mengalami kemunduran, maka kemunduran sektor inti *tidak bisa* ditolong oleh sektor pendukung, sebagaimana tergambar dari perekonomian Amerika dimana defisit perdagangan produk manufaktur tidak dapat diimbangi oleh surplus perdagangan produk jasa.

1993), hal. 51-55. Lihat juga ulasan yang dibuat oleh Jagdish Bhagwati di *Journal of Economic Literature*, Vol. 27/No. 1, Maret 1989, hal. 121-23.



Gambar 1. Model transfer surplus sektor ekonomi dari core sector pertanian hingga supporting sector berupa sektor manufaktur, jasa, dan teknologi informasi. Sumber: Tarli Nugroho (2008).

Meskipun studi yang dilakukan Cohen dan Zysman sebenarnya lebih untuk memberikan tanggapan, atau lebih tepatnya memberikan sanggahan atas tesis *post-industrial society*, sebagaimana yang dipopulerkan oleh Daniel Bell,¹² namun hasil studi itu berguna untuk memberikan kerangka (*framing*) analisis bahwa keterkaitan antar-sektor perekonomian domestik harus selalu dijaga, dan lebih dari itu harus selalu berada dalam *hubungan dialektik yang dinamis*. Dan yang juga perlu dicatat, apa yang diuraikan Cohen dan Zysman tadi pada dasarnya hanyalah semacam pengukuhan atas gagasan bahwa sektor pertanian merupakan fondasi dari pembangunan perekonomian, sebuah gagasan yang juga pernah ditegaskan oleh ekonom Cambridge, Joan Robinson,¹³ dan merupakan kesimpulan klasik, karena merupakan intisari ajaran ekonomi sejak zaman antik.¹⁴

¹² Daniel Bell, *The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting* (New York: Basic Books, 1976).

¹³ Joan Robinson, *Aspect of Development and Underdevelopment* (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1979). Lihat Arief, *op.cit.*, hal. 54.

¹⁴ Jika menyimak pemikiran zaman antik hingga pertengahan, konsep bahwa pertanian merupakan basis dari kegiatan ekonomi lainnya memang termasuk ke dalam konsep dasar pemikiran ekonomi yang akhirnya bisa ditemukan pada banyak bangsa dan kebudayaan. Lihat George Soule, *Ideas of the Great Economists* (New York: Mentor Books, 1955), hal. 13, dan 34.

Persis dalam model penjelasan yang menempatkan sektor pertanian sebagai basis tadi Mubyarto (dan juga Hatta) mempertahankan pendapatnya mengenai soal beras. Meskipun kebijakan beras murah menguntungkan konsumen, dimana mayoritas petani kita (60%) juga turut masuk di dalamnya (sebagai *net-consumer*),¹⁵ namun kebijakan itu berbahaya bagi perkembangan sektor pertanian dan bisa berakibat fatal terhadap arsitektur perekonomian secara umum. Sebagaimana sudah disinggung, karena faktor harga tidak dilihat sebagai fungsi insentif bagi para petani, maka imbasnya persoalan beras telah diisolir sekadar menjadi persoalan mikro di tingkat rumah tangga petani (dan rumah tangga konsumen secara umum), sedangkan relasi makronya dengan perekonomian nasional sepenuhnya diabaikan. Jadi, di balik pandangan Mubyarto mengenai soal beras itu sebenarnya tersimpan sebuah persoalan yang sangat mendasar, baik dilihat dari kacamata praksis maupun teoritis, yaitu soal terdapatnya *jurang* antara *analisis mikro-ekonomi* dengan *analisis makro-ekonomi* dalam perbincangan mengenai perekonomian Indonesia. Melalui *framing* “*jurang analisis*” inilah bab ini akan berusaha meninjau kontribusi Mubyarto terhadap pemikiran agraria di Indonesia.

Sampai di sini, sebelum risalah ini dilanjutkan, mungkin akan ada yang bertanya, dalam kapasitas bagaimana pembukaan ini berhubungan dengan soal agraria dan soal pemikiran agraria sebagaimana yang hendak dibicarakan oleh buku ini?! Atau, bagai-

¹⁵ Ahmad Suryana, Sudi Mardianto, Mohamad Ikhsan, “Dinamika Kebijakan Perberasan Nasional: Sebuah Pengantar”, dalam Ahmad Suryana dan Sudi Mardianto (eds.), *Bunga Rampai Ekonomi Beras* (Jakarta: LPEM FE-UI, 2001), hal. xii.

mana bisa jurang analisis dalam lingkup ilmu ekonomi bisa berhubungan dengan pemikiran agraria?! Pertanyaan-pertanyaan itulah yang coba akan dijawab oleh bab ini, selanjutnya.

B. Sekilas Manusia Mubyarto

“Tidak banyak akademisi di negeri ini yang ketika meninggal layak dikenang karena melawan mainstream. Terutama, jika arus besar itu adalah arus yang sedang berkuasa dan otoriter. Yang terjadi justru sebaliknya, ramai-ramai ikut arus.”¹⁶

Ratusan orang memadati Balairung Universitas Gadjah Mada (UGM), Rabu, 25 Mei 2005. Siang itu segenap “warga Bulaksumur”, sebutan untuk sivitas akademik dan alumni UGM, berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir. Bulaksumur berkabung. Sebenarnya bukan hanya warga Bulaksumur yang hadir siang itu, melainkan juga banyak orang dari banyak profesi dan kalangan telah menyempatkan diri untuk datang dari berbagai penjuru tanah air. Di antara mereka, misalnya, terlihat hadir Try Soetriono, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia (1993-1998), dan Drs. Frans Seda (1926-2010), ekonom senior yang eksis di tiga zaman. Mereka berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir kepada seseorang yang bahkan sejak semasa hidupnya telah disebut dan menjadi legenda. Ya, sehari sebelumnya, Selasa, 24 Mei, “Legenda Ekonomi Pancasila”, Mubyarto, tutup usia di Rumah Sakit Umum Prof. Dr. Sardjito, Yogyakarta. Dan siang itu giliran UGM memberikan upacara perpisahan untuk salah satu putra terbaiknya.

¹⁶ “Keteguhan Mubyarto”, Editorial *Harian Media Indonesia*, Kamis, 26 Mei 2005, hal. 1.



Gambar 2. Mubyarto (1938-2005).

Hanya sedikit orang, apalagi mereka yang bukan termasuk pendiri Republik, tokoh pergerakan di masa kolonial, tokoh partai politik, atau mereka yang pernah menduduki jabatan-jabatan kemiliteran dan kenegaraan puncak di negeri ini, yang kepergiannya diulas sedemikian rupa, sampai perlu ditulis dalam tajuk rencana oleh berbagai surat kabar. Mubyarto adalah salah satu yang diberi penghormatan langka itu. Tak kurang harian nasional seperti *Media Indonesia* dan *Kompas*, serta *Kedaulatan Rakyat* di Yogyakarta,¹⁷ merasa perlu untuk menulis kepergian Mubyarto dalam tajuk mereka, selain tentu saja memuat tulisan obituari serta sejumlah artikel opini sebagaimana lazimnya. Jika menyimak kliping surat kabar yang terbit waktu itu, baik lokal maupun nasional, berita

¹⁷ Lihat Tajuk Rencana Harian Umum *Kompas*, Jumat, 27 Mei 2005; Tajuk Rencana Surat Kabar Harian *Kedaulatan Rakyat*, Kamis, 26 Mei 2005.

kepergian Mubyarto umumnya ditempatkan di halaman pertama.

Di Gajah Mada, Mubyarto sejak lama memang telah menjadi tokoh istimewa. Hingga saat ini, misalnya, dia masih memegang rekor sebagai warga Bulaksumur penerima gelar doktor dan profesor paling muda. Muby, demikian ia biasa disapa oleh para karib dan muridnya — yang mula-mula lulus sarjana Jurusan Agraria Fakultas Ekonomi UGM tahun 1959, dan mendapat gelar Master of Arts (M.A.) di bidang Ekonomi Pembangunan dari Vanderbilt University pada 1962 — berhasil menyelesaikan pendidikan doktornya pada usia 27 tahun di Iowa State University (1965) dalam bidang Ekonomi Pertanian.¹⁸ Tak membutuhkan waktu lama, Mubyarto diangkat menjadi profesor pada usia 38 tahun, meskipun dia baru membacakan pidato pengukuhan pada 19 Mei 1979, ketika usianya belum genap 41 tahun.¹⁹ Dia juga merupakan salah satu dari sedikit saja mahaguru dalam riwayat kampus Bulaksumur yang statusnya dianggap sebagai “begawan”, para sarjana utama dengan reputasi keilmuan yang mendunia. Selain Mubyarto, figur “orang besar” ikonik lainnya dari kampus Bulaksumur, misalnya, adalah Sardjito (1889-1970), Notonagoro (1905-1981), Herman Johannes (1913-1992), Sartono Kartodirdjo (1921-2007), Teuku Jacob (1929-2007), Koesnadi

¹⁸ Lihat buku *Apa dan Siapa Sejumlah Orang Indonesia 1985-1986*, yang disusun oleh Majalah *Tempo* (Jakarta: Grafiti Pers, 1986), hal. 532-533; O.G. Roeder, *Who's and Who in Indonesia* (Jakarta: Gunung Agung, 1971), hal. 232; dan “Dikukuhkan Menjadi Guru Besar”, rubrik Pokok dan Tokoh Majalah *Tempo*, No. 14/Th. IX, 2 Juni 1979, hal. 18.

¹⁹ Lihat petikan wawancara dengan Sukadji Ranuwihardjo, mantan Rektor UGM (1973-1981) yang waktu itu menjadi Dirjen Pendidikan Tinggi, dalam berita “Profesor Tak Harus Botak”, di Majalah *Tempo*, No. 48/Th. XVI, 24 Januari 1987, hal. 59.

Hardjasoemantri (1926-2007), Umar Kayam (1933-2002), Masri Singarimbun (1931-1997), dan Kuntowijoyo (1943-2005).²⁰ Di kampus-kampus di luar negeri, orang-orang semacam mereka akan disebut sebagai *distinguished professor*, alias guru besar istimewa.



Gambar 3. Kuntowijoyo (1943-2005), salah satu begawan di Bulaksumur. Selain dikenal sebagai sejarawan dan sastrawan produktif, Kunto di wilayah pemikiran dikenal sebagai pencetus gagasan Ilmu Sosial Profetik.

Selain cemerlang secara akademik, keistimewaan lain dari seorang Mubyarto adalah sejak muda ia telah terlibat bukan hanya dalam kegiatan menara gading universitas yang dibatasi oleh dinding kelas dan disiplin keilmuan yang sempit, melainkan juga terlibat dalam dunia pengambilan kebijakan serta gerakan masya-

²⁰ Beberapa nama tadi di antaranya disebut, misalnya, dalam tulisan Heru Nugroho, "McDonaldisasi UGM", di *Harian Kedaulatan Rakyat*, Selasa, 5 Februari 2002. Tulisan itu dimuat kembali dalam Heru Nugroho (ed.), *McDonaldisasi Pendidikan Tinggi* (Yogyakarta: Kanisius bekerjasama dengan Program Sosiologi Pascasarjana UGM dan Center for Critical Social Studies, 2002), lihat hal. 21.

rakat dalam intensi yang kurang lebih sama besar.²¹ Di wilayah kebijakan, kapasitas Mubyarto bisa ditunjukkan dari beberapa posisi yang pernah dipegangnya dalam pemerintahan. Ia, misalnya, pernah menjadi Penasihat Menteri Perdagangan dalam Analisis Harga dan Hubungan-hubungan Harga Hasil-hasil Pertanian dan Kebijaksanaan Pangan (1968-1971), Asisten Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas untuk bidang Peningkatan Pemerataan dan Penanggulangan Kemiskinan (1993-1999), serta anggota MPR RI (1987-1998). Posisi-posisi itu, selain menunjukkan kapasitasnya, juga menunjukkan dengan jelas posisi keberpihakan Mubyarto. Pandangan kritisnya mengenai politik pangan, sebagaimana telah disinggung di bagian awal, banyak dikemukakan dalam memorandum yang disusunnya untuk menteri sewaktu ia menjadi penasihat Menteri Perdagangan.²² Begitu pula sewaktu menjadi Asisten Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas, pada waktu itulah ia berkesempatan untuk mengimplementasikan konsep yang sejak lama digodok di pusat studi yang dipimpinnya, Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan (P3PK) UGM. Konsep itu, saat diimplementasikan di pemerintahan, tak lain adalah Program IDT (Inpres Desa Tertinggal), yang lagi-lagi mencerminkan komitmen Mubyarto terhadap pembangunan perdesaan dan gerakan pemberantasan kemiskinan. Meskipun sebagai program pemerintah IDT memiliki banyak kekurangan,

²¹ Bambang Ismawan, "Relevansi Pemikiran Mubyarto dalam Konteks Indonesia Saat Ini dan Esok", makalah disampaikan dalam acara Memperingati 70 Tahun Almarhum Prof. Dr. Mubyarto (1938-2005) di Wisma Kagama, Yogyakarta, 3 September 2008.

²² Mubyarto, *Kebidjaksanaan Beras...*, *op.cit.*

dan juga menyimpan sejumlah persoalan dalam implementasinya, namun mestinya IDT tidak cukup hanya dinilai pada level programatik, melainkan juga pada level konseptual menurut pemikiran para pengagasnya. Di tangan rejim militer neo-fasis dengan birokrasi yang korup, dari sudut para pengagasnya IDT adalah sebetulnya *necessary condition* yang perlu untuk dilakukan. Program itu sendiri hingga 1997 (sejak digulirkan pertama pada 1993) telah mencakup 28.223 desa, 3,4 juta kepala keluarga, 123.000 kelompok masyarakat (Pokmas), dan tak kurang melibatkan sekira 4.000 sarjana pendamping.²³

Sementara itu, di wilayah keilmuan, kiprah Mubyarto jauh lebih menonjol. Ia adalah pendiri sekaligus ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) selama dua periode pertama berturut-turut (1969-1973). Sebagai organisasi keilmuan, Perhepi bukanlah perkumpulan sarjana ekonomi pertanian (*agricultural economists*), melainkan perhimpunan profesi ekonomi pertanian (*society of agricultural economics*).²⁴ Perhimpunan ini bisa dikatakan merupakan bentuk pelembagaan kritik terhadap ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia), sekaligus mewakili ketidakpuasan atas model pembangunan pemerintah yang bersifat sentralistik, bias perkotaan, dan terlalu pragmatis. Sehingga muncul pameo, jika ISEI lebih suka berbicara mengenai uang, perbankan, dan ekonomi makro, maka Perhepi banyak bicara tentang petani, pertanian, perdesaan, dan perekonomian mikro.²⁵ Keter-

²³ Mubyarto (ed.), *Kisah-kisah IDT: Penuturan 100 Sarjana Pendamping* (Yogyakarta: Aditya Media, 1997).

²⁴ Mubyarto, "State of the Art" *Ilmu Ekonomi Pertanian Indonesia* (Jakarta: Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, 1997), hal. 1.

²⁵ Wawancara P.M. Laksono dengan Diby Prabowo (1939-2009). Lihat P.M. Laksono, "Social Science Association", dalam Vedi R. Hadiz dan Daniel

kaitan Muby dengan Perhepi, dan juga SAE (Survei Agro-Ekonomika) — yang merupakan inang Perhepi, tentu berhubungan dengan kenapa di kemudian hari Mubyarto akhirnya meninggalkan ilmu ekonomi Neoklasik dan beralih menggagas Ekonomi Pancasila, sebuah uraian yang akan dibahas kemudian dalam bab ini.

Masih berkaitan dengan riwayat karirnya, posisi penting juga dimainkan Mubyarto di Fakultas Ekonomi UGM. Ia, misalnya, pernah menjadi Direktur Biro Penelitian Ekonomi (BPE) di fakultas (1965-1975),²⁶ Direktur Pendidikan Pascasarjana Fakultas Ekonomi UGM (1976-1979), dan kemudian memimpin salah satu lembaga penelitian paling tua di UGM, sekaligus sebuah lembaga yang memiliki riwayat penting bagi perkembangan metode dan corak ilmu sosial di Indonesia, yaitu Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK).²⁷ Muby memimpin lembaga tersebut sejak 1983 hingga 1994.

Dhakidae (eds.), *Social Science and Power in Indonesia* (Jakarta-Singapore: Equinox-ISEAS, 2005), hal. 228.

²⁶ Biro Penelitian Ekonomi (BPE) FE-UGM berdiri pada 1 Agustus 1956, ketika Mubyarto masih berstatus sebagai mahasiswa. Pada tahun 1971, di bawah pimpinan Muby, lembaga ini namanya berubah menjadi Lembaga Penelitian Ekonomi (LPE) FE-UGM. Pada 1976, LPE berubah lagi namanya menjadi Pusat Penelitian Ekonomi (PPE), dan sejak 1984 lembaga itu berubah menjadi Laboratorium Penelitian dan Pengembangan Ekonomi. Lihat buku *Laporan Perkembangan 1974* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian Ekonomi FE-UGM, 1975); dan Mubyarto, dkk., *30 Tahun Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada* (Yogyakarta: BPFE, 1985), hal. 5.

²⁷ Sebelum terakhir menjadi PSPK, lembaga tersebut—berturut-turut ke belakang—bernama Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan (P3PK), Pusat Penelitian dan Studi Pedesaan dan Kawasan (PPSPK), dan Lembaga Studi Pedesaan dan Kawasan (LSPK). Perubahan nama ini bisa dilacak dari Sartono Kartodirdjo, “Studi Interdisipliner di Lingkungan PPSPK”,

Tabel 2. Kepala Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK)
Universitas Gadjah Mada, 1973-2009

PERIODE	KEPALA
1973-1981	Prof. Dr. Sartono Kartodirjo <i>Sejarawan, Fakultas Sastra</i>
1981-1982	Prof. Dr. Moeljarto Tjokrowinoto <i>Administrasi Publik, FISIPOL</i>
1982-1983	Dr. Soetatwo Hadiwigeno <i>Ekonom, Fakultas Ekonomi</i>
1983-1994	Prof. Dr. Mubyarto <i>Ekonom, Fakultas Ekonomi</i>
1994-1999	Prof. Dr. Loekman Soetrisno <i>Sosiolog/Antropolog, Fakultas Sastra</i>
1999-2005	Prof. Dr. Ir. Moch. Maksum <i>Agro-Ekonom, Fakultas Teknologi Pertanian</i>
2005-2009	Prof. Dr. Susetiawan <i>Sosiolog, FISIPOL</i>

Sumber: Diolah dari berbagai sumber oleh Tarli Nugroho (2010);
Keterangan: Sejak 2001 Fakultas Sastra UGM menjadi Fakultas Ilmu
Budaya, dan sejak 2007 Fakultas Ekonomi UGM menjadi Fakultas
Ekonomika dan Bisnis.

Mengenai keterlibatannya dalam gerakan masyarakat, Mubyarto sejak 1960-an telah terlibat baik dalam kegiatan advokasi kebijakan maupun pemberdayaan masyarakat di tingkat

makalah pada Rapat Kerja Diperluas dalam rangka “Dasawarsa PPS Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada”, Yogyakarta, 21-22 Juli 1983; Sartono Kartodirdjo, “Beberapa Butir Pemikiran Refleksif tentang P3PK dan PPK pada HUT-nya Kedua Puluh”, makalah pada *Orasi Ondrowino* (disampaikan pada 23 Agustus 1993) dalam rangka peringatan Dwidawasarsa P3PK dan PPK (Pusat Penelitian Kependudukan) UGM, sekaligus sebagai pembukaan Seminar “Dari Pertumbuhan ke Pembangunan Berkelanjutan”, Yogyakarta, 23-25 Agustus 1993; dan Mubyarto, *Penelitian Pedesaan dan Kawasan 1973-1994: Laporan Serah Terima Jabatan Kepala P3PK UGM* (Yogyakarta: P3PK-UGM, 1994).

akar rumput. Dan keterlibatannya dalam gerakan masyarakat, menariknya, sepenuhnya terintegrasi dengan aktivitasnya di bidang keilmuan dan pemerintahan. Sehingga, dalam kehidupan Mubyarto, ketiga hal tadi menjadi semacam lingkaran dialektis yang padu. Melalui kedudukannya sebagai penasihat maupun asisten menteri, serta melalui kegiatan-kegiatan SAE, Perhepi, YAE (Yayasan Agro Ekonomika), Bina Swadaya,²⁸ PSPK (d.h. P3PK), Yaummy (Yayasan Amal Usaha Muslim Yogyakarta),²⁹ serta belakangan melalui lembaga yang terakhir didirikan dan dipimpinnya sebelum berpulang, Pustep (Pusat Studi Ekonomi Pancasila),³⁰ Mubyarto terlibat dalam banyak gerakan pemberdayaan masyarakat. Kepaduan itu juga menjadi ciri kiprah sosialnya. Ketika menjadi asisten Menteri PPN/Ketua Bappenas, dia berusaha menjahit kerjasama antara pemerintah, lembaga swadaya masya-

²⁸ Mengenai hubungan dan keterlibatan Mubyarto di lembaga Bina Swadaya, lihat Eka Budianta, *Menuju Indonesia Swadaya* (Jakarta: Bina Swadaya, 2007), hal. 181-83. Bina Swadaya bisa dikatakan termasuk lembaga swadaya masyarakat tertua di Indonesia. Lembaga ini dipimpin oleh Bambang Ismawan, adik angkatan Mubyarto di Fakultas Ekonomi UGM.

²⁹ Yayasan ini didirikan pada 1988 dan Mubyarto dimana dia menjadi ketua hingga akhir hayatnya. Yayasan ini didirikan bersamaan dengan renovasi Pasar Beringharjo dan

³⁰ Sepeninggal Mubyarto, karena tekanan dari beberapa pimpinan universitas yang tidak sepakat dengan label “Ekonomi Pancasila”, Pustep kemudian diubah namanya menjadi Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan. Perubahan nama itu, menurut para penerus Mubyarto di lembaga tadi, terpaksa dilakukan karena secara kelembagaan lembaga itu “diancam” akan dibubarkan atau digabung dengan pusat studi lain, yaitu Pusat Studi Pancasila (PSP) yang bernaung di bawah Fakultas Filsafat UGM. Karena ingin mempertahankan warisan Mubyarto, maka sebagai bentuk kompromi akhirnya Pustep bersiasat mengubah nama.

rakat (LSM), dan perguruan tinggi untuk menggulirkan dan mengawal program pemberdayaan masyarakat. Salah satu hasilnya adalah Program IDT yang telah disinggung sebelumnya.



Gambar 4. *Lingkarane integratif dari dimensi pemikiran dan aktivisme Mubyarto.*

Rajutan-rajutan semacam itu, yang berusaha menjahit perguruan tinggi, LSM, masyarakat dan pemerintah, dominan mewarnai kiprah Mubyarto. Contoh terakhir adalah apa yang digagas dalam kegiatan “Semiloka Pendalaman Ekonomi Rakyat” yang dilakukan selama 6 bulan di Jakarta. Semiloka yang diprakarsai YAE itu (yang diketuai Mubyarto) berlangsung dalam 12 pertemuan dan melibatkan lembaga-lembaga seperti Perhepi, ISI (Ikatan Sosiologi Indonesia), Komisi Ilmu-ilmu Sosial AIPI (Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia – dimana Mubyarto merupakan salah satu anggotanya), Bina Swadaya, dan GEMA PKM (Gerakan Bersama Pengembangan Keuangan Mikro).³¹ Kegiatan itu kemu-

³¹ Hasil semiloka itu dibukukan dalam Sajogyo dan Sumantoro Martowijoyo (ed.), *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dalam Kancan Globalisasi: Hasil Bahasan Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat, Jakarta, Januari-Juli 2002* (Bogor: SAINS bekerjasama dengan YAE, Perhepi, 2005).

dian menghasilkan tiga rekomendasi program, yaitu:³²

1. Memperbarui pengajaran Ilmu Ekonomi di level sekolah menengah dan perguruan tinggi, dimana menurut hasil rapat pengurus YAE, program ini dipimpin oleh Mubyarto.
2. Mengevaluasi peraturan-peraturan yang tidak memberdayakan ekonomi rakyat, yang akan dikoordinasi oleh Sajogyo.
3. Kegiatan pemberdayaan ekonomi rakyat di tingkat akar rumput. Penanggung jawab program ini adalah Bambang Ismawan.

Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi tadi, Mubyarto, melalui Pustep, menggelar dua lokakarya yang melibatkan para guru sekolah menengah di Yogyakarta dan Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Di Yogya, lokakarya dirancang bersama oleh Pustep dan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) Ekonomi SMA se-DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta). Lokakarya yang digelar pada 29 Juli 2004 dan mengambil tajuk "*Pembaruan Pendidikan Ekonomi di Sekolah Lanjutan*" itu diikuti oleh 145 guru. Ada empat aspek yang dievaluasi dari pendidikan ekonomi di SMA, yaitu (1) aspek kurikulum; (2) aspek metodologi; (3) aspek materi ajar; dan (4) nilai-nilai yang diajarkan. Untuk mengevaluasi empat aspek tadi, pembahasan persoalan dibagi menjadi empat komisi, yaitu (1) Peranan Sejarah dalam Ilmu Ekonomi; (2) Pembagian Materi Ajar Ilmu Ekonomi di Kelas 1, 2, dan 3;³³ (3) Metode pengajaran Ilmu Ekonomi; dan (4) Penekanan Pendidikan Ekonomi dan Pengaitannya dengan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya. Lokakarya ini dihadiri dan

³² Ismawan, *op.cit.*

³³ Sejak Tahun Ajaran 2004/2005, penyebutan tingkat kelas di SMA berubah dari Kelas 1, Kelas 2, dan Kelas 3, menjadi Kelas X, Kelas XI, dan Kelas XII.

diberi sambutan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DIY, serta Direktur Pendidikan Menengah Umum (Dikmenum) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas.³⁴

Di Nganjuk, lokakarya diselenggarakan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk. Lokakarya bertema “Pembaruan Pendidikan Ekonomi di Sekolah Lanjutan” itu dilaksanakan pada 23 dan 24 Agustus 2004. Materi yang dibahas sama dengan lokakarya di Yogya, hanya saja di Nganjuk para peserta diperkenalkan dengan metode kunjungan lapangan (*field study*) ke beberapa kantong ekonomi rakyat, seperti pasar, menjumpai para petani bawang merah, koperasi simpan pinjam, dan industri *shuttle cock*, yang tujuannya adalah mengajak para guru untuk menggali bahan ajar berdasarkan kehidupan ekonomi riil (*real-life economy*) masyarakat sekitarnya.³⁵

Hampir sepanjang tahun 2004 itu pula Mubyarto tak kurang menulis 6 buah buku terkait dengan dunia pendidikan, terutama mengenai pengajaran ekonomi. Buku-buku itu adalah *Pendidikan Ekonomi Kita* (Januari, 2004), *Pendidikan Ekonomi Alternatif di Sekolah-sekolah Lanjutan* (Maret, 2004), *Belajar Ilmu Ekonomi* (Juli, 2004), *Pendidikan Ekonomi Sekolah Lanjutan* (Agustus, 2004), *Ekonomi Rakyat Nganjuk* (Desember, 2004), dan *Menggugat Sistem Pendidikan Nasional* (Januari, 2005). Sayangnya, rangkaian lokakarya itu belum sampai pada tahap penyusunan buku pelajaran ekonomi alternatif, melainkan baru pada tahap evaluasi awal atas pendi-

³⁴ Mubyarto (ed.), *Pendidikan Ekonomi Sekolah Lanjutan* (Yogyakarta: Pustep, 2004).

³⁵ Mubyarto (ed.), *Ekonomi Rakyat Nganjuk: Lokakarya Pembaruan Pendidikan Ekonomi Sekolah Lanjutan Kabupaten Nganjuk* (Yogyakarta: Pustep, 2004).

dikan ekonomi. Namun begitu, dengan melibatkan para guru dan para pejabat terkait di Depdiknas untuk mengevaluasi pendidikan ekonomi, Mubyarto telah merintis sebuah usaha fundamental dalam memperbaiki pendidikan ekonomi di Indonesia.

Menyimak pemihakannya yang sangat besar terhadap ekonomi rakyat, mungkin terselip sebuah pertanyaan: apa yang bisa membuatnya sangat peduli kepada persoalan-persoalan rakyat kecil?

Menarik untuk memperhatikan bahwa sebagian besar, atau lebih tepatnya cukup banyak, di antara para ekonom kritis ternyata memiliki latar belakang pendidikan ilmu ekonomi pertanian (*agro economist*). Yang dimaksud dengan “ekonom kritis” di sini adalah mereka yang bersikap kritis terhadap persoalan-persoalan ekonomi baik di *level praksis* maupun di *level teoritis*.³⁶ Sebab, ada banyak ekonom yang kritis untuk persoalan-persoalan praksis, namun hanya sedikit di antara mereka yang bisa menemukan bahwa berbagai persoalan praksis perekonomian terkait dengan masalah yang menyangkut *state of the art* disiplin ilmu mereka. Mereka, yang hanya kritis di level praksis, kebanyakan adalah para praktisi atau kaum profesional, dan juga para akademisi pragmatis yang tidak tertarik pada persoalan teoritis dan keilmuan. Sebagai contoh kita bisa menyebut beberapa ekonom kritis yang berlatar belakang ekonomi pertanian misalnya adalah Gunnar Myrdal (1898-1987), John Kenneth Galbraith (1908-2006), dan Robert L. Heilbroner (1919-2005). Hal yang serupa juga terjadi di sini. Sebagian besar sarjana Indonesia yang kritis terhadap ilmu ekonomi adalah berlatar belakang ekonomi pertanian, atau pal-

³⁶ Tarli Nugroho, *Potret Ekonom sebagai Si Malinkundang* (Yogyakarta: LANSKAP, 2003).

ing tidak yang bidang kajiannya berkaitan dengan studi petani, pertanian, dan perdesaan. Mubyarto (1938-2005), Hidayat Nataatmadja (1932-2009), dan Ace Partadiredja (1935-2002) adalah beberapa di antara ekonom kritis sebagaimana kriteria yang telah disebutkan, memiliki latar belakang itu.



Gambar 5. Beberapa ekonom kritis di Indonesia. Dari kiri: Hidayat Nataatmadja (1932-2009), Ace Partadiredja (1935-2002), dan Dawam Rahardjo (1942-).

Dalam sebuah wawancara dengan penulis, Mubyarto tidak membantah penjelasan itu. Dia bahkan memberi penegasan bahwa bagi mereka yang pernah tinggal di desa dan hidup di tengah-tengah para petani, sulit untuk tidak berempati kepada para petani dan rakyat kecil, termasuk dirinya. Bahkan, salah satu sebab kenapa ia memilih Jurusan Agraria ketika kuliah di Fakultas Ekonomi UGM adalah karena ia terobsesi untuk memperbaiki taraf hidup para petani.³⁷ Mubyarto memang lahir di desa, tepatnya di Desa

³⁷ Wawancara Tarli Nugroho (bersama Indarti Yuni Astuti, Karlina dan Fauzul Muhammad) dengan Mubyarto, medio April 2003. Sebagian hasil wawancara itu dimuat dalam *Jurnal Balairung*, No. 37/Th. XVIII/2004, hal. 115-127, dengan tajuk “Mubyarto: Ilmu Ekonomi yang Kita Ajarkan Keliru”.

Demak Ijo, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Ia lahir sebagai anak ketujuh dari delapan bersaudara dari pasangan Martodinoto dan Sumirah. Sebagai anak laki-laki satu-satunya di keluarganya, Muby, yang lahir pada hari Sabtu, 3 September 1938, mendapat perhatian lebih dari orang tuanya. Pada masa pendudukan Jepang, yang pendek namun bisa dikatakan merupakan masa paling sulit buat rakyat kecil, Muby dan adiknya mendapatkan perlakuan istimewa dengan bisa mengkonsumsi nasi tanpa campuran jagung.³⁸ Nama Mubyarto oleh orang tuanya diartikan sebagai *cahaya terang* (Jawa: *byar*).³⁹ Melalui nama itu orang tuanya berharap agar kelak Mubyarto bisa menjadi cahaya terang buat keluarganya. Ayah Muby, Martodinoto, adalah seorang mantri pengairan, seseorang yang bertanggung jawab mengatur masalah irigasi di daerahnya.⁴⁰ Secara umum kehidupan keluarga orang tua Mubyarto sangat sederhana.

Sewaktu kecil, prestasi sekolah Mubyarto sebenarnya biasa saja. Ia masuk sekolah rakyat pada usia yang sangat muda, 5 tahun. Minat bacanya mulai kelihatan saat ia duduk di kelas 6, dimana ia rajin melahap berbagai buku dan surat kabar setiap hari. Setelah lulus dari SD Demak Ijo pada 1950, ia melanjutkan

³⁸ Hastangka, *Ekonomi Pancasila, Eksistensi dan Masa Depan: Napak Tilas Pemikiran Mubyarto* (Yogyakarta: Penerbit Bimotry, 2009). Buku ini pada mulanya adalah skripsi yang ditulis di Fakultas Filsafat UGM.

³⁹ Pada 3 September 2008, bertepatan dengan peringatan 70 Tahun Almarhum Prof. Dr. Mubyarto, resmi didirikan Yayasan Mubyarto yang berkedudukan di Yogyakarta. Logo yayasan itu, sesuai dengan arti nama Mubyarto, adalah pijar cahaya matahari.

⁴⁰ Rekaman wawancara Puthut Indroyono, staf peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, dengan Sartono Kartodirjo (1921-2007), 20 April 2006.

sekolahnya di SMP 3 Yogyakarta. Sewaktu duduk di sekolah menengah pertama itulah Mubyarto muda kecanduan bermain bulu tangkis. Meski ia kerap menjuarai berbagai kompetisi, prestasi olah raga itu ternyata tak diimbangi prestasi akademik yang bagus. Prestasi akademisnya bahkan cenderung terbengkalai. Oleh karenanya, setelah lulus SMP Mubyarto akhirnya gagal masuk sekolah negeri. Ia hanya bisa sekolah di SMA Bopkri I, sebuah sekolah swasta yang kini berada di sebelah timur Stadion Kridosono.

Kenyataan itu memberi pukulan psikologis telak kepada remaja Mubyarto. Bagi seseorang yang berasal dari keluarga sederhana seperti dirinya, tidak bisa masuk sekolah negeri memang menjadi beban, karena dengan demikian berarti biaya sekolahnya jadi lebih mahal. Mubyarto terpukul terutama karena melihat ayahnya waktu itu hampir pensiun dari mantri pengairan. Suatu ketika ia bahkan pernah menyaksikan sang ibu harus menjual kain untuk membiayai kebutuhan sekolahnya.⁴¹ Oleh karena itu Mubyarto bertekad untuk memperbaiki prestasinya agar bisa masuk perguruan tinggi negeri selepas SMA. Dan usaha Mubyarto sepenuhnya berhasil, karena pada 1956 ia bisa diterima di Fakultas Ekonomi UGM tanpa tes. Bukan hanya itu, akhirnya ia juga mendapatkan beasiswa dari kampus untuk membiayai kuliahnya, sesuatu yang membanggakan kedua orang tuanya.

Di UGM Mubyarto memilih Jurusan Agraria sebagai pilihan studi. Sebagaimana pernah disinggung, Mubyarto memilih jurusan tadi karena memiliki obsesi untuk memperbaiki nasib

⁴¹ Wawancara Tarli Nugroho (bersama Indarti Yuni Astuti, Karlina, dan Fauzul A. Muhammad) dengan Mubyarto di PUSTEP UGM, medio April 2003.

para petani. Oleh karena itu, meskipun jurusan itu tergolong sepi peminat, Mubyarto tetap setia dengan pilihannya. Pada 1959 ia berhasil menyelesaikan pendidikan Sarjana Muda (B.Sc.) dengan predikat sangat memuaskan. Pada tahun itu pula ia resmi diangkat menjadi tenaga pengajar di almamaternya dan dikirim ke Vanderbilt University, Amerika Serikat, untuk melanjutkan pendidikan di bidang Ekonomi Pembangunan.

Mengenai obsesinya untuk menolong petani dan rakyat kecil, Koesnadi Hardjasoemantri (1926-2007), Guru Besar Fakultas Hukum yang juga mantan Rektor UGM (1986-1990), bersaksi bahwa Mubyarto adalah orang yang bisa “menyatukan tindakannya dengan prinsip”.⁴² Koesnadi adalah salah satu anggota rombongan pertama Program Pengerahan Tenaga Mahasiswa (PTM) pada 1951 untuk menjadi guru di luar Jawa. Sekembali ke UGM (1952), Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (sekarang Depdiknas, Departemen Pendidikan Nasional) meminta Koesnadi untuk mengelola program PTM hingga 1962. Program itu di kemudian hari kita kenal sebagai kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata), yang mendorong mahasiswa untuk terjun dan berbaur dengan masyarakat.⁴³ “Yang penting dalam KKN adalah bukan programnya, melainkan interaksi antara mahasiswa dengan masyarakat. Akan susah jika para mahasiswa, yang merupakan calon pemimpin, tidak mengenal rakyatnya.”⁴⁴

Ketika menjadi Rektor UGM, Koesnadi dikenal sangat

⁴² Rekaman wawancara Puthut Indroyono dengan Koesnadi Hardjasoemantri, Sabtu, 22 April 2006.

⁴³ Buku *50 Tahun UGM: Di Seputar Dinamika Politik Bangsa* (Jakarta: LP3ES, 1999), hal. 95.

⁴⁴ Rekaman wawancara dengan Koesnadi, *op.cit.*

populis, karena menerima kehadiran pedagang kaki lima di lingkungan kampus dan menempatkan mereka di kapling-kapling yang telah disediakan. Bukan hanya itu, ia bahkan memberi setiap pedagang selebar Surat Keputusan (SK) Rektor, sesuatu yang dianggap “aneh” oleh banyak kalangan, sebab pemerintah saja tidak pernah memberikan pengakuan semacam itu pada para pedagang kaki lima. Tapi bagi Koesnadi keputusan itu memang sudah seharusnya. Para pedagang kaki lima, menurut mahaguru kelahiran Tasikmalaya itu, merupakan solusi atas kebutuhan konsumsi yang dihadapi oleh 35.000-an mahasiswa UGM. Dan dia tak hanya berhenti di sana, tempat-tempat untuk para pedagang kaki lima dia cantumkan dalam *Masterplan* UGM. Pada 25 April 1987, sebagai bentuk apresiasi, Menteri Tenaga Kerja, yang waktu itu dijabat Soedomo, meresmikan Kompleks Pedagang Kaki Lima di Kampus UGM.⁴⁵

Ketika mengenang semua itu, Koesnadi dengan tegas mengatakan bahwa keputusan untuk menerima kehadiran para pedagang kaki lima itu tidak lepas dari komitmen kerakyatan UGM. Dan komitmen itu tetap dimiliki UGM salah satunya karena kampus itu memiliki figur-figur seperti Mubyarto, yang waktu itu kebetulan menjabat Direktur P3PK (Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan; kini PSPK). Sehingga, kalau UGM dikenal sebagai “Universitas *Ndeso*”, aku Koesnadi, itu sebenarnya bukan ejekan, melainkan sebuah penghargaan yang membanggakan.⁴⁶

⁴⁵ 50 Tahun UGM, *op.cit.*

⁴⁶ Dalam buku *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Peranan Ilmu-ilmu Sosial*, Mubyarto menulis bahwa jika UI menonjol peranannya dalam pembangunan ekonomi Orde Baru, maka UGM lebih dikenal menghasilkan pemikiran-pemikiran untuk pembangunan pertanian dan perdesaan. Lihat Mubyarto, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Peranan Ilmu-ilmu Sosial* (Yogyakarta: Aditya Media, 2002), hal. 16.

Pemikiran kerakyatan memang memiliki akar yang kuat di lingkungan UGM, dan Mubyarto adalah salah satu tokohnya.⁴⁷ Koesnadi juga menunjuk keberadaan P3PK. Pusat studi itu berkembang sangat pesat saat dipimpin Mubyarto dan keberadaannya telah turut menjaga orientasi pedesaan dan kerakyatan Kampus Bulaksumur.⁴⁸



Gambar 6. *Koesnadi Hardjosoemantri (1926-2007), mantan Rektor UGM (1986-1990) yang juga karib Mubyarto.*

Komitmen terhadap rakyat kecil memang mewarnai jelas segala kiprah Mubyarto. Komitmen itu tergambar nyata, misalnya, saat upacara pengukuhan dirinya sebagai guru besar dalam bidang Ekonomi Pertanian, Sabtu, 19 Mei 1979. Hari itu, sebagai-

⁴⁷ Rekaman wawancara dengan Koesnadi, *op.cit.*

⁴⁸ Pengakuan bahwa P3PK (kini PSPK) berkembang sangat pesat ketika dipimpin Mubyarto juga datang dari salah satu pendirinya, Sartono Kartodirdjo. Rekaman wawancara dengan Sartono, *op.cit.*

mana ditulis oleh Majalah *Tempo*, Balai Senat UGM terasa agak “kering”, karena hampir tidak ada karangan bunga sebagaimana lazimnya menyertai upacara sejenis. Kenapa tidak ada karangan bunga? Karena Mubyarto, yang punya hajat, memang terang-terangan menolaknya. Melalui secarik kertas kecil yang disisipkan pada surat undangan, ia menulis: “Kiranya fakir miskin dan lain-lain tujuan kemanusiaan lebih memerlukannya”. Menurut *Tempo*, Mubyarto adalah orang kedua setelah almarhum Prof. Notosusanto, SH yang menolak karangan bunga dalam upacara pengukuhanannya.⁴⁹

C. Ilmu Ekonomi dan Keadilan Sosial: Fondasi Etis Pemikiran Mubyarto

“... tujuan yang berbeda tidak dapat dicapai hanya dengan mengubah kebijaksanaan dan strategi, tetapi harus dengan cara mengubah teori-nya... Tidakkah sudah tiba saatnya, ekonom Indonesia mulai mawas diri dan mempertanyakan relevansi teori ekonomi Neoklasik Ortodoks sebagai ilmu yang mendasari berbagai kebijaksanaan dan strategi ekonomi?”⁵⁰

Pidato pengukuhan sebagai guru besar lazimnya dapat dianggap sebagai semacam pidato pertanggungjawaban kenapa seseorang layak menduduki posisi terhormat tersebut. Ukuran seberapa jauh tanggung jawab itu telah dipenuhi bisa disimak dari topik yang disampaikan. Secara sederhana, karena posisi sebagai guru besar berhubungan dengan soal otorisasi keilmuan,

⁴⁹ “Dikukuhkan Menjadi Guru Besar”, *Tempo*, *op.cit.* Lihat juga *Apa dan Siapa*, *op.cit.*

⁵⁰ Mubyarto, *Gagasan dan Metoda Berpikir Tokoh-tokoh Besar Ekonomi dan Penerapannya bagi Kemajuan Kemanusiaan* (Yogyakarta: BPFE, 1979). Tulisan ini merupakan pidato pengukuhan Mubyarto sebagai Guru Besar Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, diucapkan pada 19 Mei 1979.

maka, *pertama*, ukuran itu terletak pada apakah topik yang disampaikan telah memberikan sumbangan penting terhadap pengembangan bidang keilmuannya atau tidak; atau – ini yang *kedua* – paling tidak, apakah topik yang disampaikan itu telah memberikan sejumlah agenda yang gamblang berkaitan dengan pengembangan keilmuan dari bidangnya atau belum.

Dalam studi kecil yang dilakukan Didik J. Rachbini untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pemikiran ilmu ekonomi di Indonesia, yang menggunakan pidato pengukuhan para guru besar ekonomi di beberapa perguruan tinggi terkemuka di tanah air sebagai obyek studi, didapat kesimpulan bahwa tidak sedikit di antara naskah-naskah pidato pengukuhan adalah bersifat dangkal, tidak mempercakapkan apa-apa, atau merujuk secara kasar pada buku teks, sesuatu yang jauh dari kriteria ilmiah teoritis.⁵¹ Dengan kata lain, kriteria “teoritis” memang bisa dikatakan merupakan harga mati, karena – sekali lagi – tanggung jawab yang dipikul oleh seorang guru besar adalah pada pengembangan keilmuan. Ada sepuluh pidato pengukuhan yang kemudian dianggap terpilih dalam studi Rachbini, dan pidato pengukuhan Mubyarto termasuk salah satunya.⁵²

⁵¹ Didik J. Rachbini, “Telaah Pemikiran Ekonomi Indonesia: Dari Idealisme ke Pragmatisme”, tulisan pengantar editor untuk buku Didik J. Rachbini (ed.), *Khazanah Pemikiran Ekonomi Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1994), hal. x.

⁵² Naskah lain yang masuk dalam bunga rampai yang disunting Didik J. Rachbini adalah Mohammad Hatta (Pidato Pengukuhan Guru Besar Luar Biasa di Unpad), Sarbini Sumawinata (UI), Emil Salim (UI), Sukadji Ranuwihardjo (UGM), Mubyarto (UGM), Roekmono Markam (UGM), Ace Partadiredja (UGM), M. Arsjad Anwar (UI), Nurimansjah Hasibuan (Universitas Sriwijaya), dan Sri-Edi Swasono (UI).

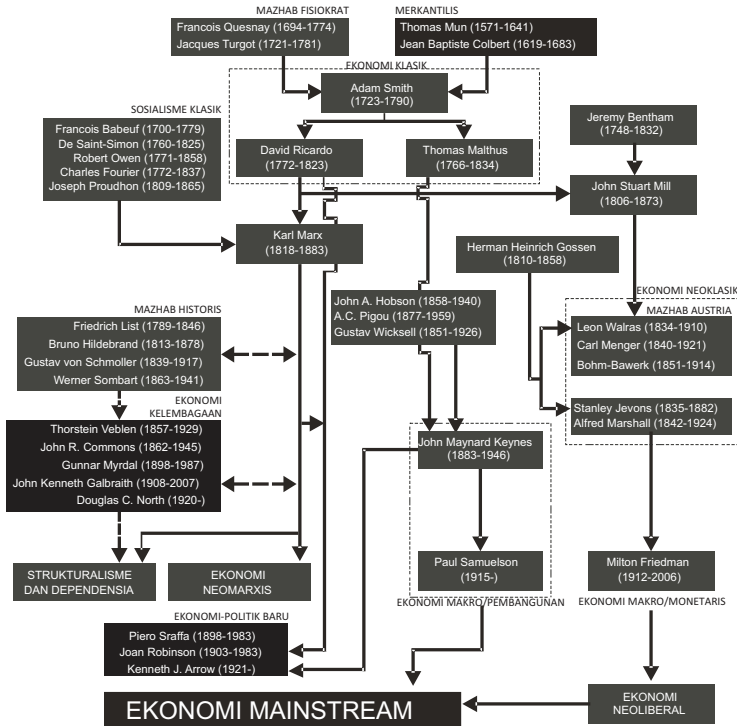
Secara garis besar, jika dibaca dalam perspektif kekinian, pidato pengukuhan Mubyarto berisi pendasaran historis dan paradigmatis bagi proyek keilmuan yang telah, sedang, dan (terlebih) akan dikerjakannya. Hal ini secara tersurat bisa kita baca dari judul pidatonya, “Gagasan dan Metoda Berpikir Tokoh-tokoh Besar Ekonomi dan Penerapannya bagi Kemajuan Kemanusiaan”. Melalui pidatonya, di bagian awal Mubyarto mencoba melakukan refleksi historis dan teoritis atas perjalanan ilmu ekonomi, untuk kemudian, di bagian akhir, ia mencoba memberikan tempat bagi pemikirannya sendiri. Apa yang dilakukannya bisa dikatakan merupakan sejenis “model baku” yang lazim dilakukan oleh para pemikir yang memiliki intensi untuk membangun karsa keilmuan baru, atau pada mereka yang hendak memformulasi ulang bangun keilmuan yang ditekuninya, dua ciri yang melekat erat pada kiprah kesarjanaannya Mubyarto. Jika kita simak, melalui sebuah studi sejarah dan pemikiran mereka yang melakukannya memang bisa berpeluang untuk menunjukkan celah dari gagasan-gagasan yang telah ada, dimana pada akhirnya celah yang dimaksud adalah juga sekaligus menjadi ruang bagi gagasan-gagasan baru dalam mana kemudian gagasan mereka akan ditempatkan. Menarik untuk mencermati bahwa sejumlah besar pemikir yang bisa dianggap sebagai pembaharu serta sang-pemula dalam beberapa bidang keilmuan hampir selalu memiliki paling tidak satu karya studi sejarah yang berwibawa.⁵³ Oleh karena itu, meskipun

⁵³ Contoh yang sangat menonjol dalam ilmu ekonomi, misalnya adalah Milton Friedman, salah satu “bapak” dari ekonomi neoliberal. Karyanya, *A Monetary History of United States, 1867-1960* (1963), yang ditulis bersama Anna J. Schwartz, bisa disebut sebagai karya monumental Friedman yang mengukuhkan gagasan monetarismenya. Studinya tersebut berhasil menunjukkan kekuatan uang dan kebijakan moneter dalam gejolak perekonomian di Amerika

secara persis tidak dimaksudkan demikian, namun topik dan model pendekatan yang digunakan oleh Mubyarto dalam menuliskan pidatonya bisa dianggap berada satu rumpun dengan kelaziman tadi.

Sebagai ilmu, ekonomi memang telah melewati beberapa fase perubahan, sebagai bentuk responnya atas perkembangan masyarakat. Perubahan-perubahan itu, meski bentuknya berbeda-beda dan terus berkembang, umumnya selalu melibatkan sebuah ketegangan, yaitu ketegangan antara kecenderungan ilmu ekonomi untuk menjadi ilmu murni yang semakin abstrak dan steril, dengan tetap menjadi ilmu moral yang selalu memegang teguh keberpihakan terhadap kemanusiaan. Di hadapan ketegangan tersebut, refleksi yang dilakukan Mubyarto terutama menitikberatkan pada soal kontribusi pemikiran ekonomi bagi kemajuan kemanusiaan, sebuah posisi yang sekali lagi sangat jelas menunjukkan keberpihakannya. Untuk menguraikan topik yang diangkatnya tersebut, Mubyarto membahas pemikiran lima orang ekonom yang pemikirannya dianggap menjadi tonggak dalam perjalanan ilmu ekonomi. Lima orang itu adalah John Stuart Mill (1806-1873), Alfred Marshall (1842-1924), John Maynard Keynes (1883-1946), Gunnar Myrdal (1898-1987), dan John Kenneth Galbraith (1908-2006).

Serikat, termasuk saat Depresi Besar dan era pasca-perang, ketika sebagian besar ekonom mengimani Keynesianisme dan percaya bahwa “uang tidak penting”. Ulasan mengenai ini lihat Mark Skousen, *The Making of Modern Economics: The Lives and Ideas of the Great Thinkers* (New York: M.E. Sharpe, 2001), hal. 389-90. Pemikir lain yang bisa disebut adalah Joseph A. Schumpeter, melalui karyanya, *History of Economic Analysis* (1955). Meski karya ini baru terbit bertahun-tahun setelah penulisnya meninggal, karya ini merupakan pengukuh bagi gagasan-gagasan Schumpeter yang telah ditulis sebelumnya.



Gambar 7. Pohon Ilmu Ekonomi. Sumber: Diolah Tarli Nugroho (2008) dari Soule (1955); Zimmerman (1955); Schumpeter (1955; 1963); Eckelund, Jr. dan Hebert (1984); Canterbury (1987); Koesters (1988); Djojohadikusumo (1991); Samuelson dan Nordhaus (1995); Pressman (2000); Skousen (2001); dan Deliarnov (2006).

Ada dua hipotesis yang diajukan Mubyarto pada bagian awal pidato pengukuhan. *Pertama*, bahwa teori ekonomi Neoklasik yang terbentuk di dunia Barat lebih dari satu abad silam, menurutnya, hanya relevan untuk menganalisis sebagian kecil perekonomian Indonesia dan tidak relevan bagi sebagian besar yang lain. *Kedua*, bahwa teori ekonomi Neoklasik ternyata telah tidak berkembang sebagai “ilmu” di Indonesia, tetapi lebih kelihatan berkembang sebagai “seni”.⁵⁴ Untuk menguji hipotesis yang

⁵⁴ Mubyarto, *Gagasan...*, op.cit., hal. 3.

diajukannya itulah Mubyarto menelaah perkembangan ilmu ekonomi melalui sebuah *pendekatan sejarah*, sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya.

Ketika pidato itu diucapkan, Mubyarto menyebut bahwa model pendekatan sejarah relatif sangat jarang digunakan oleh para ekonom modern. Dan kondisi semacam itu sebenarnya tidak banyak berubah hingga hari ini. Jika diteliti dengan seksama, hanya sedikit ekonom di Indonesia yang serius menggunakan pendekatan tersebut dalam studi-studi yang mereka lakukan. Selain Mubyarto, hingga sejauh ini barangkali hanya Thee Kian Wie⁵⁵ dan M. Dawam Rahardjo⁵⁶ ekonom Indonesia yang sering menggunakan pendekatan tersebut dalam studi-studinya. Khusus untuk Thee, bahkan hingga hari ini ekonom LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) tersebut masih merupakan satu-satunya ekonom Indonesia yang otorisasinya dalam studi sejarah juga diakui oleh para sejarawan profesional.⁵⁷

⁵⁵ Disertasi Thee adalah mengenai sejarah perekonomian. Lihat Thee Kian Wie, *Plantation Agriculture and Export Growth: An Economic History of East Sumatera, 1863-1942*, Ph.D. thesis, 1969: University of Wisconsin, Madison. Pada 1977 disertasi ini diterbitkan oleh Leknas (Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional) LIPI, tetap dalam bahasa Inggris.

⁵⁶ Di antara beberapa karya Dawam yang menggunakan pendekatan sejarah terutama adalah M. Dawam Rahardjo, *Pragmatisme dan Utopia: Corak Nasionalisme Ekonomi Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1992); *Habibienomics: Telaah Ekonomi Pembangunan Indonesia* (Jakarta: Cidesindo, 1997); *Ekonomi Pancasila: Jalan Lurus Menuju Masyarakat Adil dan Makmur* (Yogyakarta: PUSTEP-UGM, 2004); dan M. Dawam Rahardjo, dkk., *Bank Indonesia dalam Kilasan Sejarah Bangsa* (Jakarta: LP3ES, 1995).

⁵⁷ Pengakuan otorisasi keilmuan Thee di bidang sejarah misalnya dibuktikan oleh sebuah buku yang dipersembahkan sejumlah sejarawan untuk memperingati ulang tahunnya yang ke-75, yaitu *Merajut Sejarah Ekonomi Indonesia: Essays in Honour of Thee Kian Wie 75 Years Birthday* (Yogyakarta: Ombak,

Demikian pula halnya di kalangan para sejarawan, hanya terdapat sedikit sekali sejarawan yang menekuni kajian sejarah ekonomi. Di antara yang sedikit itu misalnya adalah Soegijanto Padmo (1947-2007)⁵⁸ dan — dengan beberapa perkecualian — juga barangkali Kuntowijoyo,⁵⁹ dimana keduanya, semasa hidup, kebetulan adalah sama-sama guru besar di Jurusan Sejarah UGM

2010), yang disunting oleh J. Thomas Lindblad dan Bambang Purwanto. Selain kedua penyunting, mereka yang menyumbang karangan untuk buku tersebut adalah Howard Dick, Henk Schulte Nordholt, Anne Booth, Arjen P. Taselaar, Alexander Claver, Vincent Houben, dan sejumlah sejarawan Indonesia. Buku itu dipersembahkan oleh Jurusan Sejarah UGM dan Universitas Leiden serta Institut Sejarah Indonesia (INSI).

⁵⁸ Lihat, misalnya, Soegijanto Padmo, *Bunga Rampai Sejarah Sosial Ekonomi Indonesia* (Yogyakarta: Aditya Media, 2004); *'Land Reform' dan Gerakan Protes Petani Klaten, 1959-1965* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2000); *The Cultivation of Vorstenlands Tobacco in Surakarta Residency and Besuki Tobacco in Besuki Residency and Its Impact on the Peasant Economy and Society, 1860-1960* (Yogyakarta: Aditya Media, 1994), dan; *Tembakau: Kajian Sosial Ekonomi* (Yogyakarta: P3PK-UGM, 1991, ditulis dengan Edhi Jatmiko). Di Jurusan Sejarah UGM, Soegijanto Padmo adalah guru besar terakhir yang berkonsentrasi dalam kajian sejarah ekonomi. Sepeninggalnya (ia meninggal 16 Desember 2007), belum ada lagi yang intens mengkaji sejarah ekonomi. Bambang Purwanto, sejarawan dari generasi yang lebih muda dari Soegijanto Padmo, dan juga merupakan guru besar di Jurusan Sejarah UGM, meskipun disertasi doktornya mengenai sejarah ekonomi, kemudian lebih banyak tertarik mengkaji historiografi.

⁵⁹ Meski sejarah ekonomi bukan merupakan bidang utama kajian Kunto, namun sejarawan yang juga dikenal sebagai pemikir sosial dan sastrawan ini memiliki sejumlah tulisan mengenai ekonomi, terutama perekonomian desa, dengan pendekatan sejarah dan juga sosiologi yang kuat. Beberapa karya yang mewakili penilaian ini, misalnya, adalah Kuntowijoyo, "Dualisme: Beban Sejarah Pembangunan Ekonomi", dimuat dalam Mubyarto (ed.), *Prospek Pedesaan 1986* (Yogyakarta: P3PK-UGM, 1986); dan "Keadilan Sosial di Pedesaan, dalam Mubyarto, dkk., *Prospek Pedesaan 1987* (Yogyakarta: P3PK, 1987).

dan sama-sama pernah menjadi peneliti di PSPK UGM sewaktu Mubyarto menjadi direktornya. Pada tulisan epilog yang ditulis Thee untuk terjemahan buku *New Challenges in the Modern Economic History of Indonesia*,⁶⁰ ia menulis bahwa antara dekade 1950-an hingga 1980-an, para sarjana Indonesia memang mengalami priode “keterlelapan” (*hibernation*) dari studi sejarah ekonomi. Baru, meski jumlahnya kecil, pada dekade 1980-an sejumlah sejarawan yang hampir semuanya didikan Universitas Gadjah Mada, terlibat kembali dalam studi sejarah ekonomi. Hanya saja, Thee menyayangkan, hingga studi yang ia buat pada 1979, para ekonom Indonesia secara umum belum menunjukkan minat yang tinggi untuk mengkaji sejarah ekonomi.⁶¹ Kenyataan mengenai hanya sedikit ekonom yang menggunakan pendekatan sejarah dalam analisis-analisisnya, serta sedikitnya jumlah sejarawan yang menggeluti kajian sejarah perekonomian, keduanya sama-sama menggambarkan fakta ihwal betapa miskinnya kehadiran perspektif sejarah dalam menilai bagaimana wajah ilmu ekonomi serta praktik perekonomian di Indonesia. Miskinnya kehadiran perspektif sejarah ini, dalam kacamata yang lebih luas, bisa dijadikan salah satu keterangan kenapa para ekonom di Indonesia kemudian lebih suka terjebak dalam pragmatisme, yaitu lebih tertarik untuk terlibat dalam *day to day problem*, atau pemecahan masalah ekonomi sehari-hari yang bersifat temporer dan jangka pendek, daripada terlibat dalam persoalan teoritis keilmuan yang

⁶⁰ J. Thomas Lindblad (ed.), *New Challenges in the Modern Economic History of Indonesia* (Leiden: Programme of Indonesian Studies, 1993).

⁶¹ Thee Kian Wie, “Minat yang Muncul Kembali terhadap Sejarah Ekonomi di Indonesia”, dalam J. Thomas Lindblad (ed.), *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia: Berbagai Tantangan Baru* (Jakarta: LP3ES, 2000), hal. 429.

bersifat strategis.⁶²

Kembali ke pidato pengukuhan Mubyarto, setelah menguraikan perkembangan pemikiran ekonomi melalui pemikiran lima pemikir yang dipilihnya, di akhir pidatonya Mubyarto menegaskan bahwa setiap ekonom besar selalu memikirkan nasib orang-orang kecil, lemah, dan miskin. Tidak pernah mereka dalam tulisan-tulisannya memihak pada orang-orang kaya atau konglomerat, atau sebaliknya memusuhi orang-orang miskin yang tidak berdaya.⁶³ Ia juga mengambil beberapa kesimpulan yang jika kita hubungkan dengan hipotesis yang diajukan di awal pidatonya, simpul itu menunjukkan bahwa dua hipotesis yang diajukannya adalah bisa diterima. Artinya, klaim universalitas sebagaimana yang melekat pada teori ekonomi Neoklasik pada dasarnya tidak bisa diterima, sebab apa yang diklaim sebagai “universal” itu, meminjam Ozay Mehmet, misalnya, pada kenyataannya memang tak lain dan tak bukan sebenarnya hanyalah “Eropa”.⁶⁴ Dan, jika hingga dekade 1950-an representasi dari “universalitas” itu adalah Belanda, maka setelah itu, dalam sejarah pemikiran ekonomi di Indonesia, representasi “universalitas” itu menyeberang ke Amerika.⁶⁵ Itulah yang membuat kenapa ilmu ekonomi Neoklasik di

⁶² Bdk. M. Dawam Rahardjo, *Pragmatisme*, *op.cit.*

⁶³ Bdk. Mubyarto, *Paradigma Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Pidato Dies Natalis ke-47 Universitas Gadjah Mada (Yogyakarta: UGM, 1996), hal. 4.

⁶⁴ Ozay Mehmet, *Westernizing the Third World: The Eurocentricity of Economic Development Theories* (London: Routledge, 1999).

⁶⁵ Bdk. Goenawan Mohamad, *Menyambut Indonesia: Lima Puluh Tahun dengan Ford Foundation, 1953-2003* (Jakarta: Ford Foundation dan Equinox Publishing, 2003), hal. 59. Mengenai pergeseran pengaruh dan orientasi dari Belanda ke Amerika, lihat juga Roekmono Markam, *Menuju ke Definisi Ekonomi Post-Robbins* (Yogyakarta: BPFE, 1978).

Indonesia telah tidak berkembang sebagai “ilmu”, melainkan sekadar menjadi “seni”, yaitu karena sebagai sebuah perangkat teoritis ia memiliki keterbatasan operasional, yang sekaligus menunjukkan bahwa ia tak bersifat universal sebagaimana yang diyakini oleh para penganutnya atau oleh para sarjana ekonomi yang berpikiran positivistik.

Persisnya, ada tiga kesimpulan yang diambil oleh Mubyarto di akhir pidato pengukuhan. *Pertama*, adalah penegasan bahwa ilmu ekonomi merupakan bagian dari ilmu sosial. Penegasan ini, bagi Mubyarto, semakin memberikan legitimasi sekaligus imperatif bahwa ilmu ekonomi memang harus diabdikan untuk kemajuan kemanusiaan. Meski berkali-kali ilmu ekonomi didorong untuk menjadi ilmu yang semakin abstrak secara berlebihan, dorongan itu biasanya akan selalu dikembalikan oleh seorang pemikir besar ke arah kemanfaatan yang lebih besar bagi kemajuan kemanusiaan.

Kedua, secara metodik, untuk kegunaan yang lebih besar bagi kemajuan kemanusiaan tadi, para ekonom mestinya mendudukan metode deduksi dan induksi secara proporsional. Mubyarto memberikan penghargaan yang sama besar baik bagi kekuatan penalaran maupun bagi pengalaman empiris sebagai sama-sama menjadi unsur penyokong bagi pengembangan ilmu ekonomi.

Dan *ketiga*, untuk meningkatkan kemampuan menangkap secara tepat masalah yang dihadapi oleh masyarakat pada waktu tertentu, para ekonom harus mampu mengkombinasikan berbagai pendekatan keilmuan sekaligus dalam penelitian-penelitian yang bersifat *transdisipliner*.⁶⁶ Ihwal metode transdisipliner ini perlu

⁶⁶ Mubyarto, *Gagasan dan Metoda...*, *op.cit.*, hal. 14-15.

diberi catatan khusus, mengingat ini merupakan salah satu kontribusi penting (untuk tidak mengatakannya sebagai yang *paling penting*) dari Mubyarto, bukan hanya bagi perkembangan dan pengembangan ilmu ekonomi di Indonesia, melainkan juga bagi ilmu sosial secara umum. Gagasan mengenai metode transdisipliner ini dielaborasi oleh Mubyarto pada sebuah buku karangannya, yaitu *Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan Keadilan* (selanjutnya hanya disebut *Ilmu Ekonomi*).⁶⁷ Buku tersebut, meskipun tebalnya hanya 94 halaman, bisa dikatakan merupakan *magnum opus* Mubyarto.⁶⁸ Disebut demikian karena selain secara teknis buku ini ditulis secara utuh, tidak merupakan kumpulan karangan yang ditulis untuk berbagai keperluan, juga karena persoalan yang dibicarakannya bersifat fundamental. Apa yang dibahas dalam buku tersebut menyangkut sebuah persoalan mendasar dalam wacana ilmu sosial, yaitu soal *metodologi*. Bukan hanya mendasar, persoalan tersebut juga termasuk langka dibicarakan, terutama di lingkungan ilmu ekonomi. Dalam bukunya Mubyarto menyebutkan bahwa hingga buku itu ditulis, di Amerika, misalnya, satu-satunya buku mengenai metodologi ekonomi yang bisa disebut adalah

⁶⁷ Mubyarto, *Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan Keadilan* (Jakarta: Yayasan Agro Ekonomika, 1980). Empat belas tahun kemudian Mubyarto memperbarui buku ini dan selain mengubah judulnya ia menambahkan sebuah bab baru di bagian akhir. Lihat Mubyarto, *Ekonomi dan Keadilan Sosial* (Yogyakarta: Aditya Media, 1995).

⁶⁸ Bdk. Revrisond Baswir, "Mubyarto: Ilmuwan Tulen Berdisiplin Tinggi", artikel obituari di Majalah *Gatra*, No. 29/XI, 4 Juni 2005, hal. 6. *Magnum opus* adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa Latin yang artinya kurang lebih adalah "karya raksasa", sebuah pengertian yang merujuk pada karya pemikiran paling penting, paling besar, dan paling terkenal dari seorang sarjana, seniman, ataupun musisi.

karangan Robert Ferber dan P.J. Verdoorn, *Research Methods in Economics and Business* (1962).⁶⁹ Bahkan hingga saat ini, tak hanya di Indonesia, hanya sedikit saja sarjana ilmu sosial – terlebih lagi para ekonom – yang tertarik untuk membicarakan persoalan tersebut secara serius. Hal lain yang membuat kenapa karya itu bisa dianggap sebagai sumbangan terpenting Mubyarto adalah karena apa yang diulasnya telah memberikan jalan keluar bagi pengembangan ilmu sosial sehingga tidak terjerat pada positivisme dan monodisiplineritas. Bagi pengembangan ilmu ekonomi, kerangka metodik yang diajukan Mubyarto terutama membantu untuk memenuhi persoalan relevansi sosial. Dengan bantuan perspektif ilmu sosial secara menyeluruh, penelitian-penelitian ekonomi akan bersifat lebih membumi.

Jika pada halaman terdahulu telah disebutkan bahwa pidato pengukuhan Mubyarto dapat dianggap sebagai berisi pendasaran *historis* dan *paradigmatis* bagi proyek keilmuannya, maka buku *Ilmu Ekonomi* mengungkapkan dasar-dasar *metodologis* dari proyek keilmuannya. Dengan demikian, kalau kita merekonstruksi pemikiran Mubyarto sejak dari tulisan untuk disertasinya hingga diterbitkannya buku *Ilmu Ekonomi*, akan nampak bahwa intensi pemikiran Mubyarto hingga sejauh itu telah berkembang dan melewati beberapa titik pijak. Titik pijak pertama, yaitu karya-karya awal Mubyarto, jika kita simak baik-baik, lebih bersifat empiris dan teoritis. Pada bagian awal tulisan ini telah disebutkan bahwa disertasi yang ditulis Mubyarto telah memberikan terobosan teoritis bagi analisis mengenai produksi beras di Indonesia. Sifat empiris dan teoritis ini kental mewarnai karya-karya awal Mubyarto.⁷⁰

⁶⁹ Mubyarto, *Ilmu Ekonomi...*, *op. cit.*, hal. 1.

⁷⁰ Di antara publikasi-publikasi awal Mubyarto, selain yang telah disebut

Titik pijak kedua, meski sifat empiris dan teoritis masih mewarnai karya-karyanya, namun intensi Mubyarto pada titik ini telah bergeser ke persoalan yang lebih bersifat paradigmatis. Ini adalah periode ketika ia mulai berbicara mengenai ideologi, sistem ekonomi, keadilan sosial, dan isu-isu paradigmatis lainnya secara lebih intens. Di sini pula ia mulai merintis pembicaraan mengenai Ekonomi Pancasila menurut versinya, yang berbeda dengan versi Emil Salim.⁷¹ Naskah pidato pengukuhanannya bisa disebut sebagai tonggak pemikiran di titik pijak kedua ini. Dan berikutnya adalah titik pijak ketiga, sebuah titik ketika Mubyarto mulai berbicara mengenai metode, yang menandai bahwa kritik keilmuan yang dilakukannya memang dibangun oleh argumentasi yang serius. Sebagai tonggak di titik pijak ini adalah buku *Ilmu Ekonomi* tadi.

Setelah melalui tiga pergeseran ini, dimana dasar-dasar pemikirannya ditanamkan, apa yang dikerjakan Mubyarto kemudian

dan dirujuk sebelum ini, misalnya adalah: Mubyarto, “Rice Price, Marketing and Food Policy in Indonesia”, dalam Jurnal *The Malayan Economic Review*, Vol. XIII/No. 2, 1968; “The Sugar Industry”, dalam *Bulletin of Indonesian Economic Studies (BIES)*, No. 2/1969; “Economic Development in Daerah Istimewa Yogyakarta”, dalam BIES, No. 3/1970; “Harga Beras dan Policy Produksi di Indonesia”, dalam Jurnal *Agroekonomika*, No. 1/1970; “Pendekatan Komprehensif dalam Pengembangan Pedesaan: Suatu Analisa Sosial Ekonomi”, dalam Jurnal *Agroekonomika*, No. 2/1970; “Laporan dan Evaluasi Food and Agriculture Organization, Second World Food Congress”, dalam Jurnal *Agroekonomika*, No. 2/1970; “Estimating Rice Consumption: A Comment”, dalam BIES, No. 2/1971; “Pola Perdagangan Komoditi Pertanian di Indonesia dan Beberapa Persoalannya”, dalam Jurnal *Ekonomi dan Keuangan Indonesia (EKI)*, No. 1/1973; dan “Masalah Pembinaan Usaha Perkebunan Rakyat”, dalam Majalah *Prisma*, No. 6/1974; “Economic Aspects of Animal Husbandry in Indonesia”, dalam EKI, No. 4/1974.

⁷¹ Lihat, misalnya, Mubyarto, “Koperasi dan Ekonomi Pancasila”, dimuat *Harian Kompas*, 3 Mei 1979.

pada dasarnya hanyalah meramu intensi-intensi yang telah dilewatinya tadi. Namun meskipun karyanya yang lahir kemudian tidak lagi banyak melahirkan pikiran-pikiran baru, karena lebih banyak berupa pengembangan dari apa yang telah dirintisnya, periode setelah titik pijak ketiga ini tetap memiliki arti penting, karena pada periode inilah Mubyarto kemudian mencoba melembagakan gagasannya, baik di wilayah keilmuan maupun di wilayah praksis-kebijakan (*policy*).

Menarik untuk memperhatikan bahwa karya penting Mubyarto mengenai metodologi ini justru lahir karena ketidak-sengajaan. Dalam pengantar buku *Ilmu Ekonomi*, Mubyarto menulis bahwa karyanya tersebut sebenarnya hanyalah merupakan hasil sampingan, bukan merupakan karya yang direncanakan untuk dibuat. Ketika sedang menyelesaikan naskah buku teks *Politik Pembangunan Pertanian dan Pedesaan*,⁷² Mubyarto menemukan bahwa metode yang dipakainya untuk menyelesaikan naskah tersebut setelah direfleksikan ternyata bisa dianggap relatif-baru, berbeda dengan metode yang lazim dipergunakan. Jika dalam penelitian ilmu sosial lazimnya hanya dikenal metode *monodisipliner* dan *multi-disipliner* (kadang disebut juga sebagai *inter-* atau *antar-disipliner*), maka dalam refleksi yang kemudian dituliskannya itu Mubyarto memperkenalkan dan mengelaborasi sebuah metode yang disebutnya *trans-disipliner*. Metode tersebut berbeda dengan metode *inter-disipliner*, dalam hal bahwa ia (metode *transdisipliner*) dikuasai dan diterapkan oleh satu orang, yang

⁷² Mubyarto, *Politik Pembangunan Pertanian dan Pedesaan*, Draf (California: Stanford University, April 1980). Naskah ini kemudian diterbitkan tiga tahun kemudian menjadi Mubyarto, *Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan* (Jakarta: Sinar Harapan, 1983).

secara konsekuen bersikap tidak fanatik pada disiplin yang dikuasainya.⁷³ Jadi, jika pada metode interdisipliner beberapa sarjana dari bidang yang berbeda bekerja sama untuk menyelesaikan sebuah persoalan atau topik kajian, maka pada metode transdisipliner berbagai perspektif yang berbeda dari bidang-bidang keilmuan yang berbeda itu dikuasai oleh satu orang. Seorang ekonom, misalnya, yang hendak meneliti soal kemiskinan di pedesaan, maka untuk mendapatkan kesimpulan yang memadai bagi penelitiannya tersebut hendaknya ia memiliki wawasan sosiologi dan antropologi yang cukup, jadi tak hanya cukup mengandalkan perangkat ilmu ekonomi yang dikuasainya saja. Pelibatan wawasan keilmuan dari disiplin yang berbeda oleh satu orang itulah yang disebut sebagai metode transdisipliner. Tidak terlalu sulit untuk menyimpulkan bahwa apa yang dielaborasi oleh Mubyarto merupakan sebuah gagasan penting dan otentik. Ketika ilmu sosial di Indonesia masih terpenjara pada monodisiplineritas, dan penelitian interdisipliner masih merupakan sebuah barang baru, Mubyarto telah mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan metodologis yang diidap oleh pendekatan interdisipliner dan kemudian mencoba menawarkan jalan keluarnya.

Memang, elaborasi atas metode transdisipliner dilakukan oleh Mubyarto sebagai kritik atas kelemahan pendekatan interdisipliner, terutama belajar dari pengalaman penelitian-penelitian interdisipliner yang dilakukan oleh (waktu itu masih bernama) Lembaga Studi Pedesaan dan Kawasan (LSPK, kini PSPK). Sejak berdiri pada 1973, hingga 1983 LSPK telah melakukan lima penelitian interdisipliner mengenai Pembangunan Pedesaan Terpadu (*Integrated Rural Development*), yaitu di Kabupaten Temanggung

⁷³ Mubyarto, *Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial...*, *op.cit.*, hal. ix.

(1977), Boyolali (1978), Purworejo (1980/1981 dan 1981/1982), dan empat kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta (1983). Kelima penelitian terdokumentasikan dalam laporan setebal 779 halaman yang menyangkut hampir semua aspek pembangunan pedesaan.⁷⁴ Namun, Mubyarto memiliki sejumlah catatan kritis atas penelitian-penelitian interdisipliner tersebut. Pada penelitian yang dilakukan di Temanggung, misalnya, yang merupakan penelitian interdisipliner pertama yang dilakukan oleh LSPK, anggota tim penelitian berasal dari sembilan fakultas yang berbeda, yaitu Fakultas Pertanian, Peternakan, Kedokteran, Kedokteran Hewan, Geografi, Sosial Politik, Sastra, Hukum, dan Psikologi. Penelitian itu sendiri dipimpin oleh Prof. Dr. Soemadi Soerjabrata yang berasal dari Fakultas Psikologi. Catatan penting yang dikemukakan Mubyarto terkait kelemahan hasil penelitian interdisipliner di Temanggung itu adalah bahwa kesimpulan akhir yang disusun tetap tidak bersifat padu, karena ternyata kembali ke disiplin keilmuan masing-masing anggota penelitinya. Penelitian pembangunan desa terintegrasi itupun pada akhirnya harus terbentur pada *kesulitan integrasi* menyangkut pendekatan yang diambilnya.⁷⁵

Sebagai contoh Mubyarto mencuplik sebuah kesimpulan dalam bidang kesehatan pada studi tentang mutu gizi makanan.

Dari hasil penyelidikan masih banyak didapatkan kekurang-pengetahuan tentang gizi makanan baik dalam pemberian makanan pada bayi dan anak, maupun makanan untuk ibu-ibu hamil dan yang sedang menyusui, sehingga mereka berpantang makanan yang sebetulnya sangat baik, tetapi karena

⁷⁴ Mubyarto, *Strategi Pembangunan Pedesaan* (Yogyakarta: P3PK-UGM, 1984), hal. 3.

⁷⁵ *Ibid.*, hal. 4.

menurut kepercayaan yang salah, mereka tidak memakannya. Dipandang perlu lebih mengintensifkan penyuluhan-penyuluhan tentang gizi.⁷⁶

Mubyarto menganggap kesimpulan ini sangat bersifat monodisipliner, yang dalam hal ini hanya menyangkut tinjauan ilmu kedokteran semata. Agar kesimpulan tadi lebih bersifat mendalam dan bermanfaat bagi kegiatan penyuluhan, Mubyarto mengusulkan bahwa sebaiknya perlu dijelaskan kepercayaan apa yang dianggap salah oleh ilmu kedokteran itu. Penjelasan itu sangat diperlukan, karena pada masyarakat pedesaan umumnya terdapat bermacam-macam tradisi dan kepercayaan, yang meskipun sepintas lalu kelihatan tidak masuk akal, namun sebenarnya memiliki sejenis penalaran di baliknya. Lebih jauh Mubyarto mengatakan bahwa penyuluhan yang efektif pada bidang gizi mestinya juga selalu mempertimbangkan apakah makanan sumber gizi yang diperlukan oleh penduduk itu tersedia secara lokal atau harus mendatangkan dari luar. Sampai di sini menjadi jelas kelihatan bahwa persoalan yang menyangkut kesehatan juga terkait dengan bidang-bidang lainnya, yaitu pertanian, peternakan, dan ekonomi. Jika penduduk di desa bersangkutan sangat miskin, misalnya, dan mereka menghasilkan komoditi bergizi tinggi, mungkin saja komoditi yang mereka hasilkan itu sebaiknya di jual ke pasar agar mereka bisa membeli sumber-sumber karbohidrat atau sumber-sumber gizi lainnya yang lebih mereka perlukan.⁷⁷ Dengan demikian, hubungan antara satu bidang dengan bidang lainnya menjadi lebih padu, tak lagi hanya sekadar kumpulan bidang yang berkumpul tapi tak saling bertegur sapa. Berangkat dari pengalaman semacam itulah

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*

Mubyarto mengelaborasi kekurangan-kekurangan dari metode interdisipliner, sekaligus mengusulkan pengembangan metode transdisipliner sebagaimana panjang lebar diuraikannya dalam buku *Ilmu Ekonomi*.

PSPK, sejak awal pendiriannya memang dimaksudkan sebagai *ice-breaker* bagi hubungan antara berbagai bidang keilmuan di lingkungan UGM.⁷⁸ Di pusat studi inilah untuk pertama kalinya dirintis penelitian interdisipliner di UGM, yang bisa disebut sebagai pelembagaan penelitian interdisipliner pertama di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia. Di luar lingkungan perguruan tinggi, penelitian interdisipliner yang diorganisasi oleh sarjana Indonesia pertama kali dipraktikkan oleh sebuah badan *ad-hoc* penelitian bernama Proyek Survei Agro-Ekonomi Indonesia, atau yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan SAE.⁷⁹ Secara kelembagaan SAE bekerja untuk Departemen Pertanian, yang pada awal pendirian SAE menterinya dijabat oleh Tojib Hadiwidjaja.⁸⁰ Anggota Badan Pekerja SAE, yang dipimpin pertama kali oleh Profesor Sajogyo (l. 1926), terdiri dari para staf pengajar dari berbagai perguruan tinggi. Karena pekerjaan utama mereka adalah di universitas, kegiatan-kegiatan penelitian yang dilakukan adalah bersifat "*part-time*". Di dalam kegiatan-kegiatan SAE inilah

⁷⁸ Wawancara M. Nursam dengan Sartono Kartodirdjo. Lihat M. Nursam, *Membuka Pintu bagi Masa Depan: Biografi Sartono Kartodirdjo* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008), hal. 213.

⁷⁹ D.H. Penny, "*The Agro-Economic Survey of Indonesia: An Appreciation*", dalam *Jurnal Indonesia* (Cornell University), Vol. 11/April 1971, hal. 111.

⁸⁰ Mengenai hal ini lihat Mubyarto, "Prof. Dr. Sajogyo: Sosiolog yang Ekonom, atau Bapak Ekonomi-Sosiologi Indonesia", dalam Mubyarto, dkk. (eds.), *Sajogyo: Bapak, Guru dan Sahabat* (Jakarta: Yayasan Agro Ekonomika, 1996), hal. 10.

penelitian interdisipliner pertama kali dipraktikkan di Indonesia. Para peneliti SAE memang bukan hanya berasal dari berbagai universitas, melainkan juga berasal dari berbagai latar belakang keilmuan, meskipun secara umum didominasi oleh para ekonom, sosiolog, dan insinyur.

Ciri ke-interdisipliner-an dari SAE nampaknya bisa diwakili oleh sebuah “nasihat” Sajogyo kepada D.H. Penny (1930-1983), seorang Indonesianis yang juga adalah ahli ekonomi pertanian:

“Jika Anda ingin mengerti perekonomian Indonesia, pelajarilah politik dan kebudayaan kami. Jika Anda ingin mengerti politik dan kebudayaan kami, pelajarilah ekonomi kami.”⁸¹

Tali temali antara satu wilayah persoalan dengan persoalan yang lain memang telah membuat pendekatan monodisipliner dalam penelitian ilmu sosial menjadi problematis, terutama jika penelitian yang dimaksud ditujukan bagi kepentingan perumusan sebuah kebijakan. Persis di situ SAE berkontribusi dalam mengembangkan penelitian-penelitian interdisipliner. Terbentuknya Perhepi (Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia) pada 13 Februari 1969, tak lain juga karena dibidani oleh SAE. Perhepi, sebagaimana telah disinggung pada bagian awal tulisan ini, adalah sebuah perhimpunan keilmuan dari para peminat kajian ekonomi pertanian dan perdesaan (*society of agricultural economics*), dan bukan merupakan persatuan sarjana ekonomi pertanian (*association of agricultural economists*). Sehingga, dengan karakteristiknya yang demikian, Perhepi menjadi perhimpunan keilmuan pertama di Indonesia yang bersifat interdisipliner. Dan

⁸¹ Diucapkan Sajogyo, sebagaimana diceritakan kembali oleh Mubyarto. *Ibid.*, hal. 19. Lihat juga tulisan Meneth Ginting, “Pak Sajogyo: Guru Jarak Jauh”, dalam buku yang sama, hal. 90.

Mubyarto—lagi-lagi mengenai hal ini secara sedikit pernah disinggung di bagian terdahulu—merupakan salah satu pendiri sekaligus menjadi ketua umum Perhepi yang pertama. Oleh karena itu, jika kemudian Mubyarto menggagas perlunya dikembangkan pendekatan transdisipliner bagi ilmu ekonomi (dan ilmu sosial secara umum), gagasan tersebut secara faktual memang berangkat dari sebuah refleksi pengalaman empiris yang panjang, dimulai dari keterlibatannya dalam kegiatan-kegiatan SAE, Perhepi, YAE, dan kemudian PSPK. Dengan pengalaman empiris yang panjang itu di atas kertas Mubyarto memiliki amunisi yang cukup bagi proyek keilmuan yang hendak dibangunnya.

D. Pemiskinan Ilmu Ekonomi:

Tentang Pengajaran Ekonomi di Indonesia

“Ketika Fakultas Ekonomi UGM didirikan tahun 1955,... Secara keseluruhan ilmu ekonomi yang diberikan adalah Ilmu Sosial Ekonomi (social economics) bukan economics. Tetapi 5 tahun kemudian, ketika kuliah-kuliah di Fakultas Ekonomi diorientasikan sepenuhnya ke kurikulum Amerika, maka berubahlah ciri-ciri ilmu ekonomi yang dikuliahkan... menjadi ‘ilmu’ yang makin abstrak, dan makin kering, yang hilang cirinya sebagai ilmu sosial.”⁸²

Pengajaran ilmu ekonomi di Indonesia (d.h. Hindia Belanda), mengikuti kelaziman yang berlaku di Belanda, pada mulanya diajarkan melalui Perguruan Tinggi Hukum (*Rechtshogeschool*), yang waktu itu ada di Batavia.⁸³ Keadaan demikian bukan meru-

⁸² Mubyarto, *Pendidikan Ekonomi Kita* (Yogyakarta: Pustep, 2004), hal. 15-16.

⁸³ Mohamad Sadli, “20 Tahun Perkembangan Ilmu Ekonomi di Indonesia”, dalam Widjojo Nitisastro (ed.), *Research di Indonesia 1945-1965: Jilid IV—Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya* (Jakarta: Departemen Urusan Research Nasional Republik Indonesia, 1965), hal. 175. Lihat juga Thee Kian Wie, “Economics”, *op.cit.*, hal. 226.

pakan hal yang mengherankan, karena di perguruan tinggi-perguruan tinggi di Eropa juga ilmu ekonomi pada masa yang sama belum berdiri sendiri dan belum diajarkan pada fakultas yang terpisah.⁸⁴ Pemberian kuliah ekonomi di perguruan tinggi hukum di Indonesia telah dimulai sejak awal abad ke-20. Lembaran baru pengajaran ilmu ekonomi dimulai pada 8 Oktober 1948, ketika Fakultas Ekonomi (*Economische Hogeschool*) yang pertama di Indonesia dibuka di Makasar. Namun, meskipun telah dibuka Fakultas Ekonomi yang terpisah, pengajaran ilmu ekonomi di Perguruan Tinggi Hukum tidak dihilangkan.⁸⁵ Setelah dibuka di Makasar, berturut-turut kemudian dibuka di Jakarta (Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, pada 15 Januari 1951) dan di Yogyakarta (Fakultas Ekonomi UGM, pada 19 September 1955).⁸⁶

Sejak awal abad ke-20, telah disadari ihwal keterbatasan ilmu ekonomi Barat di Indonesia. Teori ekonomi Barat dipandang hanya berlaku pada sektor-sektor modern, yaitu sektor-sektor yang dikuasai oleh para penjajah sendiri. Sedangkan untuk memahami perekonomian rakyat jajahan, para sarjana Belanda harus mencari teori-teori yang lain.⁸⁷ Di kalangan pergerakan kemerdekaan, sebelum Perang Dunia II teori ekonomi yang digandrungi adalah teori-teori Marxis. Pendekatan Marxian yang bersifat struktural dianggap lebih relevan untuk menjelaskan dinamika

⁸⁴ Sadli, *ibid.*

⁸⁵ Thee, "Economics", *op.cit.*, hal. 227. Bdk. *20 Tahun Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada* (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM, 1975), hal. 8.

⁸⁶ Fakultas Ekonomi yang dibuka di Makasar kemudian menjadi bagian dari Universitas Hasanudin.

⁸⁷ Sadli, *op.cit.*, hal. 176.

ekonomi negeri jajahan, sekaligus menjadi *counter* yang sepadan bagi pandangan beberapa sarjana ekonomi Belanda yang bias kepentingan kolonial.

Menarik untuk menyimak catatan Sadli mengenai perbedaan corak antara model pengajaran ilmu ekonomi di Jakarta dengan di Yogya. Perbedaan itu terasa cukup kental terutama pasca Perang Dunia II. Dipindahkannya ibukota Republik ke Yogya, juga turut membentuk perbedaan corak antara keduanya. Pada periode antara 1945 hingga 1950, pengajaran ilmu ekonomi di Yogya disebut Sadli banyak melanjutkan tren-tren sebelum perang, dengan perbedaan pokok bahwa yang kini mengajar ilmu ekonomi bukan lagi para sarjana Belanda, melainkan para guru besar bangsa Indonesia sendiri.⁸⁸ Orientasi pengajaran ilmu ekonomi di Yogya bercorak pendekatan sosial-ekonomi, dimana wawasan sosiologi dan antropologi masih sangat ditekankan. Sementara itu di Jakarta, dimana sebagian para guru besar Belanda masih bertahan, model pengajaran mereka lebih mementingkan teori ekonomi umum dan perusahaan, dimana model pendekatan marjinalisme dan makro-ekonomi menjadi sangat diistimewakan. Pengaruh pemikiran Belanda memang lebih kuat di Fakultas Ekonomi UI dibanding dengan di Fakultas Ekonomi UGM.⁸⁹

Perbedaan corak itu di antaranya terlembagakan pada jurusan-jurusan yang dibuka masing-masing. Di Fakultas Ekonomi UI, misalnya, jurusan yang dibuka pada mulanya ada tiga, yaitu Ekonomi Umum, Ekonomi Perusahaan, dan Akuntansi. Pada 1964 dibuka jurusan baru, yaitu Ekonomi Pemerintahan. Sementara itu, di UGM dibuka empat jurusan, yaitu Jurusan Ekonomi Agra-

⁸⁸ *Ibid.*, hal. 178.

⁸⁹ Thee, “*Economics*”, *op.cit.*, hal. 231.

ria, Kenegaraan, Ekonomi Sosiologi, dan Ekonomi Perusahaan. Menyimak jurusan-jurusan itu, kiranya penilaian Sadli bahwa pengajaran ekonomi di Yogya bercorak sosial-ekonomi memang benar adanya. Mengenai hal ini Thee juga memiliki catatan bahwa di antara Fakultas Ekonomi yang telah di buka di Indonesia, hanya di UI dan UGM yang memiliki empat jurusan, dimana antara keduanya dibedakan masing-masing oleh sebuah jurusan: jika di UI ada Ekonomi Pemerintahan, maka di UGM ada Ekonomi Pertanian.⁹⁰

Tabel 3. Evolusi Pendidikan Ekonomi di Universitas Gadjah Mada

Periode	Perkembangan Jurusan	Keterangan
1949-1951	Jurusan Ekonomi	Jurusan Ekonomi berada di bawah naungan Bagian Hukum di Fakultas HESP (Hukum, Ekonomi dan Sosial Politik)
1952/1953-1954/1955		Status Jurusan Ekonomi naik menjadi Bagian Ekonomi, masih tetap berada di bawah Fakultas HESP
1955	<ul style="list-style-type: none"> - Jurusan Ekonomi Agraria - Jurusan Kenegaraan - Jurusan Ekonomi Sosiologi - Jurusan Ekonomi Perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Fakultas HESP dipecah menjadi 3 fakultas, yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Sosial Politik - Tanggal 19 September 1955, FE UGM resmi berdiri - Di semua jurusan diberikan kuliah Pengantar Sosiologi; di Jurusan Agraria diberi kuliah Hukum dan Politik Agraria, serta kuliah Ekonomi Pertanian
1958		Kampus FE UGM pindah dari Keraton ke Bulaksumur, menempati sebagian gedung yang kini menjadi Gedung Pusat UGM

⁹⁰ *Ibid.*, hal. 241. “Jurusan Ekonomi Pertanian” yang disebut Thee baru muncul pada tahun 1965 dengan nama Jurusan Ekonomi Pertanian dan Pembangunan Masyarakat Desa, yaitu hasil merger dari Jurusan Agraria dan Jurusan Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa (KPMD). Selengkapnya lihat tabel Evolusi Pendidikan Ekonomi di UGM.

1960		Masuk pengaruh Amerika, terutama kerangka ilmu ekonomi yang diusung Lionel Robbins
1961/1962	<ul style="list-style-type: none"> - Jurusan Ekonomi Agraria - Jurusan Kenegaraan - Jurusan KPMD - Jurusan Ekonomi Perusahaan - Jurusan Keuangan dan Perbankan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dibuka Jurusan Keuangan dan Perbankan - Jurusan Sosiologi diubah menjadi Jurusan Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa (KPMD)
1963/1964	<ul style="list-style-type: none"> - Jurusan Ekonomi Agraria - Jurusan Kenegaraan - Jurusan KPMD - Jurusan Ekonomi Perusahaan - Jurusan Keuangan dan Perbankan - Jurusan Akuntansi 	Dibuka Jurusan Akuntansi
1965/1966	<ul style="list-style-type: none"> - Jurusan Ekonomi Perusahaan - Jurusan Akuntansi - Jurusan Keuangan dan Perbankan - Jurusan Ekonomi Pertanian dan Pembangunan Masyarakat Desa 	Jurusan KPMD dan Agraria dimerger menjadi Jurusan Ekonomi Pertanian dan Pembangunan Masyarakat Desa
1970	<ul style="list-style-type: none"> - Jurusan Ekonomi Perusahaan - Jurusan Akuntansi - Jurusan Ekonomi Umum - Jurusan Ekonomi Pertanian 	Terjadi perubahan nama-nama jurusan: <ul style="list-style-type: none"> - Jurusan Keuangan dan Perbankan menjadi Jurusan Ekonomi Umum - Jurusan Ekonomi Pertanian dan Pembangunan Masyarakat Desa menjadi Jurusan Ekonomi Pertanian
1984	<ul style="list-style-type: none"> - Jurusan Ekonomi Umum - Jurusan Ekonomi Perusahaan - Jurusan Akuntansi 	Jurusan Ekonomi Pertanian dihapus dari FE UGM, padahal, selain di Unsoed, ini adalah satu-satunya Jurusan Ekonomi Pertanian yang ada di Fakultas Ekonomi. Jurusan ini kemudian dimasukan ke Fakultas Pertanian.

Sumber: Diolah Tarli Nugroho (2010) dari berbagai sumber.

Perbedaan corak itu tetap terlembagakan ketika UI dan UGM kemudian membuka afiliasi kerja sama dengan perguruan tinggi yang ada di Amerika pada 1957 atas sponsor Ford Foundation. Jika UI melakukan kerja sama dengan University of California Berkeley, maka UGM membuka kerja sama dengan University of Wisconsin yang terkenal dengan studi ekonomi pertanian dan kelemagaannya (*institutional economics*). Masuknya pengaruh Amerika dalam pendidikan ekonomi di Indonesia bisa disimak dari dibukanya Jurusan Keuangan dan Perbankan serta Jurusan Akuntansi, serta lebih jauh lagi pada penyederhanaan jurusan-jurusan di Fakultas Ekonomi menjadi hanya tiga jurusan sebagaimana yang terjadi di UGM pada tahun 1984. Mulai tahun 1957

pula pengaruh tradisi pengajaran ilmu ekonomi Belanda pelan-pelan digantikan oleh pengaruh Amerika.

Putusnya hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Belanda pada 3 Mei 1956 ternyata memang berimplikasi banyak pada bagaimana wajah pengajaran ilmu ekonomi, termasuk pada bagaimana politik perekonomian Indonesia dikelola di kemudian hari. Sebagai imbas langsung dari putusnya hubungan diplomatik dengan Belanda, akibat ketegangan politik yang terus meruncing, para profesor Belanda yang mengajar di Universitas Indonesia terpaksa kembali ke negerinya. Hal ini kemudian membuat Fakultas Ekonomi UI mengalami krisis staf pengajar. Para pengajar yang tersisa tidak ada yang berlatar belakang pendidikan ekonomi atau bergelar master dan doktor. Kecuali Soemitro Djojohadikusumo, para pengajar yang lain umumnya berasal dari jurusan hukum. Sebagai informasi, krisis serupa tidak terjadi di Fakultas Ekonomi UGM, karena sejak awal pendiriannya memang tidak ada lagi sarjana Belanda yang mengajar di sana.

Keadaan krisis semacam itu kemudian mendorong Soemitro untuk menjajaki kemungkinan agar bisa menyekolahkan murid-muridnya ke luar negeri. Sebagai seorang sosialis, Soemitro tentu saja menginginkan murid-muridnya agar belajar ekonomi menurut perspektif sosialis. Oleh karena itu dia mengincar LSE (London School of Economics) sebagai mitra tempat para muridnya melanjutkan sekolah.

LSE adalah sekolah yang didirikan oleh Fabian Society, sebuah kelompok epistemik di Inggris yang mengusung agenda untuk mempopulerkan kebaikan sosialisme di kalangan intelektual borjuis.⁹¹ Salah satu pendiri LSE adalah dramawan George

⁹¹ Skousen, *The Making of...*, *op.cit.*, hal. 196.

Bernard Shaw. Berbeda dengan pendekatan kaum Marxis yang revolusioner, Fabian Society lebih suka mencapai tujuan yang sama dengan cara halus, melalui penyusupan dan indoktrinasi pada partai politik serta institusi-institusi penting lainnya di Inggris. Model pendekatan inilah yang kemudian berhasil mendorong Inggris untuk menjadi penganut *welfare state* di kemudian hari.

Secara kebetulan, sewaktu Soemitro kuliah di Eropa, dia pernah mengikuti kuliah Harold Lasky, pemikir sosialis terkemuka yang adalah guru besar di LSE. Kekagumannya pada Lasky membuat Soemitro terobsesi dengan model pendidikan di LSE. Tak heran, jika Soemitro lebih suka menyebut FE UI yang di pimpinnya waktu itu sebagai JSE (The Jakarta School of Economics). Sayangnya, British Council yang diharapkan bisa menjadi donor tidak mampu membiayai kerja sama FE UI dengan LSE waktu itu. Oleh karena itu Soemitro kemudian terpaksa mencari lembaga donor lain. Bukan kebetulan, pada saat yang hampir bersamaan, Ford Foundation baru saja membuka kantor perwakilan di Indonesia. Gayung Soemitro disambut Ford. Karena membawa kepentingan Amerika, Ford tentu saja mencariskan mitra universitas di negerinya. Lalu ketemu University of California at Berkeley. Kerja sama antara FE UI, Ford Foundation dan University of California Berkeley dimulai secara resmi pada 19 Juli 1956. Tenaga pengajar muda dari FE UI dikirim ke Berkeley, dan sebagai gantinya Berkeley mengirimkan dosen-dosennya untuk mengisi kelowongan di FE UI.

Dalam biografinya, Soemitro mengaku bahwa sebenarnya ia tidak terlalu suka dengan model pendidikan ekonomi di Amerika yang kapitalistik. Tapi karena kebutuhan yang mendesak, dia akhirnya sepakat dengan tawaran Ford. Yang menarik adalah

latar belakang kenapa Soemitro pada akhirnya menerima Berkeley sebagai universitas mitra. Ternyata itu dikarenakan ketua departemen ekonomi Berkeley adalah kawan Soemitro, yaitu Andreas Papandreou, seorang sosialis berkebangsaan Yunani. Papandreou di kemudian hari, karena tak tahan dengan iklim akademik Amerika pada 1960-an, kemudian kembali ke Yunani dan menjadi pemimpin partai sosialis disana.

Jadi, jika dibaca ulang, Soemitro sebenarnya tetap berkehendak agar murid-muridnya menjadi sosialis seperti dirinya. Tapi sejarah berkehendak lain. Widjojo, Suhadi, Subroto, Emil Salim, Sumarlin dan Ali Wardhana, kemudian menjadi pembela ekonomi pasar yang teguh sepulang dari Amerika. Mereka kemudian dijuluki sebagai The Berkeley Mafia.⁹²

Diantara murid Soemitro yang segenerasi dengan mafia Berkeley, hanya Doed Joesoef (kemudian menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 1978-1983) yang menolak untuk disekolahkan ke Amerika. Dia memilih Perancis sebagai tempat belajarnya, dimana disana dia menggondol dua gelar doktor, yaitu di bidang keuangan internasional dan di bidang hubungan internasional. Pemikiran ekonomi Daoed terbukti kemudian memang berbeda dengan pemikiran teman-temannya di FE UI. Semasa duduk di kabinet, Daoed sering mengkritik secara langsung kebijakan ekonomi yang digagas oleh teman-temannya, sesuatu yang tidak disukai oleh Soeharto. Salah satu asisten Daoed, yang juga pemikirannya berbeda dengan kebanyakan ekonom UI, adalah Sri-Edi Swasono.

Kembali ke soal pengajaran ilmu ekonomi di Indonesia,

⁹² David Ransom, "The Berkeley Mafia and the Indonesian Massacre", dalam *Majalah Ramparts*, No. 4/Oktober 1970.

penyederhanaan jurusan-jurusan di Fakultas Ekonomi menjadi hanya tiga saja sebagaimana yang kini berlangsung tentunya bertolak belakang dengan semangat awal pendirian Republik ini. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa bahkan sejak awal abad ke-20 para sarjana Belanda telah menemukan jika ilmu ekonomi konvensional mengandung banyak sekali keterbatasan untuk digunakan di Indonesia. Sehingga tidak heran, ketika berkesempatan untuk mendirikan perguruan tinggi nasional, para sarjana terdahulu telah merancang kelembagaan pengajaran ekonomi sedemikian rupa sehingga bersifat lebih membumi dan relevan dengan kepentingan nasional Indonesia. Itulah kenapa misalnya pada awal pendiriannya Fakultas Ekonomi UGM membuka Jurusan Ekonomi Agraria, atau Jurusan Ekonomi Sosiologi.⁹³ Masalah pokok perekonomian Indonesia memang terletak pada soal agraria dan sektor agraris, sehingga tak heran jika kemudian dikembangkan pula Jurusan Ekonomi Pertanian. Sayangnya, usaha itu kemudian dimentahkan kembali oleh dorongan-dorongan pragmatis. Pada akhirnya, ilmu ekonomi yang dilembagakan kembali mengalami pemiskinan, baik dilihat dari sudut relevansi, maupun dari sudut *state of the art* keilmuan.

Namun, sejarah ilmu ekonomi sendiri memang sangat dekat dengan sejarah pemiskinan pengertian. Pada banyak titik, pidato pengukuhan Mubyarto sebagaimana telah dibahas pada bagian terdahulu sebenarnya merupakan respon atas pemiskinan pengertian yang berkembang dalam ilmu ekonomi, terutama dalam kaitan dengan penerapannya di Indonesia. Apa yang terjadi di Indonesia pada dasarnya bisa jadi hanyalah bayangan kecil dari

⁹³ Mubyarto, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat...*, *op.cit.*, hal. 16.

apa yang terjadi pada *body of knowledge* ilmu ekonomi secara umum. Salah satu karya babon yang bisa bercerita mengenai bagaimana evolusi ilmu ekonomi secara komprehensif dari mulai zaman antik hingga kontemporer, termasuk juga mencatat titik-titik pemiskinan yang dialaminya, adalah buku yang ditulis oleh Joseph Schumpeter, *History of Economic Analysis* (1954). Bukan hanya menelusur akar historisnya saja, buku tersebut juga memaparkan bagaimana keterkaitan antara ilmu ekonomi dengan ilmu sosial lainnya, termasuk juga filsafat. Apa yang dilakukan Schumpeter melalui karyanya tadi tergolong istimewa, mengingat hanya sedikit sekali ekonom yang mau melacak genealogi keilmuan yang diimaninya hingga ke jaman antik serta secara terbuka menegaskan keeratan hubungan ilmu ekonomi dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, termasuk dengan sejarah dan filsafat. Secara tegas, bahkan adalah Schumpeter pula yang kemudian menekankan bahwa agar seseorang layak disebut ekonom, maka ia harus menguasai sejarah, filsafat, sosiologi, dan baru kemudian matematika. Kecenderungan untuk menjadikan matematika yang teknis sebagai jantung ilmu ekonomi, sebagaimana yang dikreasi oleh aliran ekonomi Neoklasik, menjadi salah satu sasaran kritik Schumpeter dalam karyanya tadi. Baginya matematika adalah anggota keluarga termuda dalam rumah tangga ilmu ekonomi, sehingga sangat lancang jika matematika mendominasi anggota keluarga lainnya.

Sebagai sebuah risalah sejarah, Schumpeter tidak main-main dengan proyek pelacakan sejarahnya. Dalam karya tadi dia tak kurang menuliskan risalah setebal 200 halaman sebelum akhirnya sampai pada pembahasan mengenai *The Wealth of Nations*, sebuah momen yang sering disebut banyak orang sebagai penanda kelahiran ilmu ekonomi modern. Satu kesimpulan penting yang

ditelatahkan Schumpeter, dan dibenarkan oleh banyak sejarawan yang meneliti ilmu ekonomi, adalah bahwa munculnya ilmu ekonomi modern sebenarnya lebih awal ketimbang Abad Pencerahan Eropa, apalagi jika dibandingkan dengan terbitnya karya Smith tadi. Jadi, sebagai sebuah praktik, ekonomi usianya hampir setua umur manusia.

Namun sebagai sebuah ilmu, kelahirannya memang biasanya dihubungkan dengan nama Adam Smith (1723-1790), terutama dengan karyanya yang paling mashur, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (1776), atau yang biasa disebut secara singkat sebagai *The Wealth of Nations*. Lewat buku tersebut, Smith ditahbiskan menjadi bapak ilmu ekonomi modern. Gelar tersebut sebenarnya tidak berasal dari keaslian gagasan atau teknik analisisnya dalam buku tadi, melainkan terutama berkaitan dengan visinya tentang kapitalisme.⁹⁴ Bisa dikatakan Smith merupakan orang pertama yang mempromosikan potensi keuntungan dari adanya persaingan dagang. Keberhasilan Revolusi Industri di Inggris telah membuat masalah ekonomi bergeser dari masalah penguasaan tanah (yang bersifat merkantilis) menjadi masalah yang menyangkut aturan perdagangan (seperti isu monopoli, oligopoli, dan berbagai penghapusan hambatan perdagangan lainnya).⁹⁵

Dalam *The Wealth of Nations* Smith memperkenalkan asumsi bahwa manusia bertindak sesuai dengan *kepentingan dirinya*

⁹⁴ Steven Pressman, *Fifty Major Economists* (London: Routledge, 1999), hal. 20.

⁹⁵ Soule, *op.cit.*, hal. 41-46; Robert B. Ekelund, Jr. dan Robert F. Hebert, *A History of Economic Theory and Method*, Second Edition (London: McGraw-Hill, 1984), hal. 89.

sendiri, yang dengan tuntunan “tangan tak tampak” (*invisible hand*) kepentingan diri tadi akan membawa *kebaikan umum*. Pendapat ini hingga hari ini masih memicu perdebatan. Dan perdebatan mengenai pemikiran Adam Smith salah satunya muncul karena biasanya orang mengutip secara tidak lengkap gagasan pemikir Skotlandia itu. Sebagian besar ekonom, misalnya, tidak pernah memperhitungkan karyanya yang lebih dulu terbit sebelum *The Wealth of Nations*, yaitu *The Theory of Moral Sentiments* (1759). Dalam buku pertamanya, Smith berpendapat bahwa tiap-tiap orang pada dasarnya dapat bertindak sebagai pengamat. Maksudnya, selain bisa bertindak atas dasar kepentingan-diri (*self interest*), setiap orang juga bisa berlaku seolah-olah tanpa kepentingan, alias pengamat yang memiliki pandangan obyektif. Dalam keduanya sebagai pengamat itulah maka setiap orang menerima moralitas yang membuatnya bisa membedakan gagasan antara “yang benar” dan “yang salah”.

Memang, tanpa mencoba mengaitkan gagasan *kepentingan-diri* Adam Smith dengan *filsafat moral*-nya, pandangan bahwa perayaan kepentingan-diri bisa membawa kebaikan umum sulit dicerna oleh akal. Oleh karena itu, gagasan mengenai “tangan tak tampak” (*invisible hand*) memang membutuhkan penjelasan, dan sayangnya Smith sendiri tak berusaha untuk melakukannya. Terbukti, dalam *The Wealth of Nations* Smith hanya sekali menyebutkan kata itu dan itupun tanpa disertai penjelasan.⁹⁶ Sehingga, bisa dikatakan bahwa secara umum dua karya Adam Smith tadi tidak terjembatani, sebuah pekerjaan rumah yang hingga kini tak

⁹⁶ Kata itu muncul di Chapter II buku Smith. Lihat Adam Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, A Selected Edition* (Oxford: Oxford University Press, 1998 [1776]), hal. 292.

banyak ekonom tertarik untuk mengkajinya.

Salah satu perubahan besar yang secara inheren juga menjadi penanda dari proses pemiskinan ilmu ekonomi adalah pada perubahan namanya sendiri dari semula disebut “ekonomi-politik” (*political economy*), kemudian menjadi hanya “ekonomi” saja (*economics*). Jika merunut sejarah perkembangannya, ilmu ekonomi memang mulai terbentuk dan lahir dengan nama ekonomi-politik.⁹⁷ Adalah Alfred Marshall (1842-1924), yang kemudian memilih “ekonomi” (*economics*) sebagai nama bagi “ilmu baru” tersebut.⁹⁸ Seperti tertuang dalam bukunya, *The Principle of Economics* (1890), Marshall memilih nama itu karena ekonomi menurutnya memang sudah selayaknya berhenti sebagai sebuah *system of inquiry* yang memiliki kaitan langsung dengan persoalan kebijakan ekonomi pada abad ke-18 dan 19.⁹⁹

Secara substantif, perubahan nama itu tentu saja tidak sederhana maknanya, karena perubahan itu membawa konsekuensi logis dan ideologis tertentu. Salah satu latar belakang yang mendorong perubahan identitas ilmu ekonomi tersebut adalah hegemoniknya pemikiran positivisme pada abad ke-19. Perdebatan mengenai metode ekonomi yang terjadi di Eropa pada abad itu, misalnya, yang dikenal sebagai *Methodenstreit*, juga telah dimerangkan oleh para penganut positivisme. Pada akhir 1880 hingga

⁹⁷ James A. Caporaso dan David P. Levine, *Teori-teori Ekonomi Politik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 68.

⁹⁸ Terbitnya buku Adam Smith, *An Inquiry into the Nature of the Wealth of Nations*, pada 1776, dianggap sebagai tonggak lahirnya ekonomi sebagai sebuah ilmu. Meskipun dalam kenyataannya, setidaknya demikian yang ditulis banyak literatur, sebagai sebuah seni (*art*), ekonomi telah lahir jauh hari sebelumnya.

⁹⁹ Lihat M. Dawam Rahardjo, *Esei-esei Ekonomi Politik*, (Jakarta: LP3ES, 1983), hal. 36.

awal 1890, di Eropa telah terjadi perdebatan mengenai metodologi (*Methodenstreit*)¹⁰⁰ yang melibatkan dua mazhab pemikiran, yaitu antara Mazhab Historis Jerman (*Historismus; German Historical School*), yang dipimpin Gustav von Schmoller, dengan Mazhab Austria (*Austrian School*), yang dipimpin oleh Carl Menger.¹⁰¹ Secara sederhana, perdebatan itu bisa dilukiskan sebagai perdebatan antara para pembela teori ekonomi murni yang bersifat abstrak dan matematis, yang dalam hal ini diwakili oleh Menger dan kawan-kawannya, dengan para pembela pendekatan yang bersifat empiris dan historis, yang diwakili oleh Schmoller dan sejumlah sarjana Jerman.

Pertengkar epistemologis itu dipicu oleh publikasi Menger, *Untersuchungen über die Methode der Socialwissenschaften und der politische Oekonomie ins besondere (Investigations into the Method of the Social Sciences with Special Reference to Economics)*, yang terbit pada 1883. Karangan itu mendapat respon dari Schmoller, yang kemudian menuliskan tanggapan, *Zur Methodologis der Staats- und Socialwissenschaften* (1883). Pada level epistemologis, *Methodenstreit* berpangkal pada pertanyaan apakah selain dari sejarah dimungkinkan ada ilmu yang bisa menjelaskan dinamika tindakan manusia. Dalam pandangan Menger, metodologi ekonomi adalah terutama berkaitan dengan bagaimana mempelajari obyek dari

¹⁰⁰ *Methodenstreit* adalah istilah dalam bahasa Jerman yang berarti 'pertengkar tentang metode' (*dispute over methods*).

¹⁰¹ Mark Blaug, *The Methodology of Economics or How Economists Explain*, Second Edition (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1997), hal. 72-73. Lihat juga Warren J. Samuels, Jeff E. Biddle, dan John B. Davis (eds.), *A Companion to History of Economic Thought* (Massachusetts: Blackwell Publishing, 2003), terutama Bab 14.

disiplin ekonomi, dan bukan pada mempersoalkan keabsahan metode itu sendiri. Ia menegaskan bahwa ruang lingkup ilmu ekonomi terutama adalah bersifat teoritikal, dan bukan historikal. Sebaliknya, Schmoller dan Mazhab Historis Jerman berpandangan bahwa para ekonom dapat mengembangkan teori-teori sosial secara lebih baik dari sumber-sumber sejarah, dan tidak mempercayai jika teori tidak berasal dari pengalaman sejarah. Dalam kaitannya dengan Mazhab Austria, Mazhab Historis Jerman menolak konsep determinisme-materialis yang dianut Menger dan kawan-kawannya, yang menganggap bahwa tindakan manusia bisa dan dapat dijelaskan sebagai sejenis reaksi fisika ataupun kimia. Sebagai tanggapan atas kritik pedas Schmoller atas gagasannya, Menger menulis sebuah balasan berupa pamflet, *The Errors of Historicism in the German Political Economy (1884)*, sebuah tulisan yang sekaligus menegaskan gendang *Methodenstreit* antara Mazhab Austria dengan Mazhab Historis Jerman.

Namun, yang sesungguhnya menarik dari *Methodenstreit* sebenarnya bukanlah persoalan epistemologisnya, melainkan persoalan politik ekonomi yang melatari pemikiran kedua mazhab tadi.¹⁰² Di balik argumentasi logis mengenai kekuatan metode deduksi, pemikiran Mazhab Austria sebenarnya merupakan sebetuk dukungan teoritis terhadap doktrin pasar bebas, yang dianggap pilihan terbaik bagi setiap negara dalam menjalankan kebijakan perdagangannya. Bagi para sarjana Jerman, yang dalam hal ini diwakili oleh Schmoller, pandangan itu tentu saja dianggap "bias Inggris" dan "bias negara industri". Bagi Inggris, yang telah melewati fase Revolusi Industri, pasar bebas memang merupakan

¹⁰² L.Z. Zimmerman, *Sedjarah Pendapat-pendapat tentang Ekonomi [Geschiedenis van het Economisch Denken]* (Bandung: W. van Hoeve, 1955), hal. 92-94.

pilihan terbaik bagi politik perekonomiannya. Namun bagi Jerman, yang perekonomiannya masih bersifat agraris, dan kegiatan industri baru berkembang setelah paruh kedua abad ke-19, setiap teori ekonomi yang bias kepentingan negara industri adalah patut dicurigai.¹⁰³ Pada fase awal perkembangan industri, negara sangat dibutuhkan peranannya untuk menjaga dan membesarkan industri nasional, terutama dalam bentuk kebijakan fiskal yang bersifat melindungi. Dan gagasan ini sebenarnya juga pernah dipraktikkan di Inggris pada tahap-tahap awal Revolusi Industri, sehingga bagi para sarjana Jerman agak mengherankan jika saat mereka membutuhkan kebijakan yang sama untuk menyokong sektor industrinya, mereka tak diperbolehkan oleh argumen-argumen teoritis yang disampaikan oleh ilmu ekonomi klasik, yang kebetulan memang lahir serta besar di Inggris dan saat itu sofistikasinya sedang dibangun oleh Menger dan kawan-kawannya.

Kembali ke soal awal, kemenangan positivisme telah membuat ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya ekonomi, diyakini harus menjadi sebuah otoritas obyektif yang tidak boleh memberi ruang bagi subyektifisme. Subyektif di sini tentu saja adalah se-bentuk ruang bagi konsep-konsep seperti “nilai”, atau hal-hal yang bersifat “normatif” dan “moralistik” lainnya. Dan bagi para penganut positivisme, mempersoalkan ataupun memasukan konsep-konsep tadi dalam ilmu ekonomi akan mengakibatkan ilmu ekonomi menjadi tidak ilmiah, atau sekurang-kurangnya unsur ilmiahnya menjadi lemah. Karenanya, berdasarkan pemikiran ini, munculah konsensus formal di kalangan ekonom bahwa teori-teori ekonomi adalah kumpulan pernyataan positif yang menjelaskan hubungan dan proses ekonomi seperti apa adanya (*what there is*) dan bukannya memberi opini mengenai apa yang

¹⁰³ *Ibid.*

sebaiknya terjadi (*what there ought to be*).¹⁰⁴

Latar belakang diterimanya positivisme sebenarnya juga tidak lepas dari iklim akademis yang sedang berkembang di Eropa pada masa itu. Meminjam Capra, abad ke-18 dan 19 adalah abad kemenangan mekanika Newton, dimana fisika berada dalam garda depan revolusi sains yang telah dan kelak mengubah banyak wajah dunia. Kemenangan mekanika Newton ini telah membuat fisika dijadikan sebagai prototip ilmu “keras” yang digunakan untuk mengukur ilmu-ilmu lain dengan melawannya. Gampangnya, fisika telah dijadikan standar untuk mengukur prestise ilmu-ilmu lainnya. Semakin dekat ilmuwan berhasil menandingi metode-metode fisika yang eksak, semakin tinggi posisi disiplin mereka dalam masyarakat ilmiah.¹⁰⁵ Inilah yang telah membuat ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan, meminjam Foucault, secara *episteme* telah terjebak pada positivitas ilmu-ilmu alam. Ia tidak membangun positivitasnya sendiri, melainkan meminjamnya dari ilmu-ilmu alam, sebuah fondasi keliru yang pada akhirnya akan mengantarkan ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan pada kebangkrutan.¹⁰⁶ Di level yang bersifat teknis, tendensi terhadap kerumitan sebagaimana yang pernah dikritik Galbraith,¹⁰⁷ misalnya, sebenarnya telah cukup menyulitkan perkembangan ilmu-ilmu sosial. Sebab, mereka terpaksa harus

¹⁰⁴ Lihat misalnya Sritua Arief, “Teori Ekonomi dan Kolonialisme Ekonomi”, dalam *Prisma*, No.1/1982, hal. 26.

¹⁰⁵ Fritjof Capra, *Titik Balik Peradaban: Sains Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan*, (Yogyakarta: Bentang, 2000), hal. 252.

¹⁰⁶ Lihat Michel Foucault, *The Order of Things: An Archeology of the Human Sciences* (New York: Vintage Books, 1973).

¹⁰⁷ John Kenneth Galbraith, *Economics and the Public Purpose* (London: Penguin Books, 1975), hal. 43.

berusaha keras mengadopsi konsep-konsep mekanika *a la* Newton dalam kajian-kajiannya, meski hasilnya sering kali sangat tidak cocok dengan realitas sesungguhnya. Jadi, secara *episteme* ia berpijak di atas dasar yang bukan miliknya sendiri, dan secara teknis ia mengadopsi perangkat-perangkat yang tidak sepenuhnya relevan.

Persoalan-persoalan itu bukannya tak disadari. Hanya saja, keinginan untuk mengejar gengsi ternyata lebih kuat ketimbang pertanggungjawaban ilmiah bahwa telah terjadi distorsi dalam penggunaan model-model tadi. Sehingga, tanpa malu-malu, di lingkungan ilmu ekonomi, misalnya, banyak ekonom kemudian lebih suka membongceng legitimasi ilmu lain (dalam hal ini matematika) untuk mendekati “standar” sofistikasi dari fisika tadi.¹⁰⁸ Pandangan positivis ini tentu saja menuai kritik. Penegasian variabel-variabel sosial dalam analisis ekonomi mau tidak mau berarti mengandaikan ekonomi seolah hidup dalam ruang vakum.¹⁰⁹ Tak heran, jika kemudian kita mendapati keberjarakan yang cukup lebar antara analisis teoritik dengan implikasi praktik ekonomi yang sebenarnya. Kritik yang dilontarkan Galbraith berikut cukup tegas menggambarkan apa yang sedang terjadi pada ilmu ekonomi.

“... With increasing complexity goes an impression of increasing precision and accuracy. And with resolved perplexity goes an impression of

¹⁰⁸ Lihat pidato pengukuhan Sukadji Ranuwihardjo, *Teori, Model, dan Masalah Pembangunan Ekonomi* (Yogyakarta: BPFE, 1981), hal. 5.

¹⁰⁹ Persoalan mengenai “ruang vakum” ini misalnya dipersoalkan oleh Roekmono Markam, dalam pidato pengukuhannya. Lihat Roekmono, *op.cit.*. Francis Fukuyama juga mengkritik persoalan serupa dalam bagian pendahuluan bukunya, *Trust: Kabijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*, (Yogyakarta: Qalam, 2002), hal. xvii-xviii.

understanding. If the economist is sufficiently 'caught up on his data and his techniques', he can overlook social consequences—his attention being elsewhere, he can even, without damage to conscience, 'support a system that maltreats large number of people'.¹¹⁰

Dalam perjalanannya, kritik terhadap positivisme relatif semakin diterima, sehingga ekonomi pada akhirnya mulai mengadopsi pendekatan-pendekatan yang tak lagi konvensional. Pemikiran yang mencoba mengemukakan demarkasi antara *positive economics* dengan *normative economics*, misalnya, telah tidak dapat diterima lagi. Sebab, persoalan ekonomi dalam kenyataannya memang menyangkut banyak segi dari sistem sosial, sehingga pada akhirnya penyamaan ilmu ekonomi dengan fisika ditolak, atau paling tidak keyakinan itu kini membentur keraguan yang sangat besar. Sebagai gantinya, ilmu ekonomi harus mencontoh "model" ilmu kedokteran, yang bersifat *normatif* dan *preskriptif*.¹¹¹

Jika membaca sejarah dengan jernih, ciri normatif ilmu ekonomi pada dasarnya memang bersifat bawaan. Sebagai turunan dari ilmu hukum yang menurunkan dirinya dari filsafat, ekonomi pada awal perkembangannya memang terlibat dalam perbincangan mengenai masalah moral,¹¹² dimana soal *nilai*, misalnya, dibicarakan melalui Hukum Kodrat,¹¹³ sebelum akhirnya terlem-

¹¹⁰ Galbraith, *Economics and...*, *op.cit.*

¹¹¹ Sritua Arief, *op.cit.*

¹¹² Keterlibatan ilmu ekonomi dalam perbincangan mengenai masalah moral ini misalnya diwakili oleh buku penting pertama yang ditulis oleh Adam Smith sebelum dia menulis *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (1776), yaitu *The Theory of Moral Sentiments* (1759), dimana Smith banyak berbicara mengenai etika dan simpati.

¹¹³ Perbincangan mengenai evolusi konsep nilai dari Hukum Kodrat ini misalnya dibahas oleh Sonny Keraf dalam disertasinya di Katholieke

bagakan menjadi teori harga yang kini kita kenal. Jika kita mencermati buku-buku teks ekonomi, bab mengenai teori harga biasanya akan diberi judul “Nilai (*Value*) dan Teori Harga (*Price Theory*)”. Secara semiotis, penamaan demikian itu bisa diartikan bahwa konsep *nilai (value)* pada dasarnya memang mendahului konsep *harga (price)*, sebagaimana secara historis memang demikian adanya.

Kembali populernya pendekatan ekonomi-politik telah membuat pandangan ekonomi konvensional harus mengubah keyakinannya. Robert Heilbroner, misalnya, mengutarakan pandangan bahwa apabila ilmu ekonomi di masa datang mau memiliki relevansi dengan persoalan-persoalan modern, maka ia harus melakukan perubahan dalam tiga hal. *Pertama*, pertimbangan politik secara eksplisit harus diperkenalkan dalam riset ekonomi. *Kedua*, ruang lingkup ekonomi konvensional harus diperluas sehingga mencakup dimensi politik. *Ketiga*, paradigma ilmu ekonomi ilmiah harus digantikan paradigma baru yang lebih luas.¹¹⁴

Namun, meskipun kritik terhadap pemikiran ekonomi ortodoks berkembang cukup pesat, baik di Eropa maupun Amerika, kritik tersebut nampaknya tidak berpengaruh banyak terhadap politik perekonomian di Indonesia pada masa Orde Baru. Bahkan bisa dikatakan bahwa pada masa itu adalah masa keemasan pemikiran ekonomi positivistik di Indonesia. Kebo-

Universiteit Leuven, Belgia, yang kemudian diterjemahkan dan dibukukan, *Pasar Bebas, Keadilan dan Peran Pemerintah: Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith* (Yogyakarta: Kanisius, 1996), lihat terutama Bab 1. Lihat juga Sonny Keraf, *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi* (Yogyakarta: Kanisius, 1998).

¹¹⁴ Robert L. Heilbroner, “*On the Possibility of a Political Economics*”, seperti dikutip M. Dawam Rahardjo, *op.cit.*, hal. 38.

sanan menjadi bangsa yang miskin di satu sisi, serta munculnya beberapa “keajaiban” dalam kehidupan perekonomian di sisi yang lain, telah menjadikan struktur perekonomian kita terombang-ambing antara dua arus besar pemikiran ekonomi *mainstream*, yaitu Keynesian dan Neoklasik.¹¹⁵

Salah satu analisis klasik mengenai peta pemikiran ekonomi di Indonesia di antaranya pernah ditulis oleh Benjamin Higgins (1912-2001). Higgins adalah seorang ahli ekonomi Kanada yang memiliki pengetahuan luas mengenai sejarah perkembangan ekonomi Indonesia. Dalam bukunya, *Indonesia's Economic: Stabilization and Development* (1959), Higgins menyebutkan dua klasifikasi pemikir ekonomi di Indonesia berdasarkan pemikirannya hingga akhir dasawarsa 1960-an. Kelompok *pertama* adalah apa yang dinamakannya sebagai yang “berhaluan ekonomi” (*economic minded*), terdiri dari para intelektual berpendidikan Barat yang berpendapat bahwa pembangunan ekonomi harus menjadi prioritas pertama, dan harus dilakukan dengan mencontoh Barat. Kelompok *kedua* ia namakan sebagai yang “berhaluan sejarah” (*history minded*), terdiri dari mereka yang beraliran nasionalis, komunis, konservatif, dan isolasionis. Bagi mereka, proses revolusi harus diselesaikan lebih dulu, dengan mengakhiri dominasi ekonomi, perusahaan modal, dan pengaruh budaya asing. Sikap ini banyak dipengaruhi oleh pengalaman kolonialisme dan perju-

¹¹⁵ Mengenai kiprah pemikiran ekonomi Keynesian di Indonesia, lihat, misalnya, Benni E. Matindas, *Paradigma Baru Politik Ekonomi* (Jakarta: Bina Insani, 1998). Adapun soal terombang-ambingnya perekonomian Indonesia di antara arus-arus besar pemikiran ekonomi, secara panjang lebar ditulis oleh sebuah laporan penelitian mengenai sistem-sistem ekonomi yang ditulis oleh Emil Salim. Lihat Emil Salim, *Sistem Ekonomi dan Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Leknas-MIPI, 1965).

angan kemerdekaan.¹¹⁶

Apa yang dikemukakan Higgins sebenarnya bisa dijadikan model dasar mengenai bagaimana anatomi polarisasi pemikiran ekonomi sesudah 1960-an, meskipun klasifikasi yang disusunnya tersebut terlalu sederhana dan sangat terikat pada konteks waktu ketika pertama kali dikemukakan. Namun demikian, menarik untuk menyimak bahwa model pengelompokan yang dibuat Higgins ternyata hampir serupa dengan pengelompokan yang terjadi dalam perdebatan mengenai metodologi ekonomi yang terjadi di Eropa pada abad ke-19 sebagaimana yang telah diceritakan.

Menarik juga untuk kemudian menyimak bahwa ternyata mereka yang terklasifikasi sebagai penganut *economic minded* sebagian besar adalah penjaja dan pembela dari teori ekonomi Neo-klasik. Sedangkan kelompok *history minded* sebagian besar dari mereka adalah penganut paham sosialis atau nasionalis. Beberapa dari mereka di kelompok yang kedua ini mungkin akan menolak jika disebut sosialis, tetapi tak bisa dimungkiri jika mereka umumnya bersimpati dan tertarik pada cita-cita sosialisme. Secara kelemagaan, kalau diuraikan lebih jauh, mereka yang termasuk kelompok pertama umumnya berasal dari “The Jakarta School of Economics”, sebutan populer bagi Fakultas Ekonomi UI pada awal pendiriannya. Sedangkan, mereka yang termasuk kelompok kedua umumnya berlatar belakang institusi berbeda di luar UI. Politik perekonomian Indonesia, terutama sejak Orde Baru, dalam perkembangannya lebih banyak dipegang dan dipengaruhi oleh kelompok *economic minded*. Mereka yang termasuk dalam kelom-

¹¹⁶ M. Dawam Rahardjo, “Pendekatan Historis Struktural: Menemukan Format Pembangunan”, dalam *Prisma*, No.10/1986, hal. 3.

pok ini adalah Widjojo Nitisastro, Mohamad Sadli, Ali Wardhana, Emil Salim, Subroto, dan murid-muridnya. Sedangkan kelompok *history minded*, umumnya selalu berposisi di luar pagar pengambil kebijakan, meskipun beberapa di antaranya pernah menduduki beberapa posisi penting di pemerintahan. Mereka kemudian menjadi pengkritik paling keras terhadap setiap kebijakan mazhab berhaluan ekonomi tadi. Beberapa di antara mereka adalah Mubyarto, Sajogyo, Sritua Arief, Daoed Joesoef, Sri-Edi Swasono,¹¹⁷ Dawam Rahardjo dan Hidayat Nataatmadja. Tidak dipakainya ekonom berhaluan sejarah ini tentunya bisa dipahami, karena sistem ekonomi yang dipakai oleh negara adalah kapitalisme.

Label positivis yang disematkan pada kelompok *economic minded* tidak lepas dari asumsi-asumsi yang mereka bangun dalam menyusun kebijakan perekonomian. Titik tekan pada pertumbuhan, minimasi peran negara, serta transformasi struktur perekonomian, telah membuat proses pembangunan berjalan tanpa prasangka. Kepercayaan yang berlebih pada sektor swasta – dan terutama modal asing, misalnya, menyebabkan konsep kepentingan publik menjadi kian sumir. Sementara, relokasi peran negara kepada sekadar penjamin berlangsungnya mekanisme pasar, menyebabkan negara tak lagi menjadi lembaga otoritatif yang bisa menjamin kepentingan warganya.

Kepercayaan yang begitu berlebih terhadap teori ekonomi Barat ini sebenarnya telah banyak menuai kritik, terutama dari kalangan *history minded*, yang mempercayai bahwa dalam melakukan pembangunan ekonomi, kita sebenarnya bisa membangun konsep sendiri yang tidak harus sama dengan model

¹¹⁷ Daoed Joesoef dan Sri-Edi Swasono, sebagai perkecualian, adalah guru besar di Fakultas Ekonomi UI.

Barat, sebuah pandangan yang juga dianut oleh Mazhab Historis Jerman. Menurut golongan di luar pagar ini, teori ekonomi Barat memuat beberapa persoalan fatal jika diterapkan mentah-mentah di luar wilayah sebenarnya (baca: Eropa dan Amerika). *Pertama*, asumsi bahwa teori ekonomi Barat bersifat bebas nilai. Asumsi ini dibantah dengan argumen bahwa ilmu ekonomi Barat hanya bersifat positif jika ia diterapkan di Barat. Sebaliknya, jika ia diterapkan di Timur, ia tidak lagi positif, melainkan sudah menjadi *normatif*. Ada distorsi ruang yang tak terjembatani ketika teori dari Barat diterapkan mentah-mentah tanpa melalui penyelidikan sebelumnya (induktif).¹¹⁸ Sebagai ilmu mengenai perilaku manusia, ekonomi tidak mungkin terlepas dari karakter dan struktur masyarakat yang melahirkannya. Dan tentu saja, karakter dan struktur masyarakat di mana teori ekonomi Barat itu lahir berbeda dengan karakter dan struktur masyarakat Timur.

Bukti lain mengenai bahwa ilmu ekonomi Barat tidak bebas nilai adalah masalah nasionalisme ekonomi. Kebebasan individual, yang sejak awal menjadi ciri pokok ekonomi Smithian, tidak memberi ruang bagi nasionalisme ataupun proteksionisme, yang berarti pembatasan kebebasan. Tiap individu memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi kapan saja dan dengan siapa saja. Negara tidak berhak membatasi kebebasan itu. Namun benarkah tulisan Adam Smith sama sekali bebas nilai dan kepentingan tertentu? Jika ditelusuri, *Wealth of Nations*, justru sangat nasionalistik dan penuh kepentingan kerajaan Inggris

¹¹⁸ Sayangnya, selain terlalu percaya dengan asumsi positif teori ekonomi Barat, kelompok *economic minded* juga kebanyakan menyenangi metode deduktif dalam menerangkan dan merumuskan kebijakan ekonomi.

Raya. Prinsip-prinsip yang terdapat di dalamnya adalah prinsip-prinsip yang menguntungkan Inggris pada masa itu. Bahkan, pada beberapa titik, buku Smith bisa dijadikan pembenaran bagi praktik kolonialisme yang dilakukan Inggris.

Artinya, ada muatan kepentingan nasional dalam teori ekonomi Barat, yang itu bisa jadi hanya menguntungkan mereka sendiri. Jika demikian, masih maukah kita terus-menerus memakai teori di mana kita memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional negara lain dengan mengorbankan kepentingan nasional kita? Perspektif kepentingan ini juga melekat pada tuntutan globalisasi dan pasar bebas yang menjadi agenda terbesar kaum neo-liberal. Selama ini kita mengira bahwa pasar bebas adalah *milestone* bagi perdagangan internasional yang akan bermanfaat bagi semua negara, sehingga kita harus terlibat di dalamnya. Namun, studi yang dilakukan Winifried Ruigrok menunjukkan sebaliknya. Sebesar 75% perdagangan internasional tidak dilakukan dalam aturan main GATT (General Agreement on Tariff and Trade), tetapi melalui perjanjian perdagangan preferensial (seperti antara Uni Eropa dengan NAFTA), *intra-company trade*, dan barter. Karena itulah sebenarnya globalisasi proses produksi dan penyebaran kapital adalah omong kosong. Masing-masing negara mendorong internasionalisasi, tetapi demi memenuhi kepentingan nasional. Sayangnya, sekali lagi kita terjun ke gelanggang perdagangan bebas tanpa prasangka sama sekali.¹¹⁹

¹¹⁹ Baca Pidato Pengukuhan M. Mohtar Mas' oed, *Tantangan Internasional dan Keterbatasan Nasional: Analisis Ekonomi-Politik tentang Globalisasi Neo-Liberal* (2002), hal. 14-15.

Kedua, asumsi bahwa teori ekonomi Barat berlaku universal. Banyak ahli ekonomi pembangunan yang bersepakat bahwa teori ekonomi tradisional (Neoklasik dan Keynesian) terbatas relevansinya untuk memahami segi-segi khusus perekonomian di banyak negara berkembang.¹²⁰ Dalam bahasa Todaro, konsep dan prinsip-prinsip ilmu ekonomi Barat lahir dari karakter dan struktur yang khas Barat, karena itu tidak mungkin digunakan untuk menerangkan hal-hal khusus di luar ciri masyarakat Barat. Mengenai hal ini, Gunnar Myrdal menulis,

“Economic theorists, more than other social scientists, have long been disposed to arrive at general proposition and then postulate them as valid for every time, place, and culture. There is a tendency in contemporary economic theory to follow this path to the extreme. ... when theories and concepts designed to fit the special conditions of the Western world—and thus containing the implicit assumption about social reality by which this fitting was accomplished—are used in the study of underdeveloped countries in South Asia, where they do not fit, the consequences are serious.”¹²¹

Jika secara sosiologis, relevansi teori ekonomi konvensional telah dimiskinkan oleh jarak kebudayaan, maka secara epistemologis sifat ilmu ekonomi konvensional telah dimiskinkan oleh keberjarakannya dengan soal moral, atau apa yang oleh beberapa ekonom hal serupa ini disebut sebagai etika.¹²² Pandangan ini kurang lebih sama seperti yang juga diyakini Kurt Dopfer, bahwa

¹²⁰ Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, (Jakarta: Erlangga, 1987), hal. 12.

¹²¹ Gunnar Myrdal, *Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations*, Volume I (New York: Pelican Books, 1968), hal. 16-17.

¹²² Amartya Sen, *Masih Adakah Harapan Bagi Kaum Miskin: Sebuah Perbincangan tentang Etika dan Ilmu Ekonomi di Fajar Milenium Baru* (terj. *On Ethics and Economics*), (Bandung: Mizan, 2001), hal. 7.

sejak terlepas dari filsafat, ilmu ekonomi memang telah berkali-kali mengalami krisis yang mengancam eksistensinya.¹²³

Dalam membangun gagasannya, Mubyarto juga mengedepankan persoalan moral ini sebagai jantung dari gagasan keilmuannya. Ia bahkan menyebut gagasan Ekonomi Pancasila yang dibesarkannya sebagai gagasan mengenai “ekonomi moral”. Oleh karena itu tidak mengherankan jika Sartono Kartodirdjo, mantan kolega Mubyarto di PSPK, juga berpendapat bahwa proyek keilmuan Mubyarto sedikit atau banyak memang cukup dipengaruhi oleh pemikiran James C. Scott, yang menulis buku mengenai ekonomi-moral petani.¹²⁴ Salah satu buku yang ditulis Mubyarto secara tegas juga mengambil soal moral ini sebagai tajuknya.¹²⁵ Dan karena hidup dalam sistem kebudayaan Indonesia, maka rujukan nilai-nilai moral yang dimaksudkan oleh Mubyarto tak lain juga adalah moral Pancasila.

E. Perdebatan Ekonomi Pancasila

Jika diajukan pertanyaan mengenai apakah setelah *Polemik Kebudayaan* yang terjadi pada 1930-an para sarjana Indonesia pernah mengalami polemik serupa, dalam hal level kualitas dan persoalan yang dibicarakannya?!

Di lapangan kebudayaan, jawaban atas pertanyaan itu bisa dikatakan relatif lebih mudah didapat. Setelah *Polemik Kebuda-*

¹²³ Pengantar Kurt Dopfer (ed.), dalam *Ilmu Ekonomi di Masa Depan: Menuju Paradigma Baru*, (Jakarta: LP3ES, 1983), hal. 3.

¹²⁴ James C. Scott, *The Moral Economy of Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia* (New Heaven: Yale University Press, 1976). Pandangan Sartono itu disampaikan pada wawancara yang dilakukan oleh Puthut Indroyono, *op.cit.*.

¹²⁵ Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1988).

yaan, pada pertengahan dekade 1980-an, misalnya, pernah berlangsung apa yang disebut sebagai “Perdebatan Sastra Kontekstual”.¹²⁶ Polemik yang melibatkan lebih dari belasan sarjana dan budayawan terkemuka itu berlangsung antara 1984 hingga paruh awal 1985. Jauh sebelum itu, pada 1960-an, meski lebih banyak dipicu oleh persoalan politik yang dangkal, juga pernah terjadi sejumlah perdebatan menarik mengenai kebudayaan antara golongan kiri dengan sejumlah sarjana dan budayawan non-kiri lainnya.¹²⁷ Tapi itu semua terjadi di wilayah kebudayaan. Bilakah itu terjadi di lingkungan ilmu sosial kita?!

Barangkali, dalam sejarah ilmu sosial di Indonesia, tak ada polemik yang lebih besar daripada “Polemik Ekonomi Pancasila” yang terjadi pada awal 1980-an. Pada 1957 memang sempat terjadi perdebatan penting dalam “Seminar Sedjarah” yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dengan Universitas Gadjah Mada. Namun, perdebatan dalam seminar itu tidak banyak merembes keluar forum, sehingga tak sampai menjadi polemik.¹²⁸ Adapun “Polemik Ekonomi Pancasila”, yang terjadi sejak akhir tahun 1980 dan berlangsung hampir sepanjang tahun 1981, melibatkan tulisan dan pendapat dari puluhan sarjana, bukan hanya dari lingkungan ilmu ekonomi,

¹²⁶ Perdebatan waktu itu diredaksi sangat baik oleh Ariel Heryanto hingga menjadi sebuah buku tebal. Lihat Ariel Heryanto, *Perdebatan Sastra Kontekstual* (Jakarta: Rajawali Pers, 1985).

¹²⁷ Perdebatan itu sebagian berhasil didokumentasikan oleh D.S. Moeljanto dan Taufiq Ismail, dalam buku *Prahara Budaya: Kilas Balik Ofensif Lekra/PKI dkk.* (Bandung: Mizan, 1995).

¹²⁸ Lihat buku *Seminar Sedjarah, Laporan Lengkap Atjara I dan II tentang Konsepsi Filsafat Sedjarah Nasional dan Periodisasi Sedjarah Indonesia*, Seri 2 (Yogyakarta: UGM, 1958).

melainkan juga dari ilmu-ilmu lainnya, seperti filsafat, hukum, politik, dan lain-lain. Bahkan, polemik tersebut juga telah memancing perhatian sejumlah Indonesianis untuk mengutarakan pendapatnya di jurnal internasional.¹²⁹ Sejak 1980 hingga 1981, tak kurang digelar 4 seminar penting yang membicarakan topik itu, yang digelar baik di Yogyakarta maupun di Jakarta.

Tabel 4. Empat Seminar Ekonomi Pancasila, 1980-1981

Tempat/Waktu	Tajuk	Penyelenggara	Para Pembicara
Yogyakarta 19 September 1980	Seminar Ekonomi Pancasila	Fakultas Ekonomi UGM	Ace Partadiredja, Bambang Riyanto, Boediono, M. Dawam Rahardjo, Dibyo Prabowo, Hadori Yunus, Harsono, Hidayat Nataatmadja, Kadarman, Kaptin Adisumarta, Mubyarto, Roekmono Markam, Sarino Mangunpranoto, Soediyono, Soetatwo Hadiwigeno, Soetrisno PH, Sudarsono, Sulistyo
Jakarta 19-20 Oktober 1980	Seminar Sistem Ekonomi Pancasila	Lembaga Pengkajian Ekonomi Pancasila (LPEP)	Arief Budiman, Bambang Krisnamurth, Mubyarto, Sarbini
Jakarta 23-26 Juni 1981	Simposium Sistem Ekonomi Pancasila	Dewan Pertahanan Keamanan Nasional dan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia	Abdul Rachman Panetto, Adi Sasono, Affendi Anwar, Ariono Abdulkadir, Bintoro Tjokroamidjojo, Boediono, Hidayat Nataatmadja, Hindersah Wiratmadja, M. Dawam Rahardjo Mubyarto, Roekmono Markam, Soerjanto Poespwardjojo, Sri-Edi Swasono, Sutopo Yuwono, Syamsuddin Mahmud, T.M.H.L. Tobing, Thamrin Nurdin, Wagiono Ismangil
Yogyakarta 19 September 1981	Seminar II Ekonomi Pancasila	Fakultas Ekonomi UGM	Ahmad Azhar Basyir, Frans Seda, Handjilin, Harsoyono Subyakto, Heidjrachman R., Herqutanto Sosronegoro, Hidayat Nataatmadja, Mubyarto, Pdt. Chris Marantika THN, Samiadji Djajengminardo, Sarino Mangunpranoto, Soehardi Sigit, Soetrisno P. H., Sudarsono, Warsito Singowardono

Sumber: Tarli Nugroho (2010), diolah dari berbagai sumber.

Istilah Ekonomi Pancasila untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Emil Salim pada 1965, dalam sebuah laporan pene-

¹²⁹ Lihat *Lampiran Bibliografi Wacana Ekonomi Pancasila, 1965-2010* di bagian akhir tulisan ini.

litian yang disusunnya mengenai soal-soal sistem ekonomi.¹³⁰ Pada karangannya itu Emil Salim membahas empat model sistem ekonomi, yaitu Ekonomi Swasta, Ekonomi Kontrol, Ekonomi Kolektif, dan Ekonomi Perencanaan Sentral. Pembahasan mengenai model-model sistem dan teori-teori mengenai sistem ekonomi yang dilakukannya adalah dalam rangka mencari dan merumuskan sistem ekonomi yang sesuai dengan Indonesia. Pada laporannya itu, Emil Salim masih menggunakan istilah “Sistem-Ekonomi Sosialisme Pantjasila”. Baru pada kertas kerja yang dituliskannya kemudian, yang sangat menekankan pentingnya pemerintah memikirkan masalah pembangunan ekonomi untuk mengimbangi keberhasilan Indonesia dalam pembangunan politik, istilah yang digunakan Emil Salim berubah menjadi “Ekonomi Pancasila”.¹³¹ tulisan itu dimuat pada semacam monograf yang disusun oleh Leknas untuk Lemhanas (Lembaga Pertahanan Nasional), dimana Selain Emil Salim, para penyumbang tulisan dalam monograf itu adalah Widjojo Nitisastro (yang juga menuliskan kata pengantar), Ali Wardhana, Fuad Hasan, Selo Soemardjan, dan lain-lain. Meski telah digunakan pada dua tulisan tadi, istilah Ekonomi Pancasila baru benar-benar “bergaung” setelah Emil Salim menulis sebuah makalah bagi Seminar KAMI, Januari 1966,¹³² dan

¹³⁰ Emil Salim, *Sistem Ekonomi dan Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Leknas-MIPI, 1965).

¹³¹ Emil Salim, “Politik dan Ekonomi Pantjasila”, dalam Widjojo Nitisastro, dkk., *Masalah-masalah Ekonomi dan Faktor-faktor Ipolsos (Ideologi, Politik, Sosial)*, (Jakarta: Leknas-MIPI, 1965).

¹³² Emil Salim, “Membina Ekonomi Pancasila”, dalam buku Seminar KAMI, *Jalur Baru Sesudah Runtuhnya Ekonomi Terpimpin* (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), hal. 110-121.

sebuah artikel di Harian *Kompas* pada Juni 1966.¹³³ Artikel pendek itu kemudian disambung lagi pada 1979 oleh sebuah artikel panjang Emil Salim di Majalah *Prisma*.¹³⁴ Beberapa tulisan yang pernah membahas gagasan Ekonomi Pancasila, biasanya paling akhir hanya merujuk pada tulisan Emil Salim yang dimuat di *Kompas* – atau dalam Seminar KAMI – ketika menyebut kapan pertama kali istilah itu muncul, dan tidak memperhatikan kalau istilah telah diperkenalkan sejak setahun sebelumnya.¹³⁵

Namun, meski sebagai sebuah istilah Ekonomi Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Emil Salim, dalam perjalanannya istilah tersebut kemudian lebih lekat dengan nama Mubyarto. Memang, Mubyarto-lah yang kemudian serius mengembangkan gagasan tersebut, baik dalam wilayah keilmuan maupun sebagai identitas bagi praksis kebijakan. Pada 19 September 1980, atas inisiatif Mubyarto pula, gagasan Ekonomi Pancasila untuk pertama kalinya diseminarkan, bertepatan dengan Dies Natalis Fakultas Ekonomi UGM ke-25. Ada 18 orang sarjana yang memberikan sumbangan pemikiran kala itu, dari sudut makro ekonomi, mikro ekonomi, teori pembangunan, etika ekonomi dan gagasan mengenai konsep manusia Indonesia untuk menyempurnakan konsep

¹³³ Emil Salim, “Sistem Ekonomi Pancasila”, dimuat Harian *Kompas*, 30 Juni 1966. Tulisan ini dimuat kembali dalam buku *Mencari Bentuk Ekonomi Indonesia: Perkembangan Pemikiran 1965-1981* (Jakarta: Gramedia, 1982), hal. 36-38. Buku itu disunting oleh Redaksi Ekonomi Harian *Kompas* sendiri.

¹³⁴ Emil Salim, “Sistem Ekonomi Pancasila”, dimuat dalam Majalah *Prisma*, No. 5/VIII/1979, hal. 3-9.

¹³⁵ Kekeliruan itu misalnya dilakukan oleh tulisan Mudrajad Kuncoro. Lihat Mudrajad Kuncoro, “Sistem Ekonomi Pancasila: Antara Mitos dan Realitas”, dimuat dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* (JEBI), Vol. 16/No.1/2001, hal. 88-96.

homo oeconomicus. Kumpulan makalah dalam seminar itu dibukukan dan diterbitkan oleh BPFE (Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada).¹³⁶

Seminar di Yogya tadi ternyata mampu menarik perhatian. Wacana Ekonomi Pancasila kemudian direspon oleh pemerintah dalam bentuk seminar pula yang diselenggarakan oleh Dewan Pertahanan Keamanan Nasional (Wanhankamnas) dan Departemen Dalam Negeri (Depdagri) pada 23 hingga 26 Juni 1981, yang prosidingnya kemudian diterbitkan menjadi sebuah buku berjudul *Wawasan Ekonomi Pancasila* (1981).¹³⁷ Jika seminar di Yogya lebih banyak menekankan aspek teoritis keilmuan, maka seminar di Jakarta ini terutama mengelaborasi Ekonomi Pancasila sebagai gagasan mengenai sistem ekonomi, dan bukan sebagai teori ekonomi (baru).

Meski sama-sama menggunakan istilah Ekonomi Pancasila, terdapat perbedaan mendasar antara apa yang dimaksud dengan Ekonomi Pancasila oleh Emil Salim dengan menurut Mubyarto dan “versi Yogya”. Jika Emil Salim menerjemahkan istilah tadi sebagai gagasan mengenai sistem perekonomian, atau politik perekonomian, maka Mubyarto menggunakannya sebagai sebetulnya teori kritis untuk mengkritik teori ekonomi Neoklasik (*mainstream economics*). Atau, jika diperinci lebih jelas lagi, perbedaan pokok antara gagasan Emil Salim dengan Mubyarto itu terletak pada aspek *konseptual* dan *historis* yang melatari kelahiran istilah tadi. Secara historis, gagasan Ekonomi Pancasila Emil Salim adalah

¹³⁶ Prosiding seminar tanggal 19 September 1980 itu dibukukan dalam Mubyarto dan Boediono (eds.), *Ekonomi Pancasila* (Yogyakarta: BPFE, 1981).

¹³⁷ Abdul Madjid dan Sri-Edi Swasono (eds.), *Wawasan Ekonomi Pancasila* (Jakarta: UI-Press, 1981)

mencoba memberi pendasaran terhadap jalan ekonomi akan diambil oleh Orde Baru; sementara Ekonomi Pancasila versi Yogya dan Mubyarto adalah justru hendak memberikan kritik terhadap jalan ekonomi Orde Baru.

Sedangkan jika dilihat secara konseptual, ketika memperkenalkan istilah itu, Emil Salim tidak sedang bertendensi hendak menyusun teori ekonomi baru, atau sistem ekonomi baru, sebagaimana yang terasa kental dalam Seminar Ekonomi Pancasila di Yogya pada 1980. Emil, sebagaimana bisa diikuti dalam pemikiran-pemikirannya kemudian, tidak pernah mengemukakan pandangan bahwa ada yang keliru dari ilmu ekonomi *mainstream* (neoklasik). Ia selalu berpandangan bahwa ilmu ekonomi itu universal. Jika terdapat ketidaksesuaian antara teori ekonomi dengan praktik, maka kekeliruan itu terletak di praktik. Jadi, menurut Emil, tidak ada gunanya menyusun teori baru karena memang ilmu ekonomi tidak ada yang keliru, hanya penerapannya saja yang mungkin keliru.¹³⁸

Pandangan itu tentu saja jauh berseberangan dengan pendapat Mubyarto dan pendapat para pembicara yang mengemuka dalam Seminar 1980. Dalam pidato pengukuhan sebagai guru besar ekonomi pada 1979, Mubyarto, dengan tegas mengemukakan bahwa ilmu ekonomi *mainstream* tidak bisa sepenuhnya diterapkan di Indonesia. Bahkan, lebih jauh Muby berpandangan bahwa teori ekonomi Barat bisa dikatakan gagal jika diterapkan di Indonesia. Jadi, nampak benar bahwa perbedaan antara maksud Ekonomi Pancasila sebagaimana diuar Emil Salim berlainan

¹³⁸ Baca wawancara Majalah *Prisma* dengan Emil Salim, "Emi Salim: Bukan Kesalahan Ilmu Ekonomi", dalam Majalah *Prisma*, No. 1/IX, Januari 1980, hal. 56-61.

secara fundamental dengan yang dibentuk oleh Mubyarto dan kawan-kawannya.

Adalah menarik juga untuk memperhatikan kenapa Seminar Ekonomi Pancasila di Yogya tahun 1980 sampai bisa “mencuri perhatian” pemerintah. Perspektif mengenai pertarungan medan kuasa di ruang publik barangkali penting untuk menjelaskan hal ini. Secara ringkas bisa disampaikan bahwa salah satu sebab kenapa seminar tersebut “menarik perhatian pemerintah” adalah karena pada saat itu pemerintah sedang berusaha untuk memonopoli tafsir atas Pancasila, sehingga ketika sekelompok sarjana berbicara mengenai Pancasila dalam *framing* berupa kritik terhadap pemerintah, tentu saja itu dianggap sebagai “ancaman” yang serius. Karena sebelumnya Orde Baru telah menjadikan Pancasila sebagai ujung tombak untuk melakukan de-Soekarno-isasi, delegitimasi terhadap anasir-anasir ideologis lama (seperti “sosialisme Indonesia” ataupun “sosialisme” secara umum), maka rezim neofasis tersebut tak ingin tombak yang sama kini menikam mereka.

Pada kenyataannya, tak kurang dari Soeharto sendiri ikut bicara mengenai Polemik Ekonomi Pancasila, dan komentarnya membuat orang tak lagi berani mengatakan selainnya. Dalam sebuah wawancara, Mubyarto mengatakan bahwa sejak Soeharto ikut berkomentar mengenai Ekonomi Pancasila, dan itu dengan sejumlah tuduhan negatif, maka banyak di antara kawan-kawannya yang kemudian tiarap, tak lagi berani ngomong mengenai gagasan itu.¹³⁹ Apa yang dilakukan oleh para pelopor Seminar Ekonomi Pancasila 1980, dari sudut pandang pemerintah, adalah

¹³⁹ Wawancara Tarli Nugroho (bersama Indarti Yuni Astuti, Karlina, dan Fauzul A. Muhammad) dengan Mubyarto. Wawancara dilakukan pada medio April 2003.

mereka sedang merongrong otoritas tunggal yang bisa menafsir Pancasila, yaitu pemerintah sendiri. Tak heran, meski sempat ramai diperbincangkan sepanjang tahun 1981, gagasan Ekonomi Pancasila kemudian seperti balon kempes. Itulah yang kemudian membuat kenapa gagasan hanya identik dengan nama Mubyarto.

Tendensi untuk menolak keberlakuan teori ekonomi Barat di Indonesia sejatinya bukanlah merupakan fenomena baru tahun 1980-an. Sejak masa kolonial, beberapa sarjana Belanda yang mengkaji perekonomian Hindia, juga telah melemparkan sejumlah keraguan atas kemampuan teori ekonomi konvensional dalam menjelaskan dinamika perekonomian di tanah jajahan. Tesis mengenai “Ekonomi Dualistis” (*Dual Economies*) sebagaimana yang diajukan oleh Julius Herman Boeke (1884-1956) pada awal abad ke-20, bisa jadi merupakan pintu awal bagi munculnya gagasan mengenai teori baru bagi ilmu ekonomi di Indonesia, yang waktu itu masih bernama Hindia Belanda. Dalam disertasinya yang ditulis pada 1910, *Tropisch-Koloniale Staathuishoudkunde: Het Probleem (Masalah Perekonomian Kolonial Tropik)*, Boeke pertama kali mengintrodusir tesis mengenai ekonomi dualistis. Dari sudut ekonomi, menurut Boeke, sebuah masyarakat dapat ditandai oleh tiga unsur, yaitu *semangat sosial (social spirit)*, *bentuk organisasi*, dan *teknik yang mendominasinya*. Ketiga unsur ini saling berkaitan dan dalam kaitannya itu menentukan ciri khas dari masyarakat bersangkutan, yang disebut sebagai sistem sosial. Dalam sebuah masyarakat dimana pada waktu yang bersamaan memiliki dua atau lebih sistem sosial, dan tiap sistem itu berbeda satu sama lain, disebut masyarakat dualistis atau masyarakat plural (*plural societies*). Ekonomi dualistis merupakan implikasi dari sistem sosial yang juga bersifat dualistis. Dalam perekonomian yang bersifat dualistis, sebagaimana yang ada di Hindia Belanda, maka

diperlukan dua pendekatan ekonomi yang berbeda untuk memahami dua modus perekonomian tadi, dimana teori ekonomi umum (baca: Barat) tidak berlaku bagi sistem sosial yang bersifat khas.

Tesis Boeke tersebut kemudian memancing polemik yang melibatkan banyak ekonom. Inti polemik terutama berkisar pada persoalan benarkah sistem sosial yang berbeda dengan masyarakat Barat—tempat dimana ilmu ekonomi modern lahir dan dibesarkan—memerlukan teori ekonomi tersendiri yang berbeda dengan teori umum? Di antara yang terlibat dalam polemik itu adalah Jacob van Gelderen (1891-1940), Dionijs Huibert Burger, dan G.H. van der Kolff. Van Gelderen, dalam tulisannya mengenai perekonomian tropis,¹⁴⁰ berpandangan bahwa teori ekonomi umum bukannya tidak berlaku sama sekali di Hindia Belanda. Ada keadaan-keadaan yang membuat kenapa sebuah teori kadang berlaku dan kadang tidak, dan itu tidak berarti membatalkan keabsahan sebuah teori. Sebagai jalan tengah dari pandangan Boeke, van Gelderen mengemukakan bahwa di samping teori ekonomi murni, memang perlu pula dikembangkan teori ekonomi praktis atau aplikatif dalam bentuk kebijaksanaan ekonomi atau ekonomi-politik. Lebih jauh, menurut van Gelderen, untuk memahami perekonomian Hindia, teori ekonomi umum memang tidak bisa langsung diterapkan begitu saja, karena ada beberapa faktor yang membuatnya berbeda dari kondisi yang diandaikan oleh teori ekonomi umum. Paling tidak ada tiga faktor yang disebut Boeke dan Gelderen dalam kaitannya dengan kondisi-

¹⁴⁰ J. Van Gelderen, “*Voorlezingen over Tropisch Koloniale Staathuishoudkunde*” (1927). Risalah ini pernah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi “*Ilmu Ekonomi Jajahan Daerah Khatulistiwa*” (Jakarta: Bhratara, 1981).

si spesifik Hindia Belanda waktu itu, yaitu *pertama*, faktor sosial-historis Hindia Belanda itu sendiri; *kedua* adalah faktor geografi ekonomi; dan *ketiga* adalah faktor etnologi.

Keterbatasan-keterbatasan yang melekat pada ilmu ekonomi konvensional semakin hari semakin bersifat terbuka. Tak heran jika kemudian pada bagian awal pidato pengukuhanannya, yang dibacakan pada 19 September 1978, Roekmono Markam menyebutkan bahwa tak ada persoalan yang paling menyulitkan para guru besar ekonomi waktu itu selain persoalan “relevansi”.¹⁴¹ Persoalan yang sama pula yang telah mendorong Mubyarto untuk terus berburu “kijang ilmiah” Ekonomi Pancasila. Baginya, keterbatasan yang melekat pada teori ekonomi konvensional tak bisa hanya disiasati di level kebijakan, melainkan juga harus dicarikan kerangka teoritis baru penggantinya, sebuah posisi yang jelas jauh berseberangan dengan pandangan yang dipegang oleh Emil Salim.

Jika menyimak riwayatnya yang cukup panjang, ditambah dengan sejumlah polemik yang pernah menyertainya, gagasan Ekonomi Pancasila sebenarnya bisa dikatakan telah “memiliki sejarah sendiri” dan merupakan salah satu *milestone* dari pemikiran kaum intelektual Indonesia. Meskipun demikian, Ekonomi Pancasila hingga kini masih merupakan gagasan fragmentaris yang belum tersimpul menjadi sebuah gagasan utuh. Secara teoritis, gagasan keilmuan ekonomi dibangun dari beberapa komponen teori, seperti teori tentang konsep manusia, teori sistem ekonomi, teori ekonomi (murni) dan teori ilmu pengetahuan. Pada Ekonomi Pancasila, komponen-komponen itu belum terlihat padu.

Meski beberapa sarjana terkemuka telah mencoba mengam-

¹⁴¹ Markam, *op.cit.*, hal. 1.

bil tempat untuk merumuskan lebih jelas gagasan Ekonomi Pancasila, hasilnya masih jauh dari bisa dikatakan selesai. Pada 1985, misalnya, kumpulan ceramah Sumitro Djojohadikusumo yang disampaikan melalui TVRI antara bulan September hingga November 1984, dibukukan dan diberi tajuk “Ekonomi Pancasila”.¹⁴² Pada dasarnya Sumitro berusaha mengembangkan gagasan Ekonomi Pancasila dari pendekatan normatif dengan menjabarkan sila-sila dalam Pancasila. Namun, karena berupa kumpulan naskah ceramah, elaborasi yang bisa dilakukan tidak bersifat mendalam.

Kemudian pada tahun 2004 terbit buku karangan M. Dawam Rahardjo yang diterbitkan oleh Pusat Studi Ekonomi Pancasila (Pustep) UGM.¹⁴³ Buku ini mencoba mengkonseptualisasikan Ekonomi Pancasila sebagai ilmu tersendiri dengan membahas aspek-aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi. Ide dasar buku ini lebih maju daripada buku-buku mengenai Ekonomi Pancasila yang ditulis pada masa-masa sebelumnya. Tanpa sebuah elaborasi dari sudut filsafat ilmu, gagasan Ekonomi Pancasila memang sukar untuk bisa disebut sebagai “ilmu”. Hanya saja, sayangnya buku ini melewatkan pembahasan mengenai elaborasi filosofis yang pernah dilakukan di masa lalu berkaitan dengan gagasan Ekonomi Pancasila. Sebab, elaborasi semacam itu bukanlah sebuah usaha baru, karena pada dekade 1980-an salah seorang pemikir Ekonomi Pancasila juga telah memulainya, yaitu Hidayat Nataatmadja. Buku Dawam ini, sejauh ini, merupakan buku terakhir yang pernah terbit yang membahas gagasan Ekonomi Pancasila.

¹⁴² Sumitro Djojohadikusumo, *Trilogi Pembangunan dan Ekonomi Pancasila* (Jakarta: IKPN-RI [Induk Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia], 1985)

¹⁴³ M. Dawam Rahardjo, *Ekonomi Pancasila: Jalan Lurus Menuju Masyarakat Adil dan Makmur* (Yogyakarta: Pustep-UGM, 2004).

F. Dalam Bayang-bayang Fisiokrasi: Implikasi Pemikiran Mubyarto terhadap Studi Agraria

Dibandingkan dengan topik-topik sosial ekonomi lainnya, soal agraria merupakan topik yang paling jarang dibicarakan oleh Mubyarto. Daftar karangannya mengenai soal agraria hanya merupakan sebuah daftar pendek. Buku karangannya mengenai pengantar ekonomi pertanian, yang hingga kini masih dijadikan referensi di perguruan tinggi, juga tidak cukup memadai dalam membahas soal tersebut. Buku *Pengantar Ekonomi Pertanian*, yang edisi pertamanya terbit pada 1973¹⁴⁴ dan kini telah menjadi klasik, tidak memasukan soal agraria sebagai salah satu pokok bahasan. Memang ada sebuah bab yang khusus membahas masalah tanah, namun pembahasan itu sama sekali tidak mengemukakan perspektif sosiologis, antropologis, ataupun historis, melainkan lebih berupa mengupas tanah dalam kedudukannya sebagai faktor produksi teknis bagi ekonomi pertanian.¹⁴⁵

Dalam pengantar untuk konsep bukunya, Mubyarto sebenarnya memaksudkan penulisan bukunya itu untuk mengisi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada buku-buku pengantar berbahasa asing yang isinya, baik analisis maupun contoh-contohnya, tak selalu relevan dengan kondisi sosial di Indonesia.

¹⁴⁴ Pada konsep awalnya, buku itu bertajuk *Ekonomi Pertanian: Pengantar dan Analisa*. Lihat Mubyarto, *Ekonomi Pertanian: Pengantar dan Analisa*, Konsep (Jakarta: LP3ES, 1972).

¹⁴⁵ Pada edisi awal, yang disebut pada catatan kaki sebelumnya, bab mengenai soal tanah itu terdapat pada Bab 7. Dalam edisi terakhir, yang dicetak pada 1995, bab mengenai tanah itu terdapat sebagai Bab 6. Lihat Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Edisi Ketiga (Jakarta: LP3ES, 1995, cetakan keempat).

“Makin lama makin terasa bagi setiap pengadjar Ilmu Ekonomi di Indonesia bahwa buku-buku bahasa asing jang ditulis berdasarkan situasi dan kondisi negara-negara di luar Indonesia tidak dapat begitu sadja dipakai, karena baik tjontoh-tjontohnja maupun analisisnja seringkali tidak sesuai dengan keadaan di Indonesia. Hal ini sangat memberatkan para pengadjar... Masalah demikian dialami oleh penulis selama lima tahun mengadjar Ilmu Ekonomi Pertanian pada Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada Jogjakarta. Maka buku ini ditulis dengan harapan agar supaja beban persoalan jang dihadapi oleh dosen dan mahasiswa sebagaimana disebutkan di atas dapat diringankan sekedarnja.”¹⁴⁶

Maksud sebagaimana diterangkan oleh penulisnya itu pula yang kemudian membuat buku itu disambut cukup hangat pada masanya. Hingga awal dekade 1970-an, buku-buku teks universitas memang masih didominasi oleh buku-buku teks berbahasa asing. Kalaupun tersedia bacaan dalam bahasa Indonesia, bentuknya tak lebih dari sekadar diktat yang tak memadai sebagai bahan bacaan. Oleh karena itu, pada 1970 sejumlah sarjana terkemuka mendirikan sebuah lembaga swasta bernama Perhimpunan Indonesia untuk Pembinaan Pengetahuan Ekonomi dan Sosial (BINEKSOS), yang misinya adalah untuk menanamkan kesadaran dan membina pengetahuan ekonomi dan sosial di kalangan masyarakat Indonesia. Untuk keperluan itu, BINEKSOS memiliki program mensponsori penulisan buku-buku teks universitas bagi para sarjana Indonesia. Dewan Redaksi BINEKSOS dipimpin oleh Soemitro Djohadikusumo (1917-2001), dan beranggotakan beberapa orang, seperti Suhadi Mangkusuwondo (*l. 1927*), Sukadji Ranuwihardjo (1931-2007), Basuki T. Sidharta, Soelaeman Soemardi, dan Ismid Hadad.¹⁴⁷ Buku karangan Mubyarto mengenai

¹⁴⁶ Mubyarto, *Ekonomi Pertanian: Pengantar...*, *op.cit.*, hal. i.

¹⁴⁷ Fikri Jufri, “Ini Baru Indonesia”, tulisan untuk rubrik resensi buku *Majalah Tempo*, No. 28/III, 15 September 1973, hal. 29.

ekonomi pertanian, bersama dengan buku yang ditulis Anto Dajan mengenai statistik,¹⁴⁸ merupakan dua buku pertama yang disponsori oleh BINEKSOS. Sayangnya, hingga edisi yang ketiga, pembahasan mengenai soal agraria tidak juga muncul dalam buku tersebut.

Baru pada buku kedua Mubyarto cukup panjang lebar membahas soal agraria, yaitu pada buku *Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan*.¹⁴⁹ Dalam pandangan Mubyarto, salah satu aspek terpenting dari politik pertanian adalah menyangkut masalah agraria, baik itu aspek *kepemilikan, penggunaan, persewaan, maupun penguasaan* atas tanah. Secara garis besar, Mubyarto membagi masalah pokok agraria menjadi dua, yaitu *pertama*, masalah yang menyangkut hubungan antara manusia atau penduduk dengan tanah (dalam hal ini adalah hubungan *pemilikan dan penggunaan*). Dan *kedua*, masalah yang kemudian berkembang menjadi masalah hubungan antar-orang mengenai tanah (dalam hal ini adalah hubungan *persewaan dan penguasaan*).¹⁵⁰

Dua masalah pokok itu pada dasarnya bersifat mengarahkan kemana agenda reforma agraria kemudian harus bergulir. Dengan mengutip Ladejinsky,¹⁵¹ Mubyarto menyebut bahwa berangkat dari dua pokok tadi, maka setiap konsep *land reform*, atau *agrarian reform*, pada dasarnya harus mempunyai dua tujuan, yaitu *pertama*, memberikan kepada sebanyak mungkin petani tak bertanah sejumlah tanah untuk dimilikinya sendiri, sehingga mereka

¹⁴⁸ Anto Dajan, *Metode Statistik Deskriptif* (Jakarta: LP3ES, 1973).

¹⁴⁹ Mubyarto, *Politik Pertanian...*, *op.cit.*, lihat Bab 6.

¹⁵⁰ *Ibid.*, hal. 97.

¹⁵¹ I.J.W. Ladejinsky, "Land Reform in Indonesia", dalam buku *Agrarian Reform as Unfinished Business* (Oxford, UK: Oxford University Press, 1977), hal. 340-352.

pada gilirannya mereka mampu meningkatkan produksi dari tanah-tanah tadi. Dan *kedua*, menciptakan syarat dan kondisi yang lebih baik bagi petani yang masih terpaksa mengerjakan tanah orang lain, sehingga hasil bagi yang mereka terima kian bertambah besar.¹⁵² Bagi Mubyarto, dua agenda tadi merupakan bentuk penegasan bahwa reforma agraria pada dasarnya dimaksudkan sebagai alat untuk menolong penduduk termiskin. Artinya, dengan kata lain, reforma agraria merupakan bagian dari agenda untuk menciptakan keadilan sosial.

Dalam uraiannya mengenai agenda reforma agraria, Mubyarto banyak memberikan perhatiannya pada soal penciptaan syarat dan kondisi bagi para petani yang menggarap tanah orang lain. Ini berangkat dari pengalaman bahwa seringkali soal mengenai reforma agraria ini hanya diterjemahkan sekadar merupakan soal redistribusi tanah. Dari pengalaman sejarah yang dicermatinya, terutama belajar dari pelaksanaan reforma agraria pada 1960-an, penafsiran demikian telah membuat agenda reforma agraria tak sepenuhnya berjalan, mengingat para panitia *landreform* kemudian menganggap jika tak ada lagi tanah yang bisa dibagikan, maka mereka berarti tak lagi memiliki tugas, atau tugasnya menjadi selesai. Ini membuat masalah hubungan bagi hasil para petani penggarap yang menggarap tanah orang lain menjadi terlupakan. Impaknya, meskipun reforma agraria pada tahun 1960-an berhasil mengurangi jumlah para penyakap (karena mereka kemudian memiliki tanah sendiri), namun jumlah buruh tani ternyata menjadi sangat meningkat.¹⁵³ Akibat lebih jauhnya tentu saja adalah penurunan tingkat upah riil para buruh tani

¹⁵² Mubyarto, *Politik Pertanian...*, *op.cit.*, hal. 107.

¹⁵³ *Ibid.*, hal. 108.

dan kelompok miskin secara umum.

Sejak awal Mubyarto juga sangat menekankan bahwa topik mengenai reforma agraria bukanlah semata-mata masalah hukum dan undang-undang beserta penegakannya. Soal agraria merupakan masalah yang bersifat kompleks, karena ia menyangkut soal sosial budaya, politik, ekonomi, dan juga teknik. Oleh karena itu, Mubyarto mengkritik jika orang gampang sekali menyebut *landreform* tanpa memerinci secara jelas apa yang dimaksudkannya dari penggunaan istilah itu. Ini berangkat dari pengalaman bahwa di sejumlah kalangan tertentu keperluan mengenai adanya *landreform* ini telah terlalu sering disebut tapi tanpa disertai kerangka yang jelas mengenai apa yang dimaksudnya.

Jika karangan Mubyarto mengenai soal agraria sangatlah sedikit, dan apa yang pernah dikemukakannya mengenai soal itu barangkali bukan merupakan hal baru dan istimewa bagi kalangan yang menekuni studi itu secara khusus, lantas apa yang bisa diceritakan dari uraian mengenai implikasi pemikiran Mubyarto terhadap studi agraria?

Menengok kembali uraian di bagian awal tulisan ini, dan jika memperhatikan bangun gagasan keilmuannya, maka bisa dikatakan bahwa sumbangan Mubyarto bagi studi agraria di Indonesia bukanlah pada aspek yang berkaitan langsung dengan kajian itu, baik teoritis maupun praktisnya, melainkan di luarnya, yaitu pada pemberian kerangka konseptual ekonomi politik yang mendukung agenda reforma agraria. Kerangka konseptual yang dimaksud tak lain adalah wawasan ilmu ekonomi yang berkeadilan sosial (*economics and social justice*), yang oleh Mubyarto dilembagakan ke dalam konsep Ekonomi Pancasila.

Untuk memahami hal itu, kita harus kembali lagi pada kritik yang dilontarkan oleh Mubyarto kepada pemikiran ekonomi

Neoklasik. Dalam pandangannya, ilmu ekonomi Neoklasik telah berkembang sedemikian rupa dimana perkembangannya itu semakin menjauhi masalah keadilan, yang merupakan salah satu “kebutuhan dasar” manusia selain sandang dan pangan. Mengenai soal keadilan ini Mubyarto sempat mengutarakan kegusarannya,

“Adilkah kalau harga gabah jatuh di bawah harga dasar? Adil bagi siapa? Adilkah kalau petani diwajibkan menanam sawahnya dengan tebu padahal ia tahu akan merugi? Adil bagi siapa? Kalau masalah efisiensi selalu siap ditanggapi oleh ekonom pada umumnya, tidak demikian halnya dengan masalah pemerataan yang mengandung pengertian keadilan. Keadilan adalah topik asing dan kadang-kadang “tabu” bagi ekonom.”¹⁵⁴

Lebih jauh, menurut Mubyarto, secara praksis dan teoritis ilmu ekonomo Neoklasik telah mengalami kegagalan dalam memahami dua persoalan vital di Indonesia, yaitu pertama mengenai *pertanian subsisten*, dan kedua mengenai *kemiskinan di perdesaan*.¹⁵⁵ Pandangan Mubyarto ini sejalan dengan gagasan Hidayat Nataatmadja, yang adalah merupakan koleganya di Perhepi, dan termasuk salah satu penggagas Ekonomi Pancasila. Pada 1974, Hidayat mempublikasikan tulisan bahwa jika dikaji secara mendalam, desa merupakan *blank spot theory*— atau belakangan dia menyebutnya sebagai *black continent*—dimana ilmu ekonomi Neoklasik dan ilmu sosial lainnya tidak akan bisa digunakan untuk menerangkan dinamika yang terjadi di dalamnya.¹⁵⁶

¹⁵⁴ Mubyarto, “Tanggung Jawab dan Tantangan Ilmu Ekonomi Pertanian”, dalam Boediono dan Budiono Sri Handoko (eds.), *Ekonomi dalam Transisi* (Yogyakarta: BPFE, 1985), hal. 33.

¹⁵⁵ *Ibid.*, hal. 27-28.

¹⁵⁶ Hidayat Nataatmadja, “*Rural Dynamics: Methodological Frame work— An Existentialist’s Point of View*”, dalam *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia*

Apa yang hendak dikemukakan oleh Hidayat dan Mubyarto pada dasarnya adalah sama-sama hendak menegaskan bahwa ilmu ekonomi Neoklasik tidak bisa digunakan untuk memahami desa dengan segala macam dinamikanya. Dan kegagalan itu merupakan sebetulnya kekosongan konseptual yang harus segera diisi oleh konsepsi keilmuan lain yang lebih relevan. Baik Mubyarto maupun Hidayat sama-sama menyepakati bahwa pelembagaan konsep baru yang relevan itu bisa diwadahi dalam gagasan yang dikenal sebagai Ekonomi Pancasila.

Kalau kita menengok kembali alasan penolakan Mazhab Historis Jerman atas pemikiran ekonomi klasik Inggris dan pemikiran ekonomi Mazhab Austria, kita bisa melihat bahwa argumentasi yang dikemukakan Mubyarto dan Hidayat juga berpijak di dua argumentasi dasar yang sama, yaitu argumentasi yang bersifat *epistemologis* dan argumentasi yang bersifat *politis*. Argumentasi pertama ditampilkan melalui kritik atas keterbatasan konseptual yang dimiliki oleh teori ekonomi Neoklasik dan pemberian tekanan mengenai pentingnya untuk mengelaborasi ilmu pengetahuan yang tumbuh dan berkembang dari bumi Indonesia sendiri (*homegrown science*).¹⁵⁷ Ini terkait dengan gagasan bahwa ilmu pengetahuan memang berakar pada kebudayaan. Jika ilmu pengetahuan memiliki akar pada kebudayaan, maka setiap kebudayaan mestinya bisa merumuskan pengetahuannya sendiri-sendiri, meskipun kemudian perlu disadari bahwa setiap penge-

(EKI, *Economics and Finance in Indonesia*), Vol. XXII/No. 1, March 1974, hal. 75-88. Lihat juga Hidayat Nataatmadja, *Melampaui Mitos & Logos: Pemikiran ke Arah Ekonomi-Baru* (Yogyakarta: LANSKAP, 2007), lihat Bab 3.

¹⁵⁷ Mubyarto, *Pusat Studi Non-Disipliner* (Yogyakarta: Pustep UGM, 2005), hal. 6-8.

tahuan itu memiliki keterbatasan-keterbatasan operasional yang bersifat inheren karena ia dirumuskan bukan dari andaian-andaian yang bersifat universal, melainkan dari andaian yang terutama bersifat lokal. Di Indonesia, sarjana yang cukup jauh mengelaborasi gagasan ihwal pertautan antara ilmu pengetahuan dengan kebudayaan di antaranya adalah Kahrudin Yunus, Daoed Joesoef, Soedjatmoko, dan Hidayat Nataatmadja.¹⁵⁸

Sedangkan argumentasi politis terkait penolakan terhadap teori ekonomi Neoklasik adalah karena pada dasarnya ilmu pengetahuan berakar pada kebudayaan, maka ia sangat mungkin membawa bias kepentingan dari kebudayaan inangnya. Di wilayah ekonomi politik, teori ekonomi Neoklasik dengan demikian patut dicurigai sebagai terlalu banyak mengandung bias kepentingan negara-negara industri maju. Pada sebuah seminar mengenai “Pengajaran Ilmu Ekonomi di Indonesia”, yang diadakan oleh Fakultas Ekonomi UGM, 5-6 September 1975, dalam makalahnya Sukadji Ranuwihardjo secara gamblang mengakui adanya “*value judgement*” yang tersembunyi dalam buku-buku teks ekonomi Barat, dan hal semacam itu biasanya tidak disadari oleh sebagian besar dosen dan mahasiswa ekonomi.¹⁵⁹ Sebagai contoh Sukadji menyebutkan bahwa edisi kesembilan buku *Economics* karangan Samuelson, terutama pada Bab 33 hingga 39, sangat bias perdagangan bebas. Demikian juga halnya dengan analisis marjinal,

¹⁵⁸ Tarli Nugroho, “Kebudayaan dan Absennya Kerja Kesarjanaan”, dimuat dalam Majalah *Kabare Kagama*, No. 169/Vol. XXXVII, November 2008.

¹⁵⁹ Sukadji Ranuwihardjo, “Beberapa Catatan tentang Masalah Memperkenalkan Ilmu Ekonomi kepada Para Mahasiswa Tahun Pertama”, dalam Mubyarto (ed.), *Pengajaran Ilmu Ekonomi di Universitas-universitas di Indonesia* (Yogyakarta: Pendidikan Pascasarjana FE-UGM, 1978), hal. 10.

Sukadji menyebut analisis itu sebagai berpangkal dari ekonomi Neoklasik yang didasari filsafat hedonisme, sebuah paham yang secara verbal sering kita tolak.¹⁶⁰ Di Indonesia, selain Mubyarto, sarjana yang gigih dan konsisten dalam membongkar bias-bias teori ekonomi Neoklasik semacam itu adalah Hidayat Nataatmadja, Sritua Arief, Daoed Joesoef, Sri-Edi Swasono dan M. Dawam Rahardjo.

Tentu saja semua penjelasan itu masih bersifat global untuk menerangkan bagaimana kontribusi pemikiran Mubyarto terhadap studi agraria. Untuk itu uraian pada bagian awal terdahulu, yang memaparkan terobosan teoritis yang disumbangkan oleh Mubyarto terkait soal harga dan produksi beras, akan dibuka kembali untuk menjelaskan betapa pemikiran tersebut berarti sangat penting bagi studi agraria di Indonesia.

Pada bagian awal telah disebutkan bahwa salah satu sebab kenapa masalah produksi beras tidak pernah terpecahkan adalah karena faktor harga tidak pernah dilihat sebagai fungsi insentif bagi para petani. Perlakuan ini kemudian membawa imbas serius, dimana persoalan beras pada akhirnya terisolir sekadar menjadi *persoalan mikro* di tingkat rumah tangga petani (dan rumah tangga konsumen secara umum), sedangkan *relasi makronya* dengan perekonomian nasional sepenuhnya diabaikan. Analisis simultan yang dilakukan Mubyarto ketika menyusun disertasi-nya, merupakan usaha teoritis yang bukan hanya berguna untuk merumuskan politik pangan yang tepat, melainkan juga sebuah inisiasi teoritis yang penting dalam mengintegrasikan analisis mikro-ekonomi dengan makro-ekonomi. Jadi, di balik pandangan

¹⁶⁰ *Ibid.*, hal. 11.

Mubyarto mengenai soal beras itu sebenarnya tersimpan sebuah persoalan yang sangat mendasar, baik dilihat dari kacamata praktis maupun teoritis.

Pemisahan analisis makro dari mikro-ekonomi ini, lebih dari yang mungkin dibayangkan, hampir merupakan sebetulnya “politik *apartheid*” di level teoritis bagi sektor agraris, terutama yang digerakan oleh tenaga rakyat. Jika sektor ekonomi modern bisa menggunakan semua argumentasi teoritis untuk membela posisinya, baik itu menggunakan analisis makro maupun mikro-ekonomi (sekalipun argumennya itu tidak selalu bersifat konsisten dan koheren), maka sektor agraris hanya boleh bekerja di bawah satu kerangka teoritis saja: “*ia adalah hamba bagi sektor ekonomi modern*”. Secara sederhana kurang lebih itulah gambaran dari, misalnya, kebijakan politik pangan yang dipakai oleh pemerintah selama ini. Dengan hanya mendudukan para petani sebagai *net-consumer*, maka dengan kata lain mereka sebenarnya hanya diposisikan sebagai pelayan dari pasar kebutuhan pangan nasional, yang ironisnya kebutuhan pangan mereka sendiri kemudian sangat tergantung pada belas kasihan pemerintah. Oleh karena itu, analisis simultan yang diperkenalkan Mubyarto secara teoritis pada dasarnya merupakan bentuk perlawanan bagi “politik *apartheid*” tadi. Melalui kerangka analisis tersebut, posisi lemah yang selama ini disandang petani bisa cukup teradvokasi.

Jadi, secara sederhana bisa dikatakan bahwa sumbangan terbesar Mubyarto bagi studi agraria di Indonesia adalah bahwa ia sepanjang karirnya telah berhasil membangun dasar-dasar teoritis dan paradigmatis bagi sebuah bangun ilmu ekonomi yang bersifat mengadvokasi sektor agraris, selain – tentu saja – mengadvokasi perekonomian rakyat. Di tengah perkembangan ilmu ekonomi *mainstream* yang makin abstrak dan jauh dari perike-

hidupan riil mayoritas masyarakat Indonesia, apa yang dibangun dan dikerjakan Mubyarto telah memberikan ruang bagi tetap hadirnya pemikiran ekonomi yang membumi. Tanpa pemikiran ekonomi yang membumi sebagaimana yang dibangun oleh Mubyarto, kajian agraria di Indonesia tidak akan pernah (atau sulit untuk) bisa segera menjejak wilayah operasional, karena pertama-tama ia harus menaklukkan pemikiran ekonomi *main-stream* yang tidak menghendaknya. Pengalaman reforma agraria yang dilakukan pada dekade 1960-an kiranya cukup memberikan pelajaran, bahwa setelah literatur-literatur kiri diberangus dan dianggap sebagai barang terlarang pasca-1965, secara keilmuan kajian agraria mengalami kemandekan.¹⁶¹ Tanpa kehadiran teori ekonomi yang secara inheren mendukungnya, studi agraria akan kesulitan mengukuhkan argumentasi bagi eksistensinya.

Jika kita menengok kembali sejarah perkembangan ilmu ekonomi, apa yang hendak dibangun oleh Mubyarto memiliki banyak kemiripan dengan apa yang dilakukan oleh Kaum Fisiokrat di Perancis pada abad ke-18. Pemikiran Kaum Fisiokrat lahir sebagai bentuk perlawanan terhadap paham Merkantilisme. Istilah *fisokrasi*, yang berasal dari bahasa Yunani *physis*, yang artinya alam, dan *cratein*, atau *kratos*, yang berarti kekuasaan, sehingga secara literer bermakna “supremasi alam”, atau “hukum alam” (*believers in the rule of nature*). Berbeda dengan kaum Merkantilis yang menganggap sumber kekayaan suatu negara adalah perdagangan luar negeri, kaum Fisiokrat menganggap bahwa sumber kekayaan alam yang senyatanya adalah alam itu sendiri,

¹⁶¹ Tri Chandra Aprianto, *Tafsir(an) Land Reform dalam Alur Sejarah Indonesia: Tinjauan Kritis atas Tafsir(an) yang Ada* (Yogyakarta: KARSA, 2006), hal. 103-08.

yang dalam konteks perekonomian Perancis pada zaman itu diwakili oleh sektor pertanian.

Pembahasan mengenai pemikiran kaum Fisiokrat secara substantif akan selalu berhubungan dengan dua hal, yaitu pertama, *laissez-faire*, dan kedua, *pertanian*. Berbeda dengan anggapan umum kontemporer, dimana semboyan *laissez-faire* berhubungan dan dihubungkan secara minor dengan kapitalisme, pada masa kaum Fisiokrat, *laissez-faire* justru merupakan semboyan yang dilontarkan untuk membela sektor pertanian dari keserakahan para kapitalis (pedagang, industrialis, dan pejabat negara). *Laissez-faire*, atau ungkapan lengkapnya adalah *laissez-faire laissez-passer, le monde va de lui même*, adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa Perancis, yang secara bebas bisa diterjemahkan sebagai “biarkan semua terjadi, biarkan semua berlalu (*let do, let pass*)”, atau “jangan campur tangan, alam semesta dapat mengatur dirinya sendiri”.¹⁶² Semboyan itu, yang pertama kali dikemukakan oleh Vincent de Gournay (1712-1759), direproduksi oleh kaum Fisiokrat untuk membela sektor pertanian di Perancis yang dipinggirkan oleh pemerintah dan menjadi subordinat (mungkin lebih tepatnya “sapi perah”) dari kegiatan industri dan perdagangan. Kalau membaca kembali riwayat perekonomian Perancis, pada masa pemerintahan Louis XIV berkembang apa yang belakangan dalam literatur ekonomi disebut sebagai Colbertisme. Colbertisme adalah kebijakan pemerintah yang dimotori oleh menteri keuangan dalam pemerintahan Lois XIV, yaitu Jean

¹⁶² Bdk. Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), hal. 19-20; George Soule, *Ideas of the Great Economists* (New York: Mentor Books, 1955), hal. 36; dan Komaruddin Sastradipoera, *Sejarah Pemikiran Ekonomi: Suatu Pengantar Teori dan Kebijaksanaan Ekonomi* (Bandung: Kappa-Sigma, 2007), hal. 66-67.

Baptiste Colbert (1619-1683), dimana kebijakan perekonomian pemerintah ditujukan pada kemajuan industri dengan meminggirkan dan merugikan sektor pertanian. Pemerintah Perancis pada masa itu, utamanya menteri Colbert, iri melihat kemajuan perdagangan yang terjadi di Belanda serta kegiatan industri yang mulai berkembang di Inggris.¹⁶³ Oleh karena itu, pemerintah Perancis kemudian mengubah struktur perekonomian negerinya menjadi bertumpu pada kegiatan industri dan perdagangan yang disokong oleh subsidi dan perlindungan tarif dari pemerintah.

Harga yang harus dibayar rakyat Perancis sangatlah mahal. Untuk memajukan kegiatan industri dan perdagangan, pemerintah Perancis telah menyeting sedemikian rupa agar harga produk-produk pertanian menjadi sangat rendah, sehingga upah buruh pabrik juga bisa ditekan, hingga pada akhirnya diharapkan bahwa harga produk-produk industri Perancis menjadi kompetitif di pasar internasional. Kebijakan ini jelas merugikan mayoritas rakyat Perancis yang sebagian besar adalah petani. Standar kehidupan mereka merosot drastis. Untuk menurunkan harga produk pertanian, pemerintah Perancis, misalnya, melarang perdagangan gandum dengan luar negeri, padahal pada masa itu gandum merupakan komoditas yang menjadi tumpuan para petani Perancis. Kurang lebih, apa yang terjadi di Perancis pada masa itu sama seperti yang kini kita alami sejak pemerintahan Orde Baru, dimana kebijakan ekonomi pemerintah telah menekan sektor pertanian hanya untuk menyokong sektor industri yang dikembangkan oleh kroni-kroni penguasa.¹⁶⁴

¹⁶³ Zimmerman, *op.cit.*, hal. 22.

¹⁶⁴ Mochammad Maksun, "Kembali ke Pedesaan dan Pertanian: Landasan Rekonstruksi Perekonomian Nasional", Pidato Pengukuhan Guru Besar

Kembali kepada doktrin *laissez-faire*, pendukung doktrin ini berpendapat bahwa perekonomian swasta (*private-enterprise economy*) akan mencapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi dalam pengalokasian dan penggunaan sumber-sumber ekonomi yang langka, sehingga akan mencapai pertumpuhan ekonomi yang lebih besar, bila dibandingkan dengan kegiatan perekonomian yang didominasi negara (*centrally planned economy*). Pendapat ini didasarkan pada pemikiran bahwa kepemilikan pribadi atas sumber daya dan kebebasan penuh untuk menggunakannya akan menciptakan dorongan kuat untuk mengambil risiko dan bekerja keras. Sebaliknya, birokrasi pemerintah cenderung mematkan inisiatif dan menekan perusahaan.

Dalam pandangan *laissez-faire*, kewajiban negara bukanlah melakukan intervensi untuk menstabilkan distribusi kekayaan atau untuk menjadikan dirinya menjadi semacam negara kesejahteraan (*welfare state*) yang bisa melindungi rakyatnya dari kemiskinan. *Laissez-faire* sepenuhnya memandang bahwa kesejahteraan hanya bisa diproduksi oleh pasar, bukan negara. Oleh karena itu negara tidak boleh melakukan proteksi, seperti melalui hambatan tarif, subsidi, atau semacamnya.

Gagasan *laissez-faire* sebagaimana yang kini masih ada dan menjadi kiblat teori ekonomi arus utama (*mainstream economics*), tidak lagi berhubungan dengan pikiran kaum Fisiokrat di Perancis yang membela sektor pertanian, melainkan telah diambil alih oleh para penganut liberalisme klasik di Inggris untuk melindungi ekonomi pasar bebas yang mereka imani.

Fakultas Teknologi Pertanian UGM (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2008), hal. 3-4, 9, 11.

Bagaimana pergeseran ini harus dilihat?

Sebelum muncul gagasan dari kaum Fisiokrat di Perancis, kegiatan perekonomian negara-negara Eropa pada masa itu, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dikuasai oleh doktrin Merkantilisme, yang sangat menekankan pentingnya memperbesar pundi kekayaan dan kekuasaan negara. Di tengah geliat industrialisasi dan perkembangan kegiatan perdagangan, beberapa prinsip yang diimani Merkantilisme, seperti dominannya kekuasaan negara tadi, misalnya, tidak lagi bisa dipertahankan. Oleh karena itu muncullah gagasan-gagasan baru, sebagaimana misalnya yang dipapar oleh Adam Smith (1723-1790), melalui karyanya yang telah menjadi klasik, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (1776). Dalam karyanya tersebut, Smith melancarkan kritik terhadap intervensi negara yang bisa menghambat kegiatan industri dan perdagangan yang sedang menggeliat. Menurut Smith, pasar harus diberi keleluasaan untuk berkembang tanpa campur tangan negara.

Jadi, jika di Perancis konteks kelahiran doktrin *laissez-faire* adalah kelirunya campur tangan pemerintah dalam memahami struktur perekonomian rakyat Perancis yang bertumpu pada sektor pertanian, maka di Inggris gagasan serupa digunakan untuk mengkritik pemerintah yang masih gagap dengan perubahan besar yang menyertai Revolusi Industri, dimana dibutuhkan konvensi baru dalam menilai dan mengatur kegiatan perekonomian. Bisa kita lihat, bahwa baik di Perancis maupun di Inggris, doktrin *laissez-faire* sebenarnya ditadaruskan untuk membela ekonomi rakyat, meski yang dimaksud dengan ekonomi rakyat itu berbeda antara Perancis dan Inggris. Dan perlu pula dicatat, bahwa baik dalam ajaran kaum Fisiokrat di Perancis, maupun dalam nalar Adam Smith di Inggris, *laissez-faire* tidak dijadikan

doktrin yang bersifat generik, atau berlaku menyegala, melainkan sebuah gagasan yang mengikuti konteks.¹⁶⁵

Pemikiran kaum Fisiokrat, berbeda dengan aliran Merkantilisme, bisa disebut sebagai pendasar ilmu ekonomi modern. Jika para perintis pemikiran ekonomi di masa sebelumnya hanya-baru bisa menguraikan gejala-gejala ekonomi tersendiri, seperti perdagangan luar negeri atau banyaknya peredaran uang, maka kaum Fisiokratlah yang pertama memberikan gambaran proses ekonomi seluruhnya.¹⁶⁶ Gambaran proses itu misalnya bisa dilihat dari karya Francis Quesnay (1694-1774), *Tableau Economique*, yang terbit pada 1758. Soule (1955) dan Zimmerman (1955) menyebut bahwa tabel dan analisis yang dibuat oleh Quesnay jika direferensikan dengan perkembangan teori ekonomi mutakhir, merupakan dasar-dasar dari apa yang kini kita sebut sebagai neraca perekonomian nasional. Dan Quesnay hanya tinggal selangkah lagi untuk mencapai neraca perhitungan sebagaimana yang kini kita kenal.¹⁶⁷

Bercermin pada pemikiran Kaum Fisiokrat di Perancis, aliran Klasik di Inggris, dan Mazhab Historis Jerman pada uraian terdahulu, nampak bahwa pemikiran-pemikiran tadi pada dasarnya berusaha untuk melakukan pembelaan terhadap perekonomian negaranya masing-masing, terutama jika itu melibatkan kepentingan dari apa yang di sini sering kita sebut sebagai ekonomi rakyat (*peoples economy*). Dan untuk konteks Indonesia, kerangka pemikiran ekonomi yang memiliki tendensi demikian adalah

¹⁶⁵ Tarli Nugroho, dkk., *Ensiklopedi Ilmu Pengetahuan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008).

¹⁶⁶ Zimmerman, *op.cit.*, hal, 22-23.

¹⁶⁷ Soule, *op.cit.*, hal. 37.

yang (salah satunya) dibangun oleh Mubyarto, yaitu suatu pemikiran ekonomi yang meskipun dia pernah mengatakan orang lain bisa menamainya apapun, dia sendiri menyebutnya sebagai Ekonomi Pancasila.

Daftar Pustaka

- Aprianto, Tri Chandra. 2006. *Tafsir(an) Land Reform dalam Alur Sejarah Indonesia: Tinjauan Kritis atas Tafsir(an) yang Ada*. Yogyakarta: KARSA.
- Arief, Sritua. 1982. "Teori Ekonomi dan Kolonialisme Ekonomi", dalam Majalah *Prisma*, No.1/1982, hal. 26.
- Arief, Sritua. 1993. *Pemikiran Pembangunan dan Kebijakan Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Riset Pembangunan.
- Ariel Heryanto. 1985. *Perdebatan Sastra Kontekstual*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Baswir, Revrisond. 2005. "Mubyarto: Ilmuwan Tulen Berdisiplin Tinggi", tulisan obituari di Majalah *Gatra*, No. 29/XI, 4 Juni 2005, hal. 6.
- Bell, Daniel. 1976. *The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting*. New York: Basic Books.
- Blaug, Mark. 1997. *The Methodology of Economics or How Economists Explain*, Second Edition. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Budianta, Eka. 2007. *Menuju Indonesia Swadaya*. Jakarta: Bina Swadaya.
- Bulog. 1971. *Seperempat Abad Bergulat dengan Butir-butir Beras*. Jakarta: Badan Urusan Logistik.
- Caporaso, James A. dan David P. Levine. 2008. *Teori-teori Ekonomi Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Capra, Fritjof. 2000. *Titik Balik Peradaban: Sains Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan*. Yogyakarta: Benteng.
- Dajan, Anto. 1973. *Metode Statistik Deskriptif*. Jakarta: LP3ES.
- Dajan, Anto. 1973. *Metode Statistik Deskriptif*. Jakarta: LP3ES.
- Deliarnov. 1995. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Djojohadikusumo, Sumitro. 1985. *Trilogi Pembangunan dan Ekonomi*

- Pancasila*. Jakarta: Induk Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia.
- Dopfer, Kurt (ed.). 1983. *Ilmu Ekonomi di Masa Depan: Menuju Paradigma Baru*. Jakarta: LP3ES.
- Ekelund, Jr., Robert B. dan Robert F. Hebert. 1984. *A History of Economic Theory and Method*, Second Edition. London: McGraw-Hill.
- Foucault, Michel. 1973. *The Order of Things: An Archeology of the Human Sciences*. New York: Vintage Books.
- Fukuyama, Francis. 2002. *Trust: Kabijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Yogyakarta: Qalam.
- Galbraith, John Kenneth. 1958. *The Affluent Society*. New York: Mentor Book.
- Galbraith, John Kenneth. 1975. *Economics and the Public Purpose*. London: Penguin Books.
- Goenawan Mohamad. 2003. *Menyambut Indonesia: Lima Puluh Tahun dengan Ford Foundation, 1953-2003*. Jakarta: Ford Foundation dan Equinox Publishing.
- Hadiz, Vedi R. dan Daniel Dhakidae. 2005. *Social Science and Power in Indonesia*. Jakarta-Singapore: Equinox and ISEAS.
- Hastangka. 2009. *Ekonomi Pancasila, Eksistensi dan Masa Depan*: Napak Tilas Pemikiran Mubyarto. Yogyakarta: Penerbit Bimotry.
- Hatta, Mohammad. 1960. *Beberapa Fasal Ekonomi: Djalan Keekonomi dan Pembangunan*, Djilid Pertama, Cetakan Keenam. Jakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka.
- Heryanto, Ariel. 1985. *Perdebatan Sastra Kontekstual*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hutabarat, Arifin. 1974. *Usaha Mengatasi Krisis Beras*. Jakarta: Lembaga Pendidikan dan Konsultasi Pers.
- Ismawan, Bambang. 2008. "Relevansi Pemikiran Mubyarto dalam Konteks Indonesia Saat Ini dan Esok", makalah disam-

- paikan pada acara Memperingati 70 Tahun Almarhum Prof. Dr. Mubyarto (1938-2005), di Wisma Kagama, Yogyakarta, 3 September 2008.
- Kartodirdjo, Sartono. 1983. "Studi Interdisipliner di Lingkungan PPSPK", makalah pada Rapat Kerja Diperluas dalam rangka Dasawarsa PPS Pedesaan dan Kawasan UGM, Yogyakarta, 21-22 Juli 1983.
- Kartodirdjo, Sartono. 1993. "Beberapa Butir Pemikiran Refleksif tentang P3PK dan PPK pada HUT-nya Kedua Puluh", makalah pada *Orasi Ondrowino* (disampaikan pada 23 Agustus 1993) dalam rangka peringatan Dwididasawarsa P3PK dan PPK (Pusat Penelitian Kependudukan) UGM, sekaligus sebagai pembukaan Seminar "Dari Pertumbuhan ke Pembangunan Berkelanjutan", Yogyakarta, 23-25 Agustus 1993.
- Keraf, Sonny Keraf. 1996. *Pasar Bebas, Keadilan dan Peran Pemerintah: Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith*. Yogyakarta: Kanisius.
- Keraf, Sonny Keraf. 1998. *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kuncoro, Mudrajad. 2001. "Sistem Ekonomi Pancasila: Antara Mitos dan Realitas", dimuat dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* (JEBI), Vol. 16/No.1/2001, hal. 88-96.
- Lindblad, J. Thomas (ed.). 1993. *New Challenges in the Modern Economic History of Indonesia*. Leiden: Programme of Indonesian Studies.
- Lindblad, J. Thomas dan Bambang Purwanto (Eds.). 2010. *Merajut Sejarah Ekonomi Indonesia: Essays in Honour of Thee Kian Wie 75 Years Birthday*. Yogyakarta: Ombak.
- Madjid, Abdul dan Sri-Edi Swasono (eds.). 1981. *Wawasan Ekonomi Pancasila*. Jakarta: UI-Press.
- Maksum, Mochammad. 2008. "Kembali ke Pedesaan dan Perta-

- nian: Landasan Rekonstruksi Perekonomian Nasional”, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian UGM (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada).
- Markam, Roekmono. 1978. *Menuju ke Definisi Ekonomi Post-Robbins*. Yogyakarta: BPFE.
- Mas’oed, M. Mohtar. 2002. *Tantangan Internasional dan Keterbatasan Nasional: Analisis Ekonomi-Politik tentang Globalisasi Neo-Liberal*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Matindas, Benni E. 1998. *Paradigma Baru Politik Ekonomi*. Jakarta: Bina Insani.
- Mears, Leon A. 1981. *The New Rice Economy of Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mears, Leon A. dan Sidik Moeljono. 1990 [1981]. “Kebijaksanaan Pangan”, dalam Anne Booth dan Peter McCawley (Ed.), *Ekonomi Orde Baru* (Jakarta: LP3ES, 1990, cetakan kelima).
- Mehmet, Ozay. 1999. *Westernizing the Third World: The Eurocentricity of Economic Development Theories*. London: Routledge.
- Moeljanto, D.S. dan Taufiq Ismail. 1995. *Prahara Budaya: Kilas Balik Ofensif Lekra/PKI dkk*. Bandung: Mizan.
- Mubyarto (ed.). 1986. *Prospek Pedesaan 1986*. Yogyakarta: P3PK-UGM.
- Mubyarto (ed.). 1987. *Prospek Pedesaan 1987*. Yogyakarta: P3PK-UGM.
- Mubyarto (Ed.). 1997. *Kisah-kisah IDT: Penuturan 100 Sarjana Pendamping*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Mubyarto (Ed.). 2004a. *Pendidikan Ekonomi Sekolah Lanjutan*. Yogyakarta: Pustep.
- Mubyarto (Ed.). 2004b. *Ekonomi Rakyat Nganjuk: Lokakarya Pembauran Pendidikan Ekonomi Sekolah Lanjutan Kabupaten*

Nganjuk. Yogyakarta: Pustep.

Mubyarto and Lehman B. Fletcher. 1966. *The Marketable Surplus of Rice in Indonesia: A Study in Java-Madura* (International Studies in Economics, Monograph No. 4). Ames: Department of Economics, Iowa State University.

Mubyarto dan Awan Santosa. 2004. *Pendidikan Ekonomi Alternatif di Sekolah-sekolah Lanjutan*. Yogyakarta: Pustep.

Mubyarto dan Boediono (eds.). 1981. *Ekonomi Pancasila*. Yogyakarta: BPFE.

Mubyarto, dkk. (eds.). 1996. *Sajogyo: Bapak, Guru dan Sahabat*. Jakarta: Yayasan Agro Ekonomika.

Mubyarto, dkk. 1985. *30 Tahun Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada*. Yogyakarta: BPFE.

Mubyarto. 1961. *Rice Marketing in Indonesia*. Tennessee: Vanderbilt University. Tesis Master, tidak diterbitkan.

Mubyarto. 1969. *Kebidjaksanaan Beras di Indonesia; Kumpulan Memorandum untuk Menteri Perdagangan Republik Indonesia, September 1968-September 1969*. Yogyakarta: Biro Penelitian Ekonomi (BPE) Fakultas Ekonomi UGM.

Mubyarto. 1970. "Harga Beras dan Policy Produksi di Indonesia", dalam *Jurnal Agroekonomika*, No. 1/Th. I, Januari 1970.

Mubyarto. 1972. *Ekonomi Pertanian: Pengantar dan Analisa, Konsep*. Jakarta: LP3ES.

Mubyarto. 1975. *Masalah Beras di Indonesia*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian Ekonomi Fakultas Ekonomi UGM.

Mubyarto. 1979. *Gagasan dan Metoda Berpikir Tokoh-tokoh Besar Ekonomi dan Penerapannya bagi Kemajuan Kemanusiaan*. Yogyakarta: BPFE.

Mubyarto. 1980. *Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Agro Ekonomika.

Mubyarto. 1980. *Politik Pembangunan Pertanian dan Pedesaan, Draf.*

California: Stanford University.

- Mubyarto. 1983. *Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Mubyarto. 1984. *Strategi Pembangunan Pedesaan*. Yogyakarta: P3PK-UGM.
- Mubyarto. 1985. "Tanggung Jawab dan Tantangan Ilmu Ekonomi Pertanian", dalam Boediono dan Budiono Sri Handoko (eds.), *Ekonomi dalam Transisi* (Yogyakarta: BPFE, 1985).
- Mubyarto. 1988. *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Mubyarto. 1994. *Penelitian Pedesaan dan Kawasan 1973-1994*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan (P3PK) UGM.
- Mubyarto. 1994. *Penelitian Pedesaan dan Kawasan 1973-1994: Laporan Serah Terima Jabatan Kepala P3PK UGM*. Yogyakarta: P3PK-UGM.
- Mubyarto. 1995. *Ekonomi dan Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Mubyarto. 1995. *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Edisi Ketiga. Jakarta: LP3ES.
- Mubyarto. 1996. *Paradigma Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Pidato Dies Natalis ke-47 Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Mubyarto. 1997. "State of the Art" *Ilmu Ekonomi Pertanian Indonesia*. Jakarta: Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Mubyarto. 2004a. *Pendidikan Ekonomi Kita*. Yogyakarta: Pustep.
- Mubyarto. 2004b. *Belajar Ilmu Ekonomi*. Yogyakarta: Pustep.
- Mubyarto. 2005. *Menggugat Sistem Pendidikan Nasional: Refleksi Pendidikan Akhir Tahun 2004*. Yogyakarta: Pustep.
- Mubyarto. 2005. *Pusat Studi Non-Disipliner*. Yogyakarta: Pustep-UGM.

- Myrdal, Gunnar. 1968. *Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations*, Volume I. New York: Pelican Books.
- Nataatmadja, Hidayat. 1974. "Rural Dynamics: Methodological Framework – An Existentialist's Point of View", dalam *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia (EKI, Economics and Finance in Indonesia)*, Vol. XXII/No. 1, March 1974, hal. 75-88.
- Nataatmadja, Hidayat. 2007. *Melampaui Mitos & Logos: Pemikiran ke Arah Ekonomi-Baru*. Yogyakarta: LANSKAP.
- Nitisastro, Widjojo (ed.). 1965. *Research di Indonesia 1945-1965: Jilid IV – Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: Departemen Urusan Research Nasional Republik Indonesia.
- Nugroho, Heru (Ed.). 2002. *McDonaldisasi Pendidikan Tinggi*. Yogyakarta: Kanisius bekerjasama dengan Program Sosiologi Pascasarjana UGM dan Center for Critical Social Studies.
- Nugroho, Tarli, dkk.. 2008. *Ensiklopedi Ilmu Pengetahuan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.
- Nugroho, Tarli. 2003. *Potret Ekonom sebagai Si Malinkundang*. Yogyakarta: LANSKAP.
- Nugroho, Tarli. 2008. "Kebudayaan dan Absennya Kerja Keras-janaan", dimuat dalam *Majalah Kabare Kagama*, No. 169/Vol. XXXVII, November 2008.
- Nugroho, Tarli. 2008. *Pencitraan Produk dan Implikasinya dalam Menciptakan Disparitas Nilai Tukar Produk Pertanian (Draf Laporan)*. Yogyakarta: Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Gadjah Mada (Akan Diterbitkan).
- Nursam, M. 2008. *Membuka Pintu bagi Masa Depan: Biografi Sartono Kartodirjo*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Padmo, Soegijanto dan Edhi Jatmiko. 1991. *Tembakau: Kajian Sosial*

Ekonomi. Yogyakarta: P3PK-UGM.

- Padmo, Soegijanto. 1994. *The Cultivation of Vorstenlands Tobacco in Surakarta Residency and Besuki Tobacco in Besuki Residency and Its Impact on the Peasant Economy and Society, 1860-1960*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Padmo, Soegijanto. 2000. *'Land Reform' dan Gerakan Protes Petani Klaten, 1959-1965*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Padmo, Soegijanto. 2004. *Bunga Rampai Sejarah Sosial Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Penny, D.H.. 1971. "The Agro-Economic Survey of Indonesia: An Appreciation", dalam *Jurnal Indonesia* (Cornell University), Vol. 11/ April 1971, hal. 111.
- Pressman, Steven. 1999. *Fifty Major Economists*. London: Routledge.
- Rachbini, Didik J. (ed.). 1994. *Khazanah Pemikiran Ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Rahardjo, M. Dawam, dkk.. 1995. *Bank Indonesia dalam Kilasan Sejarah Bangsa*. Jakarta: LP3ES.
- Rahardjo, M. Dawam. 1983. *Esei-esei Ekonomi Politik*. Jakarta: LP3ES.
- Rahardjo, M. Dawam. 1986. "Pendekatan Historis Struktural: Menemukan Format Pembangunan", dalam *Prisma*, No.10/1986, hal. 3.
- Rahardjo, M. Dawam. 1992. *Pragmatisme dan Utopia: Corak Nasionalisme Ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Rahardjo, M. Dawam. 1997. *Habibienomics: Telaah Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Cidesindo.
- Rahardjo, M. Dawam. 2004. *Ekonomi Pancasila: Jalan Lurus Menuju Masyarakat Adil dan Makmur*. Yogyakarta: PUSTEP-UGM.
- Ransom, David. 1970. "The Berkeley Mafia and the Indonesian Massacre", dalam *Majalah Ramparts*, No. 4/Oktober 1970.
- Ranuwihardjo, Sukadji. 1978. "Beberapa Catatan tentang Masalah

- Memperkenalkan Ilmu Ekonomi kepada Para Mahasiswa Tahun Pertama”, dalam Mubyarto (ed.), *Pengajaran Ilmu Ekonomi di Universitas-universitas di Indonesia* (Yogyakarta: Pendidikan Pascasarjana FE-UGM.
- Ranuwihardjo, Sukadji. 1981. *Teori, Model, dan Masalah Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.
- Redaksi Harian Kompas. 1982. *Mencari Bentuk Ekonomi Indonesia: Perkembangan Pemikiran 1965-1981*. Jakarta: Gramedia.
- Roeder, O.G. 1971. *Who's and Who in Indonesia: Biographies of Prominent Indonesian Personalities in All Fields*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sajogyo dan Sumantoro Martowijoyo (eds.). 2005. *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dalam Kancuh Globalisasi: Hasil Bahasan Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat, Jakarta, Januari-Juli 2002*. Bogor: SAINS bekerjasama dengan YAE, dan Perhepi.
- Salim, Emil. 1965. *Sistem Ekonomi dan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Leknas-MIPI.
- Salim, Emil. 1965b. “Politik dan Ekonomi Pantjasila”, dalam Widjojo Nitisastro, dkk., *Masalah-masalah Ekonomi dan Faktor-faktor Ipolsos (Ideologi, Politik, Sosial)* (Jakarta: Leknas-MIPI, 1965).
- Salim, Emil. 1966. “Sistem Ekonomi Pancasila”, dimuat Harian *Kompas*, 30 Juni 1966.
- Salim, Emil. 1979. “Sistem Ekonomi Pancasila”, dimuat dalam Majalah *Prisma*, No. 5/VIII/1979, hal. 3-9.
- Salim, Emil. 1984. “Membina Ekonomi Pancasila”, dalam Seminar KAMI, *Jalur Baru Sesudah Runtuhnya Ekonomi Terpimpin* (Jakarta: Sinar Harapan, 1984).
- Samuels, Warren J., Jeff E. Biddle, dan John B. Davis (eds.). 2003. *A Companion to History of Economic Thought*. Massachusetts: Blackwell Publishing.

- Sastradipoera, Komaruddin. 2007. *Sejarah Pemikiran Ekonomi: Suatu Pengantar Teori dan Kebijaksanaan Ekonomi*. Bandung: Kappa-Sigma.
- Scott, James C. 1976. *The Moral Economy of Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. New Heaven: Yale University Press.
- Sen, Amartya. 2001. *Masih Adakah Harapan Bagi Kaum Miskin: Sebuah Perbincangan tentang Etika dan Ilmu Ekonomi di Fajar Milenium Baru* (terj. *On Ethics and Economics*). Bandung: Mizan.
- Skousen, Mark. 2001. *The Making of Modern Economics: The Lives and Ideas of the Great Thinkers*. New York: M.E. Sharpe.
- Smith, Adam. 1998 [1776]. *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, A Selected Edition*. Oxford: Oxford University Press.
- Soule, George. 1955. *Ideas of the Great Economists*. New York: Mentor Books.
- Soule, George. 1955. *Ideas of the Great Economists*. New York: Mentor Books.
- Suryana, Ahmad, Sudi Mardianto, dan Mohamad Ikhsan. 2001. "Dinamika Kebijakan Perberasan Nasional: Sebuah Pengantar", dalam Ahmad Suryana dan Sudi Mardianto (Ed.), *Bunga Rampai Ekonomi Beras* (Jakarta: LPEM FE-UI).
- Tempo*. 1986. *Apa dan Siapa Sejumlah Orang Indonesia 1985-1986*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Thee, Kian Wie. 1969. *Plantation Agriculture and Export Growth: An Economic History of East Sumatera, 1863-1942*. Madison: University of Wisconsin (Ph.D. thesis).
- Thee, Kian Wie. 1979. "Economics", dimuat dalam Koentjaraningrat (Ed.), *The Social Sciences in Indonesia*, Vol. II (Jakarta: Indonesian Institute of Sciences/LIPI, 1979).

- Tim Penerbit Buku Setengah Abad UGM. 1999. *50 Tahun UGM: Di Seputar Dinamika Politik Bangsa*. Jakarta: LP3ES.
- Todaro, Michael P. 1987. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Van Gelderen, J. 1981 [1927]. *Ilmu Ekonomi Jajahan Daerah Khatulistiwa*. Jakarta: Bhratara.
- Yunus, Hadori, dkk. 1975. *20 Tahun Ekonomi Universitas Gadjah Mada*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM.
- Zimmerman, L.J. 1955. *Sedjarah Pendapat-Pendapat tentang Ekonomi (Geschiedenis van het Economisch Denken)*. Bandung: W. van Hoeve.

Majalah dan Surat Kabar

- Balairung*, No. 37/Th. XVIII/2004.
- Kedaulatan Rakyat*, Kamis, 26 Mei 2005.
- Kompas*, Jumat, 27 Mei 2005.
- Media Indonesia*, Kamis, 26 Mei 2005.
- Prisma*, No. 1/IX, Januari 1980.
- Prospek*, No. 29/II, 2 Mei 1992.
- Tempo*, No. 14/Th. IX, 2 Juni 1979.
- Tempo*, No. 28/III, 15 September 1973.
- The Mark*

Lampiran

**Bibliografi Wacana Ekonomi Pancasila,
1965-2004***

Disusun Tarli Nugroho

1. Emil Salim. Agustus, 1965. *Sistem Ekonomi dan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Leknas-MIPI. (iii + 94 hal.)
2. Emil Salim. 1965. "Politik dan Ekonomi Pantjasila", dalam Widjojo Nitisastro, dkk., *Masalah-masalah Ekonomi dan Faktor-faktor IPOLSOS* (Jakarta: Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional, 1965), hal. 81-97.
3. Emil Salim. 1966. "Sistem Ekonomi Pancasila", dalam *Harian Kompas*, 30 Juni 1966.
4. Mubyarto. 1979. "Koperasi dan Ekonomi Pancasila", dalam *Harian Kompas*, 3 Mei 1979.
5. Emil Salim. "Sistem Ekonomi Pancasila", dimuat dalam *Jurnal Prisma*, No. 5/VIII/1979, hal. 3-9.
6. Sunario Waluyo. "Pemikiran tentang Ekonomi Pancasila", dalam *Harian Kompas*, 6 Juli 1979.
7. Lembaga Pengkajian Ekonomi Pancasila (LPEP). 1980. *Ekonomi Pancasila*. Jakarta: Penerbit Mutiara. (99 hal.)
8. Mubyarto. 1980. *Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Agro Ekonomika. (x + 94 hal.)
9. Soetrisno Saleh. "Belajar dari Sejarah Memperjuangkan Sistem Ekonomi", dalam *Harian Merdeka*, Senin, 31 Maret 1980.

* Untuk tulisan berupa buku dan artikel, yang dimasukkan dalam bibliografi ini hanya terbatas pada buku dan artikel yang menggunakan kata "Ekonomi Pancasila" sebagai judulnya. Buku dan artikel yang menggunakan judul Ekonomi Pancasila, meski isinya berkaitan dengan topik tersebut, belum dimasukkan dalam bibliografi ini. Diperbarui terakhir 30 Agustus 2010.

10. Tirtodiningrat. "Sistem Ekonomi Pancasila dapat Terlaksana Bila Kekuatan Ekonomi di Tangan Rakyat", dalam *Harian Berita Buana*, Selasa, 21 Oktober 1980.
11. Mubyarto. "Faktor-faktor Kelembagaan Indonesia Harus Dianalisa Bila Hendak Menerapkan Teori Ekonomi Pancasila", dalam *Harian Kompas*, 4 Desember 1980.
12. Fachry Ali dan Desrizal. "Menanggapi Ekonomi Pancasila Mubyarto: Moral Ekonomi Islam dan Ekonomi Pancasila", dalam *Harian Kompas*, 4 Desember 1980.
13. *Antara* (Berita). "Ekonomi Pancasila Lahir dengan Dukungan Rakyat", dalam *Antara*, 11 Desember 1980.
14. *Merdeka* (Berita). "Prof. Mubyarto Tentang Ekonomi Pancasila", dalam *Harian Merdeka*, 12 Desember 1980.
15. *Kompas* (Berita). "Dubes Sajiman Tentang Ekonomi Pancasila: Di Luar Ekonomi Kapitalis dan Sosialis, Masih Ada Alternatif Lain", dalam *Harian Kompas*, 13 Desember 1980.
16. Mubyarto dan Boediono (eds.). 1981. *Ekonomi Pancasila*. Yogyakarta: BPFE. (xii + 263 hal.)
17. Tom Gunadi. 1981. *Sistem Perekonomian menurut Pancasila dan UUD '45*. Bandung: Angkasa. (xvi + 381)
18. Mubyarto. "Moral Ekonomi Pancasila", dalam *Jurnal Prisma* Th. X/No. 1, Januari 1981, hal. 75-80.
19. Sunaryati Hartono dan Albert Widjaya. "Ekonomi Pancasila, Sistem Ekonomi Indonesia dan Hukum Ekonomi Pembangunan", dalam *Jurnal Prisma*, Th. X/No. 1, Januari 1981, hal. 3-22.
20. Irwan Sunario. "Moralitas Pancasila dan Pembangunan", dalam *Harian Kompas*, 2 Februari 1981.
21. Franz Magnis Saseno. "Keadilan Sosial dan Ilmu Ekonomi", dalam *Harian Kompas*, Senin, 2 Februari 1981.
22. Y.B. Mangunwijaya. "Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan Keadilan (Tanggapan Terhadap Buku Prof. Dr. Mubyarto) Bagian I", dalam *Harian Kompas*, 6 Maret 1981.
23. Y.B. Mangunwijaya. "Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan Keadilan (Tanggapan Terhadap Buku Prof. Dr. Mubyarto)

- Bagian II", dalam *Harian Kompas*, 7 Maret 1981.
24. Y.B. Mangunwijaya. "Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan Keadilan (Tanggapan Terhadap Buku Prof. Dr. Mubyarto) Bagian III-Habis", dalam *Harian Kompas*, 9 Maret 1981.
 25. A. Widodo. "Melangkah ke Depan", rubrik "Tinjauan Buku" dalam *Harian Kompas*, 12 April 1981.
 26. *Kompas* (Berita). "Prof. Dr. Mubyarto: Tokoh Agama Memegang Peranan Sangat Penting", dalam *Harian Kompas*, 14 April 1981.
 27. *Kompas* (Berita). "Harapan Wakil Presiden Kepada Alim Ulama", dalam *Harian Kompas*, 16 April 1981.
 28. Mubyarto. "Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan Sosial", dalam *Harian Kompas*, 17 April 1981.
 29. N. Halim Kholik. "Menerapkan Sistem Ekonomi Pancasila, Ciptakan Manusia Pancasilanya Lebih Dahulu", dalam *Harian Merdeka*, 29 April 1981.
 30. *Merdeka* (Berita). "Suhardiman Soal Ekonomi Pancasila", dalam *Harian Merdeka*, 4 Mei 1981.
 31. Mubyarto. "Moral Ekonomi Pancasila", ceramah tanggal 16 Mei 1981 di Gedung Kebangkitan Nasional atas prakarsa Yayasan Idayu. Dimuat dalam buku Mubyarto, *et. al.*, *Moral Ekonomi Pancasila* (Jakarta: Yayasan Idayu, 1982), hal. 7-21.
 32. *Sinar Pagi* (Berita). "Sistem Ekonomi Pancasila", dalam *Harian Sinar Pagi*, 16 Mei 1981.
 33. *Kompas* (Berita). "Dualisme Sistem Perekonomian Indonesia: Sistem Kapitalis dan Tradisional Berjalan Sekaligus//Prof. Dr. Mubyarto: Sistem Ekonomi Pancasila Ada, Tapi Masih Perlu Digarap", dalam *Harian Kompas*, Senin, 18 Mei 1981.
 34. *Merdeka* (Berita). "Lima Ciri Ekonomi Pancasila: Desentralisasi Kebijakan Ekonomi Harus Diterapkan", dalam *Harian Merdeka*, 18 Mei 1981.
 35. *Sinar Harapan* (Tajuk Rencana). "Moral Ekonomi Pancasila", dalam *Harian Sinar Harapan*, 18 Mei 1981.
 36. *Kompas* (Tajuk Rencana). "Mulai dari Solidaritas Sosial", dalam *Harian Kompas*, 19 Mei 1981.

37. *Merdeka* (Tajuk Rencana). "Pandangan Prof. Mubyarto", dalam *Harian Merdeka*, 20 Mei 1981.
38. *Business News* (Tajuk Rencana). "Ekonomi Pancasila", dalam *Buletin Business News*, 20 Mei 1981.
39. *Angkatan Bersenjata* (Berita). "Untuk Atasi Masalah Perburuhan: Perlu Dibentuk Komite Masyarakat Ekonomi Pancasila", dalam *Harian Angkatan Bersenjata*, 21 Mei 1981.
40. Bambang Sasono. "Menciptakan Perekonomian Pancasila", dalam *Harian Angkatan Bersenjata*, 23 Mei 1981.
41. *Merdeka* (Tajuk Rencana). "Faedah Mimpi", dalam *Harian Merdeka*, 23 Mei 1981.
42. *Merdeka* (Berita). "Sistem Ekonomi Pancasila: Negara Merupakan Pencipta Lapangan Kerja Yang Utama", dalam *Harian Merdeka*, 25 Mei 1981.
43. Arief Budiman. "Sebuah Kritik terhadap 'Sistem Ekonomi Pancasila' Mubyarto", dalam *Harian Kompas*, Rabu, 10 Juni 1981.
44. Sudirman Tebba. "Pendekatan Hukum terhadap Ekonomi Pancasila: Melengkapi Pendekatan Trans-Disiplin Mubyarto", dalam *Harian Kompas*, 10 Juni 1981.
45. Mubyarto. "Ekonomi Indonesia Dewasa Ini: Berbagai Pertanyaan Ekonom dan Orang Awam", dalam *Harian Kompas*, 10 Juni 1981.
46. *Kompas* (Berita). "Oevaang Oeray Tentang UIBP: Itu Bertentangan Dengan Pola Ekonomi Pancasila", dalam *Harian Kompas*, 11 Juni 1981.
47. Mubyarto. "Skeptisisme Arief Budiman: Tanggapan Atas Tulisannya Tanggal 10 Juni 1981", dalam *Harian Kompas*, Sabtu, 20 Juni 1981.
48. Boediono. "Filsafat Manusia dan Ekonomi Pancasila: Sebuah Tanggapan buat Arief Budiman", dalam *Harian Kompas*, Sabtu, 20 Juni 1981.
49. Dede Supriadi. "Ekonomi Pancasila", Rubrik *Tinjauan Buku* dalam *Harian Suara Karya*, 23 Juni 1981.
50. *Sinar Harapan* (Berita). "Prof. Dr. Mubyarto pada Diskusi

- HIPMI: Ketimpanngan Pendapatan Tidak Akan Hilang Tanpa Sistem Ekonomi Pancasila”, dalam *Harian Sinar Harapan*, 24 Juni 1981.
51. *Merdeka* (Berita). “Ada Sesuatu Yang Salah Sekarang, Kata Mubyarto: Rasanya, Kita Belum Pernah Merdeka dalam Ekonomi”, dalam *Harian Merdeka*, 25 Juni 1981.
 52. *Suara Karya* (Tajuk Rencana). “Perbincangan tentang Sistem Ekonomi Pancasila”, dalam *Harian Suara Karya*, 29 Juni 1981.
 53. *Kompas* (Tajuk Rencana). “Ekonomi Pancasila”, dalam *Harian Kompas*, 29 Juni 1981.
 54. *Anonim* (Nama & Alamat Diketahui Redaksi). “Ekonomi Pancasila”, dalam rubrik “Redaksi Yth.”, *Harian Kompas*, 30 Juni 1981.
 55. Mubyarto. “Ekonomi Indonesia Dewasa Ini: Berbagai Pertanyaan Ekonom dan Orang Awam”, dalam *Harian Kompas*, 4 Juli 1981.
 56. Bob Widayahartono. “Sebuah Catatan Sederhana atas Karangan ‘Skeptisisme Arief Budiman’ oleh Mubyarto”, dalam *Harian Kompas*, 7 Juli 1981.
 57. Sarino Mangunpranoto. “Alam Pikiran Ekonomi dalam Filsafat Pancasila”, dalam *Harian Kompas*, Selasa, 7 Juli 1981; dimuat juga dalam *Mingguan Swadesi*, 2 Agustus 1981.
 58. *Merdeka* (Tajuk Rencana). “Sebuah Kritik yang Menggugah”, dalam *Harian Merdeka*, 9 Juli 1981.
 59. Adi Sasono. “Swadaya Nasional: Mungkinkah? (I)”, dalam *Harian Pelita*, Rabu, Kamis, 8 Juli 1981.
 60. Adi Sasono. “Swadaya Nasional: Mungkinkah? (II)”, dalam *Harian Pelita*, Jumat, 9 Juli 1981.
 61. Adi Sasono. “Swadaya Nasional: Mungkinkah? (III)”, dalam *Harian Pelita*, 10 Juli 1981.
 62. *Kompas* (Berita). “Berbagai Pendapat tentang Konsep Ekonomi Pancasila: Ilmu Ekonomi Jangan Dikaitkan dengan Macam-macam. Yang Penting Manusianya Yang Harus Punya Sikap Etis”, dalam *Harian Kompas*, 11 Juli 1981.
 63. Nono Anwar Makarim. “Eh, Ketemu Lagi”, rubrik *Resensi*,

- dalam Majalah *Tempo*, No. 19/XI, 11 Juli 1981, hal. 23.
64. *Jurnal Ekuin* (Tajuk Rencana). "Pendapat yang Gegabah", dalam *Jurnal Ekuin*, 13 Juli 1981.
 65. Suarif Arifin. "Ekonomi Akal Sehat", dalam *Harian Angkatan Bersenjata*, 14 Juli 1981.
 66. Sutrisno Saleh. "Ekonomi Pancasila yang Semakin Menarik", dalam *Harian Merdeka*, 15 Juli 1981.
 67. S.M. Noor (Unhas). "Ekonomi Pancasila dalam Pendekatan 'Sosialisme Verelendung': Tanggapan Atas Duet Mubyarto-Boediono versus Arief Budiman", dalam *Harian Kompas*, 18 Juli 1981.
 68. Sudirman Kadir. "Pandangan Sistem Ekonomi Pancasila terhadap Manusia: Sebuah Jawaban atas Pertanyaan Arief Budiman", dalam *Harian Kompas*, 18 Juli 1981.
 69. *Tempo* (Berita). "Meraba-raba Pancasila", rubrik *Nasional* dalam Majalah *Tempo*, 18 Juli 1981.
 70. *Kompas* (Berita). "Pendapat Presiden Soeharto: Tidak Mungkin Mencari Secara Ilmiah Definisi Ekonomi Pancasila Kalau Melihatnya Dari Paham Lain", dalam *Harian Kompas*, 22 Juli 1981.
 71. *Anonim* (Nama & Alamat Diketahui Redaksi). "Ekonomi Pancasila atau Pengetrapan Pancasila dalam Ekonomi", rubrik "Redaksi Yth." dalam *Harian Kompas*, 23 Juli 1981.
 72. *Business News* (Tajuk Rencana). "Sekali Lagi: Ekonomi Pancasila", dalam *Mingguan Business News*, 27 Juli 1981.
 73. Sjahrir. "Soal Sistem Ekonomi", dalam *Harian Kompas*, 28 Juli 1981.
 74. Moh Ali Yahya. "Sistem Ekonomi Pancasila Perlu Dukungan: Sebuah Komentar", dalam *Harian Kompas*, 29 Juli 1981.
 75. Alexander Manurung. "Ekonomi Pancasila adalah Ekonomi Gotong Royong", dalam *Harian Merdeka*, 29 Juli 1981.
 76. Hidayat Nataatmadja. "Etika dan Ilmu Ekonomi Menurut Jujun Suriasumantri", dalam *Harian Kompas*, Kamis, 30 Juli 1981.
 77. Jujun Suriasumantri. "Tentang Ilmu Ekonomi Pancasila",

- dalam *Harian Kompas*, Jumat, 31 Juli 1981.
78. *Tempo* (Laporan Utama). "Mengapa Ramai", dalam *Majalah Tempo*, No. 22/XI, 1 Agustus 1981.
 79. *Tempo* (Laporan Utama). "Sebuah Gambaran oleh Pak Harto tentang Masa Depan", dalam *Majalah Tempo*, No. 22/XI, 1 Agustus 1981.
 80. *Tempo* (Laporan Utama). "Galeri Sebuah Perdebatan", dalam *Majalah Tempo*, No. 22/XI, 1 Agustus 1981.
 81. Frans Seda. "Ekonomi Pancasila: *An Inquiry into the Economic System of the Nation*", dalam *Harian Kompas*, Senin, 3 Agustus 1981.
 82. Frans Seda. "Ekonomi Pancasila: Ekonomi Pancasila dan Institusi-institusi Ekonomi", dalam *Harian Kompas*, Selasa, 4 Agustus 1981.
 83. Dwi P. Sasongko. "Sistem Ekonomi Pancasila", dalam rubrik "Redaksi Yth." di *Harian Kompas*, 4 Agustus 1981.
 84. S. Belen. "Unsur Bumerang dalam 'Sistem Ekonomi Pancasila': Sebuah Jawaban atas Pertanyaan Arief Budiman", dalam *Harian Kompas*, 5 Agustus 1981.
 85. Djafar Ibnu Santa. "Sistem Ekonomi Pancasila dan Moral", dalam *Harian Kompas*, 7 Agustus 1981.
 86. *Kompas* (Berita). "Emil Salim: Pemerintah Tidak Memonopoli Ekonomi Pancasila/ /Sarbini Somawinata: Masalah Ekonomi Pancasila Makin Tidak Jelas", dalam *Harian Kompas*, 11 Agustus 1981.
 87. Maruli H. Panggabean. "Teori Ekonomi Pancasila: Nomenologis atau Normatif", dalam *Harian Sinar Harapan*, Kamis, 13 Agustus 1981.
 88. *Sinar Harapan* (Berita). "Pidato Kenegaraan Presiden Soeharto di DPR: Ekonomi Pancasila Harus Berpangkal dari Indonesia", dalam *Harian Sinar Harapan*, 15 Agustus 1981.
 89. Hidayat Nataatmadja. "Ekonomi Pancasila: Obat Penyakit Binatang Berakal", dalam *Harian Merdeka*, 20 Agustus 1981.
 90. *Kompas* (Berita). "Prof. Mubyarto Merasa 'Plong': Berarti Presiden Mendukung Usaha Menggali Terus Ekonomi

- Pancasila”, dalam *Harian Kompas*, 19 Agustus 1981.
91. Ayip Bakar. “Ekonomi Pancasila (1): Mulailah dari Koreksi Diri”, dalam rubrik “Surat Pembaca” di *Majalah Tempo*, 22 Agustus 1981.
 92. Ida Soebijanto. “Ekonomi Pancasila (2): Lebih Sempurna dari Sistem Sekarang?”, dalam rubrik “Surat Pembaca” di *Majalah Tempo*, 22 Agustus 1981.
 93. Frans Seda. “Koperasi dan Ekonomi Kekeluargaan, Kaitannya dengan Pancasila”, dalam *Harian Kompas*, 24 Agustus 1981.
 94. *Kompas* (Berita). “Hidayat dari Unpad: Sistem Ekonomi Pancasila Jangan Sampai Seperti Sosialisme Utopia”, dalam *Harian Kompas*, 24 Agustus 1981.
 95. Paul S. Baut. “Ketemu Muni dan Arief di Warung Kakilima”, dalam *Harian Kompas*, 28 Agustus 1981.
 96. Sarino Mangunpranoto. “Sekali Lagi tentang Ekonomi Pancasila”, dalam *Harian Kompas*, 29 Agustus 1981.
 97. *Sinar Harapan* (Berita). “Ekonomi Pancasila, Salah Satu Suku Cadang Sistem Pembangunan Pancasila: Drs. Hendra Esmara dari Universitas Andalas”, dalam *Harian Sinar Harapan*, 9 September 1981.
 98. Thoby Mutis. “Uraian Mubyarto Merangsang ke Arah Tugas Bersama: Penerapan Nilai Pancasila dalam Sistem Ekonomi yang Menjaman”, dalam *Harian Sinar Harapan*, 17 September 1981.
 99. *Tempo* (Berita). “Ngalor-ngidul Bulaksumur”, dalam *Majalah Tempo*, No. 30/XI, 26 September 1981.
 100. *Sinar Harapan* (Berita). “Dari Seminar tentang Sistem Ekonomi Pancasila: Dalam Demokrasi Ekonomi Perlu Demokrasi Politik”, dalam *Harian Sinar Harapan*, 21 Oktober 1981.
 101. Abdul Madjid dan Sri-Edi Swasono (eds.). 1981. *Wawasan Ekonomi Pancasila*. Jakarta: UI-Press. (vi + 308)
 102. Arief Budiman. “Sistem Perekonomian Pancasila, Kapitalisme dan Sosialisme”. Dimuat dalam *Prisma*, No. 1/Th. XI/Januari 1982.

103. Nono Anwar Makarim. 1982. "Hari Depan Ekonomi Pancasila". Dialog, dimuat dalam *Prisma*, No. 2/XI/1982, hal. 52-55.
104. Rochmat Soemitro. 1983 (Cetakan Kedelapan). *Pengantar Ekonomi dan Ekonomi Pancasila*. Bandung: Eresco. (x + 245)
105. Soemitro Djojohadikusumo. 1985. *Trilogi Pembangunan dan Ekonomi Pancasila*. Jakarta: Induk Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia. (vi + 67)
106. Mubyarto. 1985. *Pancasila Economic System: Its Feature and Conceptual Basis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. (viii + 16)
107. Mubyarto. 1987. *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan*. Jakarta: LP3ES. (x + 238)
108. Kwik Kian Gie. 1994. "Ekonomi Pancasila, Persaingan dan Kebijakan Bandul", dalam Kwik Kian Gie, *Analisis Ekonomi Politik Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1994), hal. 331-337.
109. Tom Gunadi. 1995. *Ekonomi Pancasila dalam Kancah Pendapatan Ekonomi*. Bandung: Angkasa. (viii + 112)
110. Mubyarto. 1997. *Ekonomi Pancasila: Lintasan Pemikiran Mubyarto*. Yogyakarta: Aditya Media. (xvi + 252)
111. M. Dawam Rahardjo. 1997. "Ekonomi Islam, Ekonomi Pancasila dan Pembangunan Ekonomi Indonesia", dalam Ainur Sophiaan (ed.), *Etika Ekonomi Politik* (Surabaya: Risalah Gusti).
112. Kwik Kian Gie. 1999. "Sistem Ekonomi Pancasila", dalam Kwik Kian Gie, *Gonjang-Ganjing Ekonomi Indonesia: Badai Belum Akan Segera Berlalu* (Jakarta: Gramedia, 1999 cetakan ketiga), hal. 29-34.
113. Gunawan Sumodiningrat. 1999. *Sistem Ekonomi Pancasila dalam Perspektif*. Jakarta: Impac Wahana Cipta. (xii + 94)
114. Mudrajad Kuncoro. 2001. "Sistem Ekonomi Pancasila: Antara Mitos dan Realitas". Dimuat dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia (JEBI)*, Vol. 16/No.1/2001, hal. 88-96.
115. Mubyarto. 2004. *Teknokrat dan Ekonomi Pancasila*. Yogyakarta: Pustep-UGM. (iv + 26)
116. M. Dawam Rahardjo. 2004. *Ekonomi Pancasila: Jalan Lurus Menuju Masyarakat Adil Makmur*. Yogyakarta: Pustep-UGM.

TENTANG PENULIS

Ahmad Nashih Luthfi, lahir di Tuban, 16 Januari 1981. Pada tahun 2000-2002 ia pernah menjadi ketua umum Ikatan Himpunan Mahasiswa Sejarah se-Indonesia (IKAHIMSI). Lulusan sarjana dan pascasarjana Sejarah UGM ini kini tinggal di Godean, Sleman, Yogyakarta dan aktif sebagai peneliti di Sajogyo Institute, Bogor. Alamat e-mail yang bisa dihubungi: anasluthfi@yahoo.com

Beberapa tulisannya yang telah diterbitkan: “Mencari Bentuk Perfilman Nasional: Umar Kayam dan Perfilman Indonesia (1966-1969)”, dalam Ashadi Siregar dan Faruk HT., *Umar Kayam Luar Dalam*, Yogyakarta: Pinus, 2005; *Manusia Ulang-alik, Biografi Umar Kayam, Bogor*, Eja Publisher dan Sajogyo Inside, 2007; *Laporan Penelitian Pelaksanaan Uji Coba Program Pembaruan Agraria Nasional di Provinsi Lampung: Hasil Kunjungan Singkat Ke Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Tengah*, Kerjasama santara Sekolah Tinggi Pertanian Nasional, Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan, dan Sajogyo Institute, 2007; *Melawan Kolonial*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008; Sediono M. P. Tjondronegoro, *Mencari Ilmu di Tiga Zaman dan Tiga Benua, Otobiografi Prof. Dr. Sediono M. P. Tjondronegoro* (penyunting), Bogor: Penerbit SAINS, 2008; “Lambung Paceklik, Budaya Tani yang Lestari” (co-author), dalam Majalah *Basis*, edisi Mei-Juni 2008; “Pemanggul Kapak di

Sudut Kota”, *Kompas* edisi Yogyakarta, 11 Juni 2008; “Sajogyo, Pembangun Studi Agraria Indonesia”, *Jurnal Nasional*, 19 Juli 2008, dimuat kembali dalam Eka Budianta, *Bertemu Sajogyo*, BRI dan Sains Press, (dalam proses cetak); “Cerita dari Warung Ulan”, dalam Astuti Ananta Toer (ed.), *1000 Wajah Pram dalam kata dan Sketsa*, Jakarta: Lentera Dipantara, 2009; “Sosok Gunawan Wiradi: Sang Guru Studi Agraria”, dalam Gunawan Wiradi, *Metodologi Studi Agraria, Karya Terpilih Gunawan Wiradi*, (penyunting Moh. Shohibuddin), Bogor: Institut Pertanian Bogor dan Sajogyo Institute, 2009; *Keistimewaan Yogyakarta: Yang Diingat dan Yang Dilupakan* (co-author), Yogyakarta: STPN, 2009; “Pengantar LIBRA”, dalam W. F. Wertheim, *Elite vs Massa*, Yogyakarta: Resist Book dan LIBRA, 2009; “Mochammad Tauchid: Tokoh Pendiri Bangsa, Gerakan Tani, dan Pendidikan Taman Siswa” (co-author), dalam Moch. Tauchid, *Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran rakyat Indonesia*, Yogyakarta: STPN dan Pewarta, 2009; “Revolusi Hijau di Asia Tenggara dan Transformasi Agraria Indonesia”, dalam Sri Margana dan Widya Fitrianiingsih, (ed.), *Sejarah Indonesia: Perspektif Lokal dan Global (Persembahan 70 tahun Prof. Djoko Suryo)*, Yogyakarta: Jurusan Sejarah UGM dan Penerbit Ombak, 2009; *Melacak Pemikiran Agraria, Sejarah Agraria Mazhab Bogor*, Yogyakarta: Lilakila Press, 2010 (dalam proses cetak).

Tarli Nugroho lahir di Ciparage, Karawang, 3 Mei 1981. Alumni Fakultas Teknologi Pertanian UGM ini kini adalah peneliti di Pusat Studi Pancasila (PSP) UGM, dan anggota Dewan Pengurus Mubyarto Institute. Ketika mahasiswa pernah menjadi Pemimpin Umum *Jurnal BALAIRUNG*, Kepala Litbang Keluarga Karawang Yogyakarta (KKY), Pemimpin Redaksi *Jurnal Saréréa*, dan koordinator Agricultural Studies Center (ASC). Minat kajiannya adalah filsafat, kesusastraan, ekonomi pertanian, sejarah pemikiran, dan teori harga. Menulis buku *Potret Ekonom sebagai Si Malinkundang: Soal Etik dan Ekonomi-Politik Indonesia* (2003), *Ekonomi & Pembangunan dalam Nalar Kritis* (2005), *Indonesia Bergerak: Agenda Menuju Kebangkitan* (2007, co-writer), *Melampaui Mitos & Logos: Pemikiran ke Arah Ekonomi-Baru* (2007, editor), *Pembangunan Desa: Dari Modernisasi ke Liberalisasi* (2008), *Pusat Perbelanjaan sebagai Parasit Ekonomi* (2008, *working paper*, diterbitkan), *Pancasila Dasar Negara: Kursus Presiden Soekarno tentang Pancasila* (2008, editor), *Ensiklopedi Ilmu Pengetahuan Sosial* (2009, co-author), dan *Pembangunan yang Memiskinkan: Dari Desa Melanjutkan Indonesia* (2009, *working paper*, diterbitkan). Saat ini sedang menyunting dan menulis telaah panjang untuk beberapa buku, yaitu sebuah kumpulan karangan M. Dawam Rahardjo mengenai Ekonomi Pancasila, dua buah kumpulan karangan Mubyarto mengenai koperasi dan metodologi ekonomi, sebuah kumpulan karangan Daoed Joesoef mengenai pembangunan dan kebudayaan, serta meredaksi dan menyunting sebuah buku bunga rampai yang sementara ini bertajuk *Pemikiran Ekonomi Pancasila, 1965-2010*. Bersama dengan Prof. Dr. M. Dawam Rahardjo, saat ini ia juga sedang melakukan riset “Kajian atas Pemikiran Ekonomi Pancasila, 1965-2010” yang hasilnya nanti akan dibukukan.

Amien Tohari lahir di Jambi, 30 Agustus 1981. Alumni Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saat ini sedang belajar di *Sajogyo Institute* (SAINS) Bogor. Mantan Ketua Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam untuk Wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta ini juga sedang mencoba kuliah lagi pada Program Pascasarjana *Politik Lokal dan Otonomi Daerah* (PLOD) UGM. Banyak terlibat dalam riset dan fasilitator training di berbagai tempat. Beberapa riset yang pernah dilakukannya antara lain *Modal Sosial Pesantren di Banten* (2007), *Survei Pandangan Masyarakat Tentang Kepemimpinan Nasional dan Partai Politik* (2009), *Keistimewaan Yogyakarta* (2009), *Riset Evaluasi Hasil Pengajaran HAM dan Polmas Taruna Akpol di Makassar* (2007) dan *Surabaya* (2010), *Pemikiran Agraria Bulaksumur* (2009-2010), *Administrasi Pertanahan Berbasis Desa di Banjarbaru Kalsel* (2010). Beberapa tulisan yang diterbitkan diantaranya *Anatomi Hasrat pada Fenomena Ustadz* (2006), *Nasionalisme Tanpa Rakyat* (2007), *Yang Hilang dari Jogja* (2009), *Demokrasi di Dunia Islam; Pengalaman Sunni dan Syi'ah* (2009), *Keistimewaan Yogyakarta Dalam Perdebatan & Yogyakarta: Perebutan Ruang dan Kontestasi Budaya* (2009). Sedangkan beberapa training yang pernah dikelolanya diantaranya *Training Gerakang Sosial* (2005), *Sekolah Filsafat Islam-SEFIL* (2006), *Training HAM untuk Aktiois Gerakan Islam Level Basic, Intemediate, dan Advance* (2009). Amien saat ini tinggal di Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta. Email; airgush@yahoo.com, amientoharie@gmail.com, kontak: 085292111578.